



TESIS - IS185401

**PENGUKURAN E-LEADERSHIP DALAM  
KEBERHASILAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA  
(STUDI KASUS: KOTA MADIUN, KABUPATEN  
BOJONEGORO, DAN KABUPATEN TRENGGALEK)**

YUDHA HERLAMBAANG C.P

NRP 05211750010001

DOSEN PEMBIMBING:

TONY DWI SUSANTO, S.T., M.T., Ph.D., ITIL, COBIT, TOGAF

NIP 197512112008121001

PROGRAM MAGISTER

DEPARTEMEN SISTEM INFORMASI

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

SURABAYA

2019





TESIS - IS185401

**MEASUREMENT OF E-LEADERSHIP IN THE  
SUCCESS OF E-GOVERNMENT IN INDONESIA  
(CASE STUDIES: MADIUN CITY, BOJONEGORO  
DISTRICT, AND TRENGGALEK DISTRICT)**

YUDHA HERLAMBANG C.P

NRP 05211750010001

SUPERVISOR:

TONY DWI SUSANTO, S.T., M.T., Ph.D., ITIL, COBIT, TOGAF

NIP 197512112008121001

POSTGRADUATE PROGRAM

DEPARTEMENT OF INFORMATION SYSTEM

FACULTY OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

SURABAYA

2019

*(Halaman ini sengaja dikosongkan)*

**LEMBAR PENGESAHAN**

Tesis disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar  
Magister Komputer (M.Kom)  
di  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh :  
Yudha Herlambang C.P  
NRP 05211750010001

Tanggal Ujian : 17 Mei 2019  
Periode Wisuda : September 2019

Disetujui Oleh :

1. Tony Dwi Susanto, S.T., M.T., Ph.D., ITIL, COBIT, TOGAF  
NIP. 197512112008121001



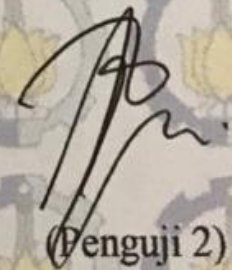
(Pembimbing)

2. Dr. Apol Pribadi Subriadi, S.T., M.T.  
NIP 197002252009121001



(Penguji 1)

3. Erma Suryani, S.T., M.T., Ph.D.  
NIP 197004272005012001



(Penguji 2)

Dekan

Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi



Dr. Agus Zamal Arifin, S.Kom, M.Kom.

NIP. 19720809 199512 1 001

*(Halaman ini sengaja dikosongkan)*

**PENGUKURAN E-LEADERSHIP DALAM KEBERHASILAN  
E-GOVERNMENT DI INDONESIA  
(STUDI KASUS: KOTA MADIUN, KABUPATEN BOJONEGORO, DAN  
KABUPATEN TRENGGALEK)**

Nama Mahasiswa : Yudha Herlambang C.P

NRP : 05211750010001

Dosen Pembimbing : Tony Dwi Susanto, S.T., M.T., Ph.D., ITIL, COBIT

**ABSTRAK**

Ketika layanan pemerintah berbasis elektronik (e-government) berkembang, aplikasi tradisional seperti portal online menghadapi tantangan di era digital baru dimana masyarakat haus akan saluran komunikasi yang lebih nyaman dan beragam. Perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan telah membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat di dunia. Sekarang disadari bahwa difusi TIK lebih dari sekedar adopsi dan adaptasi teknologi. Perkembangannya TIK yang sangat cepat dan pesat menuntut semua komponen lembaga pemerintahan harus mampu mengajarnya, khususnya hal ini terkait dengan penerapan *e-government*.

Mengingat betapa kompleksnya pengembangan dari *e-government* di lingkungan instansi pemerintah pusat maupun daerah, dibutuhkan kepemimpinan yang kuat di masing-masing institusi atau unit pemerintahan agar proses transformasi menuju e-government dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam pengembangan e-government diperlukan arsitektur dan kerangka pengembangan yang jelas agar hasilnya juga maksimal. Salah satu faktor yang menjadikan keberhasilan penerapan e-government menurut intruksi presiden no 3 tahun 2003 adalah e-leadership. *e-leadership* adalah hasil logis dari lingkungan *e-work* yang dibawa oleh perkembangan teknologi informasi dan integrasinya dalam proses organisasi. E-leadership menjadi kunci keberhasilan penerapan e-government.

Pada penelitian ini peneliti ingin melakukan penelitian terkait ada tidaknya pengaruh e-leadership terhadap kesuksesan e-government di instansi pemerintahan tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota di Indonesia. Hubungan ini dibentuk dari hasil pengukuran e-leadership dengan hasil evaluasi SPBE. Dengan diketahui ada atau tidaknya hubungan antara e-leadership dengan keberhasilan/kesuksesan penyelenggaraan e-government peneliti dapat mengeksplorasi bagaimana e-leadership dapat mempengaruhi keberhasilan e-government. Sehingga tujuan akhir dari penelitian ini adalah meningkatkan pelayanan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

**Kata Kunci : *E-leadership, E-government, Pengukuran e-leadership, Evaluasi SPBE, Good governance.***

*(Halaman ini sengaja dikosongkan)*



**MEASUREMENT OF E-LEADERSHIP IN THE SUCCESS OF  
E-GOVERNMENT IN INDONESIA  
(CASE STUDIES: MADIUN CITY, BOJONEGORO DISTRICT, AND  
TRENGGALEK DISTRICT)**

Student Name : Yudha Herlambang C.P  
NRP : 05211750010001  
Supervisor : Tony Dwi Susanto, S.T., M.T., Ph.D., ITIL, COBIT

**ABSTRACT**

When electronic-based government services (e-government) develop, traditional applications such as online portals face challenges in the new digital era where people are thirsty for more convenient and diverse communication channels. The times and science have had a significant impact on various aspects of people's lives in the world. Now it is realized that the diffusion of ICTs is more than just the adoption and adaptation of technology. The rapid and rapid development of ICT demands that all components of government institutions must be able to pursue it, especially this is related to the implementation of e-government.

Given how complex the development of e-government is in the environment of central and regional government agencies, strong leadership is needed in each institution or unit of government so that the transformation process towards e-government can be carried out as well as possible. In the development of e-government, a clear architecture and development framework is needed so that the results are also maximized. One of the factors that make the success of implementing e-government according to presidential instruction number 3 of 2003 is e-leadership. e-leadership is a logical result of the e-work environment brought about by the development of information technology and its integration in organizational processes. E-leadership is the key to the success of implementing e-government.

In this study, the researchers wanted to conduct research related to the presence or absence of the influence of e-leadership on the success of e-government in central, provincial, district/city level government agencies in Indonesia. This relationship is formed from the results of the measurement of e-leadership with the results of the SPBE evaluation. Given the presence or absence of a relationship between e-leadership and the success/success of implementing e-government, researchers can explore how e-leadership can influence the success of e-government. The ultimate goal of this research is to improve government services in order to realize good governance.

**Keywords: E-leadership, E-government, e-leadership measurement, SPBE evaluation, Good governance.**

*(Halaman sengaja dikosongkan)*

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pengukuran E-Leadership Dalam Keberhasilan E-Government Di Indonesia (Studi Kasus: Kota Madiun, Kabupaten Bojonegoro, Dan Kabupaten Trenggalek)”. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Sistem Informasi, Jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. Penulis menyadari dalam proses penyelesaian tesis ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orangtua penulis (Bapak Sugeng Prianto dan Ibu Harri Yanti Titiani) yang telah mendo’akan dan senantiasa memberi dukungan penulis dalam keadaan apapun. Saudara perempuan dan saudara laki-laki penulis (Intan Permatasari dan Syahrul Pamungkas) yang selalu mendukung dan memberikan motivasi serta hiburan.
2. Bapak Tony Dwi Susanto, S.T., M.T., Ph.D., ITIL, COBIT, TOGAF selaku dosen pembimbing dan Dosen Wali Akademik yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, serta memberikan ilmu, dukungan, dan kesabaran selama membimbing penulis dari awal hingga tesis ini selesai.
3. Bapak Dr. Apol Pribadi Subriadi, S. T., M. T., selaku Dosen Penguji I dan Ketua Departemen S2 Sistem Informasi yang telah bersedia menguji dan memberikan masukan untuk penelitian ini.
4. Ibu Erma Suryani, S.T., M.T., Ph.D. selaku Dosen Penguji II yang telah bersedia menguji dan memberikan masukan untuk penelitian ini
5. Bapak Dr. H. Suyoto, M.Si. selaku Bupati Kabupaten Bojonegoro periode 2008 - 2013 dan 2013 - 2018 serta Dosen Universitas Muhammadiyah Gresik yang telah bersedia menjadi narasumber serta membagi pengalaman dan ilmu Beliau untuk mendukung penelitian ini.
6. Bapak Kusnandaka Tjatur P, selaku Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, Bapak Subakri, S.Sos., M.Si. selaku

Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Informatika Kota Madiun, Bapak Hendro Pradono, S.T. selaku Kepala Bidang Pengelolaan TIK Kota Madiun, dan Bapak Miftakhul Huda, S.Sos., M.Eng selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan E-Government Kabupaten Trenggalek yang telah bersedia menjadi informan serta membagi pengalaman dan ilmu Beliau untuk mendukung penelitian ini.

7. Semua informan lainnya yang telah bersedia untuk membagikan pengalaman, informasi, serta ceritanya yang dibutuhkan untuk melaksanakan penelitian ini.
8. Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama Penulis menempuh pendidikan di Jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
9. Segenap staf dan karyawan di Jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang membantu Penulis dalam pelaksanaan tesis ini.
10. Novia Safitri yang selalu tulus ikhlas memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.
11. Teman-teman keluarga besar S2 SI ITS Angkatan 2017-ganjil yang telah menemani suka dan duka penulis selama menempuh pendidikan magister.
12. Keluarga “Jellyfish Squad” (Indra, Rizky, Fajar, Satrio, Taufiq, Dita, Nanda, Lolanda, Fina, Pradita) yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan kebersamaan selama penulis menempuh pendidikan magister.
13. Keluarga Besar Futsal Pascasarjana ITS Surabaya yang selalu menemani suka dan duka penulis dalam berolahraga dan menjalin persaudaraan.
14. Teman-teman kos Mojo Klanggru Lor 152 F (Pak No, Fajar, Ravi, Mas Fertha, Mas Dany, Anca, Mas Candra) yang menemani penulis setiap harinya.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, Penulis bersedia menerima kritik dan saran yang

membangun untuk memperbaiki diri. Penulis berharap tesis ini dapat memberi manfaat bagi kemajuan dunia pendidikan di Indonesia.

Surabaya, Mei 2019

Yudha Herlambang C P

*(Halaman sengaja dikosongkan)*

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	5
1.3    Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
1.4    Kontribusi Penelitian .....	6
1.4.1    Kontribusi Teoritis.....	6
1.4.2    Kontribusi di Bidang Praktis .....	7
1.5    Batasan Penelitian .....	7
1.6    Sistematika Penulisan .....	7
BAB 2.....	9
KAJIAN PUSTAKA .....	9
2.1    Kajian Teori.....	9
2.1.1    Leadership .....	9
2.1.1.1    Definisi Leadership.....	9
2.1.2    E-Leadership .....	10
2.1.2.1    Definisi E-leadership .....	10
2.1.2.2    Peran E-leadership .....	11
2.1.2.3    Pentingnya E-Leadership .....	12
2.1.3    Electronic Government (E-government).....	13
2.1.3.1    Definisi E-government.....	13
2.1.3.2    Manfaat E-government .....	14
2.1.3.3    Implementasi E-Government .....	16
2.1.4    Penelitian Kualitatif .....	18

2.1.4.1	Definisi dan Karakteristik.....	18
2.1.4.2	Pendekatan Studi Khusus.....	19
2.1.4.3	Analisis Data Penelitian Kualitatif.....	23
2.1.4.4	Pengecekan Keabsahan Data Kualitatif .....	26
2.2	Kajian Penelitian Terdahulu .....	30
<b>BAB 3</b>	.....	<b>35</b>
<b>KERANGKA KONSEPTUAL</b>	.....	<b>35</b>
3.1	Konseptual Model .....	35
3.2	Domain Penelitian.....	40
3.2.1	E-Leadership.....	41
3.2.2	E-Government.....	43
3.3	Proposisi.....	45
3.3.1	Proposisi Minor.....	45
3.3.2	Proposisi Mayor .....	46
<b>BAB 4</b>	.....	<b>47</b>
<b>METODOLOGI PENELITIAN</b>	.....	<b>47</b>
4.1	Tahapan Penelitian .....	47
4.1.1	Tahapan Persiapan.....	48
4.1.1.1	Studi Penelitian Sebelumnya .....	48
4.1.1.2	Identifikasi Permasalahan .....	48
4.1.1.3	Studi Literature .....	48
4.1.2	Tahapan Inisiasi.....	48
4.1.2.1	Pengukuran E-Leadership.....	48
4.1.2.2	Evaluasi E-Government .....	56
4.1.2.3	Identifikasi Hubungan .....	60
4.1.3	Tahapan Perancangan .....	60
4.1.3.1	Setting Lokasi dan Waktu .....	61
4.1.3.2	Setting Kriteria Informan.....	62
4.1.3.3	Instrumen Wawancara.....	64
4.1.4	Tahapan Pengumpulan dan Analisis Data .....	64
4.1.4.1	Wawancara.....	64
4.1.4.2	Pengamatan.....	65
4.1.4.3	Analisis Hasil Wawancara dan Pengamatan .....	65



4.1.5	Tahapan Validasi .....	67
4.1.6	Penyusunan Hasil Penelitian.....	68
4.1.7	Penyusunan Kesimpulan dan Saran .....	68
4.2	Rencana Penelitian .....	68
<b>BAB 5</b>	.....	<b>70</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	.....	<b>71</b>
5.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	71
5.1.1	Profil Informan dan Narasumber.....	72
5.1.1.1	Bupati Kabupaten Bojonegoro (Y) .....	72
5.1.1.2	Kepala Dinas Kominfo (X1) .....	73
5.1.1.3	Kepala Bidang Pengelolaan TIK (X2) .....	74
5.1.1.4	Kasie Layanan E-Government (X3) .....	74
5.1.2	Kelayakan Informan dan Narasumber .....	74
5.2	Pengumpulan Data .....	79
5.3	Hasil Pengukuran E-Leadership.....	80
5.4	Hasil Evaluasi SPBE.....	83
5.4.1	Kabupaten Bojonegoro .....	83
5.5.1.1	Domain Kebijakan.....	84
5.5.1.2	Domain Tata Kelola .....	86
5.5.1.3	Domain Layanan .....	87
5.4.2	Kota Madiun.....	89
5.5.1.4	Domain Kebijakan.....	90
5.5.1.5	Domain Tata Kelola .....	91
5.5.1.6	Domain Layanan .....	93
5.4.3	Kabupaten Trenggalek .....	94
5.5.1.7	Domain Kebijakan.....	95
5.5.1.8	Domain Tata Kelola .....	96
5.5.1.9	Domain Layanan .....	98
5.5	Analisis Data .....	99
5.5.1	Pengumpulan Data.....	99
5.5.2	Membaca dan Membuat Memo .....	100
5.5.3	Mengorganisasikan Data .....	100
5.5.3.1	Identifikasi Kategori.....	100

5.5.3.2	Deskripsi Kategori.....	102
5.6	Temuan dan Hasil Penelitian.....	103
5.7	Pengecekan Keabsahan Data (Validasi) .....	132
5.7.1	Uji Kredibilitas .....	132
5.7.1.1	Triangulasi .....	133
5.7.1.1	Member Cheking.....	134
5.7.2	Uji Transferability .....	135
5.7.3	Uji Dependability .....	135
5.7.4	Uji Konfirmability .....	135
5.8	Kontribusi Penelitian.....	135
5.8.1	Kontribusi Teoritis .....	135
5.8.2	Kontribusi Praktis .....	136
5.9	Keterbatasan Penelitian .....	136
<b>BAB 6</b>	.....	<b>137</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	.....	<b>137</b>
6.1	Kesimpulan .....	137
6.2	Saran .....	138
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>139</b>
<b>LAMPIRAN</b>	.....	<b>146</b>
1.	<b>INSTRUMEN WAWANCARA</b> .....	<b>147</b>
2.	<b>LEMBAR VERIFIKASI DAN VALIDASI</b> .....	<b>156</b>
	<b>LEMBAR VERIFIKASI PENGUKURAN E-LEADERSHIP</b> .....	<b>156</b>
	<b>VALIDASI HASIL EVALUASI SPBE</b> .....	<b>162</b>
3.	<b>PROFIL NARASUMBER</b> .....	<b>168</b>
4.	<b>HASIL WAWANCARA</b> .....	<b>171</b>
	<b>NARASUMBER</b> .....	<b>171</b>
	<b>INFORMAN 1</b> .....	<b>187</b>
	<b>INFORMAN 2 DAN INFORMAN 3</b> .....	<b>206</b>
	<b>INFORMAN 4</b> .....	<b>218</b>
7.	<b>DOKUMENTASI PENELITIAN</b> .....	<b>231</b>
<b>BIODATA PENULIS</b>	.....	<b>239</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2. 1</b> Kedudukan Studi Kasus.....	20
<b>Gambar 2. 2</b> Jenis-Jenis Penelitian Studi Kasus (Yin, 2003,2009) .....	21
<b>Gambar 2. 3</b> Interaktif Proses Analisis Data Penelitian Kualitatif.....	24
<b>Gambar 3. 1</b> Konseptual Model Penelitian.....	36
<b>Gambar 4. 1</b> Tahapan Penelitian.....	47
<b>Gambar 4. 2</b> Analisis Model Pengukuran E-Leadership .....	50
<b>Gambar 4. 3</b> Proses Analisis Data Penelitian Kualitatif..... <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
<b>Gambar 4. 4</b> Teknik Analisis Data Model Spiral (John W. Creswell, 2007) .....	66
<b>Gambar 4. 5</b> Uji Keabsahan Data Penelitian Kualitatif (Sugiyono,2014).....	67
<b>Gambar 5. 1</b> Indeks SPBE Kab. Bojonegoro.....	84
<b>Gambar 5. 2</b> Indeks Domain Kebijakan .....	85
<b>Gambar 5. 3</b> Indeks Domain Kebijakan .....	85
<b>Gambar 5. 4</b> Domain Indeks Tata Kelola .....	86
<b>Gambar 5. 5</b> Indeks Domain Tata Kelola .....	87
<b>Gambar 5. 6</b> Indeks Domain Layanan .....	88
<b>Gambar 5. 7</b> Indeks Domain Layanan .....	88
<b>Gambar 5. 8</b> Indeks SPBE Kota Madiun.....	89
<b>Gambar 5. 9</b> Indeks Domain Kebijakan .....	90
<b>Gambar 5. 10</b> Indeks Domain Kebijakan .....	91
<b>Gambar 5. 11</b> Indeks Domain Tata Kelola.....	92
<b>Gambar 5. 12</b> Indeks Domain Tata Kelola.....	92
<b>Gambar 5. 13</b> Indeks Domain Layanan .....	93
<b>Gambar 5. 14</b> Indeks Domain Layanan .....	93
<b>Gambar 5. 15</b> Indeks SPBE Kab. Trenggalek .....	94
<b>Gambar 5. 16</b> Indeks Domain Kebijakan .....	95
<b>Gambar 5. 17</b> Indeks Domain Kebijakan .....	96
<b>Gambar 5. 18</b> Indeks Domain Tata Kelola.....	97
<b>Gambar 5. 19</b> Indeks Domain Tata Kelola.....	97
<b>Gambar 5. 20</b> Indeks Domain Layanan .....	98

<b>Gambar 5. 21</b> Indeks Domain Layanan .....	99
<b>Gambar 5. 22</b> Model Akhir Penelitian .....	132

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2. 2</b> Perbedaan Metode Kualitatif dan Kuantitatif.....	26
<b>Tabel 2. 3</b> Penelitian Terdahulu Ke 1 .....	30
<b>Tabel 2. 4</b> Penelitian Terdahulu Ke 2.....	31
<b>Tabel 2. 5</b> Penelitian Terdahulu Ke 3.....	32
<b>Tabel 2. 6</b> Penelitian Terdahulu Ke 4.....	33
<b>Tabel 3. 1</b> Indikator Domain E-Leadership.....	41
<b>Tabel 3. 2</b> Aspek Domain E-Government .....	43
<b>Tabel 4. 1</b> Level E-Leadership (Adopsi Maxwell,2011).....	49
<b>Tabel 4. 2</b> Tabel Keterangan skala likert.....	51
<b>Tabel 4. 3</b> Deskripsi Kategori e-Leadership.....	51
<b>Tabel 4. 4</b> Kuesioner Pengukuran e-Leadership.....	52
<b>Tabel 4. 5</b> Predikat Indeks SPBE .....	58
<b>Tabel 4. 6</b> Domain, Aspek dan Indikator Penilaian.....	58
<b>Tabel 4. 7</b> Kriteria Informan.....	63
<b>Tabel 4. 8</b> Jadwal Rencana Penelitian .....	68
<b>Tabel 5. 1</b> Kelayakan Narasumber Y .....	75
<b>Tabel 5. 2</b> Kelayakan Informan X1 .....	76
<b>Tabel 5. 3</b> Kelayakan Informan X2 .....	77
<b>Tabel 5. 4</b> Kelayakan Informan X3 .....	78
<b>Tabel 5. 5</b> Inisial Narasumber .....	78
<b>Tabel 5. 6</b> Inisial Informan .....	79
<b>Tabel 5. 7</b> Identifikasi Kategori.....	101
<b>Tabel 5. 8</b> Deskripsi Kategori.....	102
<b>Tabel 5. 9</b> Pernyataan Informan tentang Strong Leadership .....	104
<b>Tabel 5. 10</b> Pernyataan Informan tentang Vision and Mission .....	108
<b>Tabel 5. 11</b> Pernyataan Informan tentang Align IT and Goals Strategi .....	113
<b>Tabel 5. 12</b> Pernyataan Informan tentang Commitment .....	118
<b>Tabel 5. 13</b> Pernyataan Informan tentang Leadership Functions .....	124
<b>Tabel 5. 14</b> Triangulasi Sumber Data Narasumber .....	133
<b>Tabel 5. 15</b> Triangulasi Waktu Pengumpulan Data .....	134

*(Halaman sengaja dikosongkan)*

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang dilakukannya penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kontribusi penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **1.1 Latar Belakang**

Ketika layanan pemerintah berbasis elektronik (*e-government*) berkembang, aplikasi tradisional seperti portal *online* menghadapi tantangan di era digital baru dimana masyarakat haus akan saluran komunikasi yang lebih nyaman dan beragam (Liang, Qi, Wei, & Chen, 2017). Perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan telah membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat di dunia. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) adalah salah satu yang berkembang sangat pesat seiring dengan perkembangan jaman dan ilmu pengetahuan ini. TIK saat ini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari berbagai aktifitas manusia di dunia. Pada era modern saat ini, teknologi informasi dan komunikasi menghadirkan suatu fungsi teknologi dengan asas praktis, efektif dan efisien sebagai acuan utama. Tujuan *e-government* suatu negara adalah sebagai bentuk konstituen dengan informasi dan layanan pemerintah, dimana memanfaatkan teknologi Informasi dan Komunikasi (Banerjee & Chau, 2004). Kehadiran teknologi ini harus digunakan secara baik dengan pengelolaan yang tepat. TIK yang sudah menyatu kehadirannya dengan masyarakat menjadi sesuatu yang harus digunakan dengan nilai kebaikan.

Sekarang disadari bahwa difusi TIK lebih dari sekedar adopsi dan adaptasi teknologi (Kifle & Cheng, 2009). Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) diciptakan untuk memberikan kemudahan dan memecahkan segala problematika kehidupan pada aktivitas keseharian manusia. Perkembangannya TIK yang sangat cepat dan pesat menuntut semua komponen lembaga pemerintahan harus mampu mengējarnya, khususnya hal ini terkait dengan penerapan *e-government*. Pengaruh pada bidang pemerintahan sangat jelas kita rasakan, terutama pada penerapan *e-government*. Mengingat betapa kompleksnya pengembangan dari *e-government* di lingkungan instansi pemerintah pusat maupun daerah, dibutuhkan kepemimpinan

yang kuat di masing-masing institusi atau unit pemerintahan agar proses transformasi menuju e-government dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya (Anwaruddin, n.d.). Teknologi informasi dan komunikasi menjadi sesuatu yang mutlak untuk dikuasai untuk mengejar ketertinggalan teknologi bangsa Indonesia. Bahkan di berbagai lembaga pemerintahan saat ini pasti akan memprioritaskan dan menambah pelatihan pegawai dibidang teknologi informasi dan komunikasi, dimana ada pembelajaran serta pengetahuan media yang dapat membantu pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai pembelajaran.

Pengembangan e-government untuk sarana penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan layanan publik artinya menyelenggarakan roda pemerintahan dengan bantuan (memanfaatkan) teknologi informasi dan komunikasi. Dalam arti melakukan transformasi sistem proses kerja secara manual ke sistem yang berbasis elektronik. Beberapa organisasi yang pada awalnya disusun untuk keperluan proses kerja secara manual pada akhirnya bisa jadi perlu diubah dan disesuaikan untuk memungkinkan berjalannya sistem elektronik secara efektif dan optimal. Tentu saja tidak semua proses kerja dapat ditransformasi ke dalam sistem elektronik. Ada beberapa yang masih harus menggunakan sistem manual, tetapi ada sebagian besar lainnya yang dapat dikerjakan dengan lebih cepat, efektif dan efisien melalui bantuan sistem elektronik. Dalam pengembangan e-government diperlukan arsitektur dan kerangka pengembangan yang jelas agar hasilnya juga maksimal. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi di pemerintahan adalah merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien.

Kepemimpinan, lembaga dan kemampuan manusia adalah kunci bagi setiap negara bergerak dengan visi dari potensi revolusi teknologi informasi dan komunikasi yang sedang berlangsung untuk kegiatan ekonomi yang kompetitif, inovatif dan berbasis pengetahuan (Hanna, n.d.). Sifat lintas sektor TIK membutuhkan pengaturan kelembagaan dan mekanisme koordinasi yang dapat menjamin koherensi kebijakan dan investasi di semua sektor terkait. Hal ini membutuhkan pemberdayaan yang ada atau pemerintah yang baru dibentuk atau badan swasta-publik untuk menyediakan e-leadership dan strategi kebijakan untuk



melaksanakan, memantau dan mengevaluasi program (Santosa & Winarno, 2015). Pemerintah harus bertindak sebagai *regulator*, *fasilitator* dan pengguna TIK, dalam kerja sama dengan pemangku kepentingan utama lainnya seperti sektor swasta dan masyarakat sipil.

Menurut (Muflihah & Susanto, 2017) mengungkapkan bahwa *e-government* menjadi populer dikarenakan adanya manfaat yang signifikan kepada pemerintah, warga dan masyarakat. Salah satu hasil penerapan *e-government* adalah peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan publik melalui penyelenggaraan layanan publik secara online. Bagi (Ke & Wei, 2004) terkait keberhasilan *e-government* di Singapura kepemimpinan yang kuat dengan visi sangat penting untuk keberhasilan *e-government*. Pemerintah harus jelas mengartikulasikan visinya dan memotivasi semuanya para pemangku kepentingan untuk berbagi visi itu. Visi pemerintah Singapura telah menginspirasi perubahan pola pikir dan mengubah lembaga pemerintah untuk memahami langkah menuju *e-government* dalam negara. Penggunaan teknologi oleh pemerintah, khususnya aplikasi internet berbasis *web* mendukung meningkatkan akses warga negara pada layanan pemerintah dan memungkinkan warga untuk melakukan transaksi *online* (*e-government*). Dengan bermigrasi secara tradisional berbasis kertas dan tatap muka layanan ke Internet atau *e-government* memiliki potensi untuk menyediakan layanan pemerintah bagi warga negara dengan cepat dan mudah. Setiap masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan melakukan permohonan terhadap layanan publik melalui sebuah aplikasi berbasis *online* yang terhubung dengan sistem internal instansi yang terkait.

Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh (Aji & Abdurachman, 2011) menjelaskan bahwa Pemerintah sesungguhnya telah mengeluarkan peraturan pemerintah tentang *e-government*. Keseluruhan bentuk pelayanan yang disediakan pemerintah selaku penyedia pelayanan tersebut, menuntut kinerja organisasi pelayanan secara baik, dan produk layanan yang berkualitas dengan dimensi-dimensi berupa kemudahan, kecepatan, ketepatan, dan keadilan serta memberikan rasa keamanan dari aspek legitimasi yang diberikan dan sekaligus sebagai jaminan dari produk layanan pemerintah. Faktor kepemimpinan juga berperan penting pada organisasi pelayanan untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan organisasi.

Kepemimpinan diperlukan manusia karena adanya keterbatasan dan kelebihan-kelebihan tertentu pada manusia. Di satu pihak manusia terbatas kemampuannya untuk memimpin, di pihak lain ada orang yang mempunyai kelebihan kemampuan untuk memimpin. Berdasarkan dari hasil penelitian dijelaskan bahwa kepemimpinan pada unit layanan publik berpengaruh langsung terhadap kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan SIUP. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan terhadap unit pelayanan publik yang semakin baik akan mempengaruhi kepuasan masyarakat yang semakin baik pula.

Penelitian (Wijaya & Surendro, 2006) menjelaskan bahwa *e-government* dapat dipahami sebagai upaya pemerintah untuk menyediakan layanan publik yang efisien dan efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan maka diperlukan kondisi atau keadaan tertentu yang mendukung. Kondisi ini dapat diartikan sebagai kesiapan atau *readiness* salah satunya adalah *e-leadership*. Menurut (Mohammad, n.d.) *e-leadership* adalah hasil logis dari lingkungan *e-work* yang dibawa oleh perkembangan teknologi informasi dan integrasinya dalam proses organisasi. Kepemimpinan baru akan bervariasi dari satu negara ke negara, budaya ke budaya, dan sektor ke sektor. Hal ini lebih terlihat dalam masyarakat maju secara ekonomi dan dalam organisasi di mana penggunaan teknologi informasi telah memasuki tahap lanjut.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, peneliti ingin melakukan penelitian terkait ada tidaknya pengaruh *e-leadership* terhadap kesuksesan *e-government* di instansi pemerintahan tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota di Indonesia. Dengan diketahui ada atau tidaknya hubungan antara *e-leadership* dengan keberhasilan/kesuksesan penyelenggaraan *e-government* peneliti dapat mengeksplorasi bagaimana *e-leadership* dapat mempengaruhi keberhasilan *e-government*. Sehingga tujuan akhir dari penelitian ini adalah meningkatkan pelayanan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal lain yang ingin diteliti oleh peneliti adalah untuk membuktikan secara empiris bahwa *e-leadership* dapat mempengaruhi keberhasilan/kesuksesan penerapan *e-government*. Teori ini oleh peneliti akan dibuktikan di lingkup instansi pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota di

Indonesia. Untuk melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kasus untuk dapat mengeksplorasi lebih detail terkait topik yang diangkat. Penelitian ini didasarkan pada fenomena yang sedang terjadi di lingkungan pemerintahan serta diperkuat dengan temuan peneliti yang diuraikan diatas serta didukung dengan kebijakan/peraturan pemerintahan Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, pembahasan lebih banyak mengangkat mengenai peran *e-government* pada masyarakat. Peran kesuksesan dari penerapan *e-government* tidak lepas salah satunya dari faktor *e-leadership* yang dimiliki oleh pemerintah dalam implementasi sebagai bentuk penyediaan fasilitas yang disediakan untuk layanan masyarakat. Penelitian ini akan mengangkat mengenai peran dari *e-leadership* berpengaruh terhadap *e-government*. Hal yang mendasari untuk perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik *e-leadership* berpengaruh terhadap *e-government* yaitu: 1) Kurangnya literasi dalam membahas penelitian mengenai *e-leadership* berpengaruh pada *e-government* di wilayah Indonesia; 2) Penelitian terdahulu masih belum jelas membahas pengaruh dari *e-leadership* sebagai bentuk kesiapan pemerintah dalam implementasi *e-government* secara mendetail; (3) masih perlu dilakukan penelitian mengenai *e-leadership* berpengaruh terhadap *e-government* untuk pemerintahan pada Kota/Kabupaten wilayah Jawa Timur, khususnya mengambil kajian analisis beberapa kota diantaranya Kota Madiun, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Trenggalek sebagai bentuk referensi acuan keberhasilan daerah dalam pengimplementasiannya; (4) memberikna rekomendasi bagaimana praktik-praktik *e-leadership* kepada daerah agar *e-government* dapat dilaksanakan dengan sukses. Adapun susunan rumusan masalah yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *e-leadership* berpengaruh terhadap *e-government* kota/kabupaten di Indonesia?
2. Bagaimana *e-leadership* dapat mempengaruhi keberhasilan/kesuksesan *e-government*?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis peran dari *e-leadership* pemerintah dapat berpengaruh terhadap *e-government* pada ranah pelayanan sektor public sekaligus memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah maupun pusat dalam menjalankan penyelenggaraan e-government yang sukses.

Manfaat penelitian ini adalah untuk menjelaskan gambaran kondisi terkini (*eksisting*) terkait *e-leadership* berpengaruh terhadap *e-government* pada Kota/Kabupaten di Indonesia khususnya mengambil kajian analisis beberapa kota diantaranya Kota Madiun, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Trenggalek dan memberikan sebuah referensi dari berkembangnya e-government suatu daerah yang dipengaruhi oleh e-leadership. Dengan demikian, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kemudahan bagi pemerintah dalam mengukur seberapa besar tingkat e-leadership berpengaruh terhadap e-government untuk kota/kabupaten di Indonesia. Selain itu, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk melakukan penilaian dan penyusunan langkah antisipasi masalah *e-leadership* guna mensukseskan terselenggaranya *e-government* yang baik.

### **1.4 Kontribusi Penelitian**

#### **1.4.1 Kontribusi Teoritis**

Berdasarkan hasil studi literatur mengenai peran *e-leadership*, ditemukan beberapa diantaranya pembahasan mengenai *leadership* (kepemimpinan) merupakan organ utama penentu kebijakan maupun operasional organisasi tersebut, sedangkan *e-leadership* adalah kemampuan untuk membawa orang-orang, alat-alat dan sumber daya secara bersama-sama dengan memanfaatkan TIK untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan organisasi. *E-leadership* lebih menunjukan pada kemampuan melihat potensi TIK untuk pengembangan dan kapasitas untuk menggunakannya dengan baik sebagai alat untuk perubahan dan sebagai alat untuk memberikan layanan yang lebih baik untuk mayoritas yang lebih besar. Keberhasilan implementasi dari *e-government* adalah kuatnya visi dari pemerintah dalam mengakulturasikan *e-government* pada pelayanan masyarakat sebagai bentuk *leadership* (kepemimpinan) kemajuan yang lebih efektif dan efisien.

#### 1.4.2 Kontribusi di Bidang Praktis

Kontribusi praktis pada penelitian ini menghasilkan model pengukuran tingkat *e-leadership* berpengaruh terhadap *e-government* kota/kabupaten di Indonesia. Model pengukuran ini dapat digunakan sebagai acuan oleh aparatur pemerintah untuk melakukan pengukuran, penilaian dan penyusunan langkah antisipasi masalah *e-leadership* untuk meningkatkan pelayanan pemerintah dalam *e-government*.

#### 1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang akan menjadi batasan dalam penelitian ini. Batasan penelitian ini antara lain:

1. Model pengukuran pada penelitian ini berfokus pada *e-leadership* berpengaruh terhadap *e-government*.
2. Studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *e-leadership* berpengaruh terhadap *e-government* di kota Madiun, kabupaten Bojonegoro dan kabupaten Trenggalek.
3. Proses validasi hasil penyusunan model pengukuran *e-leadership* berpengaruh terhadap *e-government* ini dilakukan dengan melibatkan kepala aparatur pemerintah kota/kabupaten di Indonesia.

#### 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Bab 1 Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kontribusi penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan.

##### 2. Bab 2 Kajian Pustaka

Bab ini berisi kajian terhadap teori dan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperkuat dasar dan alasan dilakukan penelitian.

##### 3. Bab 3 Kerangka Konseptual

Bab ini mengulas tentang kerangka konseptual yang dikembangkan dalam penelitian ini, termasuk hipotesis penelitian dan deskripsi operasional.

#### **4. Bab 4 Metode Penelitian**

Bab ini membahas mengenai rancangan penelitian, lokasi dan tempat penelitian, dan juga tahapan-tahapan sistematis yang digunakan selama melakukan penelitian.

#### **5. Daftar Pustaka**

Berisi daftar referensi yang digunakan dalam penelitian ini, baik jurnal, buku maupun artikel.

## BAB 2

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Kajian Teori

Dasar teori berisi penjelasan teori-teori yang digunakan berdasarkan kajian pustaka yang menjadi latar belakang penelitian. Dasar teori selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian.

##### 2.1.1 Leadership

###### 2.1.1.1 Definisi Leadership

Mengacu pada teori lama mengenai leadership, terdapat beberapa teori leadership yang terkenal diantaranya *great man theory*, *trait theory*, dan *behavior theory*. Thomas Craley (1888) pencetus teori great man mendefinisikan leadership adalah kemampuan yang melekat pada seseorang, leadership dilahirkan dan bukan dibentuk. Gordon Allport (1937) pencetus trait teori menjelaskan bahwa leadership terbentuk karena warisan dari karakteristik perilaku tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Skinner (1967) pencetus behavior teori menjelaskan bahwa seorang pemimpin besar dapat dibentuk, tidak selalu karena dilahirkan atau dimitoskan. Setiap orang memiliki jiwa kepemimpinan melalui cara pembelajaran, observasi dan arena pengalaman.

Menurut Davis dalam (Barberà, Baras, Barrio, & Teruel, 2010) leadership adalah kemampuan untuk dapat mengajak orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut Peter Northouse dalam (Goffee & Jones, 2007) leadership merupakan kemampuan seorang individu dalam mempengaruhi sekelompok individu lain untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan atau leadership dipandang sebagai proses mempengaruhi yang mencakup sasaran tugas dan strategi kelompok atau organisasi, mempengaruhi orang dalam organisasi untuk menerapkan strategi dan mencapai tujuan, mempengaruhi pemeliharaan dan identifikasi kelompok, dan mempengaruhi budaya organisasi (Gary Yukl, 1992)

Sedangkan menurut (Richard Bolden, 2004) leadership adalah fenomena yang kompleks yang menyentuh banyak proses penting organisasi, social dan pribadi lainnya. Hal ini tergantung pada proses dimana seseorang terinspirasi untuk bekerja menuju tujuan kelompok, bukan melalui paksaan tetapi melalui motivasi

pribadi. Yalom and Miles dalam (Burke, 2006) menunjukkan bahwa analisis factor dari perilaku pemimpin menghasilkan empat fungsi kepemimpinan dasar yaitu (1) **emotional stimulation** meliputi (*challenging, confronting, activity, intrusive modeling by personal risk taking and high self disclosure*), (2) **caring** meliputi (*offering support, affection, praise, protection, warmth, acceptance, genuineness, concern*), (3) **meaning attribution** meliputi (*explaining, clarifying, interpreting, providing a cognitive framework for change, translating feelings and experiences into ideas*) dan (4) **executive function** meliputi (*setting limits, rules, norms, goals, managing time, pacing, stopping, interceding, suggesting procedures*).

## **2.1.2 E-Leadership**

### **2.1.2.1 Definisi E-leadership**

E-leadership adalah proses pengaruh social yang dimediasi oleh teknologi untuk menghasilkan perubahan dalam sikap, perasaan, pemikiran, perilaku dan kinerja dengan individu, kelompok atau organisasi (Avolio, Sosik, Kahai, & Baker, 2014). Avolio and Kahai dalam (DasGupta, 2011) menggambarkan e-leadership bukan hanya tentang perpanjangan kepemimpinan tetapi sebagai perubahan mendasar dalam cara pemimpin dan pengikut berhubungan satu sama lain dalam organisasi dan antar organisasi. Menurut Anwarudin (Hani K, 2001) e-leadership (electronic leadership) berlangsung dalam konteks elektronik dimana seluruh pekerjaan dimediasi oleh teknologi informasi, utamanya dengan internet. Sedangkan menurut (Anwaruddin, n.d.) e-leadership adalah kemampuan seorang pemimpin dalam melangkah lebih jauh untuk membawa sumber daya manusia yang dipimpinya bersama-sama melintasi batas-batas bangsa, geografis, budaya dan batasan-batasan lainnya dengan memanfaatkan teknologi guna mencapai tujuan organisasi.

Pemerintah melalui (INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2003, 2003) menjelaskan e-leadership adalah sebuah aspek yang berkaitan dengan prioritas dan inisiatif negara dalam mengantisipasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. E-leadership terdiri dari 2 elemen dasar yaitu kepemimpinan dan teknologi (Budvytyte, 2006). E-leadership adalah hasil logis dari lingkungan kerja elektronik yang dibawa oleh perkembangan teknologi



informasi untuk mencapai tujuan organisasi (Mohammad, n.d.). E-leadership didefinisikan sebagai "sistem dinamis yang kuat yang tertanam dalam sistem organisasi yang lebih besar," (Avolio & Kahai, 2003). Salah satu elemen terpenting dari e-leadership adalah tim virtual. Pernyataan (Zigurs, 2003) menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam tim virtual dikomunikasikan melalui teknologi, yang berarti pemimpin harus tahu bagaimana menggunakan TIK dalam cara yang benar. Bishop et al., (2010) menunjukkan bahwa kesalahpahaman antara *leader* dan tim virtualnya sering disebabkan oleh kurangnya informasi. Menurut (Gheni et al., 2015) e-leadership berbeda dari kepemimpinan konvensional karena tidak ada interaksi tatap muka antara pemimpin dengan pengikutnya. Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa e-leadership adalah pemimpin yang memiliki kemampuan (visi, misi dan komitmen) untuk mempengaruhi pengikutnya guna mencapai tujuan bersama dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sebagai contohnya pada studi kasus yang diambil oleh peneliti di kabupaten bojonegoro telah menerapkan e-leadership. Kepala daerah di bojonegoro menggunakan aplikasi (memanfaatkan teknologi Informasi) untuk menunjang pengambilan keputusan terkait bidang pertanian dan pangan dengan menggunakan aplikasi "Hara". Selanjutnya di Kabupaten Trenggalek kepala daerah menggunakan aplikasi "Simbasis Data Terpadu Kemiskinan" untuk memetakan bantuan dana kemiskinan dari Kementerian Sosial. Terakhir di Kota Madiun, Pemkot melakukan integrasi 3 aplikasi yaitu e-budgeting, e-paling dan e-kontak untuk mengurangi angka korupsi. Utamanya dalam penelitian ini ketiga studi kasus sudah memiliki Masterplan Pengembangan Teknologi Informasi, sebagai landasan pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan e-government untuk menunjang strategi, asset dan tata pemerintahan yang baik.

#### 2.1.2.2 Peran E-leadership

Dibutuhkan kemampuan dalam menyusun dan menerapkan beberapa kebijakan baru guna memfasilitasi adanya penetrasi TIK kedalam sebuah organisasi (Astuti, 2008). Mengintegrasikan berbagai peran dan melaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi merupakan sebuah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang e-leadership menurut (Anwaruddin, n.d.). Menurut Burke

(2008) dalam (Anwaruddin, n.d.) beberapa peran yang harus dijalankan oleh seorang e-leadership adalah sebagai berikut :

- a) ***Visionary*** : memiliki kemampuan untuk melihat gambaran yang besar dan menerjemahkannya kepada anggota organisasi.
- b) ***Convener*** : memiliki kemampuan untuk mengelola perbedaan anggota dan membawa organisasi ke arah tujuan yang jelas dan pemecahan masalah.
- c) ***Team Sponsor*** : memiliki kemampuan untuk membentuk dan mengarahkan kelompok kerja nyata dan kelompok virtual/maya.
- d) ***Manager*** : memiliki kemampuan untuk mengupayakan dan mengalokasikan sumber-sumber organisasi segenap tanggungjawab dan kemauan untuk mengelola organisasi nyata dan virtual.
- e) ***Innovator*** : memiliki kemampuan untuk menemukan cara-cara baru untuk pekerjaan-pekerjaan diluar tugas pokok dan fungsinya.
- f) ***Mentor*** : memiliki kemampuan untuk membimbing dan mengarahkan calon-calon pemimpin baru di lingkungan organisasinya.

Selain beberapa aspek penting, seorang leadership juga harus memiliki visi dan misi kepemimpinan dan komitmen yang kuat terhadap pengembangan teknologi informasi. Malhotra, Majchrzak and Rosen dalam (DasGupta, 2011) menjelaskan beberapa kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang e-leadership agar sukses antara lain (1) menghasilkan dan mempertahankan kepercayaan melalui pemanfaatan teknologi dan informasi, (2) memastikan bahwa keanekaragaman terdistribusi dipahami dengan jelas dan dihargai dengan baik, (3) Memantau dan mengelola siklus kehidupan kerja virtual secara efektif, (4) memantau dan mengelola kemajuan tim virtual dengan menggunakan teknologi, (5) memperluas visibilitas anggota virtual baik didalam tim maupun diluar tim (6) membantu memastikan bahwa setiap anggota tim mendapat manfaat dari tim.

### **2.1.2.3 Pentingnya E-Leadership**

Penggunaan *e-leadership* merupakan alat strategis dalam meningkatkan komitmen didalam tim pada organisasi (Iriqat & Khalaf, 2017). Menurut Raharjo (2008) dalam (Anwaruddin, n.d.) terdapat dua faktor yang menjadi karakteristik e-leadership yang dsangat kuat pengaruhnya terhadap keberhasilan e-government,

yaitu visi dan misi kepemimpinan dan komitmen terhadap pengembangan teknologi. Lebih lanjut (Anwaruddin, n.d.) menjelaskan tantangan seorang pemimpin dalam e-leadership adalah menjembatani gap antara SDM dan masyarakat dengan kemajuan teknologi dan dampaknya, bukan perkembangan teknologinya. Faktor utama keberhasilan pengembangan e-government menurut (Anwaruddin, n.d.) adalah implementasi e-leadership yang efektifitasnya tergantung pada gaya kepemimpinan transformasional yang dikembangkan.

Pulley and Sessa (2001) dalam (DasGupta, 2011) menatakan tantangan terbesar dari e-leadership adalah bagaimana membuat individu bekerja bersama kolektif untuk menciptakan budaya yang memungkinkan semua suara kepemimpinan untuk didengar. Inturksi Presiden No 3 Tahun 2003 menyebutkan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan e-government adalah aspek e-leadership, dimana hal ini berkaitan dengan prioritas dan inisiatif negara dalam mengantisipasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Dengan demikian dapat disimpulkan betapa pentingnya e-leadership dalam proses pengembangan e-government dimana tujuan akhirnya adalah dengan tercapainya *good governance*.

### **2.1.3 Electronic Government (E-government)**

#### **2.1.3.1 Definisi E-government**

United Nation Development Programme (UNDP) memberi definisi e-government secara singkat sebagai aplikasi teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah. Definisi juga mengingatkan bahwa e-government tidak hanya sebatas penggunaan TIK semata, tetapi juga menjadi instrumen yang efektif untuk mentransformasi struktur, proses, dan budaya pemerintah untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efektif, efisien, dan berorientasi pelanggan (Alsaghier, Ford, Nguyen, & Hexel, 2009). Menurut (Forman, 2005) mendeskripsikan e-government secara umum sebagai penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan fungsi dan kinerja pemerintahan tradisional. Sedangkan menurut (Indrajit, 2002) e-government berhubungan dengan penggunaan teknologi (seperti *wide area network*, *internet* dan *mobile computing*) oleh instansi pemerintahan yang membentuk kemampuan

untuk menjalin hubungan dengan warga negara, bisnis dan organisasi lain dalam pemerintahan.

Hasil meta analisis dari literatur akademik oleh (Madsen, Berger, & Phythian, 2014) mengidentifikasikan bahwa sebagian besar ilmuan e-government memberikan definisi sebagai berikut “*the use of the Internet to deliver services and information to citizens and businesses*” dengan demikian, dapat dikatakan bahwa e-government berfokus pada penyediaan pelayanan dan informasi kepada dunia bisnis dan masyarakat melalui internet. Damanik dan Purwaningsih menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh organisasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya mengelola pemerintahan dan menyediakan layanan publik. Pemanfaatan TIK dalam konteks ini mencakup penggunaan perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan jaringan komputer untuk memfasilitasi komunikasi dan proses bisnis organisasi. Melalui e-government, penyediaan informasi dan pelayanan pemerintah dapat digelar secara daring (*online*) melalui jaringan internet dan media digital lainnya.

Dari berbagai definisi dan pemahaman mengenai e-government setidaknya dapat kita tarik beberapa konsep kunci sebagai berikut: 1) penggunaan TIK dalam praktik pemerintahan, 2) penyediaan layanan dan informasi berbasis website, ditujukan untuk peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, 4) memungkinkan kemudian akses dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat serta dunia bisnis, 5) secara umum relasi e-government meliputi pemerintah dengan pemerintah (Government to Government), pemerintah dengan dunia bisnis (Government to Business), dan pemerintah dengan warga negara (Government to Citizen).

#### 2.1.3.2 Manfaat E-government

(Seifert & Bonham, 2004) mengatakan ada beberapa manfaat implementasi *e-government*, sehingga menjadi motivasi tersendiri bagi pemerintah untuk menjadikan *e-government* sebagai alat untuk mereformasi pemerintahan. Beberapa manfaat dari *e-government* yang sering menjadi alasan dan motivasi pemerintah untuk menggunakan *e-government* antara lain: *efficiency, marketization, new and improved services, decentralization, administrative control, citizen demand, increased citizen participation, transparency*, dan *economic*

*development*. Selain itu, implementasi *e-government* memiliki manfaat baik di bidang ekonomi (*economic benefits*) maupun di bidang sosial (*social benefits*) (Bhatnagar, 2003).

Menurut (Bhatnagar, 2003) manfaat di bidang ekonomi dan sosial yang dihasilkan oleh implementasi *e-government* antara lain:

1. *Social Benefits*

- 1.1 Meningkatkan transparansi dan mengurangi korupsi
- 1.2 Memerangi korupsi melalui *e-government*
- 1.3 Meningkatkan efisiensi dan efektivitas *service delivery*
- 1.4 Pemberdayaan masyarakat pedesaan

2. *Economic Benefits*

- 2.1 Mengurangi biaya (*costs*) untuk layanan pemerintah
- 2.2 Pengendalian pengeluaran pemerintah
- 2.3 Pertumbuhan pendapatan pajak

Gore dan Tony Blair menjelaskan dan merinci manfaat yang diperoleh dengan menerapkan *e-government* pada suatu negara, seperti yang dikutip oleh (Indrajit, 2002) manfaat tersebut antara lain :

1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada pemangku kebijakan terutama dalam hal efektifitas dan efisiensi kinerja dalam berbagai bidang pemerintahan.
2. Meningkatkan kontrol, akuntabilitas dan kontrol dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan penerapan *good governance*.
3. Mengurangi biaya administrasi, relasi dan interaksi secara signifikan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun pemangku kebijakan.
4. Memeberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber pendapatan baru melalui interaksi dengan pihak yang berkepentingan.
5. Menciptakan suatu lingkungan baru yang dapat dengan cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi

sejalan dengan perubahan global dan tren yang terus berkembang.

6. Memberdayakan masyarakat dan pihak lain sebagai mitra pemerintah sebagai proses pengambilan kebijakan publik yang merata dan demokratis.

Dengan banyaknya manfaat dari penggunaan *e-government* di pemerintahan, saat ini pemerintah baik tingkat lokal maupun nasional berlomba-lomba untuk mulai mengimplementasi *e-government* tentu dengan tujuan untuk reformasi birokrasi dan pelayanan publik pemerintahan berbasis ICT.

#### 2.1.3.3 Implementasi E-Government

Menurut (Nabafu & Maiga, 2012), implementasi *e-government* merupakan bagian dari usaha pemerintah untuk masuk ke dalam tren global dengan memanfaatkan penggunaan ICT dalam layanan publik. Definisi lain dari inisiasi *e-government* menurut (Ndou, 2004) yaitu inisiatif dari pemerintah dan departemen untuk menggunakan aplikasi dan tools ICT, internet dan perangkat mobile untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, menguatkan relasi dan membangun kerjasama baru dengan masyarakat. Dengan kata lain implementasi *e-government* di pemerintahan adalah dengan memanfaatkan TIK sebagai upaya meningkatkan layanan publik.

Di Indonesia titik awal implementasi *e-government* ditandai dengan terbitnya Inpres Nomor 3 Tahun 2003. Inpres tersebut menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam organisasi pemerintah guna penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. *E-government* diharapkan dapat mengeliminasi sekat-sekat birokrasi, serta terbentuknya jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan berbagai instansi pemerintah dapat bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses informasi dan proses layanan. Sejak saat itu berbagai organisasi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah mulai bergerak dalam memanfaatkan TIK untuk mengimplementasikan *e-government* di daerahnya. Berdasarkan instruksi Presiden no. 3 tahun 2003 keberhasilan penerapan *e-Government* dipengaruhi oleh beberapa aspek sebagai berikut :

1. E-leadership; aspek ini berkaitan dengan prioritas dan inisiatif negara dalam mengantisipasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.
2. Infrastruktur Jaringan Informasi; aspek ini berkaitan dengan kondisi infrastruktur telekomunikasi serta akses, kualitas, lingkup, dan biaya jasa akses.
3. Pengelolaan Informasi; aspek ini berkaitan dengan kualitas dan keamanan pengelolaan informasi, mulai dari pembentukan, pengolahan, penyimpanan, sampai penyaluran dan distribusinya.
4. Lingkungan Bisnis; aspek ini berkaitan dengan kondisi pasar, sistem perdagangan, dan regulasi yang membentuk konteks bagi perkembangan bisnis teknologi informasi, terutama yang mempengaruhi kelancaran aliran informasi antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha, antar badan usaha, antara badan usaha dengan masyarakat, dan antar masyarakat.
5. Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, aspek ini berkaitan dengan difusi teknologi informasi dalam kegiatan masyarakat baik perorangan maupun organisasi, serta sejauh mana teknologi informasi disosialisasikan kepada masyarakat melalui proses pendidikan.

Implementasi e-government membutuhkan banyak sekali kebutuhan yang harus dipersiapkan oleh pemerintah. Dengan implementasi e-government ini pemerintah harus siap melawan tantangan yang harus dihadapi, diantara tantangan tersebut adalah tidak meratanya penerapan pemerintahan menggunakan e-government. Untuk menanggulangi hal itu pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE, di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan public (PERATURAN MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA, DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, & NOMOR 5 TAHUN 2018, 2018). Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE untuk menghasilkan suatu nilai indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang akan dievaluasi sedikitnya mencakup tata kelola SPBE, layanan SPBE, dan kebijakan SPBE.

#### **2.1.4 Penelitian Kualitatif**

##### **2.1.4.1 Definisi dan Karakteristik**

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan & Taylor, 1990). Menurut (Sugiyono, 2014) metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang masih alamiah. Sedangkan menurut (Hancock, Ockleford, & Windridge, 2009) penelitian kualitatif berkaitan dengan pengembangan fenomena sosial yang sedang terjadi, dimana tujuannya adalah untuk membantu pemahaman dunia sosial manusia dan berinteraksi dengan sosial.

Bogdan dan Biklen (1982) dalam (Sugiyono, 2014) menjelaskan beberapa karakteristik dari penelitian kualitatif, antara lain :

1. Penelitian dilakukan langsung kepada sumber data, dimana peneliti adalah instrument.
2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka,
3. Lebih menekankan pada proses daripada produk atau outcome,
4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif,
5. penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati).

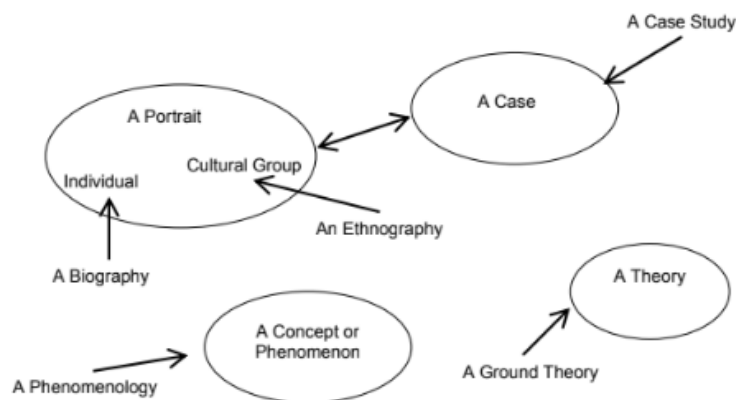


Selanjutnya (Moriarty, 2011) dalam bukunya yang berjudul *Qualitative Methods Overview* menjelaskan ada 5 karakteristik utama penelitian kualitatif antara lain : (1) Tujuannya diarahkan untuk memberi pemahaman yang mendalam, panafsiran social, pengalaman, perspektif dan cerita sejarah dari partisipan, (2) jumlah sampelnya kecil dan dipilih berdasarkan kriteria yang sesuai dan mampu memberikan informasi secara mendalam, (3) metode pengumpulan data menggunakan hubungan erat antara peneliti dan partisipan secara interaktif dan eksploratif terhadap masalah-masalah yang muncul, (4) data sangat detail, informasi yang luas. Dibutuhkan analisis untuk membuka ide-ide yang muncul dan menghasilkan deskripsi rinci, klarifikasi, mengidentifikasi pola hubungan, dan mengembangkan tipologi atau menjelaskan, (5) output cenderung berfokus pada interpretasi makna social melalui pemetaan dan menjelaskan ulang dunia social dari partisipan. Dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan alat penelitian yang utama, peneliti memiliki lebih banyak kelebihan dari pada daftar pertanyaan yang lazim dilakukan oleh penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuesioner (Moleong, 2008).

#### 2.1.4.2 Pendekatan Studi Khusus

Salah satu pendekatan yang ada pada metode pendekatan kualitatif adalah pendekatan studi kasus. Menurut (John W Creswell, 1998) penelitian studi kasus adalah sebuah eksplorasi dari *“suatu system yang terikat”* atau *“suatu kasus/beragam kasus”* yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber yang *“kaya”* dalam suatu konteks. Menurut (Yin, 2003) penelitian studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas, dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan. Studi kasus lebih banyak berfokus pada atau berupaya menjawab pertanyaan *“how”* (bagaimana) dan *“why”* (mengapa), serta pada tingkatan tertentu juga menjawab pertanyaan *“what”* (apa/apakah), dalam kegiatan penelitian (Burhan Bungin, 2005).

Creswell memulai pemaparan studi kasus dengan gambar tentang kedudukan studi kasus dalam lima tradisi penelitian kualitatif, yang ditunjukkan pada gambar 2.1 berikut.



**Gambar 2. 1** Kedudukan Studi Kasus

Dari gambar diatas dapat diungkapkan bahwa fokus penelitian studi kasus adalah spesifikasi kasus dalam suatu kejadian baik itu yang mencangkup individu, kelompok budaya ataupun suatu gambaran kehidupan. Lebih lanjut Creswell menjelaskan tentang karakteristik dari suatu studi kasus antara lain :

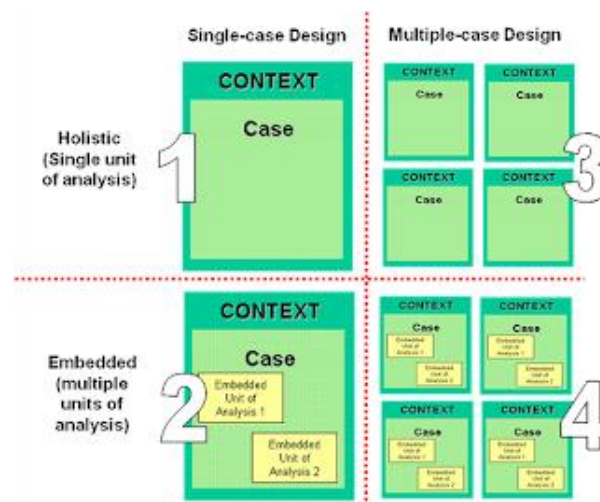
1. Mengidentifikasi kasus untuk suatu studi
2. Kasus tersebut merupakan sebuah system yang terikat oleh waktu dan tempat
3. Studi kasus menggunakan berbagai sumber informasi dalam mengumpulkan datanya untuk memberikan gambaran secara terinci dan mendalam tentang respon dari suatu peristiwa
4. Peneliti akan menghabiskan banyak waktu dalam menggambarkan konteks atau setting untuk suatu kasus.

Selanjutnya Creswell mengatakan bahwa apabila ingin memilih studi kasus untuk sebuah kasus, dapat dilihat dari beberapa program studi atau sebuah program studi dengan menggunakan berbagai sumber informasi meliputi observasi, wawancara, materi audio-visual, dokumentasi dan laporan.

Buku (Yin, 2003) membagi penelitian studi kasus secara umum menjadi 2 (dua) jenis, yaitu penelitian studi kasus dengan menggunakan kasus tunggal dan

jamak/ banyak. Disamping itu, ia juga mengelompokkannya berdasarkan jumlah unit analisisnya, yaitu penelitian studi kasus holistik (*holistic*) yang menggunakan satu unit analisis dan penelitian studi kasus terpancang (*embedded*) yang menggunakan beberapa atau banyak unit analisis. Penelitian studi kasus disebut terpancang (*embedded*), karena terikat (*terpancang*) pada unit-unit analisisnya yang telah ditentukan. Unit analisis itu sendiri dibutuhkan untuk lebih memfokuskan penelitian pada maksud dan tujuannya. Penentuan unit analisis ditentukan melalui kajian teori. Sementara itu, pada penelitian studi kasus holistik, penelitian dilakukan lebih bebas dan terfokus pada kasus yang diteliti dan tidak terikat pada unit analisis, karena unit analisisnya menyatu dalam kasusnya itu sendiri.

Jika dikaitkan antara kedua cara pengelompokkan tersebut, maka jenis-jenis penelitian studi kasus dapat disusun ke dalam suatu matriks 2 x 2. Menurut (Yin, 2003), penelitian studi kasus dapat terdiri dari 4 (empat) jenis. Untuk lebih jelasnya, hubungan antar kedua pengelompokkan tersebut, dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut.



**Gambar 2. 2** Jenis-Jenis Penelitian Studi Kasus (Yin, 2003)

Dari gambar dapat dilihat bahwa terdapat 4 jenis penelitian studi kasus yaitu :

1. Penelitian Studi Kasus Tunggal *Holistik* (Jenis 1 dan 2)

Penelitian studi kasus tunggal holistik (*holistic single-case study*) adalah penelitian yang menempatkan sebuah kasus sebagai fokus dari penelitian. Buku (Yin, 2003) menjelaskan bahwa terdapat 5 (lima) alasan untuk menggunakan

hanya satu kasus di dalam penelitian studi kasus, yaitu: a) Kasus yang dipilih mampu menjadi bukti dari teori yang telah dibangun dengan baik. Teori yang dibangun memiliki proposisi yang jelas, yang sesuai dengan kasus tunggal yang dipilih sehingga dapat dipergunakan untuk membuktikan kebenarannya. b) Kasus yang dipilih merupakan kasus yang ekstrim atau unik. Kasus tersebut dapat berupa keadaan, kejadian, program atau kegiatan yang jarang terjadi, dan bahkan mungkin satu-satunya di dunia, sehingga layak untuk diteliti sebagai suatu kasus. c) Kasus yang dipilih merupakan kasus tipikal atau perwakilan dari kasus lain yang sama. Pada dasarnya, terdapat banyak kasus yang sama dengan kasus yang dipilih, tetapi dengan maksud untuk lebih menghemat waktu dan biaya, penelitian dapat dilakukan hanya pada satu kasus saja, yang dipandang mampu menjadi representatif dari kasus lainnya. d) Kasus dipilih karena merupakan kesempatan khusus bagi penelitiannya. Kesempatan tersebut merupakan jalan yang memungkinkan peneliti untuk dapat meneliti kasus tersebut. Tanpa adanya kesempatan tersebut, peneliti mungkin tidak memiliki akses untuk melakukan penelitian terhadap kasus tersebut. e) Kasus dipilih karena bersifat longitudinal, yaitu terjadi dalam dua atau lebih pada waktu yang berlainan. Kasus yang demikian sangat tepat untuk penelitian yang dimaksudkan untuk membuktikan terjadinya perubahan pada suatu kasus akibat berjalannya waktu.

Sementara itu, perbedaan antara penelitian studi kasus holistik (jenis 1) dan terpancang (jenis 2) adalah pada jumlah unit analisis yang digunakan. Pada jenis yang pertama, jumlah unit analisis yang digunakan pada umumnya hanya satu atau bahkan sama sekali unit analisisnya tidak dapat dijelaskan, karena terintegrasi dengan kasusnya. Sedangkan jenis yang kedua, penelitian studi kasus terpancang memiliki unit analisis lebih dari satu. Hal ini dapat terjadi karena didasari oleh hasil kajian teori yang menuntut adanya lebih dari satu unit analisis.

## 2. Penelitian Studi Kasus Jamak (Jenis 3 dan 4)

Pada dasarnya, penelitian studi kasus jamak adalah penelitian yang menggunakan lebih dari satu kasus. Penggunaan jumlah kasus lebih dari satu pada penelitian studi kasus pada umumnya dilakukan untuk mendapatkan data

yang lebih detail, sehingga diskripsi hasil penelitian menjadi semakin jelas dan terperinci. Hal ini juga didorong oleh keinginan untuk mengeneralisasi konsep atau teori yang dihasilkan. Dengan kata lain, penggunaan jumlah kasus yang banyak dimaksudkan untuk menutupi kelemahan yang terdapat pada penggunaan kasus tunggal, yang dianggap tidak dapat digeneralisasikan.

Di dalam penelitian studi kasus jamak, (Yin, 2003) menyarankan menggunakan logika replikasi sebagai pendekatan di dalam proses analisisnya. Pada proses ini, setiap kasus harus mengalami prosedur penelitian yang sama, hingga menghasilkan hasil penelitiannya masing-masing. Selanjutnya, hasil dari masing-masing penelitian di perbandingkan, untuk menentukan kesamaan dan perbedaannya. Hasilnya dipergunakan untuk menjelaskan pertanyaan penelitian pada umumnya dan khususnya pencapaian atas maksud dan tujuan penelitian.

#### 2.1.4.3 Analisis Data Penelitian Kualitatif

Tahapan analisis data penelitian kualitatif merupakan rangkaian tahapan yang dilalui oleh peneliti mulai dari analisis data sebelum di lapangan hingga akhir menghasilkan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan 3 tahap analisis data yaitu terdiri dari analisis saat pengumpulan data, analisis setelah pengumpulan data, dan terakhir adalah analisis data studi kasus.

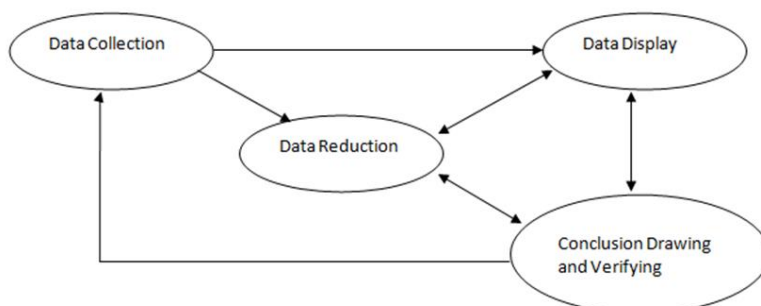
##### **A. Analisis Pengumpulan Data**

Terkait analisis pengumpulan data dilapangan, ada tiga prinsip yg harus diperhatikan dalam mengumpulkan data studi kasus (Yin, 2003):

- a. Penggunaan sumber bukti-bukti dari dua atau lebih sumber, tetapi menyatu dengan serangkaian fakta atau temuan yg sama.
- b. Penggunaan data dasar dan kumpulan formal bukti yg berlainan dari laporan akhir studi kasus yg bersangkutan.
- c. Penggunaan serangkaian bukti dan keterkatitan eksplisit antara pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, data yg terkumpul dan konklusi yang ditarik.

##### **B. Analisis Setelah Pengumpulan Data**

Untuk tahapan analisis data setelah pengumpulan data, peneliti merujuk pada siklus interaktif proses analisis data penelitian kualitatif menurut (Miles & Huberman, 1994) seperti pada bagan 2.3 dibawah ini.



**Gambar 2. 3** Interaktif Proses Analisis Data Penelitian Kualitatif

Pada gambar 2.3 diatas merupakan proses analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data ditempatkan sebagai komponen yang merupakan bagian dari kegiatan analisis data. Pada pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara, pengamatan dokumen, dan pengamatan aktivitas langsung untuk mendapatkan konsep, kategori bahkan teori.

Hasil dari pengumpulan data (data collection) perlu direduksi (data reduction) yaitu dengan cara diedit, diberi kode, dan dibuatkan tabel. Dengan mereduksi data, peneliti membuat ikhtisar hasil pengumpulan data selengkap mungkin, dan kemudian memilah-milah ke dalam satuan konsep, kategori, dan tema tertentu. Hasil reduksi data selanjutnya diorganisir ke dalam bentuk sajian tertentu (data display) sehingga akan terlihat secara utuh. Cara penyajian data dapat berbentuk diagram, alur, matriks atau bentuk-bentuk lain. Dengan sajian data yang sedemikian rupa maka akan memudahkan dalam pemaparan dan penegasan simpulan (conclusion drawing and verifying).

Sesuai dengan gambar siklusnya, proses analisis tidak langsung sekali jadi, melainkan dilakukan berulang-ulang hingga dirasa cukup menghasilkan kesimpulan yang akurat. Misalnya, selain dari mengumpulkan data kemudian mereduksi data, dapat juga dari mengumpulkan data kemudian memaparkan data baru kemudian mereduksi data. Setelah mereduksi data kembali memaparkan data, dari pemaparan data baru membuat simpulan namun tidak langsung jadi. Proses dapat kembali ke pemaparan data bahkan pengumpulan data kembali

untuk menambah perbendaharaan informasi yang mungkin dirasa kurang cukup kuat.

### **C. Analisis Data Studi Kasus**

Pada penelitian ini, peneliti juga menggunakan teknik analisis data studi kasus. Teknik analisis data studi kasus dilakukan setelah pengumpulan data dilakukan, disamping melakukan analisis data mengacu pada (Miles & Huberman, 1994), peneliti juga melakukan analisis data studi kasus mengacu pada (Yin, 2003). Tiga (3) teknik analisis studi kasus menurut (Yin, 2003) antara lain:

#### **1. Menjodohkan Pola**

Penjodohan pola dilakukan dengan membandingkan pola yang didasarkan atas data di lapangan dan pola yang didasarkan atas kajian teori sebelum pengumpulan data. Jika keduanya terjadi kesamaan, maka hasilnya akan menguatkan validitas internal studi kasus.

#### **2. Membuat Eksplanasi**

Tujuan pembuatan eksplanasi yaitu untuk membuat kejelasan kasus yang sedang diteliti. Pembuatan eksplanasi dilakukan dengan cara :

A. Membuat penjelsan naratif secara berurutan dari pertama sampai dengan akhir.

B. Serangkaian pengulangan eksplanasi yang dilakukan dengan:

- Membuat suatu pernyataan teoritis atau proposisi awal
- Membandingkan temuan kasus awal dengan pernyataan prososisi awal
- Memperbaiki pernyataan teoritis atau proposisi
- Membandingkan temuan kasus lebih lanjut untuk memperbaiki proposisi
- Memperbaiki kembali proposisi
- Begitu seterusnya hingga temuan-temuan telah ditemukan secara lengkap dan dirasa cukup oleh peneliti.

#### **3. Analisis Deret Waktu**

Analisis deret waktu ini dilakukan dengan mengikuti pola prosedural suatu tindakan. Deret waktu dapat terjadi dengan berpasangan antara

kecenderungan butir-butir dibandingkan dengan kecenderungan teoritis. Pada penelitian ini akan digunakan jenis deret waktu sederhana, karena penelitian ini menggunakan studi kasus tunggal yang hanya melibatkan fenomena tunggal saja.

#### 2.1.4.4 Pengecekan Keabsahan Data Kualitatif

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2008). Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, credibility, transferability, dependability, dan confirmability (Sugiyono, 2007). Dalam pengujian keabsahan penelitian kualitatif menggunakan istilah yg berbeda dengan penelitian kuantitatif. Perbedaan tersebut dirangkum dalam table 2.2 berikut ini.

**Tabel 2. 1** Perbedaan Metode Kualitatif dan Kuantitatif

<b>Aspek</b>	<b>Metode Kualitatif</b>	<b>Metode Kuantitatif</b>
Nilai Kebenaran	Validasi Internal	Kreadibilitas
Penerapan	Validasi Eksternal (generalisasi)	Transferability
Konsistensi	Reliabilitas	Auditability, Dependability
Natralitas	Objektivitas	Confirmability

Sugiyono menjelaskan secara rinci uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif sebagai berikut :

#### 1. Uji Kredibilitas

Uji credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

##### 1.1 Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/ kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan,



melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap.

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

## 1.2 Meningkatkan Kecermatan dalam Penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum.

Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

## 1.3 Triangulasi

William Wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono, 2007).

### 1) Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh

peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data (Sugiyono, 2007).

## 2) Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar (Sugiyono, 2007).

## 3) Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiyono, 2007).

### 1.4 Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya (Sugiyono, 2007).

### 1.5 Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya (Sugiyono, 2007).

### 1.6 Mengadakan *Membercheck*

Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan membercheck adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam

penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan (Sugiyono, 2007).

## 2. Uji *Transferability*

*Transferability* merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil (Sugiyono, 2007). Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan

## 3. Uji *Dependability*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan

## 4. Uji *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan,

maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability. Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

## 2.2 Kajian Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian sebelumnya ini digunakan sebagai referensi dan acuan. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang telah di review oleh peneliti.

**Tabel 2. 2** Penelitian Terdahulu Ke 1

<i>From E-Government to T-Government: A Malaysian Citizens' Readiness Study</i>	
Penulis	Montgomery Van Wart, Alexandru Roman, XiaoHu Wang , Cheol Liu
Tahun	2017
Research Question	Apakah Malaysia siap untuk mengubah administrasi dan proses back office mereka untuk mendorong bentuk pemerintahan yang lebih terbuka dan transparan (T-Government)? ”
Anotasi	Salah satu indikator utama dalam menjawab pertanyaan ini adalah untuk melihat tingkat adopsi layanan <i>e-government</i> saat ini di Malaysia untuk menentukan kesiapan warga negara Malaysia terhadap implementasi T-Government. Penelitian ini telah melakukan penyelidikan empiris untuk menjawab pertanyaan sebagai bagian dari penelitian yang lebih besar untuk menentukan persyaratan yang berpusat pada warga negara dalam <i>T-Government</i> . Makalah ini membahas tentang evolusi model <i>e-government</i> yang dikumpulkan menggunakan tinjauan literatur sementara konsep pemerintah transformasional dan perbedaannya dengan <i>e-government</i> diperkenalkan pada bagian ketiga. Latar belakang implementasi <i>e-government</i> Malaysia diuraikan di bagian keempat untuk mendapatkan pemahaman dasar dari

	konteks penelitian. Kemudian, metode penelitian akan dibahas, diikuti oleh analisis hasilnya. Bagian diskusi menyoroti pengamatan kami tentang skenario dan bagian kesimpulan meringkas poin-poin kunci dari makalah ini.
Hasil Penelitian	Hasil analisis mengungkapkan dua temuan penting. Temuan pertama adalah bahwa ada persentase penggunaan layanan e-government yang tinggi di antara pengguna internet Malaysia. Temuan kedua mengungkapkan bahwa penggunaan yang tinggi dikaitkan dengan persepsi positif terhadap e-partisipasi. Temuan-temuan ini telah memberikan bukti awal untuk pekerjaan masa depan dari persyaratan yang berpusat pada warga negara untuk layanan T-Government.

**Tabel 2. 3** Penelitain Terdahulu Ke 2

<i>An Explorative Review Of E-Leadership Studies</i>	
Penulis	Oh Siew Peia, Chua Yan Piawa
Tahun	2018
Research Question	Bagaimana hasil eksplorasi bidang kepemimpinan pendidikan dan inovasi teknologi Pendidikan berdasarkan studi literature?
Anotasi	Untuk memahami sejauh mana e-leadership dibahas, analisis isi pada makalah konferensi yang dipilih, bab buku, tesis dan jurnal profesional yang mencakup antara tahun 2000 hingga 2016 telah dilakukan. Ulasan literatur yang luas menemukan total 45 artikel terutama pada e-leadership, kepemimpinan virtual, tim virtual terkemuka, kepemimpinan ICT sekolah dan e-leader di bidang pendidikan dan non-pendidikan. Artikel-artikel ini berfokus pada enam tema utama e-leadership, yaitu tantangan, gaya kepemimpinan, pengembangan kepercayaan, pelatihan dan pengembangan, budaya, keterampilan dan panduan e-leader.

Hasil Penelitian	Temuan menunjukkan bahwa studi empiris tentang e-kepemimpinan langka dan lebih banyak studi di bidang ini perlu dilakukan di era digital. Selain itu, model yang diusulkan efektivitas e-kepemimpinan dan variabel yang terkait dengan e-kepemimpinan termasuk dalam makalah ini. Selanjutnya, mata rantai yang hilang untuk studi selanjutnya dibahas.
------------------	---

**Tabel 2. 4** Penelitian Terdahulu Ke 3

<i>e-Government Implementation and Leadership – the Brunei Case Study</i>	
Penulis	Hazri Kifle and Patrick Low Kim Cheng
Tahun	2009
Research Question	Bagaimana implementasi e-government dan e-leadership pada studi kasus di Brunei?
Anotasi	Implementasi banyak proyek e-government, bagaimanapun, tampaknya telah gagal mencapai potensi penuhnya karena sifat kompleks dari e-government. Sekarang disadari bahwa difusi TIK lebih dari sekedar adopsi dan adaptasi teknologi. Ada banyak masalah lunak terutama yang berhubungan dengan sisi manusia dari implementasi teknologi. Makalah ini membahas faktor inti kepemimpinan, yang menurut temuan dari makalah ini, adalah sangat penting untuk keberhasilan implementasi e-government. Proses implementasi e-government di Brunei pertama kali dibahas dan kemudian dianalisis dari perspektif kepemimpinan. Studi kasus tentang pengalaman penerapan proyek e-government di semua kementerian di Brunei telah dilakukan. Wawancara dengan pemain kunci dari masing-masing kementerian juga dilakukan.
Hasil Penelitian	Makalah ini menunjukkan bahwa identifikasi buruk seorang juara dalam e-government mengakibatkan inersia dalam memulai e-government, silo (kompartementalisasi) antara instansi pemerintah, duplikasi proyek, strategi manajemen

	<p>perubahan yang buruk, kurangnya insentif untuk mengambil risiko, dan munculnya peringkat dan file daripada pendekatan inovasi top-down. Beberapa poin pembelajaran utama tentang kepemimpinan telah diusulkan dalam makalah ini berkaitan dengan semua masalah kepemimpinan yang diidentifikasi dalam menerapkan <i>e-government</i>.</p>
--	--

**Tabel 2. 5** Penelitain Terdahulu Ke 4

<i>E-Leadership In Virtual Workforce</i>	
Penulis	James A. Ejiwale
Tahun	2008
Research Question	Bagaimanakah pentingnya komunikasi yang efektif sebagai alat yang diperlukan untuk keberhasilan e-leadership dalam lingkungan kerja virtual.?
Anotasi	Di pasar saat ini, perusahaan semakin beralih ke tenaga kerja virtual untuk menyelesaikan pekerjaan. Mengingat manfaat konektivitas dan berbagi informasi yang efektif di antara para pemangku kepentingan, banyak industri terus mencari penerapan dan penerapannya. Oleh karena itu, keberhasilan kerja koordinasi di antara tenaga kerja virtual tergantung pada komunikasi tidak langsung efektif antara kepemimpinan dan tenaga kerja virtual.
Hasil Penelitian	Peningkatan efisiensi pekerja virtual tidak hanya menghasilkan peningkatan produktivitas, tetapi juga menambah fleksibilitas kerja virtual. Namun, jika tenaga kerja ini tidak dikelola dengan baik, implementasinya mungkin merupakan pemborosan daripada memenuhi hasil yang diantisipasi dari peningkatan produktivitas. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendidik lulusan program dengan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola dan mengatasi banyak kesulitan yang biasanya dihadapi dalam pengaturan virtual.

*(Halaman sengaja dikosongkan)*



## **BAB 3**

### **KERANGKA KONSEPTUAL**

Pada bab ini akan membahas mengenai kerangka konseptual yang meliputi konseptual model, domain penelitian, dan proposisi.

#### **3.1 Konseptual Model**

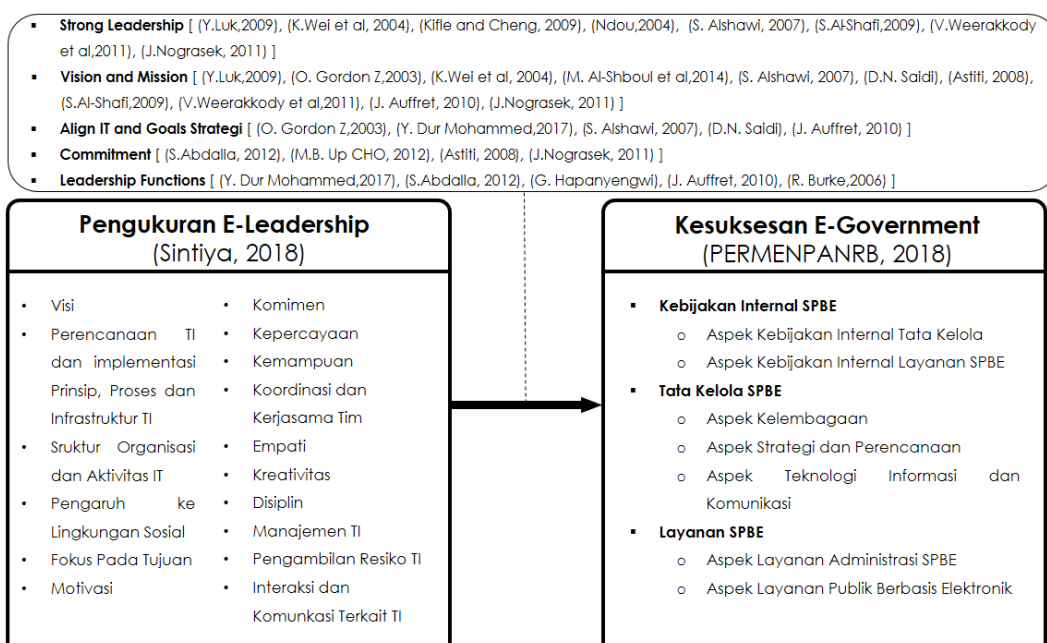
Dalam penelitian ini, peneliti mengembangkan sebuah model yang akan dijelaskan sebagai kerangka konseptual. Kerangka konseptual disusun untuk dijadikan dasar acuan yang berisi kajian teori dan penelitian terdahulu yang memunculkan sebuah permasalahan yang dapat dikaji lebih lanjut melalui penelitian ini.

Penelitian ini berfokus pada analisis hubungan antara e-leadership yang dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi penyelenggaraan e-government (Kifle & Cheng, 2009),(Ke & Wei, 2004),(Jr & Hapanyengwi, n.d.),(Luk, 2009),(Astuti, 2008),(Prybutok, Zhang, & Ryan, 2008).

Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh seorang pemimpin terhadap pemerintah daerah yang dipimpinnya, penelitian ini menggunakan 18 indikator yang telah diolah dari beberapa sumber, antara lain visi, perencanaan IT dan implementasi prinsip proses dan infrastruktur IT, struktur organisasi dan aktifitas IT, pengaruh ke lingkungan sosial, fokus pada tujuan, motivasi, komitmen, kepercayaan, kemampuan, koordinasi dan kejasama tim, empati, kreativitas, disiplin, manajemen IT, pengambilan resiko IT dan interaksi dan komunikasi terkait IT. Selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana kesuksesan penyelenggaraan e-government menggunakan Peraturan Menteri No 5 Tahun 2018 yang menggunakan indikator kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE dan Layanan SPBE.

Model konseptual ini disusun berdasarkan dengan beberapa teori dan konsep yang dijadikan acuan dalam penelitian ini yaitu: *From E-Government to T-Government: A Malaysian Citizens' Readiness Study* oleh Kamalia A. Kamaruddin dan Nor L. Md Noor (2017); *An Explorative Review Of E-Leadership Studies* oleh Oh Siew Peia dan Chua Yan Piawa (2018); *Using E-Leadership as a Strategic Tool in Enhancing Organizational Commitment of Virtual Teams in Foreign*

*Commercial Banks in North West Bank -Palestine* oleh Raed A. M. Iriqat dan Dana M. S. Khalaf (2017); *Successful E-Government in Singapore* oleh Weiling Ke dan Kwok Kee Wei (2004); *E-government in the Asia-Pacific region: Progress and Challenges* oleh Clay G. Wescott (2015); *E-Government - Exploring the Different Dimensions Of Challenges, Implementation, and Success Factors* oleh Alok Mishra dan Deepti Mishra (2011); *E-Government Implementation and Leadership – the Brunei Case Study* oleh Hazri Kifle and Patrick Low Kim Cheng (2009) sebagai berikut.



**Gambar 3. 1** Konseptual Model Penelitian

Konsep dasar yang digunakan pada penelitian ini mengadopsi framework daro paper berjudul *A Leadership Model for e-Government Transformation* oleh Elnaghi dan Alshawi (2007) dan dikembangkan dari literature yang telah disebutkan sebelumnya. Framework ini disusun sebagai acuan utama sebagai pengukuran dari sebuah e-leadership yang berpengaruh terhadap kesuksesan dari penerapan pada e-government. *E-leadership* didefinisikan sebagai sistem dinamis yang kuat yang tertanam dalam sistem organisasi yang lebih besar (Avolio & Kahai, 2003). Salah satu elemen terpenting dari E-leadership adalah tim virtual. Penelitian yang dilakukan oleh (Zigurs, 2003) menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam tim virtual dikomunikasikan melalui teknologi, yang berarti *e-leader* harus mengetahui

bagaimana menggunakan TIK dalam cara yang berarti. Bishop et al., (2010) menunjukkan bahwa kesalahpahaman antara e-leader dan tim virtualnya sering disebabkan oleh kurangnya informasi. E-leadership sebagai proses pengaruh sosial yang dimediasi oleh teknologi informasi lanjutan untuk menghasilkan perubahan dalam sikap, perasaan, pemikiran, perilaku, dan/atau kinerja dengan individu, kelompok, dan/atau organisasi. Kepemimpinan-E dapat terjadi pada tingkat hierarkis apa pun dalam suatu organisasi dan dapat melibatkan interaksi satu-ke-satu dan satu-ke-banyak di dalam dan di seluruh unit dan organisasi besar. Ini mungkin terkait dengan satu individu atau dibagi oleh beberapa individu sebagai lokusnya berubah dari waktu ke waktu.

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara organisasi menjalankan mereka tugas mereka. Akibatnya organisasi baru membentuk organisasi virtual atau jaringan organisasi muncul mendorong adanya e-leadership (Mohammad, n.d.). Keberhasilan menerapkan e-government sepenuhnya membutuhkan adopsi yang teliti dan penuh pemahaman tentang teknologi yang sedang diterapkan. Moore (1999) dimulai dengan difusi teori inovasi dari Everett Rogers, dan berpendapat ada jurang antara pengadopsi awal dari produk teknologi (penggemar teknologi dan visioner) dan mayoritas awal (yang pragmatis). Moore percaya bahwa para visioner dan pragmatis memiliki harapan yang sangat berbeda. Selanjutnya, ia mencoba untuk mengeksplorasi perbedaan-perbedaan itu dan menyarankan teknik untuk berhasil menyeberangi "jurang." Ini bisa diterapkan pada adopsi pemerintah teknologi dalam pencariannya untuk e-government.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, kepemimpinan yang kuat dapat mempercepat proses implementasi e-government, mempromosikan koordinasi di dalam dan di antara agensi dan membantu memperkuat tujuan tata kelola yang baik. Fakta bahwa *e-government* memiliki banyak dimensi adalah masalah yang rumit. Setiap dimensi menuntut kepemimpinan, strategi, koordinasi silang, dan pengetahuan yang kuat, semua dikombinasikan dengan strategi teknologi untuk mewujudkan visi ke realitas. Dengan sasaran untuk memfasilitasi keterlibatan yang lebih mudah, kurang waktu dan lebih interaktif dengan departemen pemerintah, dan menjadikan bisnis lebih efektif dan efisien melalui penggunaan teknologi, para

*pemimpin e-government* memulai berbagai inisiatif *e-government*. Berikut ini adalah beberapa alasannya, untuk menyebutkan beberapa, mengapa ada kebutuhan untuk gaya kepemimpinan visioner yang baru:

- Tugasnya kompleks;  
Kesadaran teknologi baru, Mengatasi Hambatan, Perubahan Organisasi
- Transformasi sangat mahal;  
Alokasi anggaran, Pengembangan Sistem dan manajemen, Perubahan Infrastruktur
- Membutuhkan komitmen jangka panjang; dan  
Faktor risiko, Perubahan Teknologi
- Ini juga perlu memiliki pemahaman tentang seluruh strategi pemerintah  
Merumuskan strategi baru, Kesadaran tentang hambatan dan kebijakan lintas batas.

Kepemimpinan, seperti yang umumnya dipahami, berfokus pada pencapaian misi dan tujuan organisasi tertentu. Kinerja pemimpin organisasi diukur dengan pengiriman produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Akhirnya, teknologi yang mendukung e-leadership dan tim virtual (DasGupta, 2011). Perubahan bentuk organisasi baru ke organisasi virtual dan lingkungan kerja baru yang mengharuskan adanya keahlian kepemimpinan baru adalah e-leadership. Keahlian baru tersebut dijelaskan dalam teori *Current IT Leadership Skills* oleh Lutchens (2004) terdapat lima keahlian seorang IT Leadership yaitu keahlian bisnis, keahlian dalam teknologi, keahlian manajemen kepemimpinan, keahlian berorganisasi dan berbudaya, serta keahlian manajemen keuangan. Lalu keahlian selanjutnya dalam *IT leadership focus model* oleh (Urff Kaufeld, Chari, & Freeme, 2009) yang menyatakan pemimpin harus fokus pada tiga kunci fokus area yaitu keahlian tim (komunikasi, kerja tim, kepercayaan, dukungan), keahlian individual (keahlian teknis, kekuasaan, pengetahuan bisnis, manajemen perubahan) dan ambisi (visi dan misi, manajemen risiko, dan minat). Tiga fokus itu dijalankan dalam tingkat bisnis operasional, taktikal, dan strategi. Menurut (Van Wart, Roman, Wang, & Liu, 2017b) terdapat enam keahlian e-leadership: *e-communication*, *e-social skills*, *e-team building skills*, *e-change management*, *e-technological skills*,

*and e-trustworthiness*. Selain itu dalam *Specific Abilities and Characteristics in e-Leadership* oleh (Samartinho, Resende da Silva, & Alves de Faria, 2015) terdapat keahlian dan karakter *e-leadership*: kontrol lingkungan, perubahan, komunikasi, kontrol tim, hubungan kepercayaan, pembentukan tim multifungsi, manajemen berbagi pengetahuan, motivasi, kemampuan kepemimpinan, kemampuan digital, infrastruktur dan arsitektur teknologi, pandangan kedepan, manajemen group dinamis dalam lingkungan kompleks, gaya kepemimpinan, lingkungan multi budaya, dukungan teknis manusia, dan *training*. Instrumen pengukuran yang menyesuaikan dengan cara pengukuran *transformational leadership* oleh (Avolio & Kahai, 2003) sehingga akan dihasilkan model pengukuran e-leadership dalam e-government yang terstruktur dan sesuai dengan kinerja pemerintahan daerah kota/kabupaten di Indonesia.

Upaya pemerintah khususnya di Indonesia untuk mendukung kesuksesan penyelenggaraan e-government diwujudkan dengan keluarnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018. Dalam peraturan tersebut dijelaskan pedoman evaluasi system pemerintahan berbasis elektronik. Peraturan ini dibuat untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan perlu diadakanya evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Dalam pedoman tersebut dijelaskan evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan nilai indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE. Pedoman evaluasi mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil dari evaluasi SPBE. Tujuan dilakukannya evaluasi SPBE adalah untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan SPBE dan menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tingkat kematangan SPBE merupakan kerangka kerja yang mengukur derajat pengembangan SPBE ditinjau dari tahapan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan mengarahkan pengembangan SPBE pada keluaran dan

dampak yang lebih baik. Tingkat kematangan yang rendah menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang rendah pula, sedangkan tingkat kematangan yang tinggi menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang tinggi. Metode tingkat kematangan pada evaluasi SPBE dikembangkan berdasarkan model tingkat kematangan dari 1) CMM/CMMI (*Capability Maturity Model/CMM Integration*) yang dibangun oleh Software Engineering Institute (SEI) merupakan model yang mengukur tingkat kematangan proses pengembangan piranti lunak. Model ini menjadi dasar pengembangan berbagai model kematangan lain seperti tingkat kematangan tata kelola TIK pada COBIT, Arsitektur TIK (*Enterprise Architecture Maturity Model*), manajemen resiko (*Risk Maturity Model*) dan manajemen pengetahuan (*Maturity Model for Knowledge Management*). 2) *E-Government Maturity Model* merupakan model tingkat kematangan yang mengukur evolusi SPBE dari aspek fungsionalitas dan kapabilitas teknis yang dikembangkan oleh banyak pihak antara lain Layne dan lee (2001), Andersen dan Hendriksen (2006), Kim dan Grant (2010), dan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada *UN e-Government Survey* (2012) dalam (PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA et al., 2018).

Tingkat kematangan pada kapabilitas proses terdiri dari lima tingkat yaitu rintisan, terkelola, terstandardisasi, terintegrasi dan terukur, optimum. Sedangkan tingkat kematangan pada kapabilitas fungsi teknis terdiri lima tingkat yaitu informasi, interaksi, transaksi, kolaborasi, dan optimalisasi. Setiap tingkat (level) memiliki karakteristik masing-masing yang dapat secara jelas membedakan antara tingkat satu dengan tingkat yang lain. Karakteristik pada tingkat (level) yang lebih tinggi mencakup karakteristik pada tingkat (level) yang lebih rendah. Dengan mengetahui nilai e-leadership dan nilai kematangan kesuksesan e-government penelitian ini dapat mengeksplorasi hubungan antara e-leadership dengan kesuksesan penyelenggaraan e-government pemerintahan daerah kota/kabupaten di Indonesia.

### **3.2 Domain Penelitian**

Terdapat 2 domain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Domain E-Leadership

Domain ini digunakan untuk mengetahui sejauhmana pencapaian seorang pemimpin (kepala daerah) dalam peranya mewujudkan e-government yang sukses di pemerintahan daerah yang diukur dari beberapa indikator.

## 2. Domain E-Government

Domain ini digunakan untuk mengetahui sejauhmana pencapaian pemerintah daerah mengimplementasikan e-government yang diukur melalui beberapa aspek.

### 3.2.1 E-Leadership

E-leadership dapat diartikan sebagai pemanfaatan teknologi dan informasi yang dilakukan oleh pemimpin dalam pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan dan strategi goalsnya. Menurut (DasGupta, 2011) menggambarkan e-leadership bukan hanya tentang perpanjangan kepemimpinan tetapi sebagai perubahan mendasar dalam cara pemimpin dan pengikut berhubungan satu sama lain dalam organisasi dan antar organisasi. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat e-leadership sebuah organisasi (pemerintah daerah), diperlukan beberapa indicator yang digunakan untuk mengukurnya seperti ditunjukkan pada table 3.1 berikut ini.

**Tabel 3. 1** Indikator Domain E-Leadership

<b>Indikator</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Referensi</b>
Visi	Visi dari pemerintah daerah yang berhubungan dengan IT.	(Sintiya, 2018)
Perencanaan TI dan Implementasi prinsip, proses, dan Insfrastruktur TI	Proses perancangan sampai pengimplementasian IT di pemerintahan daerah.	(Sintiya, 2018)
Struktur Organisasi dan Aktivitas TI	Sebuah organisasi atau badan yang bertugas untuk memonitoring aktivitas IT.	(Sintiya, 2018)

Pengaruh ke lingkungan sosial	Efek dari pemerintahan terhadap lingkungan sosial.	(Sintiya, 2018)
Fokus pada tujuan	Pengimplementasian IT harus fokus terhadap tujuan pemerintahan.	(Sintiya, 2018)
Motivasi	Seberapa besar dorongan pemimpin untuk mengarahkan bawahannya.	(Sintiya, 2018)
Komitmen	Upaya kepala daerah dalam mengawal pelaksanaan IT.	(Sintiya, 2018)
Kepercayaan	Tingkat keyakinan seorang kepala daerah terhadap tim kerjanya.	(Sintiya, 2018)
Kemampuan	Kompetensi yang dimiliki oleh kepala daerah atau pemimpin.	(Sintiya, 2018)
Koordinasi dan Kerjasama Tim	Upaya yang dilakukan pemimpin dengan stafnya untuk mewujudkan e-government yang baik.	(Sintiya, 2018)
Empati	Upaya kepala daerah terhadap tim kerja yang kurang dalam penerapan IT.	(Sintiya, 2018)
Kreativitas	Ide baru atau inovasi yang muncul dalam	(Sintiya, 2018)



	upaya meningkatkan pelayanan pemerintahan.	
Disiplin	Patuh dan berpegang teguh terhadap kebijakan-kebijakan IT yang telah dibuat.	(Sintiya, 2018)
Manajemen TI	Pengelolaan terhadap sumber daya IT oleh pemerintah daerah/pusat.	(Sintiya, 2018)
Pengambilan resiko terkait TI	Pengambilan resiko terhadap kebijakan-kebijakan IT yang diterapkan.	(Sintiya, 2018)
Interaksi dan komunikasi TI	Cara penyampaian ide IT seorang kepala daerah/pemimpin terhadap stafnya.	(Sintiya, 2018)

### 3.2.2 E-Government

*E-Government* dapat diartikan sebagai proses yang sedang dilakukan oleh pemerintah dalam menerapkan teknologi dan informasi dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan. United Nation Development Programme (UNDP) memberi definisi e-government secara singkat sebagai aplikasi teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah. Untuk mengetahui sejauhmana pengembangan e-government dalam rangka menuju kesuksesan e-government, diperlukan evaluasi kematangan yang dapat diukur, seperti pada table 3.2 berikut ini.

**Tabel 3. 2** Aspek Domain E-Government

Aspek	Definisi Operasional	Referensi
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	Kebijakan internal tata kelola SPBE meliputi kebijakan internal tim pengarah SPBE, inovasi proses bisnis, rencana induk	Peraturan Menteri PANRB

	SPBE, anggaran dan belanja TIK, pengoperasian pusat data, integrasi system informasi, dan penggunaan aplikasi umum	Nomor 5 Tahun 2018.
Kebijakan Internal Layanan SPBE	Kebijakan internal layanan SPBE meliputi kebijakan internal layanan naskah dinas, manajemen pegawai, manajemen perencanaan dan penganggaran, manajemen keuangan, manajemen kinerja, pengadaan, pengaduan public, dokumentasi dan informasi hukum, <i>whistle blowing system</i> dan public instansi pemerintah	Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018.
Kelembagaan	Kelembagaan meliputi tim pengarah SPBE instansi pemerintah dan inovasi proses bisnis terintegrasi.	Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018.
Strategi dan Perencanaan	Strategi dan perencanaan meliputi rencana induk SPBE instansi pemerintah dan anggaran dan belanja TIK.	Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018.
Teknologi Informasi dan Komunikasi	Teknologi informasi dan komunikasi meliputi pengoperasian pusat data, integrasi system aplikasi dan penggunaan aplikasi umum	Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018.
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan naskah dinas, layanan manajemen kepegawaian, layanan manajemen perencanaan, layanan manajemen penganggaran,	Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018.

	layanan manajemen keuangan, layanan manajemen kinerja, dan layanan pengadaan.	
Layanan Publik Berbasis Elektronik	Layanan public berbasis elektronik meliputi layanan pengaduan public, layanan dokumentasi dan informasi hukum, layanan <i>whistle blowing system</i> , dan layanan public instansi pemerintah.	Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018.

### 3.3 Proposisi

Menurut KBBI Online (2018) Proposisi adalah rancangan usulan, ungkapan yang dapat dipercaya, disangsukan, disangkal atau dibuktikan benar-tidaknya. Proposisi didasarkan pada suatu alasan teoritis yang dijelaskan dalam kerangka teoritis atau landasan teori.

#### 3.3.1 Proposisi Minor

Proposisi minor merupakan suatu pernyataan atau dugaan yang didasarkan pada setiap indikator yang digunakan pada penelitian ini. Proposisi minor pada penelitian ini antara lain :

1. *Strong leadership* dapat mempengaruhi kesuksesan penyelenggaraan *e-government*.
2. Visi dan Misi leadership dapat mempengaruhi kesuksesan penyelenggaraan *e-government*.
3. *Align IT and Strategy Goals* dapat mempengaruhi kesuksesan penyelenggaraan *e-government*.
4. Komitmen dapat mempengaruhi kesuksesan penyelenggaraan *e-government*.
5. *Leadership functions* dapat mempengaruhi kesuksesan penyelenggaraan *e-government*.

### **3.3.2 Proposisi Mayor**

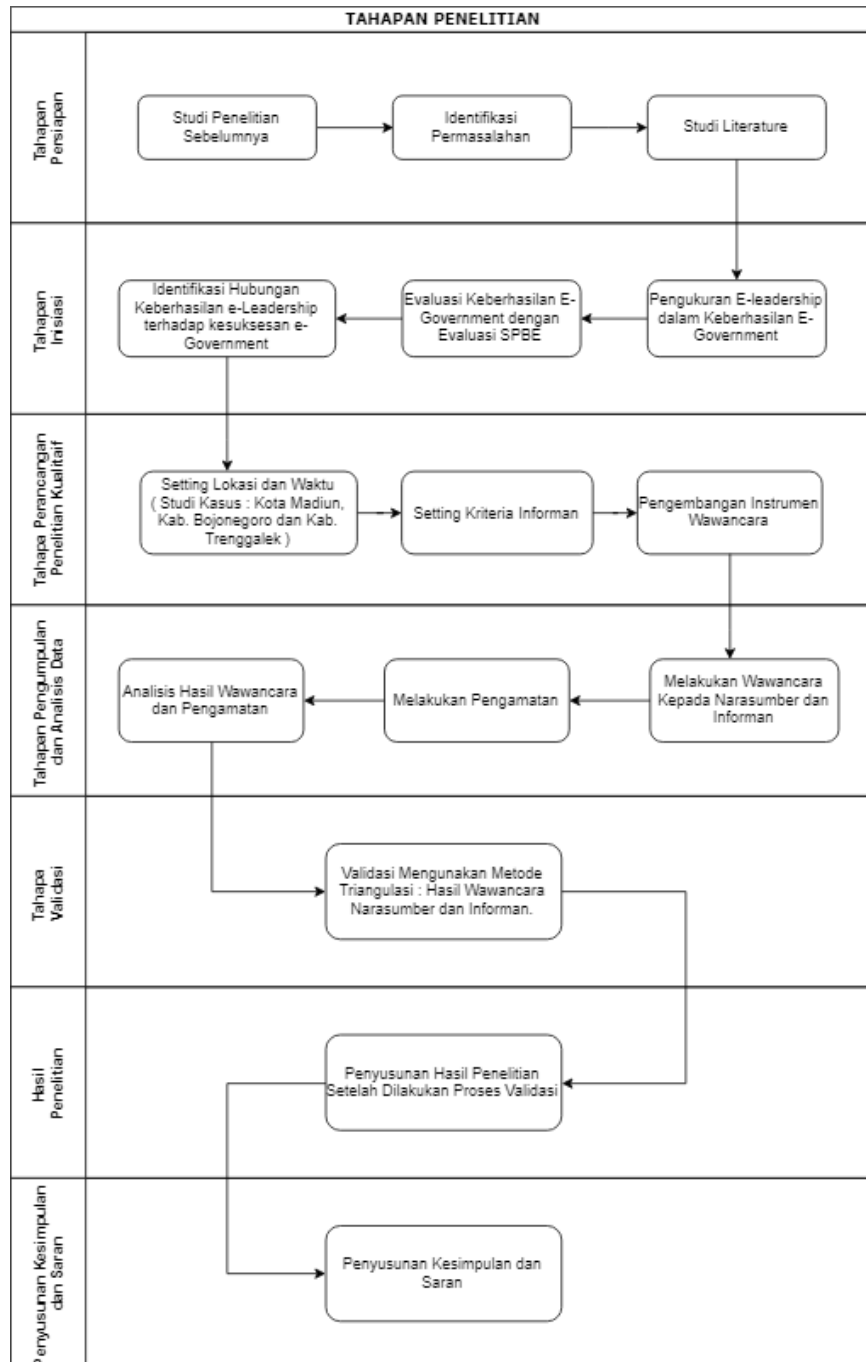
Proposisi mayor merupakan pernyataan secara umum berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari proposisi minor. Proposisi mayor pada penelitian ini adalah “Terdapat hubungan antara *e-leadership* terhadap kesuksesan penyelenggaraan *e-government* kota/kabupaten di Indonesia”.

## BAB 4

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 4.1 Tahapan Penelitian

Berikut ini merupakan tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini, seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.1 berikut.



**Gambar 4. 1** Tahapan Penelitian

## **4.1.1 Tahapan Persiapan**

### **4.1.1.1 Studi Penelitian Sebelumnya**

Langkah awal yang dilakukan untuk memulai sebuah riset adalah melakukan studi penelitian sebelumnya. Studi penelitian sebelumnya memiliki keterkaitan dengan faktor-faktor keberhasilan *e-leadership* dan *e-government*, yaitu penelitian mengenai *e-leadership*, *e-government*, dan manajemen teknologi informasi pada sektor pemerintahan.

### **4.1.1.2 Identifikasi Permasalahan**

Identifikasi permasalahan pada penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, dimana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara *e-leadership* terhadap kesuksesan penyelenggaraan *e-government* di kota/kabupaten di Indonesia. Tujuan dari pengidentifikasian masalah yaitu untuk menemukan research question penelitian yang telah dibahas pada bagian sebelumnya. Pengidentifikasian masalah ini didasarkan pada penelitian terdahulu dan diketemukannya celah yang menjadi penelitian selanjutnya.

### **4.1.1.3 Studi Literature**

Studi literature dalam penelitian ini bersumber dari buku, media pakar ataupun dari hasil penelitian orang lain. Pemahaman terhadap literature bertujuan untuk menyusun dasar teori terkait yang digunakan dalam melakukan penelitian. Studi literature dapat membantu peneliti mulai dari merumuskan permasalahan sampai penyusunan tesis.

## **4.1.2 Tahapan Inisiasi**

### **4.1.2.1 Pengukuran E-Leadership**

Implementasi pengukuran *e-leadership* dalam *e-government* dilakukan setelah didapatkan model yang valid sehingga dalam proses implemmentasi bisa diterapkan dengan benar dan sesuai dengan kondisi lingkungan objek penelitian yang telah diwakili oleh tiga tempat studi kasus. Input dari proses implemmentasi ini dari model yang sudah dibuat kemudian melihat lagi kondisi saat ini dari lingkungan perusahaan dan untuk memastikan kesesuaian dalam proses implementasi dibutuhkan validasi terlebih dahulu. Skala pengukuran yang

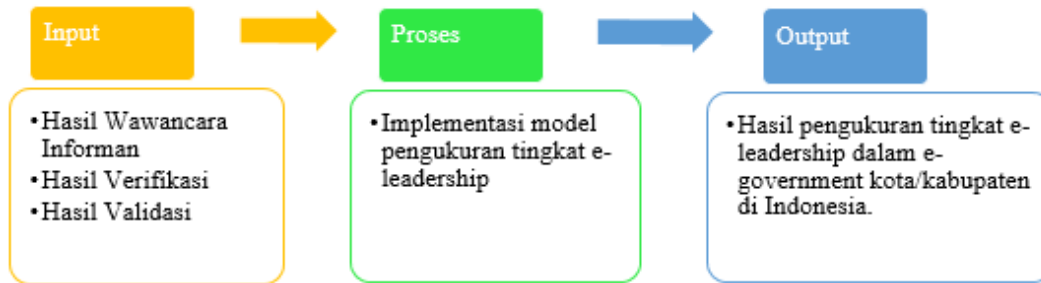
digunakan dalam penulisan ini menggunakan skala Linkert. Skala linkert menurut Sugiyono adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, sifat, pendapat atau persepsi seseorang tentang fenomena sosial. Skala yang digunakan untuk mengukur indikator dengan pilihan 1 bernilai sangat tidak setuju sampai nilai 5 untuk sangat setuju. Total bobot dilakukan dengan nilai rata-rata dan jawaban pertanyaan dikategorikan berdasarkan tingkat e-leadership dengan 5 level kepemimpinan menurut Maxwell (2011). Level tersebut dapat dilihat pada table 4.1 berikut ini.

**Tabel 4. 1** Level E-Leadership (Adopsi Maxwell,2011)

Level	Nama Level	Rentan Nilai	Keterangan
1	Position	0-1	<i>Right</i> – Orang mengikuti pemimpin karena memang seharusnya atau kerana jabatan. Semakin lama disini, semakin tinggi perputaran karyawan dan semakin rendah semangat juangnya
2	Permissiom	1,1 – 2	<i>Relationship</i> – Orang mengikuti pemimpin karena mereka ingin melakukan hal tersebut. Pekerjaan akan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Tapi semakin lama bertahan disini akan membuat orang bermotivasi tinggi menjadi gelisah.
3	Production	2,1 – 3	<i>Result</i> – Orang mau mengikuti pemimpin karena apa yang telah Anda lakukan untuk organisasi tersebut. Kesuksesan sudah bisa dirasakan oleh sebagian besar orang. Mereka menyukai anda dan apa yang anda lakukan.
4	People Development	3,1 -4	<i>Reproduction</i> – Orang mau mengikuti pemimpin karena apa yang telah anda lakukan untuk mereka. Pertumbuhan jangka panjang bagi organisasi dan manusia didalamnya.
5	Pinnacle	4,1 - 5	<i>Respect</i> – Orang mau mengikuti pemimpin karena tau siapa Anda dan apa yang Anda representasikan. Pemimpin menghasilkan

			orang yang mengangumkan setelah bertahun-tahun.
--	--	--	---

Selanjutnya hasil yang dikumpulkan akan dilakukan analisis. Analisis model pengukuran e-leadership dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut ini.



**Gambar 4. 2** Analisis Model Pengukuran *E-Leadership*

#### 4.1.2.1.1 Perangkat Pengukuran E-Leadership

##### **KUESIONER E-LEADERSHIP INSTANSI PEMERINTAHAN**

**Nama Instansi** :  
**Nama Pimpinan/ Kepala** :  
**Lama Bekerja** : Tahun  
**e-mail** :

Kuesioner E-Leadership Measurement , terdiri dari 70 pertanyaan yang memuat 17 indikator , yakni:

- I. Visi
- II. Perencanaan TI dan implementasi prinsip, proses, dan infrastruktur TI
- III. Struktur organisasi dan Aktivitas TI
- IV. Pengaruh ke lingkungan sosial
- V. Fokus pada Tujuan
- VI. Motivasi
- VII. Komitmen
- VIII. Kepercayaan
- IX. Kemampuan
- X. Koordinasi & Kerja-sama Tim
- XI. Empati
- XII. Kreativitas
- XIII. Disiplin
- XIV. Manajemen TI
- XV. Pengambilan Risiko terkait TI
- XVI. Interaksi dan Komunikasi terkait TI
- XVII. Kepemimpinan yang kuat.



## **PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER**

1. Pada halaman berikut ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu beberapa pernyataan yang menggambarkan persepsi, pengalaman, sikap dan perilaku individu kapasitas Bapak/Ibu sebagai pimpinan untuk dapat dipakai mengukur gaya kepemimpinan yang ideal dalam E-Leadership dalam E-Government.
2. Mohon untuk mengisi dan memilih alternative jawaban yang menurut Bapak/Ibu paling sesuai berdasarkan persepsi dan pengalaman kerja.
3. Untuk memberikan jawaban atas pernyataan dalam kuesioner ini disediakan alternative jawaban yang berskala Likert, pada Tabel berikut ini:

**Tabel 4. 2** Tabel Keterangan skala likert

Score	Kode	Keterangan
1	TP	Tidak pernah
2	J	Jarang
3	KK	Kadang-kadang
4	S	Sering
5	SS	Sangat sering

4. Interpretasi hasil total score pilihan Bapak / Ibu dapat di deskripsikan sebagai berikut:

**Tabel 4. 3** Deskripsi Kategori e-Leadership

Total	Keterangan
258-350	<p>Top E-Leadership</p> <p>E-Leadership Bapak / Ibu sudah sangat ideal dalam kesuksesan implementasi sistem E-Government.</p> <p>Kepemimpinan Bapak / Ibu sudah sangat ideal dalam penyelenggaraan sistem e-government. Aspek-aspek kepemimpinan Bapak/Ibu dalam menginisiasi, mengawal dan memastikan kesuksesan Teknologi Informasi dalam mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah/organisasi telah ideal.</p>
164-257	<p>Middle E-Leadership</p> <p>Gaya kepemimpinan Bapak / Ibu cukup baik untuk kesuksesan implementasi sistem E-Government.</p> <p>Kepemimpinan Bapak / Ibu pada prinsipnya dalam kategori cukup, sehingga masih perlu peningkatan optimal aspek-aspek kepemimpinan Bapak/Ibu dalam menginisiasi, mengawal dan memastikan kesuksesan Teknologi Informasi dalam mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah/organisasi.</p>
70-163	<p>Low E-Leadership</p> <p>Gaya kepemimpinan Bapak / Ibu masih perlu ditinjau ulang untuk kesuksesan implementasi sistem E-Government.</p> <p>Solusi introspeksi diri dari kepemimpinan Bapak / Ibu untuk meningkatkan aspek-aspek kepemimpinan Bapak/Ibu dalam menginisiasi, mengawal dan memastikan</p>

	kesuksesan Teknologi Informasi dalam mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah/organisasi. Perlu mendiagnosa kebutuhan aktual dari anggota organisasi dan perlu meng upgrade kemampuan dan keterampilan E-Leadership melalui proses <i>counselling</i> dan pelatihan.
--	---

5. Berikut adalah pertanyaan dalam kuesioner ini disediakan alternative sesuai penjelasan sebelumnya, mohon berkenan untuk memilih salah satu alternative pilihan jawaban yang tersedia.

**Tabel 4. 4** Kuesioner Pengukuran e-Leadership

NO	PERTANYAAN	TP	J	KK	S	SS
<b>Visi</b>						
1	Saat pertama kali menjadi kepala daerah tergambar mimpi atau visi terkait pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) untuk menjadikan daerah lebih maju ditangannya.					
2	Bersembangat membangun <i>mindset</i> pentingnya peran TI dalam memfasilitasi pencapaian visinya.					
3	Bersembangat mengkomunikasikan cita-cita memajukan daerah dengan adanya TI kepada para anggota/staf dan masyarakat.					
4	Membuat pertemuan sosialisasi dengan mengikutsertakan anggota /staf dan masyarakat dalam pengamblan kebijakan pencapaian Visi terkait IT.					
5	Meminta pendapat dan berdiskusi dengan anggota/staf untuk menyelaraskan visi pimpinan dengan visi terkait teknologi informasi(TI).					
6	Memberikan contoh kebiasaan memanfaatkan TI ternyata mampu membantu tugas pemerintahan mencapai visinya					
<b>Perencanaan TI dan implementasi prinsip, proses, dan infrastruktur TI</b>						
7	Mengkomunikasikan pentingnya perencanaan TI kepada anggota/staf					
8	Masuk/ ikut terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan TI di daerahnya.					
9	Mendukung pembuatan masterplan yang tepat sesuai isu strategis daerahnya.					
10	Bersembangat membangun kerjasama antar masyarakat, institusi, OPD bahkan aerah lain untuk memaksimalkan implementasi TI.					
11	Memberikan arahan pentingnya mengutamakan peningkatan pelayanan publik dengan TI yang efektif, efisien, <i>transparent</i> , dan <i>accountable</i> .					
12	Mendukung kebutuhan infrastruktur TI untuk masyarakat daerahnya.					
<b>Struktur organisasi dan Aktivitas TI</b>						
13	Mendukung pembuatan organisasi khusus untuk memonitor dan mengarahkan kebijakan-kebijakan TI daerahnya.					
14	Mengadakan forum/ dialog public/evaluasi rutin untuk memastikan keberhasilan e-government					
15	Mendukung fasilitas pelatihan <i>upgrade</i> penguasaan TI anggota/staf terkait TI.					

16	Bersehat membangun komunitas kerjasama dengan daerah lain terkait upaya implementasi TI.					
<b>Pengaruh ke lingkungan sosial</b>						
17	Mempengaruhi staf dan masyarakat dalam implementasi TI dengan menjabarkan manfaatnya.					
18	Ketegasan dalam peraturan atau kebijakan guna memastikan kesuksesan implementasi TI					
19	Memberikan tekanan sosial pada instansi yang belum mendukung keberhasilan implementasi TI.					
<b>Fokus pada Tujuan</b>						
20	Bersehat menyampaikan tujuan dan/atau indikator kinerja kesuksesan TI kepada staf					
21	Saling belajar bersama masyarakat dan seluruh <i>stakeholder</i> yang lain untuk mengelola masalah, menyelesaikan masalah dan tumbuh berkembang bersama-sama untuk tujuan.					
22	Melakukan pengarahannya perjanjian kerja bagi Perangkat Daerah dalam mencapai kesuksesan implementasi TI					
23	Memantau pengawasan pada laporan evaluasi keberlangsungan E-government pada daerahnya.					
<b>Motivasi</b>						
24	Sejak awal sudah menyukai Teknologi Informasi dan pemanfaatannya.					
25	Bersehat memberikan paparan motivasi staf-staf jajaran terkait kebutuhan memanfaatkan sistem e-Government					
26	Bersehat memberikan contoh untuk memotivasi memanfaatkan sistem e-Government menjadi suatu tuntutan wajib.					
<b>Komitmen</b>						
27	Memiliki komitmen tinggi dalam memanfaatkan TI guna mendukung tugas-tugas.					
28	Meyakinkan rencana program/investasi TI yang jelas manfaatnya hingga disetujui oleh DPRD					
29	Komitmen mengawal setiap program TI benar-benar didukung & dilaksanakan oleh semua unit dan staf Pemkot/kab terkait					
30	Memberikan penjelasan teknis yang logis dan komprehensif berkaitan dengan program/investasi TI kepada DPRD dalam forum dengar pendapat atau rapat kerja.					
31	Melanjutkan komitmen diawal dengan konsistensi untuk mengawal dengan bekerjasama dengan semua unit jajaran.					
<b>Kepercayaan</b>						
32	Membangun kepercayaan staf dan masyarakat hingga semakin meningkat dengan adanya sistem E-government.					
33	Membangun kepercayaan dengan adanya <i>feedback</i> penanganan permasalahan masyarakat dibantu TI.					
34	Menyakinkan staf jajaran dan masyarakat TI mampu sebagai alat meningkatkan kesuksesan pemerintahannya.					

35	Menyampaikan keuntungan memanfaatkan sistem e-government, masyarakat dan staf telah mempercayai dan mengikutinya					
<b>Kemampuan</b>						
36	Memahami konsep dasar dan fungsi IT sebagai solusi keperluan akseleasi ke pemerintahannya					
37	Memahami wawasan terkait transparansi, akuntabilitas, dan inovasi IT					
38	Memahami alur mengarahkan implementasi IT pada pemerintahannya tapi bukan pada masalah teknis.					
39	Kemauan terus belajar mengikuti perkembangan TI dan tidak menutup saran dari jajarannya.					
40	Mampu menerjemahkan kegunaan TI dan evaluasi gambaran umum e-government pada perangkat daerah/jajarannya.					
<b>Koordinasi &amp; Kerja-sama Tim</b>						
41	Keberhasilan implementasi TI lebih ditentukan oleh koordinasi dan kerja-sama tim yang baik.					
42	Membangun tim khusus dari masyarakat sebagai tim pengarah pengambilan keputusan TI pemerintahan					
43	Memberikan kepercayaan dinas kominfo dalam pendampingan dan kontrol tim khusus TI					
44	Melakukan seleksi tim pengelola TI benar-benar berisi orang yang berkompeten dan solid, sebelum memulai pengadaan sistem e-government.					
45	Mengadakan forum guna menjaga koordinasi dan kerja-sama tim tetap baik dalam implementasi E-Government untuk menghindari ego sektoral.					
<b>Empati</b>						
46	Menciptakan ekosistem <i>mindset</i> kebutuhan yang tidak bisa dihindari, dinas harus menggunakan IT untuk menunjang pekerjaannya					
47	Membangun jaringan internet (fiber optic/free wifi) solusi bagi masyarakat yang tidak mampu mengakses layanan TI pemkot/kab					
48	Mengganti layanan online yang masih menyusahkan masyarakat/penggunanya, dan tetap adanya layanan offline.					
49	Membangun semangat kerjasama antar OPD dalam evaluasi kebutuhan SDM dan aplikasi agar sesuai dengan kebutuhan pengguna/masyarakat.					
<b>Kreativitas</b>						
50	Mengemukakan ide/inovasi sistem/layanan TI untuk kemajuan daerahnya.					
51	Menggali ide solusi sistem/layanan TI berdasarkan masalah rakyatnya.					
52	Mengadakan kompetisi untuk rakyat terkait usulan gagasan pelayanan TI daerahnya					
53	Mengapresiasi inovasi/kreativitas TI staf atau masyarakat dengan tunjangan, piagam dan <i>award</i> .					
<b>Disiplin</b>						

54	Menciptakan ekosistem pentingnya kedisiplinan dalam implementasi TI					
55	Memberikan <i>punishment</i> konsekuensi ketidakdisiplinan staf dalam kehadiran dan dalam penanganian aduan masalah rakyat.					
56	Memberikan aturan/payung hukum yang jelas tentang <i>reward</i> dan <i>punishment</i> dari kedisiplinan staf/jajaran dinas.					
57	Mengapresiasi kedisiplinan staf/jajaran dengan memberikan <i>reward</i> khusus staf					
<b>Manajemen TI</b>						
58	Mengutamakan perencanaan TI sebagai pondasi aktivitas pemerintah daerah.					
59	Memberikan pengawasan dari awal hingga akhir implementasi TI terkontrol dalam setiap stepnya.					
60	Membangun kerjasama dengan tim/OPD sesuai dengan aturan/payung hukum yang berlaku.					
61	Melaksanakan evaluasi secara berkala untuk memastikan perencanaan pengelolaan e-government dapat berjalan sesuai dengan rencana					
<b>Pengambilan Risiko terkait TI</b>						
62	Telah mempertimbangkan risiko-risiko TI dan lebih mengutamakan kebermanfaatannya.					
63	Mengkomunikasikan aturan/payung hukum yang jelas tentang pembangunan, penganggaran dan akses data TI.					
64	Melakukan antisipasi risiko misal pemborosan yang akan muncul dengan membuat rencana induk (masterplan) secara detail.					
65	Memberikan fasilitas pelatihan khusus sosialisasi pembekalan antisipasi dan langkah-langkah mengamankan data terkait TI.					
66	Mendukung pengadaan sarana prasarana dan implementasi TI dilaksanakan secara bertahap sesuai skala prioritas					
<b>Interaksi dan Komunikasi terkait TI</b>						
67	Mengkomunikasikan setiap perubahan dan ide terkait TI sesuai sasaran pengguna/masyarakat.					
68	Memaksimalkan publikasi internal dan eksternal baik secara offline dan online terkait sistem e-government untuk pelayanan publik.					
<b>Kepemimpinan yang kuat</b>						
69	Tegas mendukung keberlanjutan program-program TI agar berjalan sukses.					
70	Tegas dalam pemberian reward dan punishment sesuai aturan terhadap pelaksana misi implementasi TI agar sukses.					

#### 4.1.2.2 Evaluasi E-Government

Untuk mengevaluasi kesuksesan implementasi e-government di ketiga studi kasus, peneliti menggunakan model evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diterbitkan oleh Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018. Evaluasi SPBE biasanya digunakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada instansi pusat dan pemerintahan daerah di seluruh wilayah Indonesia.

##### 4.1.2.2.1 Dimensi Model Evaluasi SPBE

Berdasarkan panduan evaluasi yang dikeluarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018, memiliki 3 dimensi penilaian antara lain :

1. Kebijakan Internal SPBE

Kebijakan Internal SPBE adalah peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh masing-masing pemerintah pusat/daerah dalam melaksanakan kegiatan SPBE. Pada domain kebijakan internal SPBE ini terdiri dari 2 aspek penilaian yaitu aspek kebijakan internal tata kelola SPBE dan aspek kebijakan internal layanan SPBE.

2. Tata Kelola SPBE

Tata Kelola SPBE adalah kebijakan atau peraturan internal instansi yang dimaksudkan untuk mengelola, mengawasi, dan mengontrol regulasi pelaksanaan SPBE. Pada domain tata kelola SPBE terdiri dari 3 aspek penilaian, diantaranya adalah kelembagaan, strategi dan perencanaan, dan teknologi dan komunikasi.

3. Layanan SPBE

Layanan SPBE adalah fungsi dari system aplikasi SPBE yang memberikan manfaat kepada pengguna SPBE. Pada domain layanan SPBE terdapat 2 aspek penilaian yaitu aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan public berbasis elektronik.

#### 4.1.2.2.2 Prosedur Evaluasi

Penilaian pada evaluasi SPBE menggunakan metode tingkat kematangan (*maturity level*) untuk menilai domain Kebijakan Internal SPBE, domain Tata Kelola SPBE, dan domain Layanan SPBE. Pelaksanaan evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menggunakan metode :

1. Evaluasi dokumen, yaitu melakukan penilaian tingkat kematangan SPBE berdasarkan dokumen yang berisi jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung.
2. Wawancara, yaitu melakukan penilaian tingkat kematangan SPBE berdasarkan tanya jawab.
3. Observasi lapangan, yaitu melakukan penilaian tingkat kematangan SPBE berdasarkan pengamatan langsung.

Sedangkan tahapan evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah: 1) Perencanaan, yaitu mempersiapkan instrumen evaluasi, mempersiapkan tim evaluator, dan melakukan sosialisasi evaluasi. 2) Pelaksanaan, yaitu melakukan pengumpulan data dan penilaian melalui evaluasi dokumen, wawancara, dan/atau observasi lapangan. 3) Pelaporan, yaitu menyusun hasil penilaian dan rekomendasi perbaikan.

#### 4.1.2.2.3 Panduan Penilaian

Nilai indeks dihitung secara agregat dari nilai tingkat kematangan pada indikator. Nilai indeks terdiri dari beberapa jenis, yaitu :

1. Nilai Indeks Aspek adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE pada aspek tertentu. Nilai Indeks Aspek merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai tingkat kematangan indikator dan bobot relatif indikator terhadap bobot aspek tersebut.
2. Nilai Indeks Domain adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE pada domain tertentu. Nilai Indeks Domain merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks Aspek dan bobot relatif aspek terhadap bobot domain tersebut.

3. Nilai Indeks SPBE adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Nilai Indeks SPBE merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot domain.

Nilai Indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat seperti tertera pada table 4.2 berikut ini.

**Tabel 4. 5** Predikat Indeks SPBE

No.	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

#### 4.1.2.2.4 Item Penilaian

Item penilaian yang digunakan untuk mengevaluasi SPBE dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini.

**Tabel 4. 6** Domain, Aspek dan Indikator Penilaian

No	Domain	Aspek	Indikator
1	Kebijakan Internal SPBE	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah
			Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi
			Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah
			Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK
			Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data
			Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi

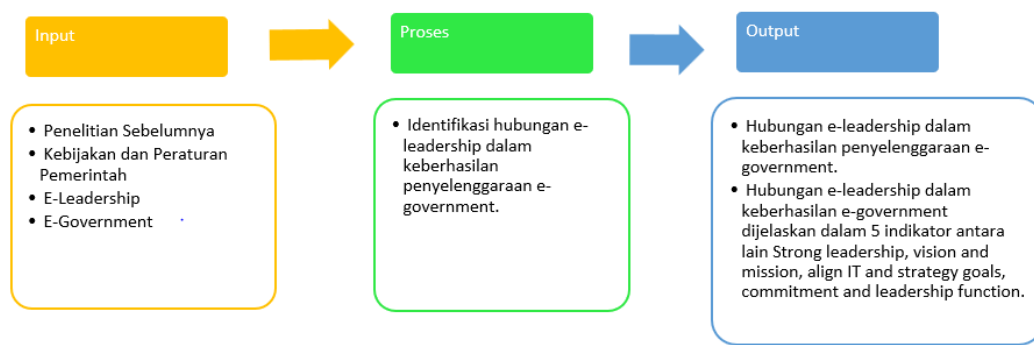


			Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	
		Kebijakan Internal Layanan SPBE	Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas	
			Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian	
			Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran	
			Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan	
			Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja	
			Kebijakan Internal Layanan Pengadaan	
			Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik	
			Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	
			Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing System	
2	Tata Kelola SPBE		Kelembagaan	Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah
				Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi
		Strategi dan Perencanaan	Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah	
			Anggaran dan Belanja TIK	
		Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pengoperasian Pusat Data	
			Integrasi Sistem Aplikasi	
			Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	
3	Layanan SPBE	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Layanan Naskah Dinas	
			Layanan Manajemen Kepegawaian	
			Layanan Manajemen Perencanaan	
			Layanan Manajemen Penganggaran	
			Layanan Manajemen Keuangan	
			Layanan Manajemen Kinerja	

		Layanan Pengadaan
	Layanan Publik Berbasis Elektronik	Layanan Pengaduan Publik
		Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum
		Layanan Whistle Blowing System
		Layanan Publik Instansi Pemerintah

#### 4.1.2.3 Identifikasi Hubungan

Tahap identifikasi ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan e-leadership yang berhubungan dengan kesuksesan penyelenggaraan e-government di Indonesia. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan e-leadership yang berhubungan dengan kesuksesan e-government di Indonesia dilakukan berdasarkan studi penelitian sebelumnya dan studi literatur. Faktor-faktor pada penelitian ini disebut juga dengan indikator. Faktor-faktor yang sudah diidentifikasi, selanjutnya dikelompokkan menjadi Strong leadership, vision and mission, align IT and strategy goals, commitment and leadership function. Gambar alur proses identifikasi dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut ini.



**Gambar 4. 3** Identifikasi Hubungan

#### 4.1.3 Tahapan Perancangan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan perspektif kajian sistem informasi. Alasan menggunakan pendekatan kualitatif karena dalam penelitian ini peneliti ingin menggali topik penelitian secara mendalam, menemukan pola, dan menggali lebih luas keterkaitan antara *e-leadership* dengan

kesuksesan penyelenggaraan *e-government* di kota/pemerintah daerah di Indonesia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Rancangan penelitian kualitatif ini merujuk pada acuan teoritis yang ditulis (J. W Creswell, 2014) dalam bukunya yang berjudul “Penelitian Kualitatif dan Desain Riset”. Pendekatan kualitatif, lebih lanjut, mementingkan pada proses dibandingkan dengan hasil akhir, oleh karena itu urutan kegiatan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi dan banyaknya gejala-gejala yang ditemukan. Pada rencana penelitian kualitatif ini terdiri dari 3 proses yaitu setting lokasi dan waktu penelitian, setting informan penelitian, dan setting instrument penelitian

#### 4.1.3.1 Setting Lokasi dan Waktu

Penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 6 bulan mulai bulan Se 2018 hingga bulan Januari 2018. Untuk lebih jelasnya, mengenai waktu penelitian beserta aktivitasnya, dapat dilihat pada Tabel Jadwal Penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga studi kasus. Maksud dari menggunakan multiple case (tiga studi kasus) adalah agar hasil dari penelitian ini dapat di generalisasi, tidak hanya terbatas pada satu studi kasus. Studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kota Madiun, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Trenggalek.

##### 1. Kota Madiun

Kota Madiun dipilih sebagai studi kasus dalam penelitian ini karena terdapat beberapa pertimbangan, antara lain :

- Kota Madiun mewakili kota kecil pelaksana *e-government* di Indonesia.
- Pemerintah Kota Madiun telah memiliki kesadaran akan pentingnya penerapan *e-government*.
- Kota Madiun telah melakukan MoU untuk implementasi aplikasi *e-government*.

##### 2. Kabupaten Bojonegoro

Kabupaten Bojonegoro dipilih sebagai studi kasus dalam penelitian ini karena terdapat beberapa pertimbangan, antara lain :

- Kabupaten Bojonegoro mewakili kabupaten pelaksana e-government di Indonesia.
- Kabupaten Bojonegoro merupakan kabupaten dengan penerapan e-government terbaik kedua di wilayah Jawa Timur. E-leadership merupakan salah satu yang mempengaruhi keberhasilan e-government.
- Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mendapat banyak sekali penghargaan salah satunya terpilih mewakili Indonesia sebagai daerah percontohan pada ajang OGP (*Open Government Partnership*) atau Percontohan Pemerintah Daerah Terbuka.

### 3. Kabupaten Trenggalek

Kabupaten Trenggalek dipilih sebagai studi kasus dalam penelitian ini karena terdapat beberapa pertimbangan, antara lain :

- Kabupaten Trenggalek mewakili kabupaten pelaksana *e-government* di Indonesia.
- Pemerintah Kabupaten Trenggalek sudah melakukan FGD (*Forum Group Discussion*) dan *desk evaluation* untuk konfirmasi implementasi *e-government*.
- Kabupaten Trenggalek dalam tahap perancangan implementasi *e-government*.

#### 4.1.3.2 Setting Kriteria Informan

Penelitian kualitatif pada teknik pengambilan sampel adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan tiga pertimbangan. Ketiga pertimbangan tersebut berkaitan dengan keputusan-keputusan mengenai pemilihan partisipan (atau tempat) yang hendak dipelajari, tipe strategi sampling yang spesifik dan ukuran dari sampel yang akan dipelajari sesuai dengan teori penelitian kualitatif dari Creswell. Konsep tentang sampling purposeful digunakan dalam penelitian kualitatif. Ketika peneliti kualitatif hendak meneliti suatu permasalahan pada wilayah tertentu, maka informan yang dapat diambil boleh

terbatas, yang terpenting informasinya dianggap sudah mewakili informasi secara keseluruhan. Oleh karena ini kriteria informan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah aparatur pemerintahan dan kepala dinas komunikasi dan informasi di kota/kabupaten di Indonesia yang :

1. Memiliki kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan daerah, sehingga mampu menggunakan kekuatan dan wewenang yang dimilikinya untuk mendukung penyelenggaraan e-government.
2. Memiliki pengalaman dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk melaksanakan birokrasi pemerintahan.
3. Memiliki kekuasaan dalam fungsi untuk melaksanakan urusan pemerintahan pada bidang komunikasi dan informatika seperti terlibat dalam proses penerapan e-government dan terlibat dalam pengelolaan penerapan e-government.

Setelah ditentukan kriteria informan, langkah selanjutnya adalah menentukan siapakah informan yang akan dimintai informasi dan memenuhi kriteria yang sudah ditentukan. Informan dan kriteria yang memenuhi kriteria informan yang sudah dijelaskan sebelumnya dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut.

**Tabel 4. 7** Kriteria Informan

No	Informan	Kriteria
1	Walikota Rekomendasi : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tri Rismaharini</li> <li>• Sugeng Rismiyanto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memiliki kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan kota di Indonesia, sehingga mampu menggunakan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki untuk mendukung penyelenggaraan e-government.</li> <li>▪ Memiliki pengalaman dalam menggunakan teknologi dan komunikasi pada kegiatan pelaksanaan birokrasi pemerintahan.</li> </ul>
2	Bupati Rekomendasi :	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memiliki kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan kota di Indonesia, sehingga</li> </ul>

	Muhammad Nur Arifin	<p>mampu menggunakan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki untuk mendukung penyelenggaraan e-government.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memiliki pengalaman dalam menggunakan teknologi dan komunikasi pada kegiatan pelaksanaan birokrasi pemerintahan.</li> </ul>
3	Kepala Diskominfo	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memiliki kekuasaan fungsi untuk melaksanakan urusan pemerintahan pada bidang komunikasi dan informatika.</li> <li>▪ Memiliki pengalaman dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi pada kegiatan pelaksanaan birokrasi pemerintahan.</li> </ul>

#### 4.1.3.3 Instrumen Wawancara

Jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, alat perekam, alat tulis dan sebagainya. Pedoman wawancara ini dituangkan dalam bentuk daftar pertanyaan terbuka yang telah disusun sebelumnya berdasarkan definisi domain pada bab 3 sebelumnya. Pedoman instrument wawancara dapat dilihat pada lampiran 1 dalam penelitian ini.

#### 4.1.4 Tahapan Pengumpulan dan Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data akan dilakukan pada kondisi yang alamiah yaitu kondisi subjek sama sekali tidak dijamah oleh perlakuan yang dikendalikan oleh peneliti seperti halnya di dalam penelitian eksperimental. Teknik yang akan digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini antara lain studi wawancara, pengamatan dan analisis hasil wawancara dan pengamatan.

##### 4.1.4.1 Wawancara

Wawancara dilakukan dengan para informan yang mengetahui tentang hal yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dengan wawancara diharapkan

diperoleh gambaran umum yang berkaitan dengan penelitian. Wawancara dengan informan menggunakan pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan terbuka untuk menggali secara mendalam informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

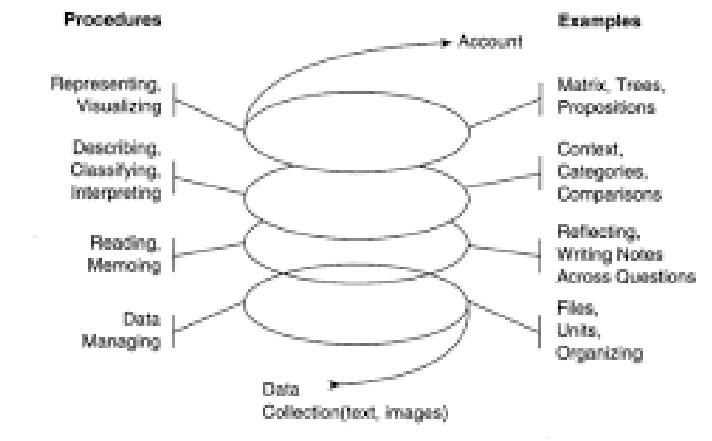
Pada penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur dan mendalam artinya peneliti menggunakan pedoman wawancara yang akan diajukan pada informan. Apabila data – data yang digali dari wawancara tersebut belum begitu mendalam maka dapat dikembangkan lagi dengan pertanyaan yang lain yang dapat memancing informasi lebih dalam dari informan tapi tetap berada pada fokus penelitian.

#### 4.1.4.2 Pengamatan

Pengamatan dilakukan pada objek penelitian yaitu data perkembangan *e-government* dan *e-leadership* di Kota Madiun, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Trenggalek. Pengamatan juga dapat diarahkan ke observasi naturalistik/alamiah terhadap situasi dan pandangan sosial.

#### 4.1.4.3 Analisis Hasil Wawancara dan Pengamatan

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data studi kasus. Teknik analisis data studi kasus dilakukan setelah pengumpulan data dilakukan, disamping melakukan analisis data mengacu pada Miles dan Huberman (1994), peneliti melakukan analisis data studi kasus mengacu pada Creswell (2007:152). Disamping melakukan analisis hasil penelitian diterjemahkan dan diuraikan secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran mengenai situasi-situasi atau peristiwa yang terjadi di lapangan. Terkait dengan kebutuhan analisis data penelitian digunakan Teknik analisis data Model Spiral yang sebagaimana tampak pada gambar 4.4 berikut.



**Gambar 4. 4** Teknik Analisis Data Model Spiral (John W. Creswell, 2007)

Penggunaan Model Spiral dalam melakukan Teknik analisis data seperti pada gambar 4.4 dapat dijelaskan dalam beberapa tahapan, diantaranya :

a. Pengumpulan Data (Data Collection)

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data baik dari data primer maupun data sekunder. Data penunjang seperti teks dan gambar juga diperlukan untuk menunjang kekompleksan data.

b. Membaca dan Membuat Catatan (Reading and Memoing)

Pada tahap ini dilakukan proses membaca dan membuat catatan-catatan sebagai refleksi dari sejumlah jawaban atas pertanyaan penelitian.

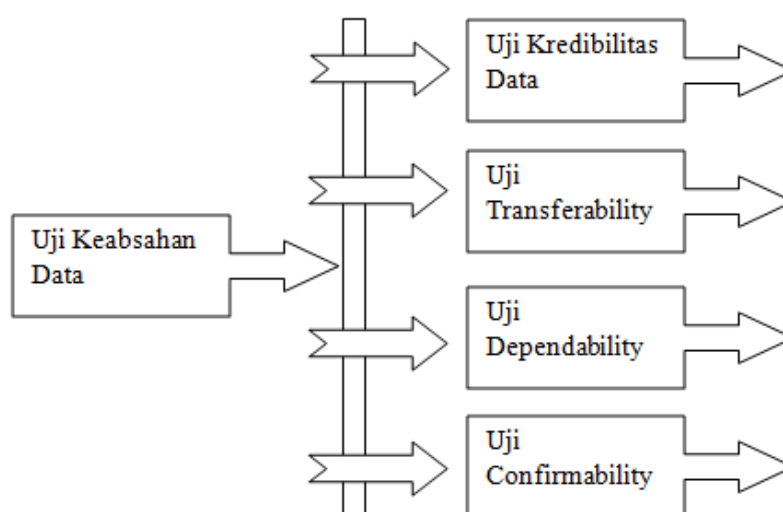
c. Mengorganisasi Atas Data yang Telah Dicatat.

Pada tahap ini dilakukan pengorganisasian data diantaranya mendeskripsikan, mengklasifikasikan, dan mengintrepretasi semua data berdasarkan konteks dan kategori. Pada tahap ini juga dilakukan representasi dan visualisasi dengan membuat kesimpulan-kesimpulan yang dapat dibuat dalam bentuk matriks, table dan selanjutnya menyusun proposisi-proposisi dari hasil penelitian.



#### 4.1.5 Tahapan Validasi

Pada penelitian ini, peneliti melakukan beberapa uji yang digunakan untuk menjamin validasi atau keabsahan data. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility, transferability, dependability, dan confirmability (Sugiyono, 2007:270). Berikut dijelaskan pada gambar 4.5 merupakan uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif.



**Gambar 4. 5** Uji Keabsahan Data Penelitian Kualitatif (Sugiyono,2014)

Pada uji kredibilitas, memeriksa keabsahan data dapat menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan proses pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai sumber dan teknik pengumpulan data yang sudah ada. Peneliti mengadakan pengecekan terhadap validasi data yang telah diperoleh dengan mengkonfirmasi antara data atau informasi yang diperoleh dari pengumpulan data. Metode triangulasi terdiri dari tiga kategori yaitu beragam sumber, metode, peneliti, dan teori sebagai bukti penguat (Creswell, 2015). Triangulasi sumber, yakni mengumpulkan data sejenis dari beberapa sumber yang berbeda. Triangulasi metode, yakni mengumpulkan data yang sejenis dengan menggunakan teknik atau pengumpulan data yang berbeda. Triangulasi teori untuk menginterpretasikan data yang. Triangulasi yang digunakan pada penelitian ini

adalah triangulasi sumber data, dengan melakukan wawancara hasil ke informan dan pakar.

#### 4.1.6 Penyusunan Hasil Penelitian

Tahap penyusunan hasil penelitian merupakan hasil dari analisis data yang telah divalidasi menggunakan triangulasi. Tahapan terakhir dalam penelitian ini yaitu menganalisis dan membahas secara menyeluruh temuan dalam penelitian terkait dengan hasil analisis hubungan *e-leadership* terhadap implementasi kesuksesan *e-government* di pemerintah pusat atau daerah dalam hal ini studi kasus penelitian di Pemerintah Kota Madiun, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Trenggalek.

#### 4.1.7 Penyusunan Kesimpulan dan Saran

Tahapan terakhir dalam penelitian ini yaitu menyusun kesimpulan dan saran. Hal ini dilakukan dengan menganalisis dan membahas mengenai seluruh temuan dalam penelitian, terkait dengan hasil analisa data telah yang diperoleh. Tahap penyusunan kesimpulan dilakukan dengan menelaah secara keseluruhan terhadap apa yang telah dilakukan pada penelitian ini. Kesimpulan dibuat berdasarkan hasil studi literatur, desain metode penelitian, validasi data, hasil analisis dan penyusunan hasil yang diperoleh. Pada tahapan ini, peneliti memberikan saran untuk penelitian yang dapat dilakukan untuk waktu mendatang.

#### 4.2 Rencana Penelitian

Aktivitas penelitian ini direncanakan berlangsung kurang lebih 6 bulan dengan rincian jadwal pelaksanaan seperti pada tabel 4.8 berikut ini.

**Tabel 4. 8** Jadwal Rencana Penelitian

Kegiatan	Tahun 2018 – Tahun 2019																	
	Oktober			November			Desember			Januari			Februari			Maret		
Studi Penelitian Terdahulu	■	■																
Identifikasi Masalah			■	■														
Studi Literature					■	■												



*(Halaman sengaja dikosongkan)*

## **BAB 5**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas proses penelitian dan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab rumusan masalah sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Bab ini menjelaskan dan menguraikan gambaran umum studi kasus, tahap pengumpulan data, proses analisis data dengan metode kualitatif, temuan dan hasil, keabsahan data, kontribusi penelitian serta keterbatasan penelitian.

#### **5.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif studi kasus. Studi kasus yang akan dikaji mengenai pengembangan model hubungan antara kesuksesan E-Leadership terhadap keberhasilan penyelenggaraan E-Government di Indonesia. Hasil pengukuran E-leadership yang digunakan adalah hasil dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Endah Syntia dengan objek penelitian adalah Kepala Daerah di Indonesia. Pengukuran keberhasilan penyelenggaraan e-government pada penelitian ini diukur berdasarkan hasil evaluasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang dilakukan oleh kementerian PANRB di tahun 2018.

Penelitian ini dalam proses pengambilan data menggunakan metode wawancara terhadap beberapa informan dan narasumber. Informan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya Kepala dinas Kominfo, Kepala bidang TIK, dan Kasi Layanan E-Government. Narasumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepala daerah yang dipilih menjadi studi kasus penelitian. Adapun instansi kerja informan dan narasumber yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Kota Madiun, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Trenggalek. Informan dan Narasumber yang digunakan dalam penelitian ini telah berhasil melakukan inisiasi dan praktek-praktek kepemimpinan yang menghasilkan kesuksesan dalam proses manajemen e-government. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengkaji dan menjawab kebutuhan untuk mendokumentasikan, mempublikasikan dan menyimpulkan hubungan antara praktek-praktek kesuksesan pemimpin terhadap kesuksesan penyelenggaraan e-government di Indonesia.

### **5.1.1 Profil Informan dan Narasumber**

Berdasarkan setting informan penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, pemilihan karakteristik informan dilakukan dengan menggunakan Teknik purposive sampling, yaitu memilih informan dengan menggunakan pertimbangan kriteria tertentu terkait pengalamannya dalam pengembangan e-leadership dan e-government. Teknik purposive sampling dimaksudkan bahwa sample bukan mewakili populasi melainkan mewakili informasi. Informan dan narasumber berasal dari beberapa instansi diantaranya Pemerintah Kota Madiun, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Trenggalek. Masing-masing terdiri dari beberapa bagian, diantaranya Kepala Daerah, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Bidang TIK, dan Kasie Layanan E-Government. Berikut adalah profil informan dan narasumber dalam penelitian ini.

#### **5.1.1.1 Bupati Kabupaten Bojonegoro (Y)**

Nama : Dr. H. Suyoto, M.SI (Kang Yoto)

TTL : Bojonegoro, 17 Februari 1965

Usia : 54 Tahun

Narasumber 1 (Y) merupakan Dosen Universitas Muhammadiyah Gresik dan juga merupakan Bupati Kabupaten Bojonegoro selama dua periode. Beliau memimpin Bojonegoro ditahun 2008-2013 dan 2013-2018. Selama menjadi bupati di Bojonegoro beliau berhasil meningkatkan kualitas manajemen kepemimpinan di sektor pemerintahan. Hal ini terlihat dari bagaimana beliau berhasil merubah wajah Kabupaten Bojonegoro dari birokrasi selfish (yang minta dilayani) menjadi birokrasi servis (yang melayani). Konsekuensi dari birokrasi yang melayani, maka tercipta pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan *partnership*. Selama beliau menjabat banyak sekali penghargaan-penghargaan yang didapat Kabupaten Bojonegoro diantaranya dari OPG (Open Government Patnership) Internasional, mendapat penghargaan TOP Leader pada IT Leadership dalam acara TOP IT & TELCO Awards 2016 dan 2017. Banyaknya penghargaan yang didapat Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menandakan pemimpinya berhasil dalam menerapkan e-leadership guna mensukseskan penyelenggaraan e-government.

### **5.1.1.2 Kepala Dinas Kominfo (X1)**

1. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro

Nama : Drs. Kusnandaka Tjatur Prasetijo, M.Si

TTL : Bojonegoro, 24 Februari 1967

Usia : 52 Tahun

Bapak Kusnandaka adalah seorang Dosen di Universitas Negeri Malang dan menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro. Beliau menjabat dari tahun 2013-sekarang. Beliau dipandang sebagai seorang kepala dinas yang transformatif dengan basic tata kelola yang baik. Berkat tangan dinginnya perlahan Kabupaten Bojonegoro berhasil dirubah dari tata kelola konvensional menjadi digital. Bersama dengan Bupati Bojonegoro sebelumnya (Kang Yoto) beliau mendapat penghargaan TOP IT Manager dalam acara TOP IT & TELCO Award tahun 2017. Selain itu masih banyak lagi penghargaan yang didapat oleh Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro.

2. Kepala Dinas Kominfo Kota Madiun

Nama : Subakri, S.Sos, M.Si

TTL : Madiun, 4 September 1968

Usia : 50 Tahun

Bapak Subakri, S.Sos M.Si adalah Kepala Dinas Kominfo Kota Madiun dari tahun 2017-sekarang. Pada tahun 2018 Dinas Kominfo Madiun mendapat penghargaan dari walikota sebagai OPD berprestasi dalam pelayanan publik. Beliau dan jajarannya terus berupaya menyajikan informasi secara maksimal kepada masyarakat. Sesuai tugas beliau untuk memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan bimbingan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **5.1.1.3 Kepala Bidang Pengelolaan TIK (X2)**

Nama : Hendro Pradono, S.T

TTL : Surabaya, 15 Agustus 1972

Usia : 46 Tahun

Bapak Hendro Pradono, S.T adalah Kepala Bidang Pengelolaan TIK Kota Madiun dari tahun 2017 - sekarang. Beliau bertugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengelolaan TIK di Kota Madiun. Fungsi terkait e-government yaitu pengelolaan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Kota, layanan keamanan informasi e-Government dan pengelolaan layanan manajemen data dan informasi e-Government.

### **5.1.1.4 Kasie Layanan E-Government (X3)**

Nama : Miftakhul Huda, S.Sos., M.Eng

TTL : Trenggalek, 16 Mei 1980

Usia : 38 Tahun

Bapak Miftakhul Huda, S.Sos., M.Eng adalah Kepala Seksi penyelenggaraan E-Government Trenggalek tahun 2017-sekarang. Beliau dibawah bidang e-government sebagaimana dipimpin oleh Kepala Bidang E-Government dan Statistik dalam menyelesaikan sebagian tugas dinas dalam lingkup fasilitas di bidang E-Government. Tujuan meningkatkan kualitas layanan E-Government sesuai dengan tujuan kominfo Kabupaten Trenggalek.

## **5.1.2 Kelayakan Informan dan Narasumber**

Pada penelitian kualitatif penentuan sampel berbeda dengan penelitian kuantitatif. Sampel pada penelitian kualitatif tidak didasarkan pada perhitungan statistic, melainkan dipilih untuk mendapatkan informasi yang maksimal. Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai mengambil data selama penelitian berlangsung. Cara pemilihan sampel didasarkan pada pertimbangan tertentu, sehingga dapat memberikan informasi yang



diperlukan. Penulis terlebih dahulu melakukan uji kelayakan informan setelah melakukan wawancara dengan semua calon informan yang telah disebutkan sebelumnya.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan satu jenis narasumber dan tiga jenis informan yang berbeda. Berikut adalah penjelasan masing-masing jenis.

1. Y- Bupati (Kepala Daerah)

Kualifikasi Narasumber pada tipe ini adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki kekuasaan dan wewenang tertinggi untuk memutuskan dan mendukung penerapan e-government Kota/Kabupaten di Indonesia.
- b. Memiliki pengalaman terlibat dalam implementasi teknologi informasi dan komunikasi pada kegiatan pemerintahan daerah Kota/Kabupaten di Indonesia.

**Tabel 5. 1** Kelayakan Narasumber Y

Narasumber	Kriteria		Keterangan
	A	B	
Y	✓	✓	Narasumber 1 (Y) merupakan Dosen Universitas Muhammadiyah Gresik dan juga merupakan Bupati Kabupaten Bojonegoro selama dua periode. Beliau memimpin Bojonegoro ditahun 2008-2013 dan 2013-2018. Selama menjadi bupati di Bojonegoro beliau berhasil meningkatkan kualitas manajemen kepemimpinan di sektor pemerintahan. Hal ini terlihat dari bagaimana beliau berhasil merubah wajah Kabupaten Bojonegoro dari birokrasi selfish (yang minta dilayani) menjadi birokrasi servis (yang melayani). Konsekuensi dari birokrasi yang melayani, maka tercipta pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan <i>partnership</i> . Selama beliau menjabat banyak sekali penghargaan-penghargaan yang didapat Kabupaten Bojonegoro diantaranya dari OPG (Open Government Patnership) Internasional, mendapat penghargaan TOP Leader pada IT Leadership dalam acara TOP IT & TELCO

			Awards 2016 dan 2017. Banyaknya penghargaan yang didapat Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menandakan pemimpinya berhasil dalam menerapkan e-leadership guna mensukseskan penyelenggaraan e-government.
--	--	--	---

## 2. X1 – Kepala Dinas Kominfo Daerah

Kualifikasi informan pada tipe ini adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mendukung kepala daerah dalam penerapan e-government Kota/Kabupaten di Indonesia.
- b. Memiliki pengalaman terlibat dalam implementasi teknologi informasi dan komunikasi pada kegiatan pemerintahan daerah Kota/Kabupaten di Indonesia.

**Tabel 5. 2** Kelayakan Informan X1

Informan	Kriteria		Keterangan
	A	B	
X1-1	✓	✓	Bapak Kusnandaka adalah seorang Dosen di Universitas Negeri Malang dan menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro. Beliau menjabat dari tahun 2013-sekarang. Beliau dipandang sebagai seorang kepala dinas yang transformatif dengan basic tata kelola yang baik. Berkat tangan dinginnya perlahan Kabupaten Bojonegoro berhasil dirubah dari tata kelola konvensional menjadi digital. Bersama dengan Bupati Bojonegoro sebelumnya (Kang Yoto) beliau mendapat penghargaan TOP IT Manager dalam acara TOP IT & TELCO Award tahun 2017. Selain itu masih banyak lagi penghargaan yang didapat oleh Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro.
X1-2	✓	✓	Bapak Subakri, S.Sos M.Si adalah Kepala Dinas Kominfo Kota Madiun dari tahun 2017-sekarang. Pada tahun 2018 Dinas Kominfo Madiun mendapat penghargaan dari walikota

			sebagai OPD berprestasi dalam pelayanan publik. Beliau dan jajarannya terus berupaya menyajikan informasi secara maksimal kepada masyarakat. Sesuai tugas beliau untuk memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan bimbingan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
--	--	--	--

### 3. X2 – Kepala Bidang Pengelolaan TIK

Kualifikasi informan pada tipe ini adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mendukung kepala daerah dalam penerapan e-government Kota/Kabupaten di Indonesia.
- b. Memiliki pengalaman terlibat dalam implementasi teknologi informasi dan komunikasi pada kegiatan pemerintahan daerah Kota/Kabupaten di Indonesia.

**Tabel 5. 3** Kelayakan Informan X2

Informan	Kriteria		Keterangan
	A	B	
X2	✓	✓	Bapak Hendro Pradono, S.T adalah Kepala Bidang Pengelolaan TIK Kota Madiun dari tahun 2017 - sekarang. Beliau bertugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengelolaan TIK di Kota Madiun. Fungsi terkait e-government yaitu pengelolaan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Kota, layanan keamanan informasi e-Government dan pengelolaan layanan manajemen data dan informasi e-Government.

### 4. X3 – Kasie Penyelenggaraan E-Government

Kualifikasi informan pada tipe ini adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mendukung kepala daerah dalam penerapan e-government Kota/Kabupaten di Indonesia.
- b. Memiliki pengalaman terlibat dalam implementasi teknologi informasi dan komunikasi pada kegiatan pemerintahan daerah Kota/Kabupaten di Indonesia.

**Tabel 5. 4** Kelayakan Informan X3

Informan	Kriteria		Keterangan
	A	B	
X3	✓	✓	Bapak Miftakhul Huda,S.Sos.,M.Eng adalah Kepala Seksi penyelenggaraan E-Government Trenggalek tahun 2017-sekarang. Beliau dibawah bidang e-government sebagaimana dipimpin oleh Kepala Bidang E-Government dan Statistik dalam menyelesaikan sebagian tugas dinas dalam lingkup fasilitas di bidang E-Government. Tujuan meningkatkan kualitas layanan E-Government sesuai dengan tujuan kominfo Kabupaten Trenggalek.

Tabel kelayakan narasumber dan informan menjelaskan perihal layak atau tidaknya seorang calon narasumber dan informan yang telah melalui proses wawancara untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini. Berdasarkan tabel kelayakan narasumber dan informan diatas berikut merupakan tabel nama narasumber dan informan yang dipilih untuk dianalisis dalam penelitian ini. Untuk narasumber akan dijelaskan dalam table 5.5 sedangkan informan dijelaskan dalam table 5.6 berikut.

**Tabel 5. 5** Inisial Narasumber

Narasumber	Nama	Inisial (alias)
Tipe Y – Bupati (Kepala Daerah)		
Y	Dr. H. Suyoto, M.Si	SY

**Tabel 5. 6** Inisial Informan

<b>Informan</b>	<b>Nama</b>	<b>Inisial (alias)</b>
Tipe X1 – Kepala Dinas Kominfo		
X1-1	Drs. Kusnandaka Tjatur Prasetyo, M.SI	KS
X1-2	Subakri, S.Sos., M.Si	SB
Tipe X2 – Kepala Bidang Pengelolaan TIK		
X2	Hendro Pradono, S.T	HP
Tipe X3 – Kasie Layanan E-Government		
X3	Miftakhul Huda, S.Sos., M.Eng	MH

## **5.2 Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mengungkap fakta yang terkait dengan faktor, pengalaman, dan praktek terbaik E-Leadership dalam kesuksesan penyelenggaraan E-Government di Indonesia. Penelitian ini bermula dari indentifikasi studi kasus terkait dengan E-Leadership pemimpin-pemimpin daerah di Indonesia dengan pengamatan berita serta studi literatur. Pengumpulan data dilakukan pada 1 Narasumber dan 3 informan dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait 5 faktor ajuan tentang pengaruh hubungan antara E-Leadership dengan kesuksesan penyelenggaraan E-Government.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara yang dilakukan di Kota Madiun, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Trenggalek. Waktu pengambilan data wawancara bervariasi antara pukul 09.00 WIB – 15.00 WIB. Menyesuaikan waktu luang masing-masing narasumber dan informan. Wawancara dilakukan dengan cara bertatap muka langsung dengan informan dan narasumber. Wawancara dilakukan dengan tujuan mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian, kemudian narasumber dan informan mengkonfirmasi hasil temuan yang didapat pada wawancara dan menanyakan kembali hal-hal yang ingin diketahui secara lebih mendalam. Wawancara direkam dengan menggunakan media perekam pada Smartphone iPhone 5s dengan format

file \*amr. Data rekaman yang terkumpul dikelompokkan berdasarkan folder kategori Kota/Kabupatennya.

### 5.3 Hasil Pengukuran E-Leadership

Telah dilakukan pengukuran tingkat E-leadership kepada tiga kepala daerah yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini. Instrument pengukuran berasal dari 17 indikator yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Hasil ini telah melalui validasi narasumber sekaligus pakar dan informan yang berkaitan. Hasil rekap pengukuran e-leadership dapat dilihat pada tabel 5.7 berikut.

**Tabel 5. 7** Hasil Pengukuran E-Leadership

Nomor Pertanyaan	Bupati Bojonegoro					Bupati Trenggalek					Walikota Madiun				
	TP	J	KK	S	SS	TP	J	KK	S	SS	TP	J	KK	S	SS
<b>Visi</b>															
1					5				4					3	
2					5				4					3	
3				4						5				3	
4					5			3							4
5				4				3				2			
6				4			2					2			
<b>Perencanaan TI dan implementasi prinsip, proses, dan infrastruktur TI</b>															
7					5			3						3	
8				4						5				3	
9					5				4						4
10					5			3						3	
11				4				3				2			
12					5				4						4
<b>Struktur organisasi dan Aktivitas TI</b>															
13					5		2					2			
14					5		2				1				
15					5				4					3	
16					5				4						4
<b>Pengaruh ke lingkungan sosial</b>															
17					5					5				3	
18					5					5				3	
19			3						4						5
<b>Fokus pada Tujuan</b>															
20					5			3				2			
21					5			3				2			
22				4			2					2			
23					5		2							3	
<b>Motivasi</b>															

24				5					5				4	
25				5			3			1				
26			4			2					2			
<b>Komitmen</b>														
27				5					5			3		
28			4					4		1				
29			4				3					3		
30			4				3			1				
31			4			2						3		
<b>Kepercayaan</b>														
32				5					5					5
33				5					5					5
34			4					4					4	
35			4				3						4	
<b>Kemampuan</b>														
36				5					5			3		
37				5					5			3		
38				5					5			3		
39				5				4			2			
40				5					5			3		
<b>Koordinasi &amp; Kerja-sama Tim</b>														
41				5					5					5
42				5		2							4	
43				5					5					5
44			3				3				2			
45				5					5				4	
<b>Empati</b>														
46				5			3					3		
47				5				4						5
48			4					4			2			
49				5			3				2			
<b>Kreativitas</b>														
50			4				3				2			
51				5			3						4	
52		2						4						5
53			4			2							4	
<b>Disiplin</b>														
54				5			3				2			
55				5		2								5
56				5					5				4	
57			4			2								5
<b>Manajemen TI</b>														

58				5				5					5	
59				5			3					2		
60				5			3					3		
61				5				4				2		
<b>Pengambilan Risiko terkait TI</b>														
62				5									5	
63				4			3					3		
64				5									5	
65				4			3						4	
66				5								2		
<b>Interaksi dan Komunikasi terkait TI</b>														
67				5			3						4	
68				5				4					5	
<b>Kepemimpinan yang kuat</b>														
69				5			3						4	
70				4									5	
<b>Total</b>	<b>323</b>				<b>256</b>				<b>228</b>					
<b>Kategori</b>	<b>TOP E-LEADERSHIP</b>				<b>MIDDLE E-LEADERSHIP</b>				<b>MIDDLE E-LEADERSHIP</b>					

Berdasarkan hasil rekap nilai pengisian kuesioner didapatkan skor total masing-masing kepala daerah. Implementasi pengukuran E-Leadership telah dilakukan pada Kepala daerah Kabupaten Bojonegoro total skor 323 termasuk dalam Top E-Leadership. Skor 323 yang diperoleh menunjukkan tingkat E-Leadership yang sangat ideal dalam kesuksesan implementasi sistem E-Government. Selain itu kepemimpinan yang ditunjukkan kepala daerah Kabupaten Bojonegoro sudah sangat **“ideal”** dalam penyelenggaraan sistem e-government. Aspek-aspek kepemimpinan kepala daerah Kabupaten Bojonegoro dalam menginisiasi, mengawal dan memastikan kesuksesan Teknologi Informasi dalam mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah/organisasi telah **“ideal”**.

Implementasi pengukuran E-Leadership telah dilakukan kepada kepala daerah Kabupaten Trenggalek dengan total skor 256. Skor tersebut termasuk middle E-Leadership. Skor 256 menunjukkan kepemimpinan kepala daerah Kabupaten Trenggalek **“cukup”** baik untuk kesuksesan implementasi sistem E-Government. Selain itu, kepemimpinan kepala daerah Kabupaten Trenggalek pada prinsipnya dalam kategori **“cukup”**, sehingga masih perlu peningkatan optimal aspek-aspek



kepemimpinan dalam menginisiasi, mengawal dan memastikan kesuksesan Teknologi Informasi dalam mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah/organisasi.

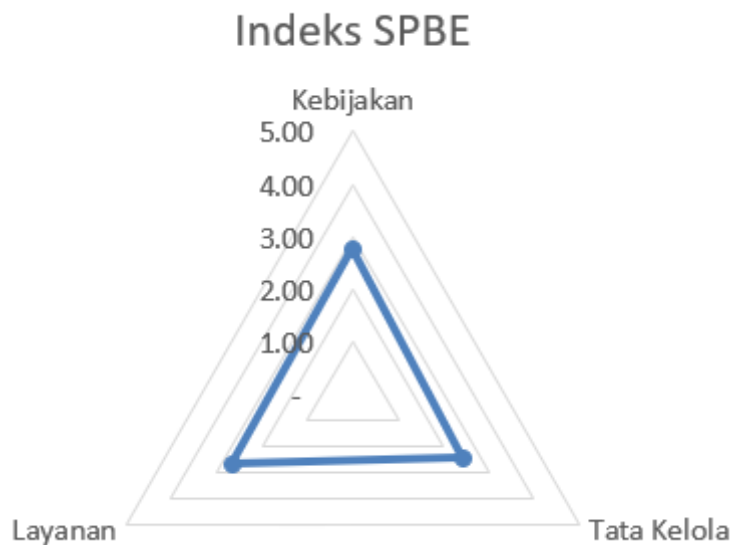
Implementasi pengukuran E-Leadership telah dilakukan kepada Wali Kota Madiun dengan total skor 228. Skor tersebut termasuk middle E-Leadership. Skor 228 menunjukkan kepemimpinan Wali Kota Madiun “**cukup**” baik untuk kesuksesan implementasi sistem E-Government. Selain itu, kepemimpinan Wali Kota Madiun pada prinsipnya dalam kategori “**cukup**”, sehingga masih perlu peningkatan optimal aspek-aspek kepemimpinan dalam menginisiasi, mengawal dan memastikan kesuksesan Teknologi Informasi dalam mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah/organisasi.

#### **5.4 Hasil Evaluasi SPBE**

Telah dilakukan evaluasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) kepada kepada tiga kepala daerah yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini. Instrument pengukuran mengacu pada PERMENPAN No. 5 Tahun 2018. Hasil ini telah melalui validasi operator yang ditunjuk dari masing-masing Pemerintah Daerah dan kemudian dikirimkan ke Pemerintah Pusat untuk dilakukan evaluasi. Hasil rekap evaluasi SPBE dapat dilihat pada penjelasan sub bab berikut ini.

##### **5.4.1 Kabupaten Bojonegoro**

Hasil evaluasi SPBE ini dinyatakan dalam indeks SPBE. Hasil perhitungan indeks SPBE diperoleh dari nilai masing-masing domain. Sedangkan nilai domain diperoleh dari masing-masing aspek. Hasil perhitungan indeks agar lebih enak dibaca ditampilkan dalam diagram 3 dimensi. Berikut hasil nilai SPBE Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat pada gambar 5.1 berikut.

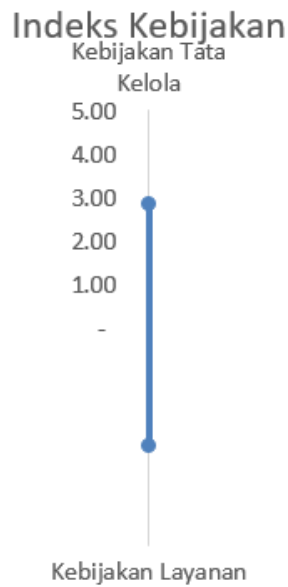


**Gambar 5. 1** Indeks SPBE Kab. Bojonegoro

Dari gambar 5.1 dapat dijelaskan bahwasanya nilai indeks SPBE Kabupaten Bojonegoro mencapai skor 2.62. Skor 2.62 didapat dari masing-masing domain yang digambarkan dalam chart dimana domain Kebijakan mendapat skor 2.76, domain Tata Kelola mendapat skor 2.43 dan Domain Layanan mendapat skor 2.67. Gambar diagram *spider chart* yang menunjukkan titik mendekati tepian menunjukkan capaian atau nilai yang tinggi. Semakin mendekati tepian maka diasumsikan nilainya semakin tinggi dan hasilnya mendekati baik. Untuk nilai masing-masing domain dapat dilihat pada penjelasan sub bab berikut ini.

#### **5.5.1.1 Domain Kebijakan**

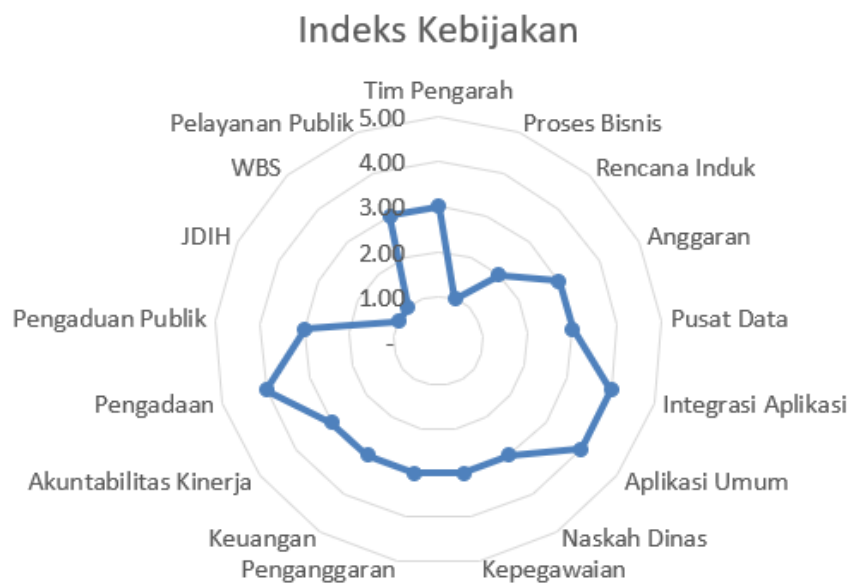
Domain kebijakan tersusun dari 2 bagian yaitu melalui penilaian aspek dan Indikator. Untuk perolehan skor pada aspek pertama domain kebijakan dapat dilihat pada gambar 5.2 berikut ini.



**Gambar 5. 2** Indeks Domain Kebijakan

Domain kebijakan terbagi menjadi 2 aspek yaitu aspek kebijakan tata kelola dan aspek kebijakan layanan. Berdasarkan gambar 5.2 domain kebijakan mendapat skor 2.76 dengan skor kebijakan tata kelola 2.86 dan skor kebijakan layanan 2.70.

Domain Kebijakan yang kedua dapat dilihat pada gambar 5.3 berikut.



**Gambar 5. 3** Indeks Domain Kebijakan

Indeks domain kebijakan yang kedua tersusun dari beberapa indikator diantaranya tim pengarah, proses bisnis, rencana induk, anggaran, pusat data, integritas aplikasi, aplikasi umum, naskah dinas, kepegawian, penganggaran, keuangan, akuntabilitas kinerja, pengadaan, pengaduan public. JDIH, WBS dan Pelayanan publik. Berdasarkan gambar 5.3 skor indeks domain kebijakan yang kedua adalah 2.76 dengan skor tim pengarah 3.00, proses bisnis 1.00, rencana induk 2.00, anggaran 3.00, pusat data 3.00, integritas aplikasi 4.00, aplikasi umum 4.00, naskah dinas 3.00, kepegawaian 3.00, penganggaran 3.00, keuangan 3.00, akuntabilitas kinerja 3.00, pengadaan 4.00, pengaduan publik 3.00, JDIH 1.00, WBS 1.00 dan pelayanan publik 3.00.

### 5.5.1.2 Domain Tata Kelola

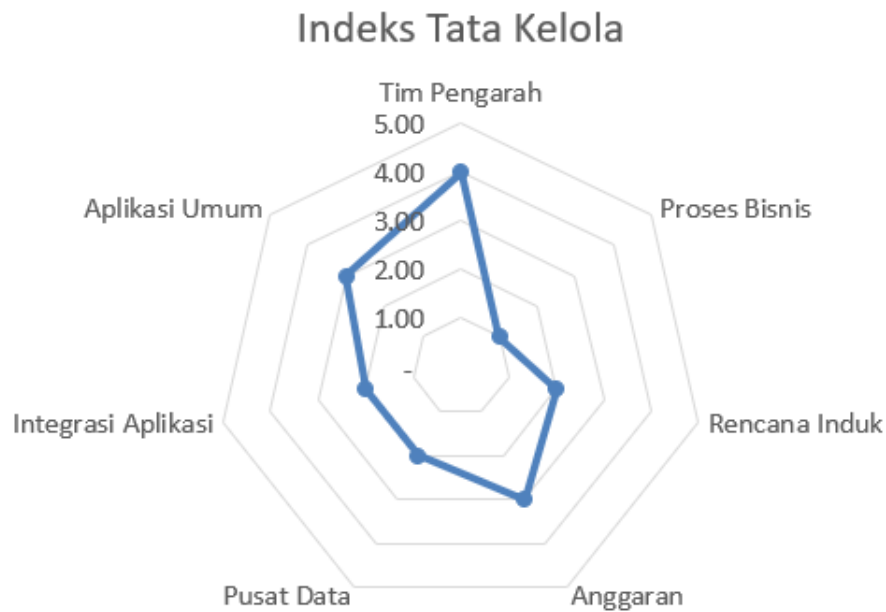
Domain Tata Kelola tersusun dari 2 bagian yaitu melalui penilaian aspek dan Indikator. Untuk perolehan skor pada aspek pertama domain tata kelola dapat dilihat pada gambar 5.4 berikut ini.



**Gambar 5. 4** Domain Indeks Tata Kelola

Domain tata kelola tersusun dari 3 aspek, diantaranya kelembagaan, strategi dan pengembangan dan TIK. Skor indeks tata kelola berdasarkan gambar 5.4 adalah 2.43 dengan kelembagaan memperoleh skor 2.50, strategi dan perencanaan 2.50 dan TIK memperoleh skor 2.33.

Domain tata kelola yang kedua dapat dilihat pada gambar 5.5 berikut.



**Gambar 5. 5** Indeks Domain Tata Kelola

Indeks domain tata kelola tersusun dari beberapa indikator diantaranya tim pengarah, proses bisnis, rencana induk, anggaran, pusat data, integritas aplikasi dan aplikasi umum. Skor dari domain tata kelola berdasarkan gambar 5.5 adalah 2.43 dengan masing-masing indikator adalah tim pengarah 4.00, proses bisnis 1.00, rencana induk 2.00, anggaran 3.00, pusat data 2.00, integrase aplikasi 2.00 dan aplikasi umum 3.00.

### 5.5.1.3 Domain Layanan

Domain Layanan tersusun dari 2 bagian yaitu melalui penilaian aspek dan Indikator. Untuk perolehan skor pada aspek pertama domain layanan dapat dilihat pada gambar 5.6 berikut ini.

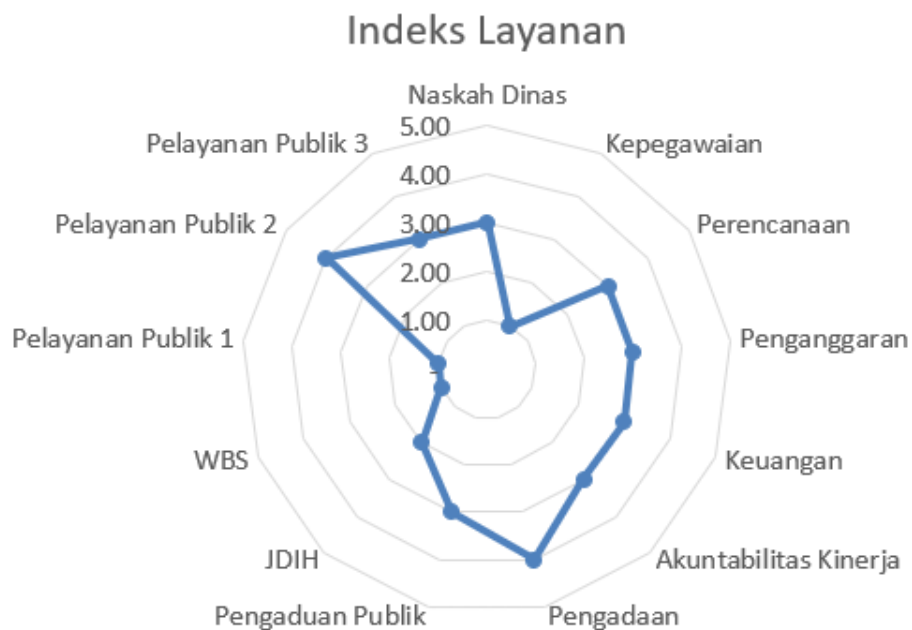
## Indeks Layanan



**Gambar 5. 6** Indeks Domain Layanan

Domain Layanan tersusun dari 2 aspek yaitu aspek layanan adpem dan layanan publik. Skor domain layanan pada gambar 5.6 adalah 2.67 dengan skor masing-masing aspek layanan adpem 2.86 dan layanan publik 2.33.

Domain layanan yang kedua dapat dilihat pada gambar 5.7 berikut.

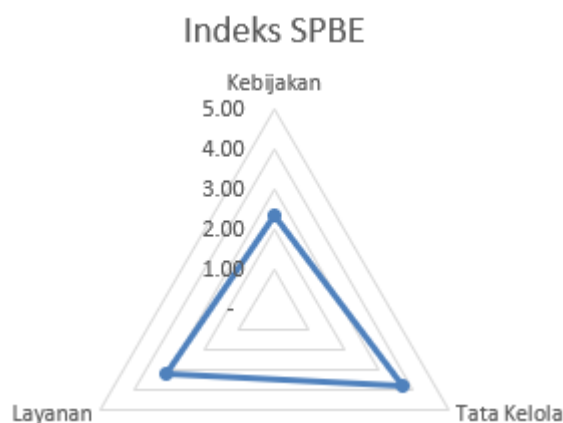


**Gambar 5. 7** Indeks Domain Layanan

Domain layanan tersusun dari beberapa indikator diantaranya naskah dinas, kepegawaian, perencanaan, penganggaran, keuangan, akuntabilitas kinerja, pengadaan, pengaduan public, JDIH, WBS, pelayanan publik 1, pelayanan public 2 dan pelayanan public 3. Berdasarkan gambar 5.7 skor domain layanan adalah 2.67 dengan skor masing-masing indikator adalah naskah dinas 3.00, kepegawaian 1.00, perencanaan 3.00, penganggaran 3.00, keuangan 3.00, akuntabilitas kinerja 3.00, pengadaan 4.00, pengaduan publik 3.00, JDIH 2.00, WBS 1.00, Pelayanan publik 1 1.00, pelayanan publik 2 4.00 dan pelayanan publik 3 3.00.

#### 5.4.2 Kota Madiun

Hasil evaluasi SPBE ini dinyatakan dalam indeks SPBE. Hasil perhitungan indeks SPBE diperoleh dari nilai masing-masing domain. Sedangkan nilai domain diperoleh dari masing-masing aspek. Hasil perhitungan indeks agar lebih enak dibaca ditampilkan dalam diagram 3 dimensi. Berikut hasil nilai SPBE Kota Madiun dapat dilihat pada gambar 5.8 berikut.



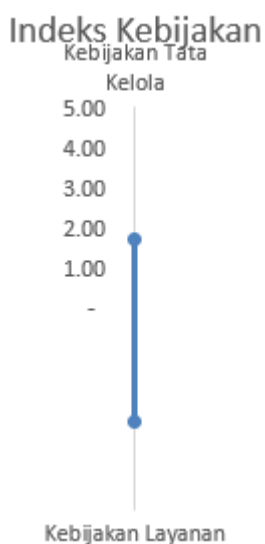
**Gambar 5. 8** Indeks SPBE Kota Madiun

Dari gambar 5.8 dapat dijelaskan bahwasanya nilai indeks SPBE Kota Madiun mencapai skor 3.16. Skor 3.16 didapat dari masing-masing domain yang digambarkan dalam chart dimana domain Kebijakan mendapat skor 2.35, domain Tata Kelola mendapat skor 3.71 dan Domain Layanan mendapat skor 3.12. Gambar diagram *spider chart* yang menunjukkan titik mendekati tepian menunjukkan capaian atau nilai yang tinggi. Semakin mendekati tepian maka diansumsikan nilainya

semakin tinggi dan hasilnya mendekati baik. Untuk nilai masing-masing domain dapat dilihat pada penjelasan sub bab berikut ini.

#### 5.5.1.4 Domain Kebijakan

Domain kebijakan tersusun dari 2 bagian yaitu melalui penilaian aspek dan Indikator. Untuk perolehan skor pada aspek pertama domain kebijakan dapat dilihat pada gambar 5.9 berikut ini.

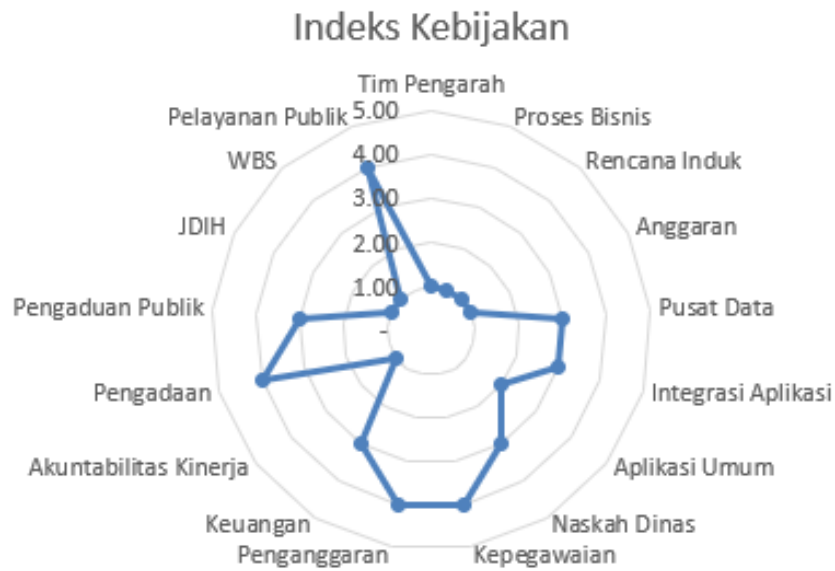


**Gambar 5. 9** Indeks Domain Kebijakan

Domain kebijakan terbagi menjadi 2 aspek yaitu aspek kebijakan tata kelola dan aspek kebijakan layanan. Berdasarkan gambar 5.9 domain kebijakan mendapat skor 2.35 dengan skor kebijakan tata kelola 1.71 dan skor kebijakan layanan 2.80.

Domain Kebijakan yang kedua dapat dilihat pada gambar 5.10 berikut.





**Gambar 5. 10** Indeks Domain Kebijakan

Indeks domain kebijakan yang kedua tersusun dari beberapa indikator diantaranya tim pengarah, proses bisnis, rencana induk, anggaran, pusat data, integritas aplikasi, aplikasi umum, naskah dinas, kepegawaian, penganggaran, keuangan, akuntabilitas kinerja, pengadaan, pengaduan public. JDIH, WBS dan Pelayanan publik. Berdasarkan gambar skor indeks domain kebijakan yang kedua adalah 2.35 dengan skor tim pengarah 1.00, proses bisnis 1.00, rencana induk 1.00, anggaran 1.00, pusat data 3.00, integritas aplikasi 3.00, aplikasi umum 2.00, naskah dinas 3.00, kepegawaian 4.00, penganggaran 4.00, keuangan 3.00, akuntabilitas kinerja 1.00, pengadaan 4.00, pengaduan publik 3.00, JDIH 1.00, WBS 1.00 dan pelayanan publik 4.00.

#### **5.5.1.5 Domain Tata Kelola**

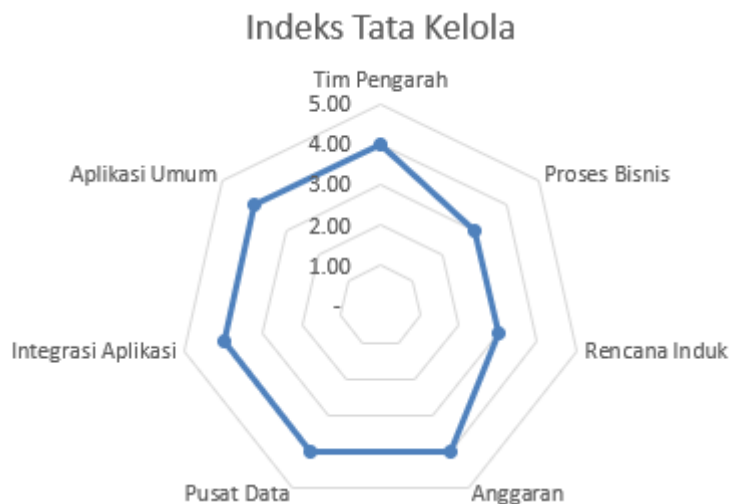
Domain Tata Kelola tersusun dari 2 bagian yaitu melalui penilaian aspek dan Indikator. Untuk perolehan skor pada aspek pertama domain tata kelola dapat dilihat pada gambar 5.11 berikut ini.



**Gambar 5. 11** Indeks Domain Tata Kelola

Domain tata kelola tersusun dari 3 aspek, diantaranya kelembagaan, strategi dan pengembangan dan TIK. Skor indeks tata kelola berdasarkan gambar 5.11 adalah 3.71 dengan kelembagaan memperoleh skor 3.50, strategi dan perencanaan 3.50 dan TIK memperoleh skor 4.00.

Domain tata kelola yang kedua dapat dilihat pada gambar 5.12 berikut.

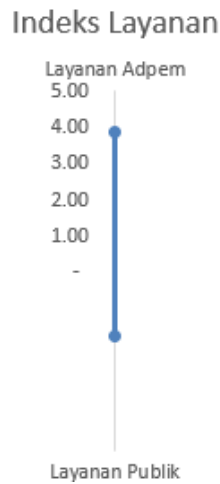


**Gambar 5. 12** Indeks Domain Tata Kelola

Indeks domain tata kelola tersusun dari beberapa indikator diantaranya tim pengarah, proses bisnis, rencana induk, anggaran, pusat data, integritas aplikasi dan aplikasi umum. Skor dari domain tata kelola berdasarkan gambar 5.12 adalah 3.71 dengan masing-masing indicator adalah tim pengarah 4.00, proses bisnis 3.00, rencana induk 3.00, anggaran 4.00, pusat data 4.00, integrase aplikasi 4.00 dan aplikasi umum 4.00.

### 5.5.1.6 Domain Layanan

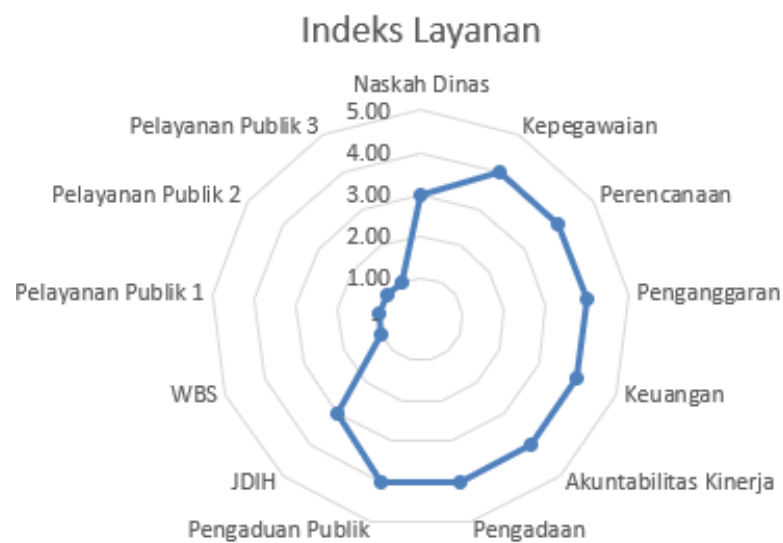
Domain Layanan tersusun dari 2 bagian yaitu melalui penilaian aspek dan Indikator. Untuk perolehan skor pada aspek pertama domain layanan dapat dilihat pada gambar 5.13 berikut ini.



**Gambar 5. 13** Indeks Domain Layanan

Domain Layanan tersusun dari 2 aspek yaitu aspek layanan adpem dan layanan public. Skor domain layanan pada gambar 5.13 adalah 3.12 dengan skor masing-masing aspek layanan adpem 3.86 dan layanan publik 1.83.

Domain layanan yang kedua dapat dilihat pada gambar 5.14 berikut.



**Gambar 5. 14** Indeks Domain Layanan

Domain layanan tersusun dari beberapa indikator diantaranya naskah dinas, kepegawaian, perencanaan, penganggaran, keuangan, akuntabilitas kinerja, pengadaan, pengaduan public, JDIH, WBS, pelayanan public 1, pelayanan public 2 dan pelayanan public 3. Berdasarkan gambar 5.14 skor domain layanan adalah 3.12 dengan skor masing-masing indikator adalah naskah dinas 3.00, kepegawaian 4.00, perencanaan 4.00, penganggaran 4.00, keuangan 4.00, akuntabilitas kinerja 4.00, pengadaan 4.00, pengaduan public 4.00, JDIH 3.00, WBS 1.00, Pelayanan publik 1 1.00, pelayanan publik 2 1.00 dan pelayanan publik 3 1.00.

### 5.4.3 Kabupaten Trenggalek

Hasil evaluasi SPBE ini dinyatakan dalam indeks SPBE. Hasil perhitungan indeks SPBE diperoleh dari nilai masing-masing domain. Sedangkan nilai domain diperoleh dari masing-masing aspek. Hasil perhitungan indeks agar lebih enak dibaca ditampilkan dalam diagram 3 dimensi. Berikut hasil nilai SPBE Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada gambar 5.15 berikut.



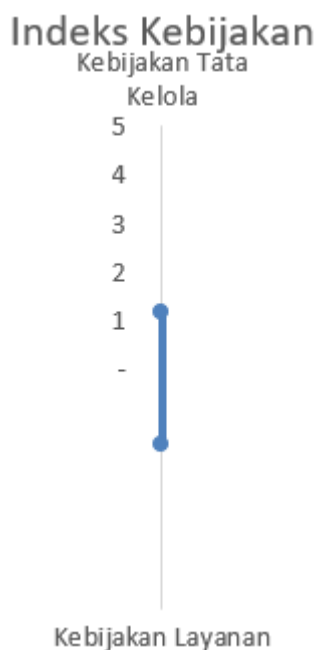
**Gambar 5. 15** Indeks SPBE Kab. Trenggalek

Dari gambar 5.15 dapat dijelaskan bahwasanya nilai indeks SPBE Kabupaten Trenggalek mencapai skor 1.80. Skor 1.80 didapat dari masing-masing domain yang digambarkan dalam chart dimana domain Kebijakan mendapat skor 1.41, domain Tata Kelola mendapat skor 1.57 dan Domain Layanan mendapat skor 2.03. Gambar diagram *spider chart* yang menunjukkan titik mendekati tepian menunjukkan

capaian atau nilai yang tinggi. Semakin mendekati tepian maka diansumsikan nilainya semakin tinggi dan hasilnya mendekati baik. Untuk nilai masing-masing domain dapat dilihat pada penjelasan sub bab berikut ini.

#### 5.5.1.7 Domain Kebijakan

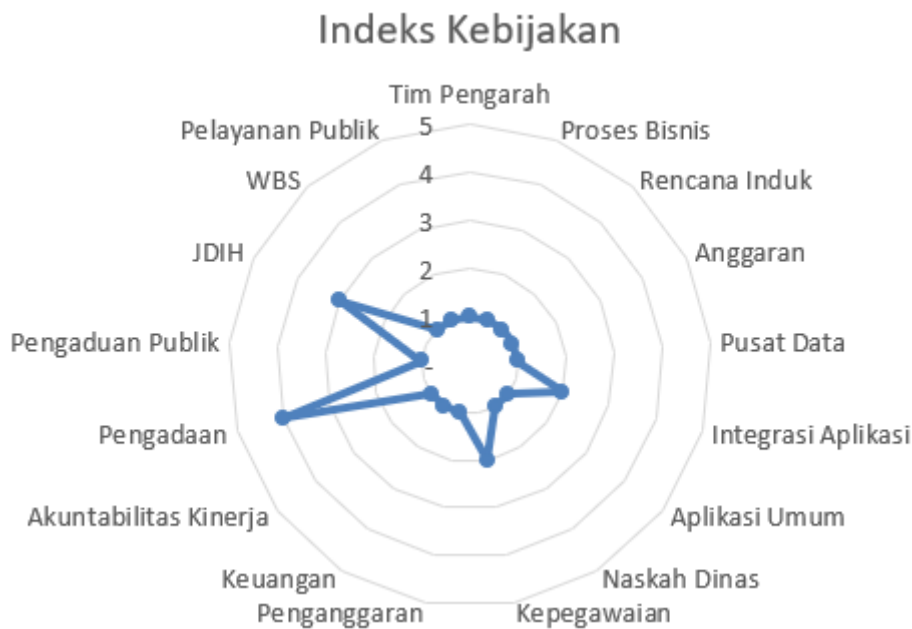
Domain kebijakan tersusun dari 2 bagian yaitu melalui penilaian aspek dan Indikator. Untuk perolehan skor pada aspek pertama domain kebijakan dapat dilihat pada gambar 5.16 berikut ini.



**Gambar 5. 16** Indeks Domain Kebijakan

Domain kebijakan terbagi menjadi 2 aspek yaitu aspek kebijakan tata kelola dan aspek kebijakan layanan. Berdasarkan gambar 5.16 domain kebijakan mendapat skor 1.41 dengan skor kebijakan tata kelola 1.14 dan skor kebijakan layanan 1.60.

Domain Kebijakan yang kedua dapat dilihat pada gambar 5.17 berikut.



**Gambar 5. 17** Indeks Domain Kebijakan

Indeks domain kebijakan yang kedua tersusun dari beberapa indikator diantaranya tim pengarah, proses bisnis, rencana induk, anggaran, pusat data, integritas aplikasi, aplikasi umum, naskah dinas, kepegawian, penganggaran, keuangan, akuntabilitas kinerja, pengadaan, pengaduan public. JDIH, WBS dan Pelayanan publik. Berdasarkan gambar skor indeks domain kebijakan yang kedua adalah 1.41 dengan skor tim pengarah 1.00, proses bisnis 1.00, rencana induk 1.00, anggaran 1.00, pusat data 1.00, integritas aplikasi 2.00, aplikasi umum 1.00, naskah dinas 1.00, kepegawian 2.00, penganggaran 1.00, keuangan 1.00, akuntabilitas kinerja 1.00, pengadaan 4.00, pengaduan publik 1.00, JDIH 3.00, WBS 1.00 dan pelayanan publik 1.00.

#### 5.5.1.8 Domain Tata Kelola

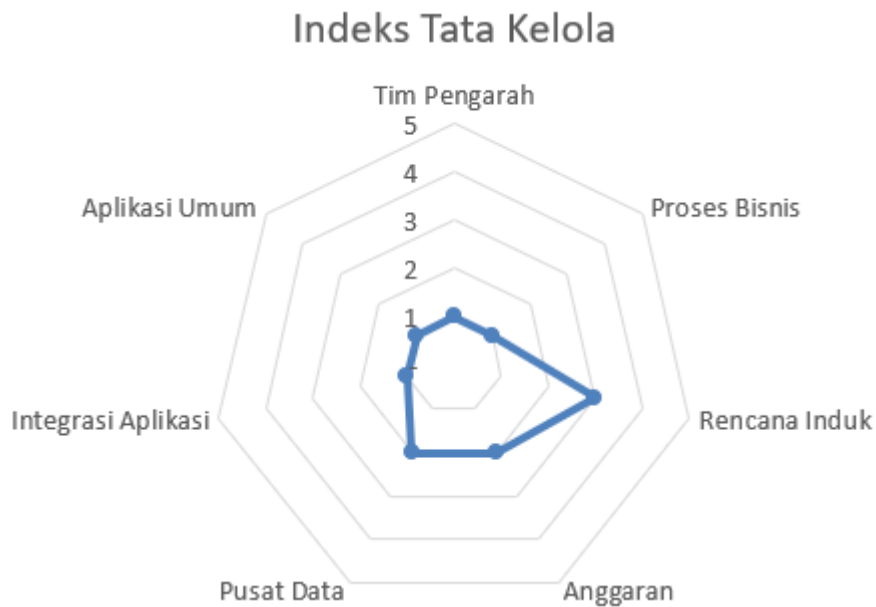
Domain Tata Kelola tersusun dari 2 bagian yaitu melalui penilaian aspek dan Indikator. Untuk perolehan skor pada aspek pertama domain tata kelola dapat dilihat pada gambar 5.18 berikut ini.



**Gambar 5. 18** Indeks Domain Tata Kelola

Domain tata kelola tersusun dari 3 aspek, diantaranya kelembagaan, strategi dan pengembangan dan TIK. Skor indeks tata kelola berdasarkan gambar 5.18 adalah 1.57 dengan kelembagaan memperoleh skor 1.00, strategi dan perencanaan 2.50 dan TIK memperoleh skor 1.33.

Domain tata kelola yang kedua dapat dilihat pada gambar 5.19 berikut.



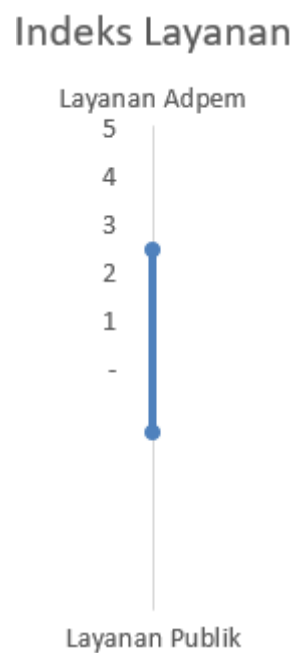
**Gambar 5. 19** Indeks Domain Tata Kelola

Indeks domain tata kelola tersusun dari beberapa indikator diantaranya tim pengarah, proses bisnis, rencana induk, anggaran, pusat data, integritas aplikasi dan

aplikasi umum. Skor dari domain tata kelola berdasarkan gambar 5.19 adalah 1.57 dengan masing-masing indikator adalah tim pengarah 1.00, proses bisnis 1.00, rencana induk 3.00, anggaran 2.00, pusat data 2.00, integrase aplikasi 1.00 dan aplikasi umum 1.00.

#### 5.5.1.9 Domain Layanan

Domain Layanan tersusun dari 2 bagian yaitu melalui penilaian aspek dan Indikator. Untuk perolehan skor pada aspek pertama domain layanan dapat dilihat pada gambar 5.20 berikut ini.

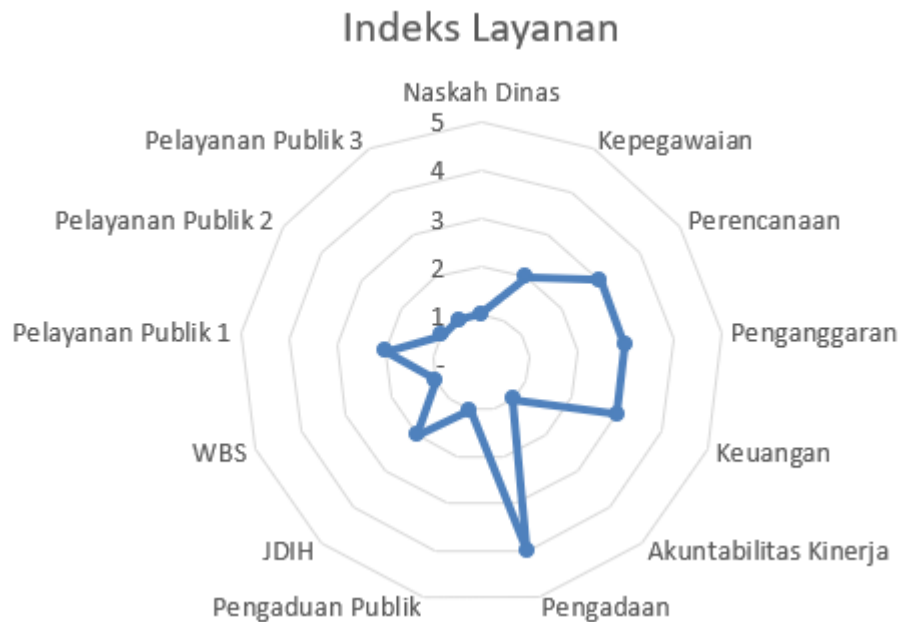


**Gambar 5. 20** Indeks Domain Layanan

Domain Layanan tersusun dari 2 aspek yaitu aspek layanan adpem dan layanan public. Skor domain layanan pada gambar 5.20 adalah 2.03 dengan skor masing-masing aspek layanan adpem 2.43 dan layanan publik 1.33.

Domain layanan yang kedua dapat dilihat pada gambar 5.21 berikut.





**Gambar 5. 21** Indeks Domain Layanan

Domain layanan tersusun dari beberapa indikator diantaranya naskah dinas, kepegawaian, perencanaan, penganggaran, keuangan, akuntabilitas kinerja, pengadaan, pengaduan public, JDIH, WBS, pelayanan public 1, pelayanan public 2 dan pelayanan public 3. Berdasarkan gambar 5.21 skor domain layanan adalah 2.03 dengan skor masing-masing indikator adalah naskah dinas 1.00, kepegawaian 2.00, perencanaan 3.00, penganggaran 3.00, keuangan 3.00, akuntabilitas kinerja 1.00, pengadaan 4.00, pengaduan public 1.00, JDIH 2.00, WBS 1.00, Pelayanan publik 1 2.00, pelayanan publik 2 1.00 dan pelayanan publik 3 1.00.

## 5.5 Analisis Data

Pada penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan spiral analisis data. Spiral analisis data melalui 3 tahapan yaitu (1) pengumpulan data, (2) membaca dan membuat memo, serta (3) menorganisasikan data. Berikut adalah penjelasan lebih rinci dari masing-masing tahapan analisis data menggunakan spiral analisis data.

### 5.5.1 Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif studi kasus. Untuk memulai melakukan analisis data pada penelitian studi kasus, tahap awal yang dilakukan adalah mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan dengan

menajemen data. Proses manajemen pengumpulan data dilakukan dengan mengelompokkan hasil rangkuman dan dokumen kedalam folder. Berikut adalah langkah manajemen data yang dilakukan peneliti.

1. Membuat Folder pada computer dengan nama “**Hasil Wawancara**”.
2. Membuat subfolder sesuai dengan kategori narasumber dan informan. Contoh yang bisa dilakukan dengan membuat folder “**Y**”.
3. Menyimpan dan memindahkan semua dokumen pendukung kedalam folder yang sudah dibuat sesuai dengan nama informan dan narasumber.
4. Memberikan nama file sesuai dengan ketentuan sebagai berikut : [Kategori Informan] [Tanggal Wawancara] [Nama]. Contoh dalam pengaplikasiannya menjadi seperti berikut “[**Y**][**19-11-2018**][**Suyoto**]”.

### **5.5.2 Membaca dan Membuat Memo**

Tahapan selanjutnya setelah melakukan pengumpulan data adalah membaca dan membuat memo. Proses ini dilakukan dengan memaknai database secara keseluruhan, mencoba memahami dan memaknai hasil wawancara sebagai kesatuan yang utuh. Dalam memudahkan proses pemahaman dilakukan pencatatan hasil wawancara kedalam dokumen naskah hasil wawancara. Dokumen hasil wawancara secara keseluruhan dapat dilihat pada bagian lampiran.

### **5.5.3 Mengorganisasikan Data**

Tahap selanjutnya pada proses analisis data adalah mengorganisasikan data. Pengorganisasian data ini mencakup mendeskripsikan, mengklasifikasikan dan menafsirkan data menjadi kode dan tema. Pengkodean atau pengkategorian merupakan hal yang penting dalam penelitian kualitatif. Proses dilakukan dengan membuat diskripsi secara mendetail. Peneliti melakukan identifikasi kategori penelitian dari hasil pengumpulan data dan informasi. Pertanyaan dikelompokkan agar menjadikan suatu pernyataan yang bermakna.

#### **5.5.3.1 Identifikasi Kategori**

Peneliti melakukan identifikasi terkait kategori penelitian dari hasil pengumpulan data dan informasi. Peneliti mengkategorikannya menjadi 5 kategori diantaranya 1) *Strong Leadership*, 2) *Vision and Mission*, 3) *Align IT and Goal*

*Strategy*, 4) *Commitment* dan 5) *Leadership functions*. Untuk lebih jelasnya peneliti menjabarkan identifikasi kategori kedalam tabel 5.7 berikut ini.

**Tabel 5. 7** Identifikasi Kategori

No	Kategori	Penjabaran	Sumber
1	Strong Leadership	Kategori diambil dari hasil wawancara kepada informan dan narasumber pada pertanyaan nomor 1 sampai 6.	OECD (2003), Weiling Ke and Kwok Kee Wei (2004), H. Kifle & Patrick L Kim, 2009, Lufman (2004), Heeks, R (2003), Ndou, V (2004), Layne and lee (2001), E. Marwan et al (2007), Dr. Nasser Said & Yared Hala (2003), Kim <i>et al.</i> , (2009), Leitner and Kreuzeder (2005).
2	Vision and Mission	Kategori diambil dari hasil wawancara kepada informan dan narasumber pada pertanyaan nomor 7 sampai 11.	OECD (2003), Kotter(1996), Weiling Ke and Kwok Kee Wei (2004), M. Almarabeh and Ali (2007), Ojo et al (2007), Dr. Nasser Said & Yared Hala (2003), Rahardjo (2008), Burke (2008), O'Donnell et al. (2003), Jaeger and Thompson (2003), Ke and Wei (2004), Elnaghi et al. (2007), Dawes S (2008), Leitner and Kreuzeder (2005), Gordon Z.O (2004).
3	Align IT and Strategi Goals	Kategori diambil dari hasil wawancara kepada informan dan narasumber pada pertanyaan nomor 12 sampai 16.	M. Almarabeh and Ali (2007), Lufman (2004), E. Marwan et al (2007), Andoh-Baidoo and Osatuyi (2009), Weerakkody and Dhillon, (2008), Irani <i>et al.</i> (2003), Avolio B & Kahai S, (2013), K. Mohammad (2009), Dawes S (2008), Jean-Pierre Auffret, et all (2010).
4	Commitment	Kategori diambil dari hasil wawancara kepada informan dan narasumber pada	Ojo et al (2007), UNPOG (2012), Rahardjo (2008), Heeks and Stanforth, (2007), Zairi (1994, p. 9), Leitner and Kreuzeder (2005).

		pertanyaan nomor 17 sampai 22.	
5	Leaderships Functions	Kategori diambil dari hasil wawancara kepada informan dan narasumber pada pertanyaan nomor 23 sampai 27.	Burke (2008), Yalom and Miles (1995).

### 5.5.3.2 Deskripsi Kategori

Tahap selanjutnya pada penelitian ini adalah dengan mendeskripsikan kategori secara lebih detail dengan makna dan temuan dari setiap kategori. Proses ini dilakukan dengan mengembangkan pernyataan penting dari tiap kategori. Penjelasan detail tentang kategori dijelaskan dalam tabel 5.8 berikut ini.

**Tabel 5. 8** Deskripsi Kategori

No	Kategori	Deskripsi Kategori
1	Strong Leadership	Kepemimpinan yang kuat tidak lain adalah kepemimpinan yang efektif yang mampu mengelola SDM yang ada guna mewujudkan tujuannya. Pertanyaan tentang strong leadership (kepemimpinan yang kuat) mencangkup model kepemimpinan yang digunakan, manajerial kepemimpinan, latar belakang pendidikan pemimpin dan <i>relationships</i> .
2	Vision and Mission	Visi dan Misi dari seorang pemimpin dalam menjalankan tugas sebagai tujuan yang ingin dicapai. Pertanyaan tentang visi dan misi pemimpin mencangkup apakah visi dan misi dishare ke stakeholders, visi dan misi mudah dipahami dan selaras dengan tujuan yang ingin dicapai organisasi atau pemerintahan.
3	Align IT and Strategi Goals	Kesadaran seorang pemimpin dalam memanfaatkan IT sebagai alat atau strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Pertanyaan tentang align IT dan Strategi Goals mencangkup seberapa besar peran IT dalam menjalankan kepemimpinan dan

		bagaimana proses change management dari yang sebelumnya manual menjadi sistem terkomputerisasi.
4	Commitment	Keinginan atau kemauan dari pemimpin dan yang dipimpin untuk mencapai keberhasilan yang didambakan. Pertanyaan tentang komitmen mencakup pemimpin berani mengambil resiko dari perubahan system, ada tidaknya tim inovatif pembentuk kebijakan, membina mental berani mencoba atau berinovasi, memimpin masa depan dan kepercayaan kepada seluruh tim kerja.
5	Leadership Functions	Fungsi kepemimpinan atau kemampuan memimpin yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pertanyaan tentang leadership functions mencakup proteksi yang diberikan pimpinan, bentuk control yang dijalankan, dan memberikan support.

## 5.6 Temuan dan Hasil Penelitian

Pada tahap ini peneliti menjelaskan 5 temuan besar dari hasil penelitian yang dilakukan. Masing-masing temuan akan dijelaskan secara detail sebagai berikut.

1. *Strong Leadership* merupakan faktor dari e-leadership yang dapat mempengaruhi kesuksesan penyelenggaraan e-government.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan dalam penelitian ini, diketahui bahwa strong leadership (pemimpin kuat) merupakan faktor e-leadership yang mempengaruhi kesuksesan penyelenggaraan e-government. Kategori narasumber Y menyatakan bahwa pentingnya pemimpin yang kuat sejak awal menerapkan IT adalah bukan perkara gagah-gagahan melainkan berdasarkan fungsinya. Pemerintah dengan IT mengedepankan aspek transparansi, akuntabilitas, inovasi dan partnership. Kategori Informan X1 menyatakan pemimpin yang kuat dapat menghire anggotanya untuk dapat mengeluarkan kemampuan terbaiknya demi mewujudkan tujuan organisasi.

Pemimpin juga harus selalu mengaktualisasi diri utamanya dalam bidang IT agar terus bisa mengikuti perkembangan teknologi. Informan X2 dan X3 menyatakan pemimpin harus kuat, dalam arti tidak disepelekan oleh OPD. Pemimpin harus dihargai dan disegani oleh OPD agar menjadi hal yang baik untuk pelayanan public ke masyarakat. Informan X4 menyatakan pemimpin harus memiliki keinginan yang kuat, komitmen yang kuat untuk mensukseskan pemerintahan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan masing-masing narasumber dan informan yang dirangkum dalam tabel 5.9 berikut.

**Tabel 5. 9** Pernyataan Informan tentang Strong Leadership

1. Pernyataan tentang <i>Strong Leadership</i>	
Kode Informan	Pernyataan
<b>Y.SY.SL_1</b>	Pentingnya peran <b>pemimpin yang kuat</b> adalah dengan mengetahui sejak awal <b>bahwa IT itu bukan perkara gagah-gagahan.</b> Melainkan dengan mempertimbangkan <b>funksinya.</b> Maka dari itu bukan <b>canggihnya tetapi fungsionalnya</b> yang membuat tumbuh dan berkembangnya pemerintahan dan tiba-tiba menjadi bagian dari hidupnya (jalanya pemerintahan itu sendiri). Pemerintah mengedepankan aspek <b>transparansi, akuntabilitas inovasi dan partnership</b> karena itu yang menjadi <i>value</i> dari <b>open government.</b> Pemimpin yang memahami tentang konsep dasar mengapa IT digunakan itu akan <b>dengan cepat mengadopsi</b> <b>keperluan</b> <b>akseleasi pemerintahannya.</b> Tapi bagi yang tidak mengerti biasanya takut terhadap teknologi itu. <b>Saya tidak bisa membayangkan jika pemimpin tidak welcome pada IT pasti susah karena anak buahnya harus meyakinkan pemimpinnya.</b> Karena IT merupakan alat yang digunakan untuk menuju kepemimpinan yang efektif namun kalo malah menyusahkan yaa tidak boleh dipaksa untuk menggunakan IT nanti hasilnya malah kurang maksimal. Di kota-kota maju IT nya pasti bagus sehingga pemimpinnya efektif dalam menjalankan pemerintahan.
<b>X1.KS.SL_1</b>	<b>Pemimpin yang kuat dapat menghire anggotanya untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk</b>

	<p><b>mewujudkan tujuan organisasi.</b> Disamping itu pemimpin harus <b>terus mengakualisasi diri utamanya di bidang IT</b> agar terus bisa mengikuti perkembangan teknologi. Latar belakang pendidikan pimpinan yang berkaitan dengan IT lebih bagus dimiliki tetapi tidak wajib. <b>Jadi di dalam leader kan ada tingkatan top leader, middle dan low leader itu berbeda. Kalau lower leader itu adalah teknikal skill yang mereka butuhkan lebih banyak. Kalau di middle itu antara teknikal dan managerialnya itu sama. Jika top itu di managerial. Karena disiapkan dalam top leader kalau tahu sedikit IT maka teknisnya itu akan pada lower manajer tapi pimpinan hanya bisa direction/mengarahkan.</b></p>
<p><b>X2.SB.SL_1</b> <b>X3.HP.SL_1</b></p>	<p><b>Pemimpin harus kuat, continue dan meningkat. Kuat disini dalam arti tidak disepelekan oleh OPD.</b> Jika hal ini bisa terjadi akan menjadi hal yang baik untuk pelayanan publik ke masyarakat untuk mencapai visi dan misi pemerintahan. <b>Latar belakang pendidikan pemimpin mengenai IT itu perlu tapi tidak wajib. Tidak perlu sangat teknis tapi harus tahu TI itu bisa dimanfaatkan untuk ini maka didorong.</b> Cukup dengan tahu wawasan sudah cukup, namun jika tahu lebih sempurna. <b>Misal data-data makro yang untuk mencapai visi misi walikota yang beliau perlukan, contoh membutuhkan data ini tampilkan sehingga saya bisa monitor itu sudah IT harus masuk.</b> Terkait kerjasama pimpinan dengan pihak luar demi melancarkan proses kerja <b>penawaran-penawaran khusus di Kominfo ada kemarin GSIO ke ITS ada teman dapat beasiswa kesana, kemudian ada yang berangkat ke Bandung masalah fiber optic.</b></p>
<p><b>X4.MH.SL_1</b></p>	<p><b>Pemimpin harus memiliki keinginan yang kuat, komitmen yang kuat untuk mensukseskan penyelenggaraan e-government.</b> Saya rasa pak bupati sekarang memiliki itu semua, soalnya kalau pas ada rapat dan paparan itu pak bupati rasanya paham semua yang dikerjakan gitu. <b>Jadi kita juga istilah kasarnya harus belajar dulu agar nanti kalo ditanya-tanya kita juga bisa menjawab. Naah disinilah yang</b></p>

	<p><b>akhirnya memaksa anggota lain untuk mengupdate wawasan juga akhirnya bisa turut mensukseskan pemerintahan.</b> Model kepemimpinan yang digunakan <b>kalua pak bupati rasanya berbasis ide-ide atau masalah dari masyarakatnya.</b> Soalnya dulu pas pertama menjabat bapak bupati melalui bapeda pernah mengadakan sebuah lomba untuk menggali ide. Mengenai latar belakang pendidikan pemimpinya <b>kalau pendidikan khusus mungkin tidak perlu karena pimpinan kan kebijakan tapi kalau punya kompetensi lebih bagus lagi.</b> Kalau Bupati sekarang pak emil sangat-sangat berkompeten seperti dalam paparan selalu paham. Karena bapak Bupati sudah sangat berkompeten ya mungkin kalau bupati pasti fungsi manajerial, IT meskipun tidak detail juga harus paham misal smart regency dari petanya dan fungsi itukan pasti paham tidak harus keteknis tapi secara gambaran umumnya paham. <b>Tidak harus lulusan IT yang penting tahu dan mau mengikuti perkembangan IT dan mampu menerjemahkan kegunaan IT juga terbuka tidak menutup saran dan masukan untuk mau belajar mengikuti perkembangan saat ini.</b></p>
--	---

Poin penting sebagai kunci adalah

- *Pemimpin kuat mengetahui bagaimana IT dapat dimanfaatkan untuk membantu proses jalannya pemerintahan. IT bukan menjadi ajang gaya-gayaan dalam mengikuti perkembangan teknologi, lebih dari itu adalah mengenai fungsinya yang dapat membantu pekerjaan di pemerintahan.*
- *Pemimpin yang kuat tidak harus memiliki latar belakang pendidikan berbasis IT namun minimal mengetahui perkembangan IT dan mau terus mengaktualisasi diri agar tidak ketinggalan zaman.*
- *Pemimpin dalam menjalankan pemerintahan tidak bisa lepas dari kerjasama dengan pihak lain sebagai contoh yang dilakukan oleh Pemerintah Bojonegoro dengan Pemeritah Koa Surabaya lewat*



*pengembangan aplikasi Musreimbang yang diadopsi dari SIPADU. Pemerintah Kota Madiun yang bekerjasama dengan PT. Telkom untuk mewujudkan internet gratis di tiap-tiap penjuru kota. Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang melakukan tandatangan MoU dengan Kabupaten Banyuwangi untuk saling berbagi aplikasi.*

- *Berbagai kerjasama tersebut diakukanguna meningkatkan kinerja pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang sukses.*
- *Pemimpin yang kuat dengan segala Teknik dan terobosannya dapat menjadikan suksesnya penyelenggaraan e-government.*

Untuk itu dapat disimpulkan bahwasanya pemimpin yang kuat dapat mensukseskan pelaksanaan e-government. Temuan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Weiling Ke and Kwok Kee Wei (2004), H. Kifle & Patrick L Kim, (2009), Lufman (2004), Heeks, R (2003), Ndou, V (2004), Layne and lee (2001), E. Marwan et al (2007), Dr. Nasser Said & Yared Hala (2003), Kim *et al.*, (2009), Leitner and Kreuzeder (2005).

2. *Vision and Mission* merupakan faktor dari e-leadership yang dapat mempengaruhi kesuksesan penyelenggaraan e-government.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan dalam penelitian ini, diketahui bahwa vision and mission (visi dan misi) merupakan faktor e-leadership yang mempengaruhi kesuksesan penyelenggaraan e-government. Kategori narasumber Y menyatakan visi dan misi merupakan acuan untuk tolok ukur keberhasilan pemimpin dalam menjalankan pemerintahannya. Visi dan misi merupakan sebuah komitmen sekaligus janji dari pimpinan untuk diwujudkan bersama. Kategori informan X1 Visi dan Misi pimpinan itu yang mendorong seorang pemimpin untuk melakukan tugas dan fungsinya. Tentunya semua kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin (kepala daerah) adalah kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah dicanangkan. Kategori informan X2 dan X3 Tercapainya visi secara otomatis kesuksesan akan diraih. Disini visi dan misi sebagai tolok ukur keberhasilan pemerintahan, apakah sudah tercapai apa belum. Kategori

informan X4 menyatakan Di dibuatnya visi dan misi yang jelas dan terukur tentunya akan memudahkan kepala daerah dan perangkat daerah untuk mewujudkannya. Dengan mewujudkan visi dan misi tersebut maka akan terbentuknya kesuksesan bagi pemimpin. Hal ini diperkuat dengan pernyataan masing-masing narasumber dan informan yang dirangkum pada tabel 5.10 sebagai berikut.

**Tabel 5. 10** Pernyataan Informan tentang *Vision and Mission*

2. Pernyataan tentang <i>Vision and Mission</i>	
Kode Informan	Pernyataan Informan
Y.SY.VM_2	<p><b>Visi dan misi merupakan sebuah komitmen sekaligus janji dari pemimpin untuk diwujudkan.</b> Dengan diwujudkan visi dan misi maka pemerintahan dianggap berhasil. <b>Dalam visi dan misi ini juga ada langkah-langkah yang harus dikerjakan untuk mewujudkannya. Kami memiliki Dewan IT yang tugasnya semacam perencanaan IT kedepan membuat dokumen <i>master plan IT Bojonegoro</i>.</b> Perencanaan pembangunan IT, fungsi IT seperti apa kedepannya. Sehingga jika ada usulan IT apapun harus melalui uji relevan atau tidak dengan <i>masterplan</i> itu. <b>Terkait visi dan misi Saya tidak menyebutkan dokumen resmi tapi saya menyebutkan ada 6 pilar pembangunan: ekonomi, lingkungan hidup, sosial, fiscal, good governance, dan leadership.</b> Didalam good governance transformasi itulah sebenarnya point IT sebagai fasilitas bukan sebagai tujuan. <b>Untuk memastikan visi dan misi diketahui oleh stakeholders ada kombinasi offline orang bisa dialog publik dialog jum'at selalu saya buka intinya itu komunikasi. Semangat dari itu semua "<i>government should connected with people</i>", gunanya <i>present</i>(hadir) and <i>connect</i>(nyambung) itulah spirit dari pemerintah kepada masyarakatnya.</b></p>
X1.KS.VM_2	<p><b>Visi dan Misi dari pemimpin itu yang mendorong seorang pemimpin untuk melakukan tugas dan fungsinya.</b> Tentunya semua kegiatan yang dilakukan</p>

	<p>oleh pemimpin (kepala daerah) adalah kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah dicanangkan bersama. <b>Visi dan Misi tertulis pada RPJMD di web kita RPJMD 2013-2018 ada target disitu berbunyi mewujudkan tata pemerintahan yang baik good and clean government dishare di website terkait ini.</b> Lebih baik dilebarkan ke tata kelola pemerintahan karena person itu kan bagian dari subjek yang dianalisis. <b>Visi misi individual menjadi visi misi institusional yang tertuang dalam RPJMD jadi yang kita lakukan produk peraturan daerah regualasi legal standingnya disitu.</b> Tentunya di situ diawali visi misi ada tujuan ada sasaran ada kebijakan inilah <b>disebut kinerja brackdownnya RPJMD ini tingkat kabupaten maka pelaksana OPD lalu ada Renstra dari kebijakan tambah lagi program dan kegiatan.</b> Indikator sasaran RPJMD ini menjadi tujuannya renstra. Misal Makronya kabupaten ingin mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik itu semua OPD kan melakukan. <b>Jika pada Kominfo merubah tata kelola konvensional menjadi tata kelola berbasis IT SPBE menjadi tujuan per 5 tahun. Lalu pertahunnya ada RKPD (Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah) lalu di OPD ada RENJA. Dari 2 ini muncul brackdown tahunannya RKADBA anggaran ini dilaksanakan dievaluasi tahunannya namanya SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Apakah pelaksanaannya ini sudah memberikan dorongan untuk mewujudkan visi dan misi OPD.</b></p>
<p><b>X2.SB.VM_2</b> <b>X3.HP.VM_2</b></p>	<p><b>Kalo visinya tercapaian secara otomatis kesuksesan akan diraih. Disini visi dan misi sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintahan. Apakah sudah tercapai atau belum seperti itu.</b> Visi misi di pemkot madiun selaras dengan tujuan instansi karena ada dokumen resminya semacam peraturan walikota (perwali). <b>Untuk proses sosialisasi visi dan misi sendiri biasanya ada forum lalu kita sampaikan misal aplikasi baru juga pada level bawahnya. Kita butuh tenaga admin, ada pejabat-pejabat yang menyatakan tentang komitmennya. Di masyarakat</b></p>

	<p>ada <b>KIM ada relawan TIK itu menjadi ujung tombak kami</b>. Semua kegiatan yang direncanakan tentunya dalam rangka menuju tercapainya visi dan misi. <b>Dengan mereka melakukan kegiatan yang sudah direncanakan dalam masterplan brati mereka sudah paham dengan visi dan misi yang ada</b>. Visi yang baik dengan indikator pencapaian yang jelas memudahkan para stakeholders untuk memahaminya. <b>Dengan mencapai visi dan misi maka kesuksesan e-government akan tercapai</b>. Tentunya dengan kerjasama antar OPD yang ada di pemerintahan Kota Madiun.</p>
<p><b>X4.MH.VM_2</b></p>	<p>Dibuatnya visi dan misi yang jelas dan terukur tentunya akan memudahkan kepala daerah dan perangkat daerah untuk mewujudkannya. <b>Dengan mewujudkan visi dan misi tersebut maka akan terbentuknya kesuksesan bagi pemimpin. Kalo pada RPJMD itu visi dari kepemimpinan yang berkaitan dengan IT tentunya dan diskominfo ada. Tepatnya di visi nomor 1. Selain itu ada juga visi dan misi yang berkaitan dengan IT di isian form SPBE</b>. Untuk tertulisnya memang tidak ada, namun tersirat dengan meningkatkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Yang mana efektif dan efisien yang dimaksud adalah dengan memanfaatkan TIK. <b>Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya visi dan misi pemerintahan tertuang dalam RPJMD. Yang mana dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program pemimpin (kepala daerah) yang mana penyusunannya berpedoman terhadap RPJM nasional</b>. Selain itu diawal penyusunan masterplan pengembangan e-government kami melakukan <b>FDG ke dinas-dinas terkait visi dan misi yang akan dicantumkan dalam masterplan</b>. Kemudian setelah FDG masukan dari dinas-dinas terkait kita tamping kemudian kita finalisasi masterplannya baru kemudian di share. Untuk sosialisasi visi dan misi terkait IT sudah ada roadmapnya. <b>Selain itu kami juga selalu mengusahakan yang terbaik salah satunya kita memiliki masterplan pengembangan e-government yang dimana didalamnya terdapat visi dan misi</b></p>

	<p><b>terkait IT.</b> Untuk saat ini kami masih mengupayakan proses nya untuk dijadikan sebagai peraturan bupati, hingga kini sedang proses penetapan.</p>
--	--

Poin penting sebagai kunci adalah

- *Visi dan Misi pemimpin merupakan acuan atau tolak ukur seberapa berhasil pemimpin dalam menjalankan pemerintahannya. Untuk itu diperlukan visi dan misi yang jelas dan dapat dipahami oleh seluruh stakeholders pemerintahan.*
- *Dalam upayanya seringkali misi dan visi individu (pemimpin) menjadi visi dan misi institusional. Di pemerintahan visi dan misi tertuang dalam RPJMD dan Masterplan pemerintahan.*
- *Dalam dokumen RPJMD dijabarkan secara detail bagaimana visi dan misi itu dicapai. Terdapat berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi tersebut.*
- *Sebaiknya pemerintah memiliki Lembaga Independent seperti yang ada di Kabupaten Bojonegoro dengan Dewan IT nya. Lembaga independent ini bertugas memantau apakah usulan kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan masterplan apa belum, sehingga semua usulan kegiatan bisa selaras dengan tujuan pemerintahan. Di Pemkot Madiun ada semacam relawan TIK dan KIM sebagai ujung tombak dari sosialisasi visi dan misi kepada masyarakat.*
- *Dengan pemahamannya seluruh stakeholders akan visi dan misi pemerintahan maka mereka akan bahu membahu untuk mewujudkannya demi kesuksesan pemerintahan.*

Untuk itu dapat disimpulkan bahwasanya visi dan misi dapat mensukseskan pelaksanaan e-government. Temuan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kotter(1996), Weiling Ke and Kwok Kee Wei (2004), M. Almarabeh and Ali (2007), Ojo et al (2007), Dr. Nasser Said & Yared Hala (2003), Rahardjo (2008), Burke (2008), O'Donnell et al. (2003), Jaeger and

Thompson (2003), Ke and Wei (2004), Elnaghi et al. (2007), Dawes S (2008), Leitner and Kreuzeder (2005), Gordon Z.O (2004).

3. *Align IT and Goals Strategi* merupakan faktor dari e-leadership yang dapat mempengaruhi kesuksesan penyelenggaraan e-government.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan dalam penelitian ini, diketahui bahwa *Align IT and Goals Strategi* (keselarasan IT dan tujuan strategi) merupakan faktor e-leadership yang mempengaruhi kesuksesan penyelenggaraan e-government. Kategori narasumber Y menyatakan IT itu adalah alat untuk kita untuk bekerja lebih efektif dan efisien. IT itu alat untuk memfasilitasi seluruh proses pemerintahan mulai dari perencanaan, deliberate, sampai kepada budgeting, sampai pada pengadaan, reporting, pengawasan, sampai evaluasi itu seluruh proses pemerintahan itu difasilitasi oleh IT. Visinya ya itu terkait alat/tool untuk mempercepat seluruh proses pemerintahan yang demokratis, partisipatif. Kategori informan X1 menyatakan kami berubah menuju kepemimpinan yang transparan berkat mengadopsi IT. IT sebagai tool dan masa depan pemerintahan. Kita bergantung pada IT namun kembali lagi IT hanya alat manusia atau SDM yang paling utama. Kategori Informan X2 dan X3 menyatakan Mau tidak mau kita harus menggunakan IT agar memudahkan kita dalam menjalankan pemerintahan. Sekarang serba online, serba aplikasi dan serba terintegrasi. Dari pusat sudah menggunakan aplikasi jika tidak mengikuti kita akan ketinggalan dengan itu semua. Kategori informan X4 menyatakan dengan menggunakan IT kinerja kita jadi lebih mudah. Sebenarnya kan bukan pada e-nya tatpi tujuan e-government adalah pelayanan kepada masyarakat. Jadi harus ada hasil akhirnya yang meningkatkan pelayanan pada public. Dengan menggunakan IT tentunya pelayanan public jadi lebih baik. Hal ini diperkuat dengan pernyataan masing-masing narasumber dan informan yang dirangkum pada tabel 5.11 sebagai berikut.

Tabel 5. 11 Pernyataan Informan tentang *Align IT and Goals Strategi*

3. Pernyataan tentang <i>Align IT and Goals Strategi</i>	
Kode Informan	Pernyataan Informan
Y.SY.IT_3	<p>Pengalaman saya merasa sudah berpengalaman di kota dulu di UnMuh Malang dan menjadi direktur eksekutif LION Air di Jakarta. Sehingga saya merasa balik ke kampung saya harus melengkapi kantor dengan skype dan email agar orang bisa berbincang, <b>agar mereka tahu seperti ada teknologi seperti ini.</b> Saya meminta Telkom waktu itu memasang Wifi di alun-alun di lingkungan pendopo supaya orang tahu ada teknologi seperti ini. Kemudian kalau orang sudah tau mereka akan menggunakannya dan setelah menggunakan mereka akan terbiasa dan itu akan memudahkan kami dalam mencapai tujuan Bersama. <b>Bojonegoro tidak akan dikenal banyak orang kalo bukan karena ITnya. Dengan IT kami bertransformasi untuk memudahkan layanan kepada masyarakat. Lebih transparan efisien dan tentunya muncul kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah. Lewat pemanfaatan dan pengelolaan IT yang baik pula bojonegoro masuk dalam nominasi pilot project dalam open government patnetships. Mungkin satu-satunya kabupaten yang punya fiber optic jaringan kabupaten ya Bojonegoro, makanya beberapa kita di CCTV jalan lalu monitor banjir punya bojonegoro sendiri. IT itu adalah alat untuk kita untuk bekerja lebih efektif dan efisien. IT itu alat untuk memfasilitasi seluruh proses pemerintahan mulai dari perencanaan, deliberate, sampai kepada budgeting, sampai pada pengadaan, reporting, pengawasan, sampai evaluasi itu seluruh proses pemerintahan itu difasilitasi oleh IT. IT menjadikan kami dipemerintahan mudah dalam melaksanakan tugas-tugas kami, pekerjaan kami menjadi lebih efisien, lebih transparan sehingga kita lebih enak aja kerjanya. Selain itu IT memudahkan masyarakat kami dalam mengakses informasi yang dibutuhkan sehingga masyarakat jadi lebih aware kepada kami. Hal itu yang</b></p>

	<p>menyebabkan suksesnya penyelenggaraan pemerintahan kami. Orientasinya dalam masyarakat puas akan kinerja dan layanan kami.</p>
<p><b>X1.KS.IT_3</b></p>	<p><b>Cilakanya lingkungan kita banyak yang tidak paham IT cara mengkomunikasikannya itu bahasa teknis IT, sehingga ketika kita ngomong orang lain tidak tahu. Sehingga peran leader dibutuhkan untuk menyatukan berbagai background kemampuan di organisasi dengan ada pertemuan rutin dan seharusnya menyampaikan permasalahan. IT itu sarana yang sangat membantu kita tapi jika alur dan culture masih egois dan sulit bekerjasama itu masih berat. kami berubah menuju kepemimpinan yang transparan berkat mengadopsi IT. IT sebagai tool dan masa depan pemerintahan. Kita bergantung pada IT namun kembali lagi IT hanya alat manusia atau SDM yang paling utama. IT itu adalah alat untuk kita untuk bekerja lebih efektif dan efisien. IT itu alat untuk memfasilitasi seluruh proses pemerintahan mulai dari perencanaan, deliberate, sampai kepada budgeting, sampai pada pengadaan, reporting, pengawasan, sampai evaluasi itu seluruh proses pemerintahan itu difasilitasi oleh IT. Visinya ya itu terkait alat/tool untuk mempercepat seluruh proses pemerintahan yang demokratis, partisipatif. untuk menuju tujuan pemerintah peranan IT sangat membantu kami. Semua tools IT itu sangat menunjang, tapi kembali lagi tools hanya akan menjadi tools jika tidak dioperasionalkan. Sehingga analisis itu perlu sebageian memakai mesin. IT Bojonegoro sudah mulai didevelop pada tahun 2008-2010. Kita mempunyai jaringan FO itu 2010/2011 milik sendiri 25 KM jadi seluruh OPD sudah tersambung miliknya Pemkab bukan milik vendor. Aplikasi juga kita miliki sudah banyak dulu awal 40-50 sekian aplikasi, sekarang sudah 81 aplikasi. Semua aplikasi dan infrastruktur tersebut dalam rangka kami mewujudkan tujuan instansi. Tentunya dengan menggunakan IT kinerja pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu yang menjadi IT sangat</b></p>



	<p>penting adalah transparansi. Dengan transparansi masyarakat akan menjadi mengetahui bahwa orang-orang dipemerintahan itu benar-benar bekerja sehingga menimbulkan kepercayaan. Dari rasa kepercayaan inilah yang menyebabkan masyarakat menjadi care, aware dengan pemerintah sehingga penyelenggaraan e-government menjadi sukses.</p>
<p>X2.SB.IT_3 X3.HP.IT_3</p>	<p>Karena sekarang memang sudah eranya IT. Mau tidak mau kita harus menggunakan IT agar memudahkan kita dalam menjalankan pemerintahan. Sekarang serba online, serba aplikasi dan serba terintegrasi. Dari pusat sudah menggunakan aplikasi jika tidak mengikuti kita akan ketinggalan dengan itu semua. Pasti lebih meningkat kepercayaanya istilahnya memang semakin tinggi kepercayaan dengan adanya sarana lewat IT sehingga merasakan kemudahan. Ada LAPOR dari sosial media kita dan pemerintah memfasilitasi wifi gratis sudah ada di 200 lebih titik sebagai pelayanan dasar yang ada di masyarakat. Jika pelayanan ada yang kurang akan menyampaikan contoh lampu PJO yang mati, mungkin pelayanan kependudukan yang kurang memuaskan, jalannya yang kurang bagus bisa melapor titik pusat wifi ada di pos kamling. Memang suatu program pemerintah ada positif dan negatifnya tapi ya itulah tuntutan perkembangan jaman IT kebutuhan masyarakat paham. Ada KIM, Relawan TIK, pemuda karang taruna yang membantu respon sekali. Ada pertemuan dan pembinaan KIM setiap bulan tentang diskusi masalah tanya jawab. Ketika ditanya mengenai bagaiman proses perubahan dari manual ke menggunakan IT pelan-pelan sebelumnya ada, Jilid 1 jaringan setiap kantor itu bisa tersambung semua dengan IT termasuk juga CCTV mau ada juga video conference juga. Baris jilid 2 ini gara-gara ada masalah di 2016 akhirnya kita menerapkan e-kinerja dan dari KPK kan kita dikekang untuk rencana aksi mengatasi korupsi. Jadi kita ada integrasi sistem antara perencanaan dan penganggaran sehingga</p>

	<p>ada e-kinerja. Dengan begitu mau tidak mau kita jadi melek dengan TI, transparan, efisien dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kami. Dengan begitu penyelenggaraan e-government akan semakin sukses. Parameternya adalah masyarakat puas dan tugas-tugas dapat diselesaikan dengan baik dan benar.</p>
<p>X4.MH.IT_3</p>	<p>Di zaman sekarang kita akan ketinggalan kalo tidak menyesuaikan dengan perkembangan IT. Dari awal trenggalek smart regency yaa aware sebenarnya, pak wakil bupati juga aware. Namun keinginan trenggalek menuju smart regency, e-government di kominfo khususnya masih kebingungan memulai smart regency ini. Kita kebingungan memulai smart regency ini dari mana lalu apakah yang sudah kita lakukan ini sudah memenuhi karakteristik dari e-government. Mungkin hanya di level beberapa persen saja karena semua sudah memanfaatkan IT (computer) seperti website dan ms office. <b>Penilaian tentang level pemanfaatan e-government sebenarnya juga sudah ada pada dokumen SPBE. dengan menggunakan IT kinerja kita jadi lebih mudah. Sebenarnya kan bukan pada e-nya tatpi tujuan e-government adalah pelayanan kepada masyarakat. Jadi harus ada hasil akhirnya yang meningkatkan pelayanan pada public. Dengan menggunakan IT tentunya pelayanan public jadi lebih baik. Untuk mewujudkan smart regency dibutuhkan peranan IT guna memudahkan dan memaksimalkan pelayanan public serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Di dokumen SPBE itu sudah dijelaskan bahwa kesuksesan penyelenggaraan e-government dipengaruhi oleh penggunaan IT. Karena semua yang ditanyakan dalam evaluasi SPBE tersebut berkaitan dengan IT. Mulai dari dokumen landasan hukum, tata kelola IT sampai penggunaan aplikasi-aplikasi yang menunjang kinerja pemerintahan.</b> Dari situ sudah jelas kalo IT mendukung penyelenggaraan e-government.</p>

Poin penting sebagai kunci adalah

- *IT adalah alat bagi pemerintahan untuk bekerja lebih efektif dan efisien. IT itu alat untuk memfasilitasi seluruh proses pemerintahan mulai dari perencanaan, deliberasi, sampai kepada budgeting, sampai pada pengadaan, reporting, pengawasan, sampai evaluasi.*
- *Dengan IT menjadikan pemerintahan mudah dalam melaksanakan tugas-tugas, pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih transparan sehingga “pemerintah lebih enak aja kerjanya”. Selain itu IT memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi yang dibutuhkan sehingga masyarakat jadi lebih aware kepada pemerintah.*
- *Pemerintah bergantung pada IT namun kembali lagi IT hanya sebagai alat manusia atau SDM yang paling utama. SDM harus dibekali kemampuan dengan mengupdate wawasan terkait IT.*
- *Di Roadmap pemerintahan memang ada kompetensinya meningkatkan kompetensi dengan ikut sertifikasi, ikut ini itu. Untuk anggaran-anggaran peningkatan kompetensi dipemerintahan khususnya di kominfo ini terbatas untuk yang lebih luas itu anggaran ada di BKD nanti ada bidang diklat.*
- *Menggunakan IT kinerja pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu yang menjadi IT sangat penting adalah transparansi. Dengan transparansi masyarakat akan menjadi mengetahui bahwa orang-orang dipemerintahan itu benar-benar bekerja sehingga menimbulkan kepercayaan. Dari rasa kepercayaan inilah yang menyebabkan masyarakat menjadi care, aware dengan pemerintah sehingga penyelenggaraan e-government menjadi sukses.*

Temuan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Almarabeh and Ali (2007), Lufman (2004), E. Marwan et al (2007), Andoh-Baidoo and Osatuyi (2009), Weerakkody and Dhillon, (2008), Irani *et al.* (2003), Avolio B & Kahai S, (2013), K. Mohammad (2009), Dawes S (2008), Jean-Pierre Auffret, et all (2010).

4. *Commitment* merupakan faktor dari e-leadership yang dapat mempengaruhi kesuksesan penyelenggaraan e-government.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan dalam penelitian ini, diketahui bahwa *commitment* (komitmen) merupakan faktor e-leadership yang mempengaruhi kesuksesan penyelenggaraan e-government. Kategori narasumber Y menyatakan Tanpa adanya komitmen dan dukungan dari pemimpin mungkin semua ini tidak akan tercapai. Tentunya bukan hanya pemimpin yaa ada juga dukungan dari kepala dinas dan anggota pemerintahan yang lain. Kami saling berkomitmrn untuk mewujudkan bojonegoro lebih baik. Kategori Informan X1 menyatakan Jika pemimin tidak mepuyai komitmen yang kuat, maka e-government tidak akan sukses, karena tida adanya kekompakan dan keselaasan antara pemimpin dan *team*. *Kategori informan X2 dan X3 menyatakan* Komitmen itu penting. Pemimpin harus komitmen dan konsisten. Jangan hanya di awal saja namun terus dikawal. Bisa dengan melibatkan OPD dan Kominfo juga. Sehingga semangat untuk mewujudkan visi dan misi itu akan terus ada dan penyelenggraan e-government akan sukses tentunya. Kategori informan X4 menyatakan Komitmen dari atasan sangat mempengaruhi kemauan anggotanya untuk mewujudkan tujuan organisasi. Biasanya komitmen pimpinan ini ditunjukkan dengan caranya memotivasi, memberikan arahan serta bertanggung jawab akan hasil kerja anggotanya. Biasanya bapak bupati melakukan rapat koordinasi rutin untuk memberikan arahan kepada kepala dinas terkait. Yaa itu dilakukan biar kepala dinas terus diingatkan akan tugas dan fungsinya dalam mensukseskan e-government. Hal ini diperkuat dengan pernyataan masing-masing narasumber dan informan yang dirangkum pada tabel 5.12 sebagai berikut.

**Tabel 5. 12** Pernyataan Informan tentang *Commitment*

4. Pernyataan tentang <i>Commitment</i>	
Kode Informan	Pernyataan Informan
<b>Y.SY.KM_4</b>	<b>Tanpa adanya komitmen dan dukungan dari pemimpin mungkin semua ini tidak akan tercapai.</b>

	<p>Tentunya bukan hanya pemimpin yaa ada juga dukungan dari kepala dinas dan anggota pemerintahan yang lain. Kami saling berkomitmrn untuk mewujudkan bojonegoro lebih baik. Dulu pada tahun 2009 saya memutuskan untuk memasang fiber optic jaringan, karena kita setelah lihat master plan kantor saya terpecah-pecah maka saya putuskan fiber optic, waktu itu belum ada Biznet belum ada indihome kira-kira anggaran ini 9M pengajuan ke DPR namun dipermasalahkan biayanya. <b>Kemudian siapa yang akan menyakinkan ini semua yaitu dewan TIK yang saya bentuk dari unsur semua pihak, karena disitu kita ingin nanti data ekonomi, sosial, pemerintahan semua itu bisa cepat.</b> Mungkin satu-satunya kabupaten yang punya fiber optic jaringan kabupaten ya Bojonegoro, makanya beberapa kita di CCTV jalan lalu monitor banjir punya bojonegoro sendiri. <b>Bojonegoro ini dianggap terlewat karena sudah sejak awal ada <i>open data contract</i> semua data kita buka kecuali memang yang dikecualikan oleh Negara tidak boleh. Jika ada teknologi tidak jalan, namun itu sudah melalui proses pengecekan dewan IT dan msyarakat. Apabila masih risiko ya sudah kita harus mencari solusi yang lain. Karena saya tidak akan menyetujui jika dewan IT belum approve supaya tahu ini betul-betul useful.</b> Saya tidak merasakan risiko yang dominan karena dengan mekanisme sudah terkontrol. <b>Ada Dewan IT Bojonegoro sebagai pihak independent. Pengadaan IT software apapun harus lewat Dewan IT (yang saya bentuk atas usulan-usulan rakyat) bekerjasama pengecekan dengan Kominfo.</b> Masyarakat itu akan tidak percaya kalau mereka tidak tahu feeback, karena sekarang penggunaan IT di Bojonegoro mau sms mau menggunakan wa atau emal, masyarakat bisa mengecek di LAPOR dan ada notifikasi penanganan atau tindak lanjut dari laporannya.</p>
X1.KS.KM_4	<p><b>Jika pemimin tidak mepuyai komitmen yang kuat, maka e-government tidak akan sukses, karena tida adanya kekompakan dan keselaasan antara</b></p>

	<p><b>pemimpin dan team.</b> Semua kehidupan ini risiko tidak ada yang tidak berisiko. Jika kita berbicara risiko jangan berbicara risikonya itu akan membuat tidak berani melangkah. Jangan melihat risiko tapi lihat kebermanfaatannya. Kalau yang kita lakukan itu manfaat lalu kita bandingkan dengan dalil lakukan. <b>Ini sudah hal umum risiko di IT, jadi masalah SDM malah aplikasi dan sebagainya itu pasti. Kemarin saya baru berbicara di tingkat kementerian pembangunan pengembangan IT ini payung hukumnya masih belum lengkap. Payung hukum pemerintah itu masih payung hukum infrastruktur fisik untuk pembangunan IT belum.</b> Sehingga ini menjadi phobia dan penghambat beberapa pihak kalau kita tidak mengutarakannya. Kalau kita customize aplikasi belum tentu setelah jadi terbatas pada anggaran begitu selesai bisa running realitanya masih error, penyesuaian dengan user (pengguna dan pengelola) Pengguna bisa masyarakat dan pengelola bisa kita. <b>Tim khusus ada Dewan TIK saya guide dan saya mencoba membuka peluang yang lainnya untuk mencukupi potensi kami. Disini ada anak SMK ada PKL maka begitu PKL di sini, sebelumnya saya masih ke gugus kepala sekolah musyawarah kerja kepala sekolah saya masuk disitu waktu rapat saya sampaikan saat melakukan PKL siswa dibekali saat disini ditempatkan di desa, kecamatan dan pemerintahan minimal bisa mengajarkan transfer knowledge ini cara rutin. Manusia itu bisa jalan karena ada komitmen. Komitmen pimpinan ini sangat berpengaruh 50-75% itu komitmen pimpinan, lalu lainnya kehendak para pihak SDM baru alat. Maka sekecil apapun suatu pekerjaan jangan diremehkan lakukan dengan sungguh-sungguh dengan fokus dengan niat yang kuat, ikhlas pasti yang besar akan terwujud itu prinsip. Kembali pada Top Leader.</b></p>
<p><b>X2.SB.KM_4</b> <b>X3.HP.KM_4</b></p>	<p><b>Komitmen itu penting. Pemimpin harus komitmen dan konsisten. Jangan hanya di awal saja namun terus dikawal. Bisa dengan melibatkan OPD dan Kominfo juga. Sehingga semangat untuk mewujudkan visi dan misi itu akan terus ada dan</b></p>

	<p>penyelenggraan e-government akan sukses tentunya. Perlu tekana sosial, dalam setiap rapat koordinasi. Memang daerah OPD itu kendalanya adalah SDM kurang orangnya. <b>Tahun ini kita bangun madiun dashboard itu jika supply data dari OPD kurang lancar ya sama aja mau menampilkan apa analisisnya seperti apa. Tidak ada artinya jika OPD itu tidak update data.</b> Untuk menunjang komitmen pemimpin organisasi khusus ya dari dinas terkait. Outsource di kami itu memang saat ini belum sampai kepada fokus implementator namun aplikasi sudah kami kembangkan saat ini. <b>Tapi juga tidak menutup kemungkinan nanti tuntutan kedepan untuk melakukan itu. Katakanlah sekarang ada masterplan.</b> Untuk kerjasama kita ada dengan Surabaya dan Bandung. Dengan Surabaya itu e-kinerja kalau Kota Bandung seluasnya aplikasi yang ada di Bandung moU bapak walikota dengan Pak Ridwan Kamil ada banyak aplikasi tapi yang sesuai dengan sini ada sekitar 20 aplikasi dan tahap pengembangan, yang sudah berjalan perijinan itu sudah. <b>Pak walikota memberikan kebebasan melakukan kegiatan asalkan sesuai dengan perencanaan dan masterplan yang sudah disepakati.</b> Asal kegiatannya tidak melenceng jauh dari yang sudah ditentukan di situ otomatis pak wali kota pasti support. <b>Pentingnya komitmen, yang utama itu komitmen dan konsistensi dari seorang leader. Komitmen itu hanya diawal yang harus terus itu konsisten. Jika tahun ini ada inovasi maka butuh konsisten. mengawal dengan bekerjasama dengan kominfo.</b></p>
X4.MH.KM_4	<p><b>Komitmen dari atasan sangat mempengaruhi kemauan anggotanya untuk mewujudkan tujuan organisasi. Biasanya komitmen pimpinan ini ditunjukkan dengan caranya memotivasi, memberikan arahan serta bertanggung jawab akan hasil kerja anggotanya. Biasanya bapak bupati melakukan rapat koordinasi rutin untuk memberikan arahan kepada kepala dinas terkait. Yaa itu dilakukan biar kepala dinas terus diingatkan akan tugas dan fungsinya dalam mensukseskan e-</b></p>

	<p>government. <b>Ketika ditanya terkait resiko IT Rasanya sampai sekarang belum ada resiko besar yang terjadi. Soalnya semua kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan sudah dirancang dalam RPJMD dan utamanya untuk kegiatan yang berkaitan dengan IT sudah ada masterplanya. Jadi selama masih mengikuti itu yaa saya rasa tidak ada resikonya wong kita sudah saling berkomitmen untuk menjalankan semua itu.</b> Ketika ditanya tim inovatif Idealnya iya, kalau kominfo levelnya masih luas. <b>Saya mengatakan iya karena assessment dari SPBE itu mungkin ada Dewan Pengarah TIK, harus ada Komite TIK itu salah satu rekomendasi harus ada pengarah lalu ada komitenya ada pelaksananya. Dulu ada istilah Government shift Officer itu levelnya itu mungkin Bapak Sekda atau Bapak Bupati untuk menggerakkan atau untuk memerintah dinas-dinas.</b> Bisa juga dengan tim independent, sekarang disini masih terpusat di Kominfo itu rekomendasi SPBE itu ada pembentukan tim pengarah istilah steering commite. <b>Komitmen dari kepala daerah dan perangkat daerah sangat penting dalam kesuksesan penyelenggaraan e-government. Komitmen tersebut biasaya terlihat dari banyak aplikasi yang kita pakai, berapa OPD yang saling terhubung.</b> Namun kebanyakan orang biasanya melihat dari jumlah aplikasi yang digunakan dan missal adanya command center, biasanya itu. Secara tertulis banyak aplikasi desa, itu ada bantuan dari KOMPAK dan LSM bekerjasama dengan combine research institute desa, sudah mengadopsi ini hampir 108 desa. Kalau OPD ada website kurang 3 atau berapa gitu dari total 40 OPD. Aplikasi pasti itu seperti perijinan SIMPADU lalu SIAK trus semacam e-planning itu SIPPD kedepanya SIMCAN, kalau e-budgeting SIPDA meskipun istilahnya masih lokal belum terintegrasi. Lalu ada SIMBADA untuk mengelola asset lalu SIPGAJI dan untuk detailnya aplikasi ada daftar aplikasi. <b>Semua itu adalah bentuk komitmen kepala daerah untuk mewujudkan e-government.</b></p>
--	---



Poin penting sebagai kunci adalah

- *Komitmen dari pimpinan merupakan hal yang penting dan mendasar. Tanpa adanya komitmen dan dukungan dari pemimpin mungkin semua ini tidak akan tercapai.*
- *Tentunya bukan hanya pemimpin, juga harus ada dukungan dari kepala dinas dan anggota pemerintahan yang lain. Harus saling berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik.*
- *Dalam mewujudkan dan menjaga konsistensi komitmen biasanya ada resiko-resiko terkait IT yang harus diambil. Pemimpin harus berani mengambil resiko tersebut tentunya dengan pertimbangan dan payung hukum yang jelas.*
- *Pemerintah daerah sebaiknya memiliki tim inovatif atau tim independent yang bertugas untuk memantau kinerja pemerintahan utamanya terkait IT. Misalnya di Bojonegoro dengan Dewan IT nya dan di Kabupaten Trenggalek dengan Government Shift Officer yang bertugas untuk menjadi tim pengarah atau validasi agar seluruh kegiatan dan pengadaan selaras dengan tujuan pemerintahan.*
- *Untuk meningkatkan komitmen yang sudah dipaparkan ada strategi-strategi agar tetap konsisten diantaranya dengan membuat perlombaan di tingkat OPD seperti yang dilakukan di Kabupaten Bojonegoro dengan membuat perlombaan web terbaik. Juga bisa dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah lain.*
- *Komitmen dari kepala daerah dan perangkat daerah sangat penting dalam kesuksesan penyelenggaraan e-government. Komitmen tersebut biasanya terlihat dari banyak aplikasi yang pemerintah pakai, berapa OPD yang saling terhubung. Namun kebanyakan orang biasanya melihat dari jumlah aplikasi yang digunakan dan missal adanya command center dan lainnya seperti itu.*

Temuan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ojo et al (2007), UNPOG (2012), Rahardjo (2008), Heeks and Stanforth, (2007), Zairi (1994, p. 9), Leitner and Kreuzeder (2005).

5. *Leadership Functions* merupakan faktor dari e-leadership yang dapat mempengaruhi kesuksesan penyelenggaraan e-government.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan dalam penelitian ini, diketahui bahwa leadership functions (fungsi kepemimpinan) merupakan faktor e-leadership yang mempengaruhi kesuksesan penyelenggaraan e-government. Kategori narasumbet Y menyatakan Sudah sejak pertama kali saya maju untuk menjadi bupati, kesadaran akan skill kepemimpinan memang mutlak dimiliki. Namun dengan niat yang baik dan pengalaman saya selama di kota saya yakin saja bisa membawa bojonegoro lebih baik. Dan sekarang beginilah kabupaten bojonegoro. Kategori Informan X1 menyatakan Ini bedanya antara pengalaman dengan ilmu, kalau orang pengalaman memang dia dimatangkan dalam hal skill yang berbasis strategi. Pengalaman itu akan menjadi suatu keahlian/skill menjadi professor maka kala ditambahkan ilmu. Kategori informan X2 dan X3 menyatakan Skill kepemimpinan perlu dimiliki seorang pemimpin. Utamanya sebenarnya managerial. Karena pemimpin disini yang memanjajajemen seluruh resource dan SDM. Dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada guna mencapai kesuksesan jalanya pemerintahan. Kategori informan X4 menyatakan Sekarang semua ini tergantung pemimpinnya, kalo pemimpinnya bagus nanti anggotanya akan menyesuaikan juga. Karena bapak Bupati sudah sangat berkompeten ya mungkin kalau bupati pasti bisa turut mempengaruhi jalannya pemerintahan. Apalagi dari masa jabatannya ini sudah bisa kita rasakan perbedaanya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan masing-masing narasumber dan informan yang dirangkum pada tabel 5.13 sebagai berikut.

**Tabel 5. 13** Pernyataan Informan tentang Leadership Functions

5. Pernyataan tentang <i>Leadership Functions</i>	
Kode Informan	Pernyataan Informan

Y.SY.LF_5	<p>Sudah sejak pertama kali saya maju untuk menjadi bupati, kesadaran akan skill kepemimpinan memang mutlak dimiliki. Namun dengan niat yang baik dan pengalaman saya selama di kota saya yakin saja bisa membawa bojonegoro lebih baik. Dan sekarang beginilah Kabupaten Bojonegoro. Evaluasi control dilakukan rutin setiap jum'at dengan manajemen review progress kerja dinas dan sebagai dialog public dengan masyarakat secara offline. <b>Kinerja dinas atau juga perorangan dilihat dari progress laporan setiap bulan. Selama pekerjaan yang mereka lakukan sesuai dengan peraturan dan untuk inovasi IT semua usulan harus di approve oleh dewat IT. Tidak ada pengadaan tidak ada apapun kecuali di approve oleh Dewan IT. Dewan ini bukan birokrat sehingga pihak independent di luar pemerintahan sehingga ini orang-orang ahli dari guru dan paham IT yang approve tadi selanjutnya di approve oleh fungsi jika tidak berfungsi kenapa diberi pengadaan.</b> Maka tidak ada ego sektoral karena semua sudah tahu harus terkoneksi. Lebih kepada menciptakan ekosistem jadi tidak sekedar cuma menakut-nakuti jadi ekosistem ini akan tiba-tiba menjadi kebutuhan dan tidak bisa dihindari orang harus menggunakan IT untuk menunjang pekerjaannya. <b>Tentunya pemimpin harus bisa memanfaatkan sumberdaya dan infrastruktur yang ada untuk bisa mencapai tujuan yang ada. Selain itu saya sebagai pemimpin juga harus terus mengupdate wawasan agar bisa terus berkembang.</b> Saya sampai malam kebiasaan malam akan tidur masih mendengarkan two talk pidato-pidato di youtube dan masih banyak lagi saya apat meng-update ilmu untuk menambah pengetahuan saya. <b>Jika ada daerah-daerah yang maju kita belajar apa yang bisa kita adopsi.</b></p>
X2.KS.LF_5	<p>Ini bedanya antara pengalaman dengan ilmu, kalau orang pengalaman memang dia dimatangkan dalam hal skill yang berbasis strategi. Pengalaman itu akan menjadi suatu keahlian/skill menjadi professor maka kala ditambahkan ilmu. Setiap minggu saya sampaikan isu strategisnya kepada Bapak Bupati</p>

	<p>maka di dalam isu strategis ini maka akan ada perencanaan yang tepat, penganggaran tepat pengawasannya tepat itu konsepnya <i>money follow problem</i>. Semua tools IT itu sangat menunjang, tapi kembali lagi tools hanya akan menjadi tools jika tidak dioperasikan. <b>Sehingga analisis itu perlu sebgaiian memakai mesin. Selama kami mengerjakan kegiatan inovatif yang sudah direncanakan sesuai dengan masterplan IT saya rasa akan aman-aman saja. Selain itu kita juga punya Dewan IT yang bertugas untuk menyeleksi usulan terkait IT. Jadi semuanya harus lewat dewan IT yang mana yang menjadi prioritas adalah aplikasi atau inovasi yang sudah ada pada perencanaan dalam masterplan IT. Harus ada umpan balik dari user setiap problem kita tidak bisa karena kominfo itu bagaikan pipa yang punya tandonnya OPD lain. Setiap ada ilmu baru saya share kepada teman-teman saya. Kemampuan managerial dari pimpinan memang sangat berpengaruh besar. Apalagi kendala terbesar yang ada di bojonegoro ini adalah SDM. Persebaran SDM yang tidak merata dan berbeda latar belakang mengharuskan pemimpin untuk bisa mengelolnya agar bisa saling berkontribusi adil. Adil disini bukan sama rata atau sama rasa, melainkan adil sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Ditempatkan ditempat yang sesuai dengan kemampuannya. Dengan begitu semua akan saling berkontribusi dalam mensukseskan pemerintahan.</b></p>
<p><b>X2.SB.LF_5</b> <b>X3.HP.LF_5</b></p>	<p><b>Skil kepemimpinan perlu dimiliki seorang pemimpin. Utamanya sebenarnya managerial. Karena pemimpin disini yang memanjajumen seluruh resource dan SDM. Dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada guna mencapai kesuksesan jalanya pemerintahan. Kan ada atasan, kalau misal kominfo kan levelnya sama kita punya atasan ada pak sekda ada pak wali. Kita tiap bulan atau tiap waktu tertentu mengadakan forum diskusi terkait IT untuk menuju smart city. Biasaya pak wali menanyakan dan sering kita menghadiri undangan instansi di atas kita dengan melibatkan perangkat</b></p>

	<p>daerah yang lain. Sehingga dari itu tahu masing-masing OPD tidak boleh ego sektoral atau sangat protect tidak open ini kan tidak boleh. Sekarang eranya keterbukaan semua harus transparan tidak ada suatu informasi yang tidak bisa dilihat masyarakat, kecuali informasi atau dokumen tertentu yang sifatnya memang harus dirahasiakan misal APBD, anggaran semua sudah share, lelang share semua sudah by system. Jika ada yang menanyakan kita sudah terbuka tidak ada ditutupi misal agar dapat dana yang lebih besar ini tidak ada karena ada e-kinerja. Karena sudah paham semua ini butuh ada pak wali ada pak sekda jadi kita sampaikan musyawarahkan bila memang era keterbukaan. <b>Karena sudah kita susun masterplan jadi tahu kebutuhan dan data lengkap kependudukan. Inovasi tidak harus menciptakan sendiri replika tidak masalah tinggal menyesuaikan kebutuhan di daerah. Kebutuhan yang belum ada apa misal di rumah sakit yang kurang ada tinggal mencontoh yang sudah ada kan hampir sama. Pemimpin yang bisa memaksimalkan sumber daya yang ada dapat menyebabkan kesuksesan e-government.</b> Contohnya dengan sumber daya yang ada aja dimaksimalkan missal ada sdm yang kurang mengetahui tentang IT yaa dia jangan ditugaskan di bidang IT. Nanti hasilnya tidak akan maksimal dan malah membebani juga. Kerjasama memang harus melibatkan tidak bisa hanya orang perorang itu. Memang harus kerjasama dan dirasa kebutuhan contoh integrasi memang dirasa manfaatnya kebutuhan untuk itu mulai dari perencanaan sampai monitoring.</p>
<p><b>X4.MH.LF_4</b></p>	<p><b>Sekarang semua ini tergantung pemimpinnya, kalo pemimpinnya bagus nanti anggotanya akan menyesuaikan juga. Karena bapak Bupati sudah sangat berkompeten ya mungkin kalau bupati pasti bisa turut mempengaruhi jalannya pemerintahan. Apalagi dari masa jabatannya ini sudah bisa kita rasakan perbedaannya. Trenggalek jadi lebih tertata, masyarakatnya juga lebih aware sekarang. Intinya dengan pemimpin yang memiliki skill semuanya</b></p>

	<p><b>jadi lebih jelas dan mudah.</b> Kominfo kan ada pengelolaan/penanganan masyarakat lalu pengelolaan informasi, Bapak bupati sangat aware, contohnya saat penyusunan masterplan dari tim penyusunnya itu kebetulan kita kan swakelola dengan ITS itu juga ada Bapak Bupati itu sangat mengapresiasi itu karena dinkominfo sebelumnya hubkominfo itu dulu waktu ada pemerinnngkatan PeGi itu yang ditanya pertama kali mesti terkait kepemilikan masterplan dulu belum ada dan baru terealisasi pada tahun 2017 akhir. <b>Bapak bupati memastikan secara langsung itu ya di rapat. Jika rapat khusus belum, ini kan fokusnya e-government smart regency memastikan itu. Malah yang sering menanyakan itu kalau tidak salah malah DPRD komisi 1 itu yang menangani kominfo itu yang menanyakan. Pertanyaan seputar bagaimana pencapaian e-government. Jika bupati langsung mungkin intern langsung dengan bapak kepala dinas kominfo sendiri. Jika ada komite TIK atau pengarah TIK nanti akan lebih mengarahkan itu.</b> Usul dari kominfo untuk penilaian web dinas indikator dibuat oleh kominfo nanti dibuat ranking dan dipasang di web kabupaten. <b>Hal ini kan akan dilihat bupati akan malu jika posisi dibawah dan pasti akan berlomba-lomba untuk mengupdate webnya. Namun saat ini masih usulan belum terealisasi. Yang pasti bentuk support yang nyata adalah dari honor pegawai itu, setiap kegiatan yang dilakukan para pegawai dan anggota akan mendapatkan honor kegiatan diluar gaji pokok mereka. Yaa memang fungsi managerial seorang pemimpin disitu. Harus bisa mengolah SDM yang ada. Entah itu SDM yang mumpuni ataupun kurang semua harus bisa dimanfaatkan sesuai tugas dan kemampuannya. Perbedaan SDM ini seharusnya juga bisa sedikit dikurangi dengan memberikan beberapa pelatihan-pelatihan dan sertifikasi kerja.</b> Semua sumberdaya yang ada harus dimanfaatkan agar sama-sama ikut serta dalam upaya mewujudkan tujuan pemerintahan, utamanya untuk mensukseskan penyelenggaraan e-government.</p>
--	---

Poin penting sebagai kunci adalah

- *Skil memimpin mutlak dimiliki oleh seorang pemimpin, utamanya untuk pemimpin daerah. Skil kepemimpinan ini meliputi managerial yang baik, support dan control kepada jalanya pemerintahan.*
- *Berbagai bentuk support dan control dilakukan oleh pemerintah daerah di masing-masing daerah tergantung kondisi daerah yang dipimpinya.*
- *Di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bentuk control dilakukan dengan mengadakan manajemen review rutin setiap hari jum'at. Meliputi manajemen review progress kinerja dan juga dialog publik.*
- *Di Kabupaten Trenggalek bentuk control yang dilakukan dengan mengadakan rapat rutin kepala daerah dengan kepala dinas dan kadang dalam rapat kordinasi dengan pihak DPRD.*
- *Hal serupa dilakukan di Pemerintah Kota Madiun yang menggunakan rapat sebagai bentuk control antara kepala daerah dengan kepala dinas terkait.*
- *Dalam memberikan support pemerintah daerah rata-rata memiliki Lembaga independent yang bertugas untuk memastikan bahwa tiap kegiatan sesuai dengan perencanaan entah itu sesuai masterplan untuk bidang IT maupun di bidang yang lain.*
- *Paling penting bagi kepala daerah adalah memiliki kemampuan managerial yang baik utamanya untuk mengelola SDM yang dimiliki. SDM yang berkompeten dan kurang berkompeten harus bisa saling bekerjasama dan dimanfaatkan sesuai dengan kemampuannya guna menunjang jalanya pemerintahan. Guna mensukseskan penyelenggaraan e-government di masing-masing instansi.*

Temuan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Burke (2008), Yalom and Miles (1995).

## 6. Temuan diluar prediksi penelitian.

Berdasarkan hasil temuan data dilapangan terdapat beberapa temuan dilaur prediksi penelitian. Panemuan ini berkaitan dengan hubungan antara nilai e-leadership dan nilai e-government yang tidak sesuai dengan prediksi penelitian. Masing-masing temuan tersebut antara lain.

### - Kota Madiun

Berdasarkan hasil penilaian e-leadership yang dilakukan di Kota Madiun, e-leadership di Kota Madiun tergolong dalam “**Middle E-Leadership**“ dengan skor **228**. Artinya kepemimpinan di Pemerintah Kota Madiun cukup baik untuk kesuksesan penyelenggaraan e-government. Kepemimpinan pada prinsipnya sudah masuk dalam kategori cukup, sehingga masih perlu peningkatan yang optimal terhadap aspek-aspek kepemimpinan dalam menginisiasi, mengawal dan memastikan kesuksesan TI untuk mendukung pencapaian tujuan pemerintahan daerah/organisasi. Skor 228 didapat dari penjumlahan hasil penilaian dari 18 indikator e-leadership yang telah ditanyakan kepada kepala daerah. Namun hasil ini berbanding terbalik dengan hasil evaluasi SPBE yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Menurut hasil evaluasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) pemerintah Kota Madiun memperoleh skor **3.16** dimana dengan skor tersebut masuk dalam kategori “**Sangat Baik**”. Skor ini menjadi skor yang tertinggi dibandingkan dengan 2 pemerintah daerah lain yang menjadi studi kasus penelitian.

Dari hasil penggalian data yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan beberapa fakta diantaranya 1) Yang menjadikan nilai SPBE tinggi dikarenakan Pemerintah Kota Madiun adalah pada domain tata kelola utamanya di TIK. 2) Di Pemerintah Kota Madiun sudah memiliki legalisasi dokumen yang mendukung kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan IT, sehingga nilai SPBE tinggi. 3) Inisiatif dari masing-masing kepala dinas yang baik dalam menggunakan IT sebagai ujung tombak



transformasi mereka. 4) Pemerintah Kota Madiun sudah memiliki tim pengarah terkait kebijakan dan pengadaan TI.

- **Kabupaten Trenggalek**

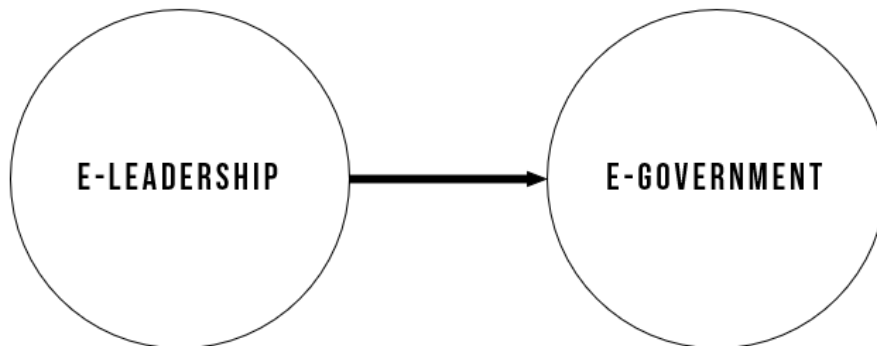
Berdasarkan hasil penilaian e-leadership yang dilakukan di Kabupaten Trenggalek, e-leadership di Kabupaten Trenggalek tergolong dalam “**Middle E-Leadership**“ dengan skor **256**. Artinya kepemimpinan di Pemerintah Kabupaten Trenggalek cukup baik untuk kesuksesan penyelenggaraan e-government. Kepemimpinan pada prinsipnya sudah masuk dalam kategori cukup, sehingga masih perlu peningkatan yang optimal terhadap aspek-aspek kepemimpinan dalam menginisiasi, mengawal dan memastikan kesuksesan TI untuk mendukung pencapaian tujuan pemerintahan daerah/organisasi. Skor 256 didapat dari penjumlahan hasil penilaian dari 18 indikator e-leadership yang telah ditanyakan kepada kepala daerah. Namun hasil ini berbanding terbalik dengan hasil evaluasi SPBE yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Menurut hasil evaluasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) pemerintah Kota Madiun memperoleh skor **1.80** dimana dengan skor tersebut masuk dalam kategori “**Cukup**”. Skor ini menjadi skor yang terendah dibandingkan dengan 2 pemerintah daerah lain yang menjadi studi kasus penelitian.

Dari hasil penggalan data yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan beberapa fakta diantaranya 1) Yang menjadikan nilai SPBE rendah dikarenakan Kabupaten Trenggalek adalah kurang bersinerginya pemimpin yang ada di Kabupaten Trenggalek. Yang kuat hanya di *top leadernya* untuk *middle leader* masing kurang suportnya. 2) Di Pemerintah Kabupaten Trenggalek belum memiliki legalisasi dokumen yang mendukung kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan IT, sehingga nilai SPBE rendah. 3) Inisiatif dari masing-masing kepala dinas yang kurang untuk menggunakan IT sebagai ujung tombak transformasi mereka. 4) Pemerintah Kabupaten Trenggalek belum memiliki tim

pengarah terkait kebijakan dan pengadaan TI. 5) Kurang fokusnya kepala daerah mereka yang memiliki urusan politik di pemerintahan provinsi, sehingga kurang fokus.

#### 7. Model Akhir Penelitian.

Setelah seluruh tahapan analisis dilakukan, dan temuan dari penelitian ini dijabarkan diatas, maka akan berdampak pada pengembangan model penelitian. Model penelitian ini seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.22 berikut ini.



**Gambar 5. 22** Model Akhir Penelitian

(Sumber: Hasil analisis, 2019)

### **5.7 Pengecekan Keabsahan Data (Validasi)**

Penelitian ini guna melakukan pengecekan data mengacu pada teknik pengecekan keabsahan data penelitian dari Sugiyono (2014). Teknik pengecekan keabsahan data penelitian tersebut mencakup uji kredibilitas, uji transferability, uji dependability dan uji confirmability.

#### **5.7.1 Uji Kredibilitas**

Uji Kredibilitas pada penelitian ini terdiri dari 2 bagian yaitu uji triangulasi dan member cheking.

### 5.7.1.1 Triangulasi

Pada penelitian ini, dilakukan tiga jenis triangulasi yaitu triangulasi sumber data, triangulasi Teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu pengumpulan data.

#### 1. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data penelitian ini dilakukan dengan menggali informasi kepada narasumber dan informan dengan latar belakang yang berbeda. Informan dan narasumber dapat dilihat pada tabel 5.9 berikut ini.

**Tabel 5. 14** Triangulasi Sumber Data Narasumber

<b>Narasumber dan Informan</b>	<b>Nama Asli</b>	<b>Latar Belakang</b>
<b>Tipe Y – Bupati</b>		
Narasumber 1	Dr. H. Suyoto, M.Si	Dosen dan Bupati Kab. Bojonegoro
<b>Tipe X1 – Kepala Dinas Kominfo</b>		
Informan 1	Drs. Kusnandaka Tjatur Prasetijo, M.SI	Dosen dan Kepala Dinas Kominfo Kab. Bojonegoro
Informan 2	Subakri, S.Sos	Kepala Dinas Kominfo Kota Madiun
<b>Tipe X2 – Kepala Bidang Pengelolaan TIK</b>		
Informan 3	Hendro Pradono, S.T	Kepala Bidang Pengelolaan TIK Kota Madiun
<b>Tipe X3 – Kasie Layanan E-Government</b>		
Informan 4	Miftakhul Huda, S.Sos., M.Eng	Kepala Seksi Layanan E-Government Kab. Trenggalek

## 2. Triangulasi Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti selain mengumpulkan data melalui wawancara, juga melakukan pengumpulan data dengan mengumpulkan beberapa dokumen-dokumen pendukung baik hard copy maupun soft copy. Selain itu peneliti juga mengamati secara langsung dengan mendokumentasikan foto.

## 3. Triangulasi Waktu Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengambilan data yang bervariasi pada setiap informan. Hal ini dikarenakan kesibukan dari masing-masing informan yang berbeda. Kami menyesuaikan waktu longgar dari masing-masing informan dan narasumber. Berikut waktu pengambilan data dari masing-masing informan dan narasumber dijelaskan pada tabel 5.9.

**Tabel 5. 15** Triangulasi Waktu Pengumpulan Data

<b>Nama Asli</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Tempat</b>
Dr. H. Suyoto, M.Si	19 November 2018	Kantor BPH, Universitas Muhammadiyah Gresik
Drs. Kusnandaka Tjatur Prasetijo, M.SI	28 November 2018	Kantor Dinas Kominfo, Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro
Subakri, S.Sos	29 November 2018	Kantor Dinas Kominfo, Pemerintahan Kota Madiun
Hendro Pradono, S.T	29 November 2018	Kantor Dinas Kominfo, Pemerintahan Kota Madiun
Miftakhul Huda, S.Sos., M.Eng	05 Desember 2018	Kantor Dinas Kominfo, Pemerintahan Kabupaten Trenggalek

### 5.7.1.1 Member Cheking

Tujuan dari dilakukannya member checking adalah untuk memastikan kembali data atau hasil penelitian yang telah diperoleh sesuai dengan informasi yang disampaikan informan dan sesuai dengan realita studi kasus di lapangan. Pada

penelitian ini, member checking dilakukan setelah proses wawancara selesai dilakukan. Lembar member checking terlampir pada lampiran 4.

### **5.7.2 Uji Transferability**

Uji transferability pada penelitian kualitatif sama artinya dengan generalisasi pada penelitian kuantitatif. Uji transferability dilakukan dengan cara menyusun laporan hasil penelitian secara tersistematis dan menjelaskan agar hasil dari penelitian ini dapat ditransferkan atau diterapkan pada obyek atau daerah lain yang memiliki kemiripan karakteristik studi kasus penelitian ini.

### **5.7.3 Uji Dependability**

Uji Dependability pada penelitian kualitatif disebut reabilitas. Pada penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan memeriksa keseluruhan proses penelitian. Oleh sebab itu, pada penelitian ini dilampirkan hasil wawancara pada lampiran 4 dalam laporan untuk dilakukan pengujian prosesnya secara menyeluruh.

### **5.7.4 Uji Konfirmability**

Tahapan pengujian Konfirmability dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Pada penelitian ini, hasil penelitian yang dijelaskan sesuai dengan proses pengumpulan data. Peneliti juga mengkonfirmasi kembali jawaban instrumen dengan merangkum hasil wawancara dan melampirkannya di laporan.

## **5.8 Kontribusi Penelitian**

Pada bagian ini menjelaskan tentang kontribusi teoritis dan kontribusi praktis dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kontribusi praktis bertujuan menambah pengetahuan bagi ilmuwan, sedangkan kontribusi praktis bertujuan menambah pengetahuan praktis bisa diaplikasikan dalam bidang terkait. Berikut adalah kontribusi teoritis dan praktis pada penelitian ini.

### **5.8.1 Kontribusi Teoritis**

Kontribusi teoritis yang dihasilkan dari penelitian ini antara lain :

1. Memberikan sebuah model penelitian yang komprehensif di bidang pengaruh atau dampak dari *e-leadership* terhadap kesuksesan penyelenggaraan *e-government* di Indonesia.
2. Penggunaan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang mendetail dan mendalam untuk penelitian dengan topik di bidang hubungan *e-leadership* terhadap kesuksesan penyelenggaraan *e-government*.

### **5.8.2 Kontribusi Praktis**

Kontribusi praktis dari penelitian ini antara lain :

1. Hasil penelitian ini sebagai hasil evaluasi bagi pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Trenggalek dan Kota Madiun terhadap peningkatan kualitas e-government dan e-leadership yang mana keduanya saling berhubungan.
2. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah maupun pusat untuk meningkatkan nilai e-government dan e-leadership dengan cara meningkatkan indikator yang sudah di definisikan dalam penelitian ini.

### **5.9 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang menjadikan batasan dalam penelitian ini. Batasan dalam penelitian ini antara lain :

1. Model konseptual pada penelitian ini berfokus pada hubungan antara e-leadership terhadap kesuksesan penyelenggaraan e-government.
2. Studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah e-leadership dan e-government di kota dan kabupaten (pemerintah daerah) di Indonesia.
3. Proses pengambilan data dilakukan kepada narasumber kepala pemerintahan, kepala dinas diskominfo dan pejabat terkait e-leadership dan e-government pada lingkup kota/kabupaten di Indonesia.
4. Hasil penelitian ini terbatas pada pengembangan model konseptual hubungan antara e-leadership terhadap kesuksesan penyelenggaraan e-government di Indonesia.

## BAB 6

### KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari penelitian yang telah dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penelitian telah menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah dilakukan di Kota Madiun, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Trenggalek. Peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan dari penelitian mengenai hubungan antara *e-leadership* terhadap kesuksesan penyelenggaraan *e-government* sebagai berikut :

1. Pada proses pengukuran *e-leadership* meliputi beberapa tahapapan yaitu pendefinisikan indikator, pembuatan instrument pengukuran, wawancara mendalam, dan validasi pengukuran kepada narasumber. Nilai pengukuran diperoleh dari proses penilaian menggunakan 17 indikator penilaian *e-leadership*. Indikator diperoleh dari hasil ekstaksi definisi *leadership* yang diakomodasi oleh TIK. Hasil penilaian diperoleh Kota Madiun dan Kabupaten Trenggalek masuk dalam kategori “*middle e-leadership*” dan Kabupaten Bojonegoro masuk dalam kategori “*top e-leadership*”.
2. Pada proses evaluasi *e-government* meliputi beberapa tahapan yaitu audit internal organisasi, pengumpulan bukti pendukung dan pengiriman hasil audit internal organisasi kepada pemerintah pusat yang selanjutnya dikeluarkan hasil evaluasi *e-government* dari pemerintah pusat. Terdapat 3 domain yang dijadikan item evaluasi dan menghasilkan Kota Madiun memperoleh kategori “*Sangat Baik*”, Kabupaten Bojonegoro memperoleh kategori “*Baik*” dan Kabupaten Trenggalek memperoleh kategori “*Cukup*”.
3. Proses analisis terhadap hasil pengukuran *e-leadership* dan evaluasi penyelenggaraan *e-government* yang menghasilkan hubungan antara nilai *e-leadership* yang mempengaruhi kesuksesan penyelenggraan *e-govrnment*

dengan 5 faktor antara lain *Strong leadership, vision and mission, align IT and goals strategy, commitment* dan *leadership function*.

4. Hasil dari penelitian ini menjawab rumusan masalah atau penelitian bahwasanya *e-leadership* berpengaruh terhadap terhadap kesuksesan penyelenggaraan *e-government*.
5. E-leadership mempengaruhi kesuksesan/keberhasilan penyelenggaraan *e-government* melalui beberapa faktor, antara lain *Strong leadership, vision and mission, align IT and goals strategy, commitment* dan *leadership function*.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian ini, maka ada beberapa saran yang dapat ditindaklanjuti untuk pengembangan peneliti di masa yang akan datang. Diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk membandingkan hasil dari evaluasi e-government dari beberapa tahun terakhir. Minimal dengan membandingkan 2 nilai sehingga naik atau turunnya kelihatan.
2. Guna mendapatkan perspektif yang berbeda disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat mengembangkan model akhir penelitian ini menjadi model kuantitatif serta dapat dilakukan pengujian menggunakan pendekatan kuantitatif.
3. Pengambilan sampling studi kasus dapat diperluas, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan representasi nasional. Bisa dilakukan dengan mengambil masing-masing 1 daerah mewakili provinsi agar lebih nasional dan dapat merepresentasikan data seluruh Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aji, F. B., & Abdurachman, E. (2011). Pengaruh Sistem Informasi Manajemen, Pelayanan, dan Kepemimpinan Terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat di Kota Tangerang. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 2(2), 1089. <https://doi.org/10.21512/comtech.v2i2.2858>
- Alsaghier, H., Ford, M., Nguyen, A., & Hexel, R. (2009). Conceptualising Citizen's Trust in e-Government: Application of Q Methodology, 7(4), 16.
- Anwaruddin, A. (n.d.). Faktor Kunci Pengembangan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi di Daerah, 14.
- Astiti. (2008). Upaya Penyiapan e-Leadership dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan e-Government.
- Avolio, B. J., & Kahai, S. S. (2003). Adding the "E" to E-Leadership: *Organizational Dynamics*, 31(4), 325–338. [https://doi.org/10.1016/S0090-2616\(02\)00133-X](https://doi.org/10.1016/S0090-2616(02)00133-X)
- Avolio, B. J., Sosik, J. J., Kahai, S. S., & Baker, B. (2014). E-leadership: Re-examining transformations in leadership source and transmission. *The Leadership Quarterly*, 25(1), 105–131. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2013.11.003>
- Banerjee, P., & Chau, P. Y. K. (2004). An evaluative framework for analysing e-government convergence capability in developing countries. *Electronic Government, an International Journal*, 1(1), 29. <https://doi.org/10.1504/EG.2004.004135>

- Barberà, O., Baras, M., Barrio, A., & Teruel, J. R. (2010). Are parties democratizing themselves? The evolution of leadership selection in Spain (1977-2008), 26.
- Bhatnagar, S. (2003). The Economic and Social Impact of E-government. *Information Age*, 39.
- Bogdan, R., & Taylor, S. (1990). *Pengantar Metode Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Budvytyte, A. (2006). Pre planned e-leadership management across human sensitive to reach communication quality, 6.
- Burhan Bungin, P. D. H. (2005). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Kencana.
- Burke, R. (2006). Leadership and spirituality. *Foresight*, 8(6), 14–25.  
<https://doi.org/10.1108/14636680610712504>
- Creswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Creswell, John W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing Among Five Traditions*. California: Sage Publication.
- DasGupta, P. (2011). Literature Review: e-Leadership, 4, 36.
- Forman, M. (2005). E-Government: Using IT to Transform the Effectiveness and Efficiency of Government., 4.
- Gary Yukl, D. V. F. (1992). Theory and Research on Leadership in Organizations. In *Theory and Research on Leadership in Organizations* (pp. 147-197.).
- Gheni, A. Y., Jusoh, Y. Y., Jabar, M. A., Ali, N. M., Abdullah, R. H., Abdullah, S., & Khalefa, M. S. (2015). The virtual teams: E-leaders challenges. In *2015 IEEE Conference on e-Learning, e-Management and e-Services (IC3e)* (pp.

38–42). Melaka, Malaysia: IEEE.

<https://doi.org/10.1109/IC3e.2015.7403483>

Goffee, R., & Jones, G. (2007). LEADERSHIP—WHAT IS IT?, 28.

Hancock, B., Ockleford, E., & Windridge, K. (2009). An Introduction to Qualitative Research. *Qualitative Research*, 39.

Hani K, A. (2001). DETERMINING HOW INFORMATION TECHNOLOGY IS CHANGING THE ROLE OF LEADERSHIP IN VIRTUAL ORGANIZATION, (2001–12), 41.

Hanna, N. K. (n.d.). E-Leadership Institutions:, 91.

Indrajit, R. E. (2002). *Electronic government: strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital / Richardus Eko Indrajit*. Yogyakarta: Andi.

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2003. (2003). KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT.

Iriqat, R. A. M., & Khalaf, D. M. S. (2017). Using E-Leadership as a Strategic Tool in Enhancing Organizational Commitment of Virtual Teams in Foreign Commercial Banks in North West Bank -Palestine. *International Journal of Business Administration*, 8(7), 25. <https://doi.org/10.5430/ijba.v8n7p25>

Jr, S. T., & Hapanyengwi, G. (n.d.). The influence of culture on e-leadership in developing countries:, 15.

Ke, W., & Wei, K. K. (2004). Successful e-government in Singapore. *Communications of the ACM*, 47(6), 95–99. <https://doi.org/10.1145/990680.990687>

- Kifle, H., & Cheng, P. L. K. (2009). e-Government Implementation and Leadership - the Brunei Case Study, 7(3), 12.
- Liang, Y., Qi, G., Wei, K., & Chen, J. (2017). Exploring the determinant and influence mechanism of e-Government cloud adoption in government agencies in China. *Government Information Quarterly*, 34(3), 481–495. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.06.002>
- Luk, S. C. Y. (2009). The impact of leadership and stakeholders on the success/failure of e-government service: Using the case study of e-stamping service in Hong Kong. *Government Information Quarterly*, 26(4), 594–604. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2009.02.009>
- Madsen, C. Ø., Berger, J. B., & Phythian, M. (2014). The Development in Leading e-Government Articles 2001-2010: Definitions, Perspectives, Scope, Research Philosophies, Methods and Recommendations: An Update of Heeks and Bailur. In M. Janssen, H. J. Scholl, M. A. Wimmer, & F. Bannister (Eds.), *Electronic Government* (pp. 17–34). Springer Berlin Heidelberg.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. SAGE Publications. Retrieved from [https://books.google.co.id/books?id=U4IU\\_-wJ5QEC](https://books.google.co.id/books?id=U4IU_-wJ5QEC)
- Mohammad, K. (n.d.). E-Leadership: The Emerging New Leadership for the Virtual Organization, (1), 21.
- Moleong, L. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Moriarty, J. (2011). *Qualitative Methods Overview*. London: The School for Social Care Research.

Muflihah, Y., & Susanto, T. D. (2017). Faktor yang Mempengaruhi Warga dan Pemerintah dalam Adopsi E-Government: Sebuah Ulasan Sistematis, 7.

Nabafu, R., & Maiga, G. (2012). A Model of Success Factors for Implementing Local E-government in Uganda, *10*(1), 16.

Ndou, V. D. (2004). E - Government for Developing Countries: Opportunities and Challenges. *The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*, *18*(1), 1–24. <https://doi.org/10.1002/j.1681-4835.2004.tb00117.x>

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA, DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, & NOMOR 5 TAHUN 2018. (2018). PEDOMAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA.

Prybutok, V. R., Zhang, X., & Ryan, S. D. (2008). Evaluating leadership, IT quality, and net benefits in an e-government environment. *Information & Management*, *45*(3), 143–152. <https://doi.org/10.1016/j.im.2007.12.004>

Richad Bolden, B. (2004). What is Leadership? *Centre for Leadership Studies, University of Exeter*, (2004–07). Retrieved from <http://hdl.handle.net/10036/17493>

- Samartinho, J. P. R. da S., Resende da Silva, P. F., & Alves de Faria, J. M. (2015). GOOD PRACTICES IN VIRTUAL LEADERSHIP – THE E-3Cs RULE (COMMUNICATION, TRUST AND COORDINATION).
- Santosa, P. I., & Winarno, W. W. (2015). Model Evaluasi E-Leadership pada Implementasi Program E-Development, 10.
- Seifert, J. W., & Bonham, G. M. (2004). The Transformative Potential of E-Government in Transitional Democracies., 1–10.
- Sintiya, E. (2018). PENGEMBANGAN MODEL PENGUKURAN TINGKAT E-LEADERSHIP DALAM E-GOVERNMENT DI INDONESIA (STUDI KASUS: KOTA MADIUN, KOTA SURABAYA, DAN KABUPATEN TRENGGALEK).
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Elfabeta.
- Sugiyono, P., Dr. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Urff Kaufeld, N. von, Chari, V., & Freeme, D. (2009). Critical Success Factors for Effective IT Leadership. *Electronic Journal Information Systems Evaluation*, 12(1), 119–128.
- Van Wart, M., Roman, A., Wang, X., & Liu, C. (2017a). Integrating ICT adoption issues into (e-)leadership theory. *Telematics and Informatics*, 34(5), 527–537. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2016.11.003>
- Van Wart, M., Roman, A., Wang, X., & Liu, C. (2017b). Operationalizing the definition of e-leadership: identifying the elements of e-leadership. *International Review of Administrative Sciences*, 002085231668144. <https://doi.org/10.1177/0020852316681446>

Wijaya, S. W., & Surendro, K. (2006). KAJIAN TEORITIS: MODEL E-GOVERNMENT READINESS PEMERINTAH KABUPATEN/KOTAMADYA DAN KEBERHASILAN E-GOVERNMENT, 4.

World Bank. (2002). *Global Development Finance: Financing the Foorest Countries*. Washington: The World-Bank Group.

Yin, R. K. (2003). *Case Study Research: Design and Methods*. SAGE Publications.  
Retrieved from [https://books.google.co.id/books?id=BWea\\_9ZGQMwC](https://books.google.co.id/books?id=BWea_9ZGQMwC)

Zigurs, I. (2003). Leadership in Virtual Teams: *Organizational Dynamics*, 31(4), 339–351. [https://doi.org/10.1016/S0090-2616\(02\)00132-8](https://doi.org/10.1016/S0090-2616(02)00132-8)

*(Halaman sengaja dikosongkan)*



## LAMPIRAN

### 1. INSTRUMEN WAWANCARA

#### 1. Judul Penelitian

Pengukuran E-Leadership Dalam Keberhasilan E-Government Di Indonesia (Studi Kasus: Kota Madiun, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Trenggalek)

#### 2. Latar Belakang Penelitian

Ketika layanan pemerintah berbasis elektronik (e-government) berkembang, aplikasi tradisional seperti portal online menghadapi tantangan di era digital baru dimana masyarakat haus akan saluran komunikasi yang lebih nyaman dan beragam (Liang, Qi, Wei, & Chen, 2017). Perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan telah membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat di dunia. Sekarang disadari bahwa difusi TIK lebih dari sekedar adopsi dan adaptasi teknologi (Kifle dan Cheng, 2009). Perkembangannya TIK yang sangat cepat dan pesat menuntut semua komponen lembaga pemerintahan harus mampu mengujarnya, khususnya hal ini terkait dengan penerapan *e-government*.

Mengingat betapa kompleksnya pengembangan dari *e-government* di lingkungan instansi pemerintah pusat maupun daerah, dibutuhkan kepemimpinan yang kuat di masing-masing institusi atau unit pemerintahan agar proses transformasi menuju e-government dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya (Anwaruddin, 2008). Dalam pengembangan e-government diperlukan arsitektur dan kerangka pengembangan yang jelas agar hasilnya juga maksimal. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi di pemerintahan adalah merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Salah satu faktor yang menjadikan keberhasilan penerapan e-government menurut intruksi presiden no 3 tahun 2003 adalah e-leadership. Menurut Mohammad (2017) *e-leadership* adalah hasil logis dari lingkungan *e-work* yang dibawa oleh perkembangan teknologi informasi dan integrasinya dalam proses organisasi. E-leadership menjadi kunci keberhasilan penerapan e-government.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, peneliti ingin melakukan penelitian terkait ada tidaknya pengaruh e-leadership terhadap kesuksesan e-government di instansi pemerintahan tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota di Indonesia. Dengan diketahui ada atau tidaknya hubungan antara e-leadership dengan keberhasilan/kesuksesan penyelenggaraan e-government peneliti dapat mengeksplorasi bagaimana e-leadership dapat mempengaruhi keberhasilan e-government. Sehingga tujuan akhir dari penelitian ini adalah meningkatkan pelayanan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal lain yang ingin diteliti oleh peneliti adalah untuk membuktikan secara empiris bahwa e-leadership dapat mempengaruhi keberhasilan/kesuksesan penerapan e-government. Teori ini oleh peneliti akan dibuktikan di lingkup instansi pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota di Indonesia. Untuk melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kasus untuk dapat mengeksplorasi lebih detail terkait topik yang diangkat. Penelitian ini didasarkan pada fenomena yang sedang terjadi di lingkungan pemerintahan serta diperkuat dengan terbitnya Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 tahun 201 tentang Pedoman Evaluasi SPBE.

### **3. Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh kesuksesan e-leadership terhadap kesuksesan e-government di Indonesia.
2. Menjelaskan bagaimana kesuksesan e-leadership dapat mempengaruhi kesuksesan e-government.
3. Sebagai trigger dan masukan kepada pemerintah daerah dalam upayanya mengukur dan melaksanakan penerapan e-government yang baik.

### **4. Manfaat**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Memperoleh gambaran terkini terkait kondisi e-leadership dan pengaruhnya terhadap kesuksesan e-government yang ada di kota/kabupaten (Kota Madiun, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Trenggalek) di Indonesia

2. Memberikan petunjuk dan masukan terkait kondisi e-leadership yang ada di kota/kabupaten agar supaya dapat meningkatkan kesuksesan pelaksanaan e-government.

**PROFIL INFORMAN**

- 1. **Nama Instansi** : .....
  - 2. **Tanggal Interview** : .....
  - 3. **Nama** : .....
  - 4. **Jabatan** : .....
  - 5. **Lama Kerja** : .....
  - 6. **Kualifikasi** : .....
- .....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

....., ..... 2018

.....

No	Hipotesis	Definition	Reference	Questions
1.	<b><i>Strong leadership</i></b> dapat mempengaruhi kesuksesan e-government.	<p>Kepemimpinan yang kuat tidak lain adalah kepemimpinan yang efektif yang mampu mengelola SDM yang ada guna mewujudkan tujuannya.</p> <p><i>Strong leadership</i> mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Model kepemimpinan</li> <li>- Manajerial</li> <li>- Latar belakang pendidikan</li> <li>- <i>Relationship</i></li> </ul>	<p>OECD (2003), Weiling Ke and Kwok Kee Wei (2004), H. Kifle &amp; Patrick L Kim, 2009, Lufman (2004), Heeks, R (2003), Ndou, V ( 2004), Layne and lee (2001), E. Marwan et al (2007), Dr. Nasser Said &amp; Yared Hala (2003), Kim <i>et al.</i>, (2009), Leitner and Kreuzeder (2005),</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. “ Pak/Bu, Menurut panjenengan ada atau tidak nggeh hubungan antara strong leadership terhadap kesuksesan e-government?”</li> <li>2. “ Model kepemimpinan kana da banyak pak/bu, kira-kira panjenengan pakai model yang seperti apa yaa? “</li> <li>3. “ Misalkan ada anggota ibu yang tidak sesuai dengan kepemimpinan bapak/ibu, bagaimana cara menanggapi nggih?”</li> <li>4. “ Menurut bapak /ibu penting kah latar belakang pendidikan seorang pemimpin? “</li> <li>5. “ Sebagai sorang pemimpin tentunya bapak/ibu butuh kerjasama dengan kepala daerah yang lain, bagaimana bentuk relationship yang bapak/ibu bangun?”</li> <li>6. “ Bagaimana menurut bapak/ibu kepemimpinan yang efektif menyebabkan kesuksesan e-goverment?”</li> </ol>

2.	<b>Vision and Mision leadership</b> dapat mempengaruhi kesuksesan e-government.	<p>Visi dan Misi dari seorang pemimpin dalam menjalankan tugas sebagai tujuan yang ingin dicapai.</p> <p>Visi dan Misi pemimpin mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Share visi and mission</li> <li>- Selaras dengan tujuan organisasi</li> <li>- Jelas dan dipahami oleh seluruh stakeholders</li> </ul>	<p>OECD (2003), Kotter(1996), Weiling Ke and Kwok Kee Wei (2004), M. Almarabeh and Ali (2007), Ojo et al (2007), Dr. Nasser Said &amp; Yared Hala (2003), Rahardjo (2008), Burke (2008), O'Donnell et al. (2003), Jaeger and Thompson (2003), Ke and Wei (2004), Elnaghi et al. (2007), Dawes S (2008), Leitner and Kreuzeder (2005), Gordon Z.O (2004),</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. “ Pak/ibu, menurut panjenengan, ada atau tidak yaa hubungan visi dan misi terhadap kesuksesan e-leadership?”</li> <li>2. “ Apakah selama ini visi dan misi bapak/ibu sudah selaras dengan tujuan instansi nggeh? “</li> <li>3. “ Agar tujuan instansi dapat tercapai tentunya bapak/ibu harus menshare visi &amp; misi, bagaimana cara bapak/ibu melakukan itu nggeh? “</li> <li>4. “ Menurut bapak/ibu, bagaimana cara untuk mengetahui bahwa stakeholders sudah paham dan jelas dengan visi dan misi yang bapak/ibu tentukan?”</li> <li>5. “ Bagaimana menurut bapak/ibu, visi dan misi leadership mempengaruhi kesuksesan e-government?”</li> </ol>
3.	<b>Align IT and goals strategy</b> dapat	Kesadaran seorang pemimpin dalam memanfaatkan IT sebagai	M. Almarabeh and Ali (2007), Lufman (2004), E. Marwan et al (2007),	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. “ Pak/bu, sebelumnya sudah ada kesadaran kan dari bapak/ibu untuk menggunakan IT dalam mencapai tujuan instansi?”</li> </ol>

	mempengaruhi kesuksesan e-government.	alat atau strategi untuk mencapai tujuan.  <i>Align IT and goals strategy</i> mencakup : - Seberapa besar peran IT - Change management	Andoh-Baidoo and Osatuyi (2009), Weerakkody and Dhillon, (2008), Irani <i>et al.</i> (2003), Avolio B & Kahai S, (2013), K. Mohammad (2009), Dawes S (2008), Jean-Pierre Auffret, et al (2010),	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. “Menurut bapak/ibu ada tidak yaa dampak yang diperoleh dengan menggunakan IT dalam keberhasilan e-government?”</li> <li>3. “ Dari kacamata bapak/ibu, seberapa penting sih peranan IT dalam proses bapak/ibu mewujudkan tujuan instansi? “</li> <li>4. “ Sebelum kan tidak menggunakan IT kemudian berubah menggunakan IT, bagaimana cara bapak/ibu merubah paradigam anggota yang sudah nyaman dengan proses manual kemudian dirubah menjadi menggunakan IT?”</li> <li>5. “ Bagaimana menurut bapak/ibu penggunaan IT dapat mempengaruhi kesuksesan penyelenggaraan e-government?”</li> </ol>
4.	<b>Commitment</b> dapat mempengaruhi kesuksesan e-government.	Keinginan atau kemauan dari pemimpin dan yang dipimpin untuk mencapai keberhasilan yang didambakan.	Ojo et al (2007), UNPOG (2012), Rahardjo (2008), Heeks and Stanforth, (2007), Zairi (1994, p. 9), Leitner and Kreuzeder (2005).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. “ Menurut bapak/ibu ada gak hubungan antara komitmen yang kuat dari leadership terhadap kesuksesan penyelenggaraan e-government?”</li> </ol>

		<p>Commitment mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berani menanggung resiko</li> <li>- Membentuk kelompok kerja inovatif</li> <li>- Membina mental berani mencoba</li> <li>- Memimpin masa depan</li> <li>- Percaya kepada pengikut</li> </ul>		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. “ Tentunya dengan komitmen yang bapak/ibu punya mudah untuk menangani resiko-resiko yang kemungkinan terjadi, kira-kira resiko terbesar apa yang pernah bapak/ibu ambil dalam upaya mencapai tujuan yang sudah bapak/ibu tentukan?”</li> <li>3. “ Sejauh ini selama bapak/ibu menjabat, apakah bapak/ibu memiliki kelompok kerja inovatif nggeh, guna terus berinovasi dalam mewujudkan tujuan instansi? “</li> <li>4. “ Bagaimana cara bapak/ibu dalam membangun mental berani mencoba/berinovasi kepada anggota bapak/ibu? “</li> <li>5. “ Bagaimana cara bapak/ibu memberikan kepercayaan kepada anggotanya dalam komitmen mewujudkan tujuan instansi? ”</li> <li>6. “ Bagaimana menurut bapak/ibu komitmen dari seorang leadership mampu mempengaruhi kesuksesan penyelenggaraan e-leadership?”</li> </ol>
--	--	---	--	--



5.	<p><b>Leadership functions</b> mempengaruhi kesuksesan e-government.</p>	<p>Fungsi kepemimpinan atau kemampuan memimpin yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam menjalankan tugas dan fungsinya.</p> <p><i>Leadership functions</i> mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Protection</li> <li>- Goals managing time</li> <li>- Controlling</li> <li>- Offering support</li> </ul>	<p>Burke (2008), Yalom and Miles (1995).</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. “ Bapak/ibu sebelumnya sudah ada kesadaran nggeh kalau skill / kemampuan pemimpin mempengaruhi kesuksesan e-government?”</li> <li>2. “ Salah satu skill yang diperlukan dalam kepemimpinan kan mengontrol, bagaimana bentuk control yang bapak/ibu lakukan agar anggota tetap <i>on the track</i>?”</li> <li>3. “ Bagaimana bapak/ibu memberikan perlindungan terhadap anggota bapak/ibu, sehingga mereka berani untuk melakukan inovasi-inovasi guna mensukseskan e-government? “</li> <li>4. “ Bagaimana bentuk support yang bapak/ibu berikan kepada anggota sehingga anggota terus termotivasi untuk menjalankan tugas dan fungsinya guna mencapai tujuan instansi?”</li> <li>5. “ Bagaimana menurut bapak/ibu kemampuan leadership dalam mengelola perbedaan untuk mencapai tujuan mempengaruhi kesuksesan penyelenggaraan e-government?”</li> </ol>
----	--	--	--	---

## 2. LEMBAR VERIFIKASI DAN VALIDASI

### LEMBAR VERIFIKASI PENGUKURAN E-LEADERSHIP

Lembar verifikasi dan validasi dokumen instrument pengukuran tingkat e-leadership dalam e-government Indonesia ini ditujukan untuk mengesahkan bahwa daftar indikator dan instrument pengukuran yang telah dirumuskan peneliti telah disetujui oleh pakar E-Leadership. Hal ini berkaitan dengan penggunaan dokumen indikator yang digunakan untuk pengukuran tingkat e-leadership dapat digunakan. Persetujuan dokumen model pengukuran e-leadership adalah berdasarkan pada sektor pemerintahan daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.

#### **Petunjuk:**

Lembar validasi ini digunakan untuk mengetahui pendapat Bapak sebagai ahli/expert terhadap model pengukuran e-leadership adalah berdasarkan pada sektor pemerintahan daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, saya berharap kesediaan Bapak untuk memberikan validasi terhadap model pengukuran yang telah disintesis.

Berikut dokumen yang dihasilkan:

#### **Perangkat Pengukuran E-Leadership**

##### **KUESIONER E-LEADERSHIP INSTANSI PEMERINTAHAN**

Nama Instansi :  
Nama Pimpinan/ Kepala :  
Lama Bekerja : Tahun  
e-mail :

Kuesioner E-Leadership Measurement , terdiri dari 70 pertanyaan yang memuat 17 indikator , yakni:

- I. Visi
- II. Perencanaan TI dan implementasi prinsip, proses, dan infrastruktur TI
- III. Struktur organisasi dan Aktivitas TI
- IV. Pengaruh ke lingkungan sosial
- V. Fokus pada Tujuan
- VI. Motivasi
- VII. Komitmen
- VIII. Kepercayaan
- IX. Kemampuan
- X. Koordinasi & Kerja-sama Tim
- XI. Empati
- XII. Kreativitas
- XIII. Disiplin
- XIV. Manajemen TI
- XV. Pengambilan Risiko terkait TI
- XVI. Interaksi dan Komunikasi terkait TI
- XVII. Kepemimpinan yang kuat.

### **PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER**

1. Pada halaman berikut ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu beberapa pernyataan yang menggambarkan persepsi, pengalaman, sikap dan perilaku individu kapasitas Bapak/Ibu sebagai pimpinan untuk dapat dipakai mengukur gaya kepemimpinan yang ideal dalam E-Leadership dalam E-Government.
2. Mohon untuk mengisi dan memilih alternative jawaban yang menurut Bapak/Ibu paling sesuai berdasarkan persepsi dan pengalaman kerja.
3. Untuk memberikan jawaban atas pernyataan dalam kuesioner ini disediakan alternative jawaban yang berskala Likert, pada Tabel berikut ini:

<b>Score</b>	<b>Kode</b>	<b>Keterangan</b>
1	TP	Tidak pernah
2	J	Jarang
3	KK	Kadang-kadang
4	S	Sering
5	SS	Sangat sering

4. Interpretasi hasil total score pilihan Bapak / Ibu dapat di deskripsikan sebagai berikut:

<b>Total</b>	<b>Keterangan</b>
258-350	<p>Top E-Leadership</p> <p>E-Leadership Bapak / Ibu sudah sangat ideal dalam kesuksesan implementasi sistem E-Government.</p> <p>Kepemimpinan Bapak / Ibu sudah sangat ideal dalam penyelenggaraan sistem e-government. Aspek-aspek kepemimpinan Bapak/Ibu dalam menginisiasi, mengawal dan memastikan kesuksesan Teknologi Informasi dalam mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah/organisasi telah ideal.</p>
164-257	<p>Middle E-Leadership</p> <p>Gaya kepemimpinan Bapak / Ibu cukup baik untuk kesuksesan implementasi sistem E-Government.</p> <p>Kepemimpinan Bapak / Ibu pada prinsipnya dalam kategori cukup, sehingga masih perlu peningkatan optimal aspek-aspek kepemimpinan Bapak/Ibu dalam menginisiasi, mengawal dan memastikan kesuksesan Teknologi Informasi dalam mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah/organisasi.</p>
70-163	<p>Low E-Leadership</p> <p>Gaya kepemimpinan Bapak / Ibu masih perlu ditinjau ulang untuk kesuksesan implementasi sistem E-Government.</p> <p>Solusi introspeksi diri dari kepemimpinan Bapak / Ibu untuk meningkatkan aspek-aspek kepemimpinan Bapak/Ibu dalam menginisiasi, mengawal dan memastikan kesuksesan Teknologi Informasi dalam mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah/organisasi. Perlu mendiagnosa kebutuhan aktual dari anggota organisasi dan perlu meng upgrade kemampuan dan keterampilan E-Leadership melalui proses <i>counselling</i> dan pelatihan.</p>

5. Berikut adalah pertanyaan dalam kuesioner ini disediakan alternative sesuai penjelasan sebelumnya, mohon berkenan untuk memilih salah satu alternative pilihan jawaban yang tersedia.

NO	PERTANYAAN	TP	J	KK	S	SS
<b>Visi</b>						
1	Saat pertama kali menjadi kepala daerah tergambar mimpi atau visi terkait pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) untuk menjadikan daerah lebih maju ditangannya.					
2	Bersempat membangun <i>mindset</i> pentingnya peran TI dalam memfasilitasi pencapaian visinya.					
3	Bersempat mengkomunikasikan cita-cita memajukan daerah dengan adanya TI kepada para anggota/staf dan masyarakat.					
4	Membuat pertemuan sosialisasi dengan mengikutsertakan anggota /staf dan masyarakat dalam pengamblan kebijakan pencapaian Visi terkait IT.					
5	Meminta pendapat dan berdiskusi dengan anggota/staf untuk menyelaraskan visi pimpinan dengan visi terkait teknologi informasi(TI).					
6	Memberikan contoh kebiasaan memanfaatkan TI ternyata mampu membantu tugas pemerintahan mencapai visinya					
<b>Perencanaan TI dan implementasi prinsip, proses, dan infrastruktur TI</b>						
7	Mengkomunikasikan pentingnya perencanaan TI kepada anggota/staf					
8	Masuk/ ikut terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan TI di daerahnya.					
9	Mendukung pembuatan masterplan yang tepat sesuai isu strategis daerahnya.					
10	Bersempat membangun kerjasama antar masyarakat, institusi, OPD bahkan daerah lain untuk memaksimalkan implementasi TI.					
11	Memberikan arahan pentingnya mengutamakan peningkatan pelayanan publik dengan TI yang efektif, efisien, <i>transparent</i> , dan <i>accountable</i> .					
12	Mendukung kebutuhan infrastruktur TI untuk masyarakat daerahnya.					
<b>Struktur organisasi dan Aktivitas TI</b>						
13	Mendukung pembuatan organisasi khusus untuk memonitor dan mengarahkan kebijakan-kebijakan TI daerahnya.					
14	Mengadakan forum/ dialog public/evaluasi rutin untuk memastikan keberhasilan e-government					
15	Mendukung fasilitas pelatihan <i>upgrade</i> penguasaan TI anggota/staf terkait TI.					
16	Bersempat membangun komunitas kerjasama dengan daerah lain terkait upaya implementasi TI.					
<b>Pengaruh ke lingkungan sosial</b>						
17	Mempengaruhi staf dan masyarakat dalam implentasikan TI dengan menjabarkan manfaatnya.					
18	Ketegasan dalam peraturan atau kebijakan guna memastikan kesuksesan implementasi TI					
19	Memberikan tekanan sosial pada instansi yang belum mendukung keberhasilan implementasi TI.					
<b>Fokus pada Tujuan</b>						

20	Bersemangat menyampaikan tujuan dan/atau indikator kinerja kesuksesan TI kepada staf					
21	Saling belajar bersama masyarakat dan seluruh <i>stakeholder</i> yang lain untuk mengelola masalah, menyelesaikan masalah dan tumbuh berkembang bersama-sama untuk tujuan.					
22	Melakukan pengarahan perjanjian kerja bagi Perangkat Daerah dalam mencapai kesuksesan implementasi TI					
23	Memantau pengawasan pada laporan evaluasi keberlangsungan E-government pada daerahnya.					
<b>Motivasi</b>						
24	Sejak awal sudah menyukai Teknologi Informasi dan pemanfaatannya.					
25	Bersemangat memberikan paparan motivasi staf-staf jajarannya terkait kebutuhan memanfaatkan sistem e-Government					
26	Bersemangat memberikan contoh untuk memotivasi memanfaatkan sistem e-Government menjadi suatu tuntutan wajib.					
<b>Komitmen</b>						
27	Memiliki komitmen tinggi dalam memanfaatkan TI guna mendukung tugas-tugas.					
28	Meyakinkan rencana program/investasi TI yang jelas manfaatnya hingga disetujui oleh DPRD					
29	Komitmen mengawal setiap program TI benar-benar didukung & dilaksanakan oleh semua unit dan staf Pemkot/kab terkait					
30	Memberikan penjelasan teknis yang logis dan komprehensif berkaitan dengan program/investasi TI kepada DPRD dalam forum dengar pendapat atau rapat kerja.					
31	Melanjutkan komitmen diawal dengan konsistensi untuk mengawal dengan bekerjasama dengan semua unit jajarannya.					
<b>Kepercayaan</b>						
32	Membangun kepercayaan staf dan masyarakat hingga semakin meningkat dengan adanya sistem E-government.					
33	Membangun kepercayaan dengan adanya <i>feedback</i> penanganan permasalahan masyarakat dibantu TI.					
34	Menyakinkan staf jajarannya dan masyarakat TI mampu sebagai alat meningkatkan kesuksesan pemerintahannya.					
35	Menyampaikan keuntungan memanfaatkan sistem e-government, masyarakat dan staf telah mempercayai dan mengikutinya					
<b>Kemampuan</b>						
36	Memahami konsep dasar dan fungsi IT sebagai solusi keperluan akseleasi pemerintahannya					
37	Memahami wawasan terkait transparansi, akuntabilitas, dan inovasi IT					
38	Memahami alur mengarahkan implementasi IT pada pemerintahannya tapi bukan pada masalah teknis.					

39	Kemauan terus belajar mengikuti perkembangan TI dan tidak menutup saran dari jajarannya.					
40	Mampu menerjemahkan kegunaan TI dan evaluasi gambaran umum e-government pada perangkat daerah/jajarannya.					
<b>Koordinasi &amp; Kerja-sama Tim</b>						
41	Keberhasilan implementasi TI lebih ditentukan oleh koordinasi dan kerja-sama tim yang baik.					
42	Membangun tim khusus dari masyarakat sebagai tim pengarah pengambilan keputusan TI pemerintahan					
43	Memberikan kepercayaan dinas kominfo dalam pendampingan dan kontrol tim khusus TI					
44	Melakukan seleksi tim pengelola TI benar-benar berisi orang yang berkompeten dan solid, sebelum memulai pengadaan sistem e-government.					
45	Mengadakan forum guna menjaga koordinasi dan kerja-sama tim tetap baik dalam implementasi E-Government untuk menghindari ego sektoral.					
<b>Empati</b>						
46	Menciptakan ekosistem <i>mindset</i> kebutuhan yang tidak bisa dihindari, dinas harus menggunakan IT untuk menunjang pekerjaannya					
47	Membangun jaringan internet (fiber optic/free wifi) solusi bagi masyarakat yang tidak mampu mengakses layanan TI pemkot/kab					
48	Mengganti layanan online yang masih menyusahkan masyarakat/penggunanya, dan tetap adanya layanan offline.					
49	Membangun semangat kerjasama antar OPD dalam evaluasi kebutuhan SDM dan aplikasi agar sesuai dengan kebutuhan pengguna/masyarakat.					
<b>Kreativitas</b>						
50	Mengemukakan ide/inovasi sistem/layanan TI untuk kemajuan daerahnya.					
51	Menggali ide solusi sistem/layanan TI berdasarkan masalah rakyatnya.					
52	Mengadakan kompetisi untuk rakyat terkait usulan gagasan pelayanan TI daerahnya					
53	Mengapresiasi inovasi/kreativitas TI staf atau masyarakat dengan tunjangan, piagam dan <i>award</i> .					
<b>Disiplin</b>						
54	Menciptakan ekosistem pentingnya kedisiplinan dalam implementasi TI					
55	Memberikan <i>punishment</i> konsekuensi ketidaksiplinan staf dalam kehadiran dan dalam penanganian aduan masalah rakyat.					
56	Memberikan aturan/payung hukum yang jelas tentang <i>reward</i> dan <i>punishment</i> dari kedisiplinan staf/jajaran dinas.					
57	Mengapresiasi kedisiplinan staf/jajaran dengan memberikan <i>reward</i> khusus staf					

<b>Manajemen TI</b>					
58	Mengutamakan perencanaan TI sebagai pondasi aktivitas pemerintah daerah.				
59	Memberikan pengawasan dari awal hingga akhir implementasi TI terkontrol dalam setiap stepnya.				
60	Membangun kerjasama dengan tim/OPD sesuai dengan aturan/payung hukum yang berlaku.				
61	Melaksanakan evaluasi secara berkala untuk memastikan perencanaan pengelolaan e-government dapat berjalan sesuai dengan rencana				
<b>Pengambilan Risiko terkait TI</b>					
62	Telah mempertimbangkan risiko-risiko TI dan lebih mengutamakan kebermanfaatannya.				
63	Mengkomunikasikan aturan/payung hukum yang jelas tentang pembangunan, penganggaran dan akses data TI.				
64	Melakukan antisipasi risiko misal pemborosan yang akan muncul dengan membuat rencana induk (masterplan) secara detail.				
65	Memberikan fasilitas pelatihan khusus sosialisasi pembekalan antisipasi dan langkah-langkah mengamankan data terkait TI.				
66	Mendukung pengadaan sarana prasarana dan implementasi TI dilaksanakan secara bertahap sesuai skala prioritas				
<b>Interaksi dan Komunikasi terkait TI</b>					
67	Mengkomunikasikan setiap perubahan dan ide terakait TI sesuai sasaran pengguna/masyarakat.				
68	Memaksimalkan publikasi internal dan eksternal baik secara offline dna online terkait sistem e-government untuk pelayanan publik.				
<b>Kepemimpinan yang kuat</b>					
69	Tegas mendukung keberlanjutan program-program TI agar berjalan sukses.				
70	Tegas dalam pemberian reward dan punishmet sesuai aturan terhadap pelaksana misi implementasi TI agar sukses.				

## VALIDASI HASIL EVALUASI SPBE

### 1. Kabupaten Bojonegoro

#### KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik.

Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE ditujukan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, dan meningkatkan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami bahwa hasil evaluasi SPBE tahun 2018 dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan SPBE yang terpadu sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan serta bermanfaat bagi masyarakat, pelaku usaha, aparatur sipil negara, dan instansi pemerintah.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan semua pemangku kepentingan termasuk Tim Evaluator Eksternal dari Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah.

Jakarta, Maret 2018

Deputi Bidang Kelembagaan  
dan Tata Laksana,  
Rini Widyantini

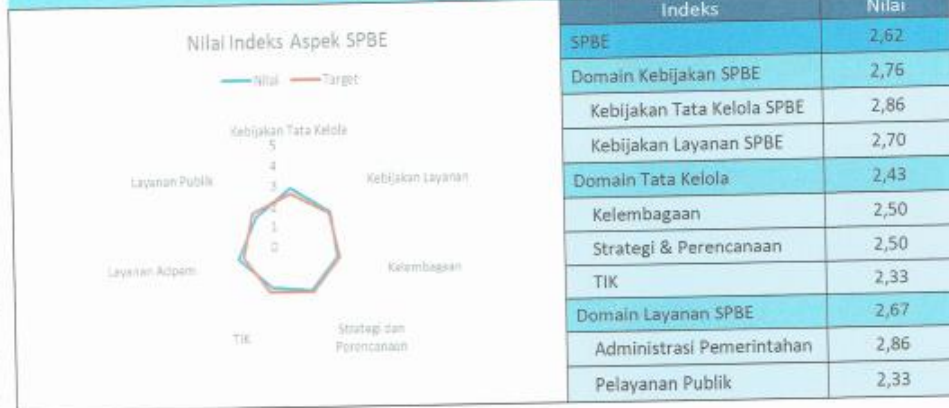




## INDEKS SPBE – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

2,62  
(Baik)

### Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



### Kekuatan dan Kelemahan

#### A. Kebijakan Tata kelola

- **Kekuatan**

Kebijakan tata kelola SPBE yang telah mengatur mekanisme evaluasi berkelanjutan dan manajemen perubahan adalah kebijakan tim pengarah SPBE, kebijakan anggaran dan belanja TIK, dan kebijakan integrasi sistem aplikasi. Kebijakan penggunaan aplikasi umum berbagi pakai telah mengatur integrasi antar proses tata kelola dan mekanisme pengukuran kinerja proses tata kelola tersebut. Selain itu, kebijakan pengoperasian pusat data telah mengatur standar proses tata kelola bagi semua perangkat daerah terkait, meskipun belum mengatur keselarasan antar proses tata kelola.

- **Kelemahan**

Adapun kebijakan tata kelola SPBE perlu disusun, ditetapkan, dan dilaksanakan adalah kebijakan inovasi proses kerja terintegrasi dan kebijakan rencana induk SPBE. Kebijakan tersebut minimal mengatur standar proses tata kelola bagi semua perangkat daerah terkait, meskipun belum mengatur keselarasan antar proses tata kelola.

Kebijakan inovasi proses kerja terintegrasi (Perbup 30/2013) dan pengelolaan data center (perbup 46/2015) perlu ditingkatkan kapabilitas prosesnya (terstandarisasi, terintegrasi, hingga optimum).

#### B. Kebijakan Layanan

- **Kekuatan**

Kebijakan layanan SPBE terkait kebijakan layanan pengadaan telah mengatur integrasi antar proses tata kelola dan mekanisme pengukuran kinerja proses tata kelola tersebut. Selain itu, kebijakan layanan naskah dinas, kebijakan layanan manajemen kepegawaian, kebijakan layanan manajemen perencanaan dan penganggaran, kebijakan layanan manajemen keuangan, kebijakan layanan manajemen kinerja, kebijakan layanan pengaduan publik, dan kebijakan layanan publik pemerintah daerah telah mengatur standar proses tata kelola bagi semua perangkat daerah terkait, meskipun belum mengatur keselarasan antar proses tata kelola.

## 2. Kabupaten Trenggalek



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/195/M.KT.03/2019  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis  
Elektronik (SPBE) Tahun 2018

27 Maret 2019

Yth.  
**Bupati Trenggalek**  
di  
Tempat

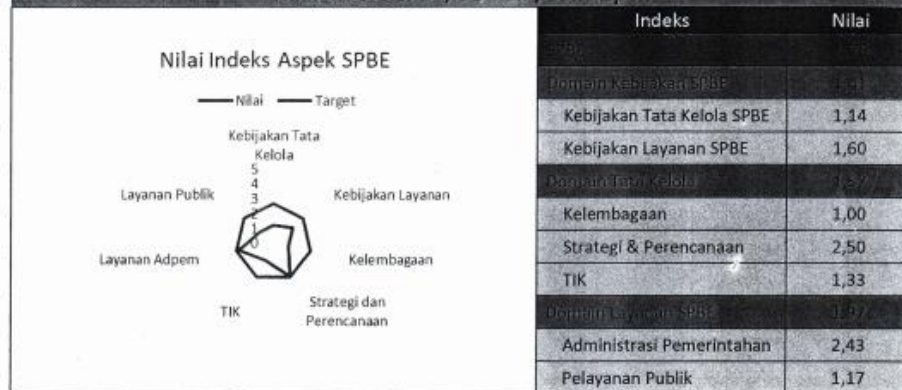
Sehubungan dengan pelaksanaan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tahun 2018 sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka bersama ini kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara atas partisipasi dan kerjasama yang baik selama kegiatan evaluasi ini berlangsung. Kegiatan Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang nantinya akan digunakan sebagai dasar memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE

Menindaklanjuti pelaksanaan Evaluasi SPBE Tahun 2018, dengan ini kami sampaikan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2018 sebagaimana terlampir. Harapan kami bahwa hasil Evaluasi SPBE Tahun 2018 dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Saudara dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan SPBE yang terpadu sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan serta bermanfaat bagi masyarakat, pelaku usaha, Aparatur Sipil Negara, dan instansi pemerintah.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami mengucapkan terima kasih

  
Menteri Pendayagunaan Aparatur  
Negara dan Reformasi Birokrasi  
  
SYAFRUDDIN

## Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



## Kekuatan dan Kelemahan

## A. Kebijakan Tata kelola

## • Kekuatan

Pemerintah Kabupaten Trenggalek berkomitmen menyusun, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan tata kelola SPBE.

## • Kelemahan

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan tim pengarah SPBE, kebijakan inovasi proses bisnis terintegrasi, kebijakan rencana induk SPBE, kebijakan anggaran dan belanja TIK, kebijakan pengoperasian pusat data, kebijakan integrasi sistem aplikasi, dan kebijakan penggunaan aplikasi umum berbagi pakai. Kebijakan tersebut minimal mengatur standar proses tata kelola bagi semua perangkat daerah terkait, meskipun belum mengatur keselarasan antar proses tata kelola.

## B. Kebijakan Layanan

## • Kekuatan

Kebijakan layanan SPBE terkait kebijakan layanan pengadaan dan kebijakan layanan dokumentasi dan informasi hukum telah mengatur standar proses tata kelola bagi semua perangkat daerah terkait, meskipun belum mengatur keselarasan antar proses tata kelola.

## • Kelemahan

Adapun kebijakan layanan SPBE yang perlu disusun, ditetapkan, dan dilaksanakan, meliputi kebijakan layanan naskah dinas, kebijakan layanan manajemen kepegawaian, kebijakan layanan manajemen perencanaan dan penganggaran, kebijakan layanan manajemen keuangan, kebijakan layanan manajemen kinerja, kebijakan layanan pengaduan publik, kebijakan layanan whistle blowing system, dan kebijakan layanan publik pemerintah daerah. Kebijakan tersebut minimal mengatur standar proses tata kelola bagi semua perangkat daerah terkait, meskipun belum mengatur keselarasan antar proses tata kelola.

### 3. Kota Madiun



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/195/M.KT.03/2019

27 Maret 2019

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : **Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis  
Elektronik (SPBE) Tahun 2018**

Yth.

**Walikota Madiun**

di

Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tahun 2018 sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka bersama ini kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara atas partisipasi dan kerjasama yang baik selama kegiatan evaluasi ini berlangsung. Kegiatan Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang nantinya akan digunakan sebagai dasar memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE.

Menindaklanjuti pelaksanaan Evaluasi SPBE Tahun 2018, dengan ini kami sampaikan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2018 sebagaimana terlampir. Harapan kami bahwa hasil Evaluasi SPBE Tahun 2018 dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Saudara dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan SPBE yang terpadu sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan serta bermanfaat bagi masyarakat, pelaku usaha, Aparatur Sipil Negara, dan instansi pemerintah.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami mengucapkan terima kasih

Menteri Pendayagunaan Aparatur  
Negara dan Reformasi Birokrasi  
  
SYAFRUDDIN

**Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek**



**Kekuatan dan Kelemahan**

- A. Kebijakan Tata kelola
  - **Kekuatan**  
Kebijakan tata kelola SPBE sudah dibuat dan diterapkan secara optimal untuk sebagian keperluan layanan publik pada instansi terkait.
  - **Kelemahan**  
Kebijakan tata kelola SPBE belum secara konsisten diperbarui dan diterapkan untuk memayungi setiap bentuk layanan publik pada instansi terkait.
- B. Kebijakan Layanan
  - **Kekuatan**  
Kebijakan layanan SPBE sudah dibuat dan diterapkan secara optimal untuk sebagian aplikasi layanan pada instansi terkait.
  - **Kelemahan**  
Kebijakan layanan SPBE belum secara konsisten diperbarui dan diterapkan untuk memayungi setiap bentuk aplikasi layanan pada instansi terkait.
- C. Kelembagaan
  - **Kekuatan**  
Kelembagaan SPBE sudah diatur dan dijalankan secara optimal oleh sebagian unit kerja pada instansi terkait.
  - **Kelemahan**  
Kelembagaan SPBE belum secara konsisten diperbarui dan dijalankan untuk seluruh unit kerja pada instansi terkait.
- D. Strategi dan Perencanaan
  - **Kekuatan**  
Strategi dan perencanaan SPBE sudah mulai disusun dan dilaksanakan secara optimal oleh sebagian unit kerja pada instansi terkait.

### 3. PROFIL NARASUMBER

#### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Dr. H. SUYOTO, M.Si
2. Tempat/ Tanggal lahir/Umur : Bojonegoro, 17 Februari 1965 / 53 tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : I S L A M

#### 5. Riwayat pendidikan

NAMA SEKOLAH	TEMPAT / KOTA	TAHUN LULUS
1. SDN BAKUNG KANOR	BOJONEGORO	1977
2. MTs ISLAMIYAH Ds. TALUN	BOJONEGORO	1981
3. MA ISLAMIYAH Ds. TALUN	BOJONEGORO	1984
4. S1 IAIN SUNAN AMPEL	MALANG	1989
5. S2 UM MALANG	MALANG	1997
6. S3 UNAIR-UM MALANG	MALANG	2017
7. EXECUTIVE EDUCATION PROGRAM, KERJASAMA IDEAS DENGAN MIT	MASACHUSSETS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, USA	2010

#### 6. Kursus/ Diklat : Lemhanas Tahun 2008

#### 7. Pengalaman Organisasi

NO	NAMA ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI
1	HMI MALANG TH. 1987/1988	KETUA
2	DPW PAN JATIM DI SURABAYA TH. 2005-2016	KETUA

#### 8. Riwayat Pekerjaan

JABATAN	BERLAKU TERBILANG
1. DOSEN UM MALANG	TAHUN 1989 – 2004
2. DOSEN UM GRESIK	TAHUN 1989 – 2004
3. REKTOR UM GRESIK	TAHUN 2000 – 2004
4. DPRD JAWA TIMUR	TAHUN 2004 – 2008
5. KETUA DPW PAN JATIM	TAHUN 2005 – 2015
6. BUPATI BOJONEGORO	TAHUN 2008 – 2013
7. BUPATI BOJONEGORO	TAHUN 2013 - 2018

9. Forum Internasional yang pernah diikuti (**sebagai narasumber**)
  - a. 21-23 Agustus 2013, Konferensi Asia Selatan tentang Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif, Davao Filipina
  - b. 25-30 Agustus 2013, Ford Foundation Ghana Meeting entitled "Reversing the Resource Curse", Accra Ghana
  - c. 10-12 Februari, Global Presencing Forum in Cambridge MA-USA, Boston USA
  - d. 22-31 Juli 2014, International Integral Space Conference, New Meanings In Busines Becoming Genuine Rusia, Rusia
  - e. 3-5 Desember 2014, Dialogue on the Extractive Sector and Sustainable Development-Enhancing Public-Private Cooperation inthe Context of the Post-2015, Brazil
  - f. 21-22 Juli 2015, Konferensi Walikota Sedunia mengenai Climate Change dan Permasalahan Terkait, di Vatican
  - g. 22-28 Agustus 2015, BUNTWANI 2015, "The Next Step in Innovation for Good Governance : Moving the dialogue forward from potential to impact", Afrika Selatan
  - h. 07- 09 Desember 2016, Open Government Partnership (OGP) global Summit in Paris, France
  - i. 18-20 July 2017 Sharing discussion "Open Government Partnership (OGP) subnational Workshop in Washington DC
  - j. 26-30 Oktober 2017 Sharing Session The Open and Tranformative Government Of Bojonegoro in Manchester
  - k. 26-30 November 2017 Open Contracting global Confrence in Amsterdam

10. Tanda Penghargaan :

- a) Satyalencana karya bhakti praja nugraha (Jasa besar, prestasi kinerja sangat tinggi, penyelenggaraan pemerintah daerah) dari Presiden RI. (Kep. Presiden. 106/tk/2012, tgl 27 Des 2012). Diserahkan pada Hari Otoda tahun 2013.
- b) Penghargaan Adipura Kategori Kota Kecil dari Presiden RI Tahun 2013. Diserahkan pada Hari Lingkungan Hidup tahun 2013
- c) Satya Lencana Wira karya Hari Keluarga XX Tahun 2013
- d) Penghargaan bhakti koperasi dan UMKM tahun 2012 dari Menteri Koperasi dan UMKM RI.
- e) Perhargaan Wahana Tata Graha Tahun 2013
- f) Penghargaan JUARA 1 kategori Sustainable Development Inisiative Award

11. Karya Tulis/ Buku

- a. Buku Al-Fatekah Codes
- b. Buku Melawan Kutukan Sumber Daya Alam
- c. Buku Spirit Of Love
- d. Buku Resonansi Kepemimpinan Transformatif
- e. The Essence of Leadership

## 12. Riwayat Perjuangan :

- a. Sebagai Rektor tahun 2000-2004, teruji mampu melakukan transformasi di Universitas Muhammadiyah Gresik, dari Perguruan Tinggi Swasta rintisan menjadi PTS unggulan dan diperhitungkan di dunia pendidikan tinggi Jawa Timur.
- b. Sebagai Bupati selama dua periode tahun 2008 s.d. saat ini, dipandang sebagai pemimpin transformatif yang mampu mengubah wajah birokrasi di Pemkab Bojonegoro dari birokrasi selfish yang minta dilayani menjadi birokrasi servis yang melayani. Konsekuensi dari birokrasi yang melayani, maka tercipta pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan partnership. Kiprahnya sebagai pemimpin yang mendorong pemerintahan terbuka telah mendapatkan pengakuan dunia dari lembaga OGP Internasional.
- c. Perubahan paradigma birokrasi menyebabkan perubahan tata kelola dan pelayanan publik, pembangunan dilakukan fokus pada penyelesaian masalah, sehingga dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun mampu menurunkan kemiskinan hingga 50% (versi World Bank). Dari kelompok 2 daerah termiskin di Pulau Jawa (versi C.L.M Panders) pada era penjajahan menjadi nomer 11 di Jawa Timur, pada tahun 2016 sekaligus keluar dari 10 daerah termiskin di Jawa Timur.
- d. Selain berhasil menangani kemiskinan endemik yang terjadi sejak era penjajahan Belanda, dibawah kepemimpinan Bupati Suyoto, Bojonegoro tercatat sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia bahkan dunia pada tahun 2015 sebesar 19,4%, mengalahkan tiongkok yang hanya sebesar 7%. Tingkat kesenjangan pun rendah hanya 0,24 %.
- e. Disertainya S3 pada tahun 2017 menghasilkan model yang dinamakan Generative Self Governance (GSG). Model dialog generatif ini digali dari nilai kearifan lokal Bojonegoro dan dikembangkan sejak menjabat sebagai bupati, telah teruji mampu membuat demokrasi lebih bermakna bagi kesejahteraan rakyat, hal ini semakin mengukuhkan perannya sebagai tokoh intelektual sekaligus praktisi dalam bidang pembangunan pedesaan.



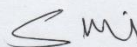
## 4. HASIL WAWANCARA

### NARASUMBER

#### PROFIL NARASUMBER

1. Nama Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro
2. Tanggal : 19 November 2018
- Interview
3. Nama : Dr. H. Suyoto, M.Si
4. Jabatan : Bupati Periode 2008 - 2013 & 2013 - 2018
5. Lama Kerja : 10 Tahun
6. Kualifikasi :
  - Memiliki kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan Kabupaten Bojonegoro untuk mendukung e-Government
  - Memiliki pengalaman kepemimpinan terlibat dalam implementasi TI dan pemerintahan daerah
  - TOP ICT Leadership pada TOP IT & Tekno Award Tahun 2016 & 2017
  - Kabupaten Bojonegoro sebagai pilot project dalam Open Government Partnership
  - Best Practice Implementation on Regency Government 2016
  - Sebagai narasumber forum Internasional dan Nasional
  - Penulis buku Resonansi Transformatif kepemimpinan & The essence of leadership

Gresik ..... 19 November 2018



Dr. H. Suyoto, M.Si

### LEMBAR VALIDASI HASIL PENELITIAN

Judul Penelitian : Pengukuran *E-Leadership* Dalam Keberhasilan *E-Government* Di Indonesia

Peneliti : Yudha Herlambang C.P., S.Kom.

Dosen Pembimbing : Tony Dwi Susanto, S.T., M.T., Ph.D., ITIL, COBIT

Telah dilakukan penggalan data melalui wawancara dan observasi langsung terhadap narasumber sebagai berikut :

Nama Narasumber : Dr. H. Suyoto, M.Si

Usia :

Posisi : Bupati Periode 2008-2013 & 2013-2018

Tanggal Wawancara : 19 November 2018

Tempat Wawancara : Universitas Muhammadiyah Gresik

Hasil Penelitian : TERLAMPIR SESUAI LAPORAN PENELITIAN

Berikan checklist (✓) pada kolom di bawah ini :

Komponen Validasi	Sesuai Fakta Di Lapangan	
	Ya	Tidak
Keterkaitan antara e-leadership dalam keberhasilan e-government	✓	
<i>Strong Leadership</i>	✓	
Visi dan Misi <i>Leadership</i>	✓	
Keselaranan IT dengan <i>Goals Strategi</i>	✓	
Komitmen	✓	
<i>Leadership Fuctions</i>	✓	

Gresik, 19 November 2018

*Suyoto*

( Dr. H. Suyoto, M.Si )

## HASIL WAWANCARA NARASUMBER 1

<b>Strong Leadership (Pemimpin Yang Kuat)</b>	
1. “Pak/Bu, Menurut panjenengan ada atau tidak nggeh hubungan antara strong leadership terhadap kesuksesan e-government?”	Pentingnya peran pemimpin yang kuat sejak awal sudah ada bahwa IT itu bukan gagah-gagahan tapi adalah fungsinya. Maka dari itu bukan canggihnya tapi fungsionalnya yang membuat tumbuh berkembang dan semua menjadi tiba-tiba menjadi bagian dari hidupnya. Jika tidak mengerti dia akan belajar pada lingkuangannya anak-anak muda. Jika memerlukan software yang canggih kita bisa mengundang orang lain bisa dari luar daerah bisa orang luar pemerintahan dari mana saja yang kita anggap bisa. Hampir semua tidak berbiaya atau ya tidak mahal karena tiba-tiba ad media track Topnya IT di Indonesia tahu Bojonegoro begitu dia datang dengan timnya dan membantu karena ini akan menjadi bisnis suatu hari kedepan. Bank dunia juga turut terlibat, jika kita punya terobosan bagus itu ibarat magnet itu diputar itu tiba-tiba menyedot energy dari luar.
2. “Model kepemimpinan kan ada banyak pak/bu, kira-kira panjenengan pakai model yang seperti apa yaa? “	Pemerintahan yang mengedepankan aspek adalah transparansi, akuntabilitas, inovasi dan partnership karena itu yang menjadi <i>value</i> dari <i>open government</i> , disitulah kita mengalami proses <i>co-creation</i> saling belajar bersama masyarakat dan seluruh <i>stakeholder</i> yang lain untuk mengelola masalah, menyelesaikan masalah dan tumbuh berkembang bersama-sama.
3. “Misalkan ada anggota ibu yang tidak sesuai dengan kepemimpinan bapak/ibu, bagaimana cara menanggapi nggih?”	Jika tidak disiplin dinas langsung medapat tanda merah statistiknya terlihat lagsung dan jika dinas merah beberapa kali konsekuensi tunjangan

	<p>kinerjanya hilang. Jadi sekali lagi ini terkait ekosistem bukan gagah-gagahan bupati atau pemimpinnya. Ada manajemen review setiap jum'at disitu akan ketahuan dan tidak bisa berbohong misal laporan kinerjanya dari bulan ke bulan berikutnya, jika lupa tidak mengisi maka dia tidak ada progres kerja, tidak ada performance dan tidak sesuai target misalnya. Jika 2-3 kali merah maka ada teguran. Jadi bukan takut pada pemimpin tapi takut pada ekosistem dan sistem yang dibuat tadi.</p>
<p>4. “Menurut bapak /ibu penting kah latar belakang pendidikan seorang pemimpin? “</p>	<p>Pemimpin yang memahami tentang konsep dasar mengapa IT digunakan itu akan dengan cepat mengadopsi keperluan akseleasi pemerintahannya. Tapi bagi yang tidak mengerti biasanya takut terhadap teknologi itu. Saya tidak bisa membayangkan jika pemimpin tidak welcome pada IT pasti susah karena anak buahnya harus meyakinkan pemimpinnya. Inisiatif IT tidak harus dari saya karena semua mempunyai keterbatasan. Wifi gratis di alun-alun juga setiap desa dan memasang fiber optic jaringan, karena kita setelah melihat <i>masterplan</i> kantor saya terpecah-pecah maka saya memutuskan menggunakan fiber optic.</p>
<p>5. “Sebagai sorang pemimpin tentunya bapak/ibu butuh kerjasama dengan kepala daerah yang lain, bagaimana bentuk relationship yang bapak/ibu bangun?”</p>	<p>Sudah terjawab pada narasumber yang lain.</p>
<p>6. “Bagaimana menurut bapak/ibu kepemimpinan yang efektif</p>	<p>Pertimbanganya bermanfaat atau tidaknya untuk kita semua. Memperkuat kerja kita atau tidak. Jika</p>

<p>menyebabkan kesuksesan e-government?”</p>	<p>tidak memperkuat dan tidak bermanfaat yang tidak usah ada IT. Karena IT merupakan alat yang digunakan untuk menuju kepemimpinan yang efektif namun kalo malah menyusahkan yaa tidak boleh dipaksa untuk menggunakan IT nanti hasilnya malah kurang maksimal. Di kota-kota maju IT nya pasti bagus sehingga pemimpinnya efektif dalam menjalankan pemerintahan. Tapi menurut saya di bojonegoro pemimpin yang efektif adalah yang bisa memanfaatkan SDM nya untuk bisa mengelola IT untuk kesuksesan pemerintahan bojonegoro.</p>
<p><b>Vision and Mision Leadership (Visi dan Misi Pemimpin)</b></p>	
<p>1. “Pak/ibu, menurut panjenengan, ada atau tidak yaa hubungan visi dan misi terhadap kesuksesan e-leadership?”</p>	<p>Adaa, visi dan misi yang ada di bojonegoro merupakan acuan untuk tolak ukur keberhasilan pemimpin dalam menjalankan pemerintahannya. Visi dan misi merupakan sebuah komitmen sekaligus janji dari pemimpin untuk diwujudkan. Dengan diwujudkannya visi dan misi maka pemerintahan dianggap berhasil. Dalam visi dan misi ini juga ada langkah-langkah yang harus dikerjakan untuk mewujudkannya.</p>
<p>2. “Apakah selama ini visi dan misi bapak/ibu sudah selaras dengan tujuan instansi nggeh?”</p>	<p>Saya memberikan tugas Dewan IT semacam perencanaan IT kedepan membuat dokumen <i>master plan IT</i> Bojonegoro. Perencanaan pembangunan IT, fungsi IT seperti apa kedepannya. Sehingga jika ada usulan IT apapun harus melalui uji relevan atau tidak dengan <i>masterplan</i> itu. Dinas kominfo lalu melakukan pengecekan. Saya tidak menyebutkan dokumen resmi tapi saya menyebutkan ada 6</p>

	<p>pilar pembangunan: ekonomi, lingkungan hidup, sosial, fiscal, good governance, dan leadership. Didalam good governance transformasi itulah sebenarnya point IT sebagai fasilitas bukan sebagai tujuan. Ada didokumen resmi Negara otomatis semua orang tahu, diperda, diperaturan-peraturan ada.</p>
<p>3. “Agar tujuan instansi dapat tercapai tentunya bapak/ibu harus menshare visi &amp; misi, bagaimana cara bapak/ibu melakukan itu nggeh? “</p>	<p>Pada tingkat sederhana dulu, sms itu sangat membantu pemerintahan. Kemudian radio itu sama membantu sekali pemerintahan. Jadi ketika kita fokus pada masalah akhirnya kita tahu bahwa sekian masalah. Saya masih ingat kepala Satuan Kerja setiap akhir bulan selalu melaporkan seluruh sms forward yang diterima dari saya dan tindak lanjutnya seperti apa wujudnya laporan nota dinas dan via email. Mereka akhirnya tahu misalkan saya di jakarta pun saya bisa koreksi misal juga draft pidato karena lewat email saya bisa koreksi dan kirim ulang. Mereka mulai merasakan betapa sebenarnya tidak sulit ini mulai menjadi kebiasaan dan kebutuhan. Ketika mulai ada blackberry sekitar tahun 2008 akhir 2009, saya pertama kali pakai blackberry senang sekali karena saat itu muncul yang namanya email saya bisa langsung di tangan saya yang tadinya harus membuka komputer/laptop. Saya merasa terbantu menulis email dan artikel saya kirim ke teman-teman. Kemudian saya membuat blackberry group dan juga memanfaatkan broadcast untuk mempublikasi tulisan puisi saya agar semua orang bisa menikmati hingga masyarakat minat membeli hp serupa.</p>

	<p>Hal tersebut mempermudah membagikan refleksi saya. Kemudian muncul whatsapp dipakai, sebelumnya tidak langsung memakainya karena saya lebih senang ketika orang mengadu lebih suka pakai sms tahu dia berbiaya dan dia akan bertanggungjawab apa yang dikirimkannya. Kemudian awal pakai fb kemudian saya tinggalkan karena tidak menggambarkan realitas rakyat saya, akun fb kadang fake dan tidak bisa dilacak pertanggungjawabannya sehingga tidak bisa mengandalkan itu. Pada akhirnya saya terus mengkombinasikan dengan offline jadi ada dialog publik dan radio semua bisa dilacak jika ada apa-apa.</p>
<p>4. “Menurut bapak/ibu, bagaimana cara untuk mengetahui bahwa stakeholders sudah paham dan jelas dengan visi dan misi yang bapak/ibu tentukan?”</p>	<p>Ada kombinasi offline orang bisa dialog publik dialog jum’at selalu saya buka intinya itu komunikasi. Semangat dari itu semua “<i>Government should connected with people</i>”, gunanya <i>present</i>(hadir) and <i>connect</i>(nyambung) itulah spirit dari pemerintah kepada masyarakatnya. kita punya forum manajemen review jadi nanti akan ketahuan bahwa manajemen pemerintahan mulai dari perencanaan sampai penganggaran hingga pengadaan laporan dan evaluasi semuanya kita bisa menggunakan IT. Sehingga kenapa sampai 82 aplikasi yang kemudian diintegrasikan.</p>
<p>5. “Bagaimana menurut bapak/ibu, visi dan misi leadership mempengaruhi kesuksesan e-government?”</p>	<p>Sudah terjawab dalam pertanyaan lain.</p>
<p><b>Align IT and Goals Strategy (Keselarasan IT dan Tujuan Strategi)</b></p>	

<p>1. “Pak/bu, sebelumnya sudah ada kesadaran kan dari bapak/ibu untuk menggunakan IT dalam mencapai tujuan instansi?”</p>	<p>Yaa dari pengalaman saya merasa sudah berpengalaman di kota dulu di UnMuh Malang dan menjadi direktur eksekutif LION Air di Jakarta. Sehingga saya merasa balik ke kampung saya harus melengkapi kantor dengan skype dan email agar orang bisa berbincang, agar mereka tahu seperti ada teknologi seperti ini. Saya meminta Telkom waktu itu memasang Wifi di alun-alun di lingkungan pendopo supaya orang tahu ada teknologi seperti ini. Kemudian kalau orang sudah tau mereka akan menggunakannya dan setelah menggunakan mereka akan terbiasa dan itu akan memudahkan kami dalam mencapai tujuan Bersama.</p>
<p>2. “Menurut bapak/ibu ada tidak yaa dampak yang diperoleh dengan menggunakan IT dalam keberhasilan e-government?”</p>	<p>Jelas ada, bojonegoro tidak akan dikenal banyak orang kalo bukan karena ITnya. Dengan IT kami bertransformasi untuk memudahkan layanan kepada masyarakat. Lebih transparan efisien dan tentunya muncul kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah. Lewat pemanfaatan dan pengelolaan IT yang baik pula bojonegoro masuk dalam nominasi pilot project dalam open government patnetships. Mungkin satu-satunya kabupaten yang punya fiber optic jaringan kabupaten ya Bojonegoro, makanya beberapa kita di CCTV jalan lalu monitor banjir punya bojonegoro sendiri. Lalu DPR akhirnya ya setuju karena akhirnya tahu manfaatnya karena kami tidak pernah mengadakan sesuatu yang tidak jelas manfaatnya. Jika ada masalah terkait IT kami akan melakukan solusi efisien difasilitasi IT jadi kita bukan melakukan sesuatu yang</p>



	glamour, aksesoris supaya kelihatan ada IT bukan itu. IT itu <i>part of solution</i> .
3. “Dari kacamata bapak/ibu, seberapa penting sih peranan IT dalam proses bapak/ibu mewujudkan tujuan instansi? “	<p>IT itu adalah alat untuk kita untuk bekerja lebih efektif dan efisien. IT itu alat untuk memfasilitasi seluruh proses pemerintahan mulai dari perencanaan, deliberate, sampai kepada budgeting, sampai pada pengadaan, reporting, pengawasan, sampai evaluasi itu seluruh proses pemerintahan itu difasilitasi oleh IT. Visinya ya itu terkait alat/tool untuk mempercepat seluruh proses pemerintahan yang demokratis, partisipatif.</p> <p>Kemudian saya pilih orang yang mengerti pemerintahan tapi sekaligus dia walaupun tidak ahli IT tapi dia sangat welcome terhadap IT waktu itu asisten 1 pemerintahan saya pindah dia jadi kominfo mungkin awal tidak biasa dengan hal itu. Karena pada awal kominfo ini dinas yang masih butuh banyak perbaikan. Tapi saya punya visi bahwa saya perlu orang yang mengerti proses pemerintahan karena kita tidak sekedar gaya gayaan dengan IT. Maka dari itu saya memberikan tugas dinas kominfo, ternyata betul feeling saya, banyak sekali inovasi yang dibuat dari kepala dinas kominfo bapak Kusnandaka sehingga saya menyarankan untuk juga ke pak Kusnandaka. Ketika saya ingin memperkuat itu beliau mulai banyak sekali inovasi. Dulu pada zaman bapak SBY ada aplikasi Laport dan sistem informasi lainnya saya adopsi, sehingga Kabupaten Bojonegoro ini pertama kali mengadopsi sistem Laport sehingga penghargaan Top Ten dan banyak macam itu (nanti ada file</p>

	<p>semua kronologisnya kapan ada disana soal saya bicara transformasi). Berdasarkan pengalaman birokrasi setiap ada software sering terpesona lalu dia mengusulkan beli, kadang-kadang tidak terpakai.</p>
<p>4. “Sebelumnya kan tidak menggunakan IT kemudian berubah menggunakan IT, bagaimana cara bapak/ibu merubah paradigam anggota yang sudah nyaman dengan proses manual kemudian dirubah menjadi menggunakan IT?”</p>	<p>Hampir tidak ada orang yang mengerti soal IT lalu saya masih ingat saat pertama kali paksa kirim nota dinas pakai email itu tidak mudah. Kemudian saya bilang bisa telpon ya telpon jika yang bisa sms ya sms, bahkan ada yang kepala dinas itu yang kirim sms saja tidak bisa waktu itu. Lalu, saya dulu mendapat cerita beli komputer tapi tidak bisa menggunakan. Banyak pemerintah yang menjadi korban jualan software dan jualan hardware, saya tidak mau bojonegoro seperti itu. Maka saya merasa sudah berpengalaman di kota dulu di UnMuh Malang dan menjadi direktur eksekutif LION Air di Jakarta. Sehingga saya merasa balik ke kampung saya harus melengkapi kantor dengan skype dan email agar orang bisa berbincang, agar mereka tahu seperti ada teknologi seperti ini. Saya meminta Telkom waktu itu memasang Wifi di alun-alun di lingkungan pendopo supaya orang tahu ada teknologi seperti ini. Pertama kali orang mengenal bahwa teknologi dan informatika itu bagian dari hidup kita. Hal ini menjadi fase pertama pengenalan jangan merasa asing dengan kehidupan ini dan ini akan membantu kita.</p> <p>Terbukti saat waktu itu belum ada Whatsapp saya memanfaatkan sms untuk berkirin puisi-puisi saya ke masyarakat langsung dari bupati yang</p>

	<p>dulunya dianggap berjarak tiba-tiba dekat. Nomor hp saya bagikan ke seluruh warga saya sejak pertama kali menjabat sebagai bupati. Gunanya hal ini untuk bisa berinteraksi langsung, jika bisa sms kenapa harus bertemu, hal ini juga akan menghemat waktu saya dan orang yang akan bertemu, saya sebagai pelayan mereka. Selain itu ada kombinasi offline orang bisa dialog publik dialog jum'at selalu saya buka intinya itu komunikasi. Semangat dari itu semua "<i>Government should connected with people</i>", gunanya <i>present</i>(hadir) and <i>connect</i>(nyambung) itulah spirit dari pemerintah kepada masyarakatnya. Hadir dan nyambung dengan <i>people problems</i>, jika masalah rakyatnya sudah nyambung maka pemerintahan itu akan cenderung menjadikan <i>people problem is government problem. Government problem is bureaucratic problem, priorly some people or some senior staff from bureaucratic problem is staff problem</i>. Sehingga sekarang kita mengubah menjadi <i>government problem</i>. Sehingga sms dulu dan <i>dialog public</i> itu membantu sekali dari aspirasi rakyat untuk kontrol pemerintahan itu mendapat manfaat yang luar biasa. Saya menjadi tahu detik denyut nafas masalah rakyat, sehingga apa yang kita kerjakan itu ter <i>delivery</i> dengan baik, direspon dengan baik, dan saya mendapat respon langsung dari rakyat.</p>
<p>5. "Bagaimana menurut bapak/ibu penggunaan IT dapat mempengaruhi kesuksesan penyelenggaraan e-government?"</p>	<p>Yaa dengan IT menjadikan kami dipemerintahan mudah dalam melaksanakan tugas-tugas kami, pekerjaan kami menjadi lebih efisien, lebih transparan sehingga kita lebih</p>

	<p>enak aja kerjanya. Selain itu IT memudahkan masyarakat kami dalam mengakses informasi yang dibutuhkan sehingga masyarakat jadi lebih aware kepada kami. Hal itu yang menyebabkan suksesnya penyelenggaraan pemerintahan kami. Orientasinya adalah masyarakat puas akan kinerja dan layanan kami.</p>
<b>Commitment Leadership (Komitmen Pemimpin)</b>	
<p>1. “Menurut bapak/ibu ada gak hubungan antara komitmen yang kuat dari leadership terhadap kesuksesan penyelenggaraan e-government?”</p>	<p>Tanpa adanya komitmen dan dukungan dari pemimpin mungkin semua ini tidak akan tercapai. Tentunya bukan hanya pemimpin ya ada juga dukungan dari kepala dinas dan anggota pemerintahan yang lain. Kami saling berkomitmen untuk mewujudkan bojonegoro lebih baik. Dulu pada tahun 2009 saya memutuskan untuk memasang fiber optic jaringan, karena kita setelah lihat master plan kantor saya terpecah-pecah maka saya putuskan fiber optic, waktu itu belum ada Biznet belum ada indihome kira-kira anggaran ini 9M pengajuan ke DPR namun dipermasalahkan biayanya. Kemudian siapa yang akan menyakinkan ini semua yaitu dewan TIK yang saya bentuk dari unsur semua pihak, karena disitu kita ingin nanti data ekonomi, sosial, pemerintahan semua itu bisa cepat. Mungkin satu-satunya kabupaten yang punya fiber optic jaringan kabupaten ya Bojonegoro, makanya beberapa kita di CCTV jalan lalu monitor banjir punya bojonegoro sendiri.</p>
<p>2. “Tentunya dengan komitmen yang bapak/ibu punya mudah untuk menangani resiko-resiko yang</p>	<p>Bojonegoro ini dianggap terlewat karena sudah sejak awal ada <i>open data contract</i> semua data kita buka kecuali</p>

<p>kemungkinan terjadi, kira-kira resiko terbesar apa yang pernah bapak/ibu ambil dalam upaya mencapai tujuan yang sudah bapak/ibu tentukan?”</p>	<p>memang yang dikecualikan oleh Negara tidak boleh. Jika ada teknologi tidak jalan, namun itu sudah melalui proses pengecekan dewan IT dan masyarakat. Apabila masih risiko ya sudah kita harus mencari solusi yang lain. Karena saya tidak akan menyetujui jika dewan IT belum approve supaya tahu ini betul-betul useful. Saya tidak merasakan risiko yang dominan karena dengan mekanisme sudah terkontrol. Pertimbangannya bermanfaat atau tidaknya untuk kita semua. Memperkuat kerja kita atau tidak. Jika tidak memperkuat dan tidak bermanfaat yang tidak usah ada IT.</p>
<p>3. “Sejauh ini selama bapak/ibu menjabat, apakah bapak/ibu memiliki kelompok kerja inovatif nggeh, guna terus berinovasi dalam mewujudkan tujuan instansi? “</p>	<p>Ada Dewan IT Bojonegoro sebagai pihak independent. Pengadaan IT software apapun harus lewat Dewan IT(yang saya bentuk atas usulan-usulan rakyat) bekerjasama pengecekan dengan Kominfo.</p>
<p>4. “Bagaimana cara bapak/ibu dalam membangun mental berani mencoba/berinovasi kepada anggota bapak/ibu? “</p>	<p>Semua orang memiliki asumsi dan kita semua tidak ada yang ahli, tapi kita ini orang yang bisa kalau mau. Jika kita mencari ahli dari mana di Bojonegoro disana tidak ada perguruan IT. Makanya yang menarik bagi dunia saat saya diwawancarai Washington post dan lainnya aneh Bojonegoro ini tidak ada orang ahli IT tapi pemerintahnya bisa begitu banyak aplikasi.</p>
<p>5. “Bagaimana cara bapak/ibu memberikan kepercayaan kepada anggotanya dalam komitmen mewujudkan tujuan instansi?”</p>	<p>Masyarakat itu akan tidak percaya kalau mereka tidak tahu feedback, karena sekarang penggunaan IT di Bojonegoro mau sms mau menggunakan wa atau emal, masyarakat bisa mengecek di LAPOR dan ada notifikasi penanganan atau tindak lanjut dari laporannya. Misalkan</p>

	<p>di email laporan kepada siapa, detail lampirannya juga dan orang yang lapor juga dapat notifikasi hal ini ada sudah dari tahun 2012 atau 2013. Paling lengkap menggunakan sistem LAPOR ini adalah Bojonegoro makanya dulu menjadi percontohan dunia dan mendapat penghargaan ya tentang ini. Sehingga, bagaimana orang tidak percaya dan inipun masih dikombinasikan radioya pemkab malowopati itu ini kadang dibacakan sehingga orang merasa tiap sms tiap apa selalu mendapat respon. Jika masyarakat tidak puas maka disediakan pelayanan offline dia datang ke pendopo untuk dialog jum'at, jadi akhirnya ya mau tidak mau percaya(saya kirim email untuk contoh penanganana LAPOR)</p>
6. “Bagaimana menurut bapak/ibu komitmen dari seorang leadership mampu mempengaruhi kesuksesan penyelenggaraan e-leadership?”	Sudah terjawab pada pertanyaan yg lain.
<b>Leadership Functions (Fungsi Leadership)</b>	
1. “Bapak/ibu sebelumnya sudah ada kesadaran nggeh kalau skill / kemampuan pemimpin mempengaruhi kesuksesan e-government?”	Sudah sejak pertama kali saya maju untuk menjadi bupati, kesadaran akan skil kepemimpinan memang mutlak dimiliki. Namun dengan niat yang baik dan pengalaman saya selama di kota saya yakin saja bisa membawa bojonegoro lebih baik. Dan sekarang beginilah kabupaten bojonegoro.
2. “Salah satu skill yang diperlukan dalam kepemimpinan kan mengontrol, bagaimana bentuk control yang bapak/ibu lakukan agar anggota tetap <i>on the track</i> ?”	Evaluasi control dilakukan rutin setiap jum'at dengan manajemen review progress kerja dinas dan sebagai dialog public dengan masyarakat secara offline. Kinerja dinas atau juga perorangan dilihat dari progress laporan setiap bulan.

<p>3. “Bagaimana bapak/ibu memberikan perlindungan terhadap anggota bapak/ibu, sehingga mereka berani untuk melakukan inovasi-inovasi guna mensukseskan e-government? “</p>	<p>Selama pekerjaan yang mereka lakukan sesuai dengan peraturan dan untuk inovasi IT semua usulan harus di approve oleh dewan IT. Tidak ada pengadaan tidak ada apapun kecuali di approve oleh Dewan IT. Dewan ini bukan birokrat sehingga pihak independent di luar pemerintahan sehingga ini orang-orang ahli dari guru dan paham IT yang approve tadi selanjutnya di approve oleh fungsi jika tidak berfungsi kenapa diberi pengadaan. Maka tidak ada ego sektoral karena semua sudah tahu harus terkoneksi.</p>
<p>4. “Bagaimana bentuk support yang bapak/ibu berikan kepada anggota sehingga anggota terus termotivasi untuk menjalankan tugas dan fungsinya guna mencapai tujuan instansi?”</p>	<p>Jika dalam manajemen review ditanya terus kepala dinas bingung lama-lama malu sendiri dia akan inisiatif bertanya kepada stafnya. Lebih kepada menciptakan ekosistem jadi tidak sekedar cuma menakut-nakuti jadi ekosistem ini akan tiba-tiba menjadi kebutuhan dan tidak bisa dihindari orang harus menggunakan IT untuk menunjang pekerjaannya. Jika dia tidak mengecek email saja tidak mengecek web saja dia tidak tahu. Sebagai contoh dia tiga hari tidak direspon maka nanti distatistiknya dia langsung kuning, 5 hari merah waktu manajemen review hari jum'at pagi ditanyakan statistiknya itu akan malu sekali.</p>
<p>5. “Bagaimana menurut bapak/ibu kemampuan leadership dalam mengelola perbedaan untuk mencapai tujuan mempengaruhi kesuksesan penyelenggaraan e-government?”</p>	<p>Tentunya pemimpin harus bisa memanfaatkan sumberdaya dan infrastruktur yang ada untuk bisa mencapai tujuan yang ada. Selain itu saya sebagai pemimpin juga harus terus mengupdate wawasan agar bisa terus berkembang. Saya sampai malam kebiasaan malam akan tidur masih mendengarkan two talk pidato-pidato</p>

	di youtube dan masih banyak lagi saya dapat meng-update ilmu untuk menambah pengetahuan saya. Jika ada daerah-daerah yang maju kita belajar apa yang bisa kita adopsi.
--	--

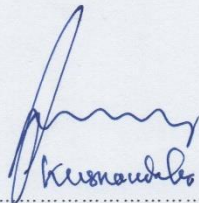


## INFORMAN 1

### PROFIL INFORMAN

1. Nama Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro
2. Tanggal : 28 November 2018
- Interview
3. Nama : Drs. Kusnandaka Tjatur Prasetyo, M.Si
4. Jabatan : Kepala Dinas Kominfo
5. Lama Kerja : 10 Tahun
6. Kualifikasi : - Memiliki kekuasaan dan wewenang untuk membantu kepala daerah dalam penerapan e-Government  
- Memiliki pengalaman terlibat dalam implementasi TI pada kegiatan pemerintahan daerah

Bojonegoro, 28 November 2018

  
Kusnandaka Tjatur P

### LEMBAR VALIDASI HASIL PENELITIAN

Judul Penelitian : Pengukuran *E-Leadership* Dalam Keberhasilan *E-Government* Di Indonesia  
Peneliti : Yudha Herlambang C.P., S.Kom.  
Dosen : Tony Dwi Susanto, S.T., M.T., Ph.D., ITIL, COBIT  
Pembimbing

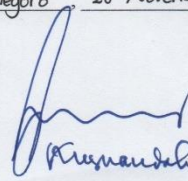
Telah dilakukan penggalan data melalui wawancara dan observasi langsung terhadap informan sebagai berikut :

Nama Informan : Drs. Kusnandaka Tjatur Prasetyo, M.Si  
Usia : 52 Tahun  
Posisi : Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro  
Tanggal : 28 November 2018  
Wawancara  
Tempat : Kantor Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro  
Wawancara  
Hasil Penelitian : **TERLAMPIR SESUAI LAPORAN PENELITIAN**

Berikan checklist (✓) pada kolom di bawah ini :

Komponen Validasi	Sesuai Fakta Di Lapangan	
	Ya	Tidak
Keterkaitan antara e-leadership dalam keberhasilan e-government	✓	
<i>Strong Leadership</i>	✓	
Visi dan Misi <i>Leadership</i>	✓	
Keselarasan IT dengan <i>Goals Strategi</i>	✓	
Komitmen	✓	
<i>Leadership Fuctions</i>	✓	

Bojonegoro, 28 November 2018

  
( Kusnandaka Tjatur P.

## HASIL WAWANCARA INFORMAN 1

<b>Strong Leadership (Pemimpin Yang Kuat)</b>	
<p>1. “Pak/Bu, Menurut panjenengan ada atau tidak nggeh hubungan antara strong leadership terhadap kesuksesan e-government?”</p>	<p>Jelas ada, pemimpin yang kuat dapat menghire anggotanya untuk dapat mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk mewujudkan tujuan organisasi. Dan tentunya pemimpin sudah mengetahui resiko-resiko yang akan muncul ketika dia mulai menjabat sehingga resiko-resiko tersebut sudah harus dipikirkan. Selain itu saya juga selalu mengaktualisasi diri saya untuk terus belajar utamanya di bidang IT agar terus bisa mengikuti perkembangan. Sebelumnya saya tidak berani namun saya menyukai tantangan dan menaganggap diri saya terus sedang kuliah IT yang ada pada mindset saya agar tidak merasa terbebani. Dengan begitu nantinya keberhasilan itu akan didapat.</p>
<p>2. “Model kepemimpinan kan ada banyak pak/bu, kira-kira panjenengan pakai model yang seperti apa yaa? “</p>	<p>Fungsi pemerintah kan melayani dan mewujudkan pelayanan yang baik kan ada dukungan dan pujian kalau tidak ya ejekan dan cacian. Fungsi trust kan demokrasi seperti dalam keluarga. Konsep-konsep ini ibarat mata uang keeping jadi dalam struktur organisasi sebenarnya kita tidak bisa memilah dan memisahkan konsep pimpinan atau bawahan. Yang ada adalah konsep pimpinan jadi akan ketika saya punya konsep dan saya berikan kepada pimpinan ini akan menjadi konsep pimpinan bukan konsep saya.</p>
<p>3. “Misalkan ada anggota ibu yang tidak sesuai dengan kepemimpinan bapak/ibu, bagaimana cara menanggapinya nggih?”</p>	<p>Ada pelatihan itu bukan berarti melatih ini dan itu justru di management review malah pelatihan sendiri karena di manajemen review itu membuka mindset. Awal mindset ada problem</p>

	<p>diselesaikan lalu saya mencoba menggali itu dengan kajian filsuf bahwa orang itu suatu saat pada dasarnya kehidupan itu akan butuh keseimbangan butuh keadilan arti keadilan bukan dibagi ditengah tapi keadilan itu sesuai dengan kemampuan. Maka dari kondisi itu saya mengikuti arus tapi jangan terhanyut. Jadi saya memohon maaf namun saya arahkan kebermanfaatannya seperti apa. Maka sekarang yang terjadi adalah teman-teman lebih aktif mencari informasi inisiatif sendiri tapi tidak semua karena tidak sama. Dalam hidup kita pasti berbeda tapi jangan mencari perbedaanya, karena perbedaan itu tanpa dicari pasti ada. Tapi dari persamaan dari persamaan itulah yang kemudian kita kuatkan. Saya merasakan pergantian pimpinan walaupun tidak diungkapkan tapi saya terasa dulu saat pak Yoto dibackup seakarang tidak. Namun saya niatkan kehidupan itu yang terbaik. Jadi di jum'at review ini selain menyampaikan problem terus edukasi manfaat terus itu jadi persoalan-persoalan yang tidak terselesaikan diselesaikan bersama-sama.</p>
<p>4. “Menurut bapak /ibu penting kah latar belakang pendidikan seorang pemimpin? “</p>	<p>Bagus, jadi di dalam leader kan ada tingkatan top leader, middle dan low leader itu berbeda. Kalau lower leader itu adalah teknikal skill yang mereka butuhkan lebi banyak. Kalau di middle itu antara teknikal dan managerialnya itu sama. Jika top itu di managerial. Karena disiapkan dalam top leader kalau tahu sedikit IT maka teknisnya itu akan pada lower manajer tapi kita hanya bisa direction/mengarahkan. Jadi perlu tapi tidak harus orang expert skill itu di top manajer tapi kalau tingkatan eselon</p>

	<p>3 dan 4 middle managerial dan technical itu harus. Disini kasi layanan e-government background IPDN selain ini struktur organisasi tolong dipelajari. Disini eselon 4 kasi aplikasi background sosial politik namun punya hobi IT. Ini bedanya antara pengalaman dengan ilmu, kalau orang pengalaman memang dia dimatangkan dalam hal skill yang berbasis strategi. Pengalaman itu akan menjadi suatu keahlian/skill menjadi professor maka kala ditambahkan ilmu. Maka dalam konsep teori filsafat itu bahwa suatu ilmu yang diterapkan akan menjadi ilmu baru itulah S3 disertasi, jika tesis itu baru membandingkan, dan skripsi menerapkan ilmu mencocokkan ilmu. Kalau orang hanya punya teori saja tanpa pengalaman maka buntu kering, padahal di dunia nyata ini yang banyak tidak seperti teori. Ditingkatan skill pada lower leader itu harus kalau tidak itu akan lambat. Keahlian bisa didapat dari pengalaman. Kalau pengalaman saja tanpa ilmu bisanya ngawur tapi kadang insting tepat.</p>
<p>5. “Sebagai sorang pemimpin tentunya bapak/ibu butuh kerjasama dengan kepala daerah yang lain, bagaimana bentuk relationship yang bapak/ibu bangun?”</p>	<p>Kita punya kerjasama dengan Sidoarjo Surabaya dan Banyuwangi. Kerjasama MoU bentuk kerjasama pada sector misal Surabaya pengembangan aplikasi musrenbang diadopsi sipadu. Juga ada kawasan Ratubangnegoro itu singkatan Blora, Tuban, Rembang, dan Bojonegoro. Wironegoro singkatan dari Ngawi, Blora, dan Bojonegoro. Kawasan-kawasan itu kemarin datang kesini membahas kerjasama-kerjasama dan tukar informasi dan juga terkait aplikasi.</p>
<p>6. “Bagaimana menurut bapak/ibu kepemimpinan yang efektif</p>	<p>Semua kerja itu harus berlandas payung hukum tim kerja bupati sini ada PerBup.</p>

<p>menyebabkan kesuksesan e-government?"</p>	<p>Ada evaluasi kinerja dilakukan. Dalam konsep manajemen itu jelas ada planning, organizing, activity, controlling. Saya umpamakan planning itu pondasi, pondasi itu kuat bagaimanapun kemudian organizing activity itu adalah pilar. Sebagus pilar apapun tapi kalau tidak ada atapnya maka bahan bagus itu akan cepat rusak. Tapi bahan sederhana lalu atapnya kuat itu lebih mampu atap itu harus kuat itu controlling. Sebagus apapun organisasi itu jika tidak ada control akan mudah ambruk. Tapi control kuat meskipun organisasi itu sederhana maka itu lebih kuat kuncinya disana. Seharusnya control dan pengawasan itu sudah dari awal tidak diakhir. Jika perencanaan itu dilakukan secara baik maka setengah dari goal itu akan tercapai manajemennya begitu. Lalu saya sampaikan pada bapak Bupati jika harus ada manajemen ini sehingga ada manajemen review rutin jum'at dan harus ada konsekuen. Jadi di management review itu ada punishment jika masih merah maka berdiri ini akan malu sendiri. Dan dari komitmen pimpinan ini akan terus. Perencanaan, pengawasan itu banyak tapi ini membantu perencanaan tepat. Jika dalam evaluasi menanyakan aturannya ya saya buat ada semua minimal keputusan kepala dinas. Jika tidak ada komitmen para pihak ya tidak bisa terlaksana baik.</p>
<p><b>Vision and Mision Leadership (Visi dan Misi Pemimpin)</b></p>	
<p>1. "Pak/ibu, menurut panjenengan, ada atau tidak yaa hubungan visi dan misi terhadap kesuksesan e-leadership?"</p>	<p>Ya ada, visi dan misi dari pemimpin itu yang mendorong seorang pemimpin untuk melakukan tugas dan fungsinya.</p>

	<p>Tentunya semua kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin (kepala daerah) adalah kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah dicanangkan. Apabila visi dan misi dapat terlaksana tentunya kualitas dari pemimpin tersebut sudah tidak diragukan lagi dan hal itu akan menimbulkan rasa kepercayaan dari para anggotanya. Disini tentunya kesuksesan e-leadership akan terbentuk.</p>
<p>2.“Apakah selama ini visi dan misi bapak/ibu sudah selaras dengan tujuan instansi nggeh?”</p>	<p>Ada keterkaitan dengan visi IT pada RPJMD beliau di web kita RPJMD 2013-2018 ada target disitu berbunyi mewujudkan tata pemerintahan yang baik good and clean government dishare di website terkait ini. Lebih baik dilebarkan ke tata kelola pemerintahan karena person itu kan bagian dari subjek yang dianalisis.</p>
<p>3.“Agar tujuan instansi dapat tercapai tentunya bapak/ibu harus menshare visi &amp; misi, bagaimana cara bapak/ibu melakukan itu nggeh?”</p>	<p>Visi misi individual menjadi visi misi institusional yang tertuang dalam RPJMD jadi yang kita lakukan produk peraturan daerah regualasi legal standingnya disitu.Tentunya di situ diawali visi misi ada tujuan ada sasaran ada kebijakan inilah disebut kinerja brackdownnya RPJMD ini tingkat kabupaten maka pelaksana OPD lalu ada Renstra dari kebijakan tambah lagi program dan kegiatan.</p>
<p>4.“Menurut bapak/ibu, bagaimana cara untuk mengetahui bahwa stakeholders sudah paham dan jelas dengan visi dan misi yang bapak/ibu tentukan?”</p>	<p>Indikator sasaran RPJMD ini menjadi tujuannya renstra. Misal Makronya kabupaten ingin mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik itu semua OPD kan melakukan. Jika pada Kominfo merubah tata kelola konvensional menjadi tata kelola berbasis IT SPBE menjadi tujuan per 5 tahun. Lalu pertahunnya ada RKPDP (Rencana Kegiatan Pembangunan</p>

	<p>Daerah) lalu di OPD ada RENJA. Dari 2 ini muncul brackdown tahunannya RKADBA anggaran ini dilaksanakan dievaluasi tahunannya namanya SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Apakah pelaksanaanya ini sudah memberikan dorongan untuk mewujudkan visi dan misi OPD. Tahapan ini semua pasti ada tahap sosialisasi. Disini dari dulu diterapkan ada manajemen review pak Yoto sudah menceritakan kan tentang ini setiap hari jum'at. Di manajemen review itulah saya kelapa dinas kominfo aduan masyarakat yang saya kelola melalui aplikasi LAPOR yang dimana Bojonegoro yang tidak bisa berbasis online jadi saya gabung dengan offline disitu muncul inovasi SIAP LAPOR</p>
<p>5.“Bagaimana menurut bapak/ibu, visi dan misi leadership mempengaruhi kesuksesan e-government?”</p>	<p>Lingkungan pemerintahan sudah ada. Ada keterkaitan dengan visi IT pada RPJMD beliau di web kita RPJMD 2013-2018 ada target disitu berbunyi mewujudkan tata pemerintahan yang baik good and clean government dishare di website terkait ini. Dari situ seluruh anggota pemerintahan akan aware dengan visi dan misi itu kemudian berusaha untuk mewujudkan misi tersebut. Tentunya dengan mewujudkan visi dan misi tersebut secara otomatis kesuksesan e-government akan tercapai. Kita sudah ada masterplan e-government yang membimbing kita menuju visi dan misi IT, sehingga kegiatan apa saja yang perlu dilakukan sudah ada disitu, kita tinggal mengikuti roadmapnya saja.</p>
<p><b>Align IT and Goals Strategy (Keselarasan IT dan Tujuan Strategi)</b></p>	



<p>1. “Pak/bu, sebelumnya sudah ada kesadaran kan dari bapak/ibu untuk menggunakan IT dalam mencapai tujuan instansi?”</p>	<p>Sejak awal kan pak yoto sudah menyampaikan bahwa saya dulu bukan orang IT. Namun, saya akademisi mengajar pemerintahan tentang teori politik, leadership, public relation, dan metodologi. Kemudian saya mencoba bertanya kepada beliau kenapa yang ditempatkan sebagai kepala diskominfo bukan orang IT yang sebelumnya saya sudah mengaktualisasi diri. Sebelumnya saya tidak berani namun saya menyukai tantangan dan menantang diri saya terus sedang kuliah IT yang ada pada mindset saya agar tidak merasa terbebani. Kita mempunyai jaringan FO itu 2010/2011 milik sendiri 25 KM jadi seluruh OPD sudah tersambung miliknya Pemkab bukan milik vendor. Kemudian saya suka membaca lalu dipraktikkan dan mencari di Internet saya belajar IT itu otodidak karena tuntutan begitu. Kemudian saya menemukan unsur IT ada 4/5 unsur utama infrastruktur itu saya umpamakan jalan, aplikasi itu saya umpamakan mobil. Saya juga membaca tulisan Pak Tony orang IT tu cilakanya lingkungan kita banyak yang tidak paham IT cara mengkomunikasikannya itu bahasa teknis IT, sehingga ketika kita ngomong orang lain tidak tahu. Lalu mobil itu akan nongkrong di garasi kalau tidak ada penumpangnya ibarat penumpang itu data. Maka juga harus ada rambu lalu lintas nah ini tata kelola. Semuanya ini akan patuh dan taat maka ditambah satu lagi SDM ya paham harus ada pelatihan agar tidak kagok karena jika tidak, mobil ini akan rusak. Maka SDM harus dikuatkan harus seiring, setelah saya bedah itu saya</p>
--	--

	<p>sampaikan kepada Pak Yoto bahwa IT di Bojonegoro ini sebetulnya sudah bagus pak tetapi bagus ternyata hanya bagus cerminannya kita sendiri. Ternyata dari 4/5 unsur itu dari sisi jaringan kita sudah unggul ibarat jalan tol itu adanya FO sudah canggih. Aplikasi juga kita miliki sudah banyak dulu awal 40-50 sekian aplikasi, sekarang sudah 81 aplikasi, tadi aplikasi kan mobil, mobil yang ada tidak standart semua. Ibarat kecepatan jalan tol misal 80-100 namun disana ada becak, sepeda yang jalanya lama dan saling melamakan. Logika itu, jadi aplikasi ini harus ada standarisasi dan harus ada shortcut nyambung dikembangkan integrasi. Sehingga peran leader dibutuhkan untuk menyatukan berbagai background kemampuan di organisasi dengan ada pertemuan rutin dan seharusnya menyampaikan permasalahan. IT itu sarana yang sangat membantu kita tapi jika alur dan culture masih egois dan sulit bekerjasama itu masih berat.</p>
<p>2. “Menurut bapak/ibu ada tidak yaa dampak yang diperoleh dengan menggunakan IT dalam keberhasilan e-government?”</p>	<p>Jelas ada, kami berubah menuju kepemimpinan yang transparan berkat mengadopsi IT. IT sebagai tool dan masa depan pemerintahan. Kita bergantung pada IT namun kembali lagi IT hanya alat manusia atau SDM yang paling utama. IT itu adalah alat untuk kita untuk bekerja lebih efektif dan efisien. IT itu alat untuk memfasilitasi seluruh proses pemerintahan mulai dari perencanaan, deliberate, sampai kepada budgeting, sampai pada pengadaan, reporting, pengawasan, sampai evaluasi itu seluruh proses pemerintahan itu difasilitasi oleh IT. Visinya ya itu terkait</p>

	<p>alat/tool untuk mempercepat seluruh proses pemerintahan yang demokratis, partisipatif.</p> <p>Kemudian saya pilih orang yang mengerti pemerintahan tapi sekaligus dia walaupun tidak ahli IT tapi dia sangat welcome terhadap IT waktu itu asisten 1 pemerintahan saya pindah dia jadi kominfo mungkin awal tidak biasa dengan hal itu. Karena pada awal kominfo ini dinas yang masih butuh banyak perbaikan. Tapi saya punya visi bahwa saya perlu orang yang mengerti proses pemerintahan karena kita tidak sekedar gaya gayaan dengan IT. Maka dari itu saya memberikan tugas dinas kominfo, ternyata betul felling saya, banyak sekali inovasi yang dibuat dari kepala dinas kominfo bapak Kusnandaka sehingga saya menyarankan untuk juga ke pak Kusnandaka. Ketika saya ingin memperkuat itu beliau mulai banyak sekali inovasi. Dulu pada zaman bapak SBY ada aplikasi Laporan dan sistem informasi lainnya saya adopsi, sehingga Kabupaten Bojonegoro ini pertama kali mengadopsi sistem Laporan sehingga penghargaan Top Ten dan banyak macam itu (nanti ada file semua kronologisnya kapan ada disana soal saya bicara transformasi). Berdasarkan pengalaman birokrasi setiap ada software sering terpesona lalu dia mengusulkan beli, kadang-kadang tidak terpakai.</p>
<p>3. “Dari kacamata bapak/ibu, seberapa penting sih peranan IT dalam proses bapak/ibu mewujudkan tujuan instansi? “</p>	<p>Sangat penting, untuk menuju tujuan pemerintah peranan IT sangat membantu kami. Semua tools IT itu sangat menunjang, tapi kembali lagi tools hanya akan menjadi tools jika</p>

	<p>tidak dioperasionalkan. Sehingga analisis itu perlu sebagaimana memakai mesin. IT Bojonegoro sudah mulai didevelop pada tahun 2008-2010. Kita mempunyai jaringan FO itu 2010/2011 milik sendiri 25 KM jadi seluruh OPD sudah tersambung miliknya pemkab bukan milik vendor. Aplikasi juga kita miliki sudah banyak dulu awal 40-50 sekian aplikasi, sekarang sudah 81 aplikasi. Semua aplikasi dan infrastruktur tersebut dalam rangka kami mewujudkan tujuan instansi.</p>
<p>4. “Sebelumnya kan tidak menggunakan IT kemudian berubah menggunakan IT, bagaimana cara bapak/ibu merubah paradigam anggota yang sudah nyaman dengan proses manual kemudian dirubah menjadi menggunakan IT?”</p>	<p>Saat perjalanan berdua dengan beliau ke Washington transit di Dubai menanyakan mengapa saya di tempatkan disitu karena awal saya asisten. Beliau menjawab itu orang yang tidak tahu maksud saya memandang pak Kus itu paham tata kelola pemerintahan. Justru dengan pemahaman tata kelola pemerintahan konvensional bagaimana di switch menjadi tata kelola yang sekarang telah berbasis elektronik PP 95 tahun 2018 yang kemarin sosialisasi di Jogja SPBE. Pada SPBE jika tidak paham tata kelola kan step by step kan tidak mudah karena merubah culture. Dari awal orang menulis lalu melalui sistem, mengubah culture ini sangat luar biasa. Jika dulu orang merasa diundang itu via surat dan lisan sekarang via wa, email dan tidak tahu dibaca atau tidak ini perubahan culture nah itu yang disampaikan oleh pak Yoto. Sebelum bertanya tentang itu saya telah berusaha merubah semua itu. Perubahan yang saya lakukan dengan tata strateginya kan ketika berbicara analysis kan berangkat dari problem. Saya mencoba bertanya mengapa IT</p>

	<p>Bojonegoro dikatakan tidak maju-maju padahal sudah mulai didevelop pada tahun 2008-2010. Adanya Relawan TIK sekarang mandiri itu awalnya saya yang mendorong rapat kami fasilitasi. Sekarang sudah ada pelatihan-pelatihan blog penjelasan lengkap ada web bojonegoro, ada RTIK Bojonegoro sudah menjadi tolok ukur nasional.</p>
<p>5.“Bagaimana menurut bapak/ibu penggunaan IT dapat mempengaruhi kesuksesan penyelenggaraan e-government?”</p>	<p>Tentunya dengan menggunakan IT kinerja pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu yang menjadi IT sangat penting adalah transparansi. Dengan transparansi masyarakat akan menjadi mengetahui bahwa orang-orang dipemerintahan itu benar-benar bekerja sehingga menimbulkan kepercayaan. Dari rasa kepercayaan inilah yang menyebabkan masyarakat menjadi care, aware dengan pemerintah sehingga penyelenggaraan e-government menjadi sukses.</p>
<p><b>Commitment Leadership (Komitmen Pemimpin)</b></p>	
<p>1.“Menurut bapak/ibu ada gak hubungan antara komitmen yang kuat dari leadership terhadap kesuksesan penyelenggaraan e-government?”</p>	<p>Jika pemimpin tidak mempunyai komitmen yang kuat, maka e-government tidak akan sukses, karena tidak adanya kekompakan dan keselaasan antara pemimpin dan <i>team</i>.</p>
<p>2.“Tentunya dengan komitmen yang bapak/ibu punya mudah untuk menangani resiko-resiko yang kemungkinan terjadi, kira-kira resiko terbesar apa yang pernah bapak/ibu ambil dalam upaya mencapai tujuan yang sudah bapak/ibu tentukan?”</p>	<p>Semua kehidupan ini risiko tidak ada yang tidak berisiko. Jika kita berbicara risiko jangan berbicara risikonya itu akan membuat tidak berani melangkah. Jangan melihat risiko tapi lihat kebermanfaatannya. Kalau yang kita lakukan itu manfaat lalu kita bandingkan dengan dalil lakukan. Ini sudah hal umum risiko di IT, jadi masalah SDM malah aplikasi dan sebagainya itu pasti. Kemarin saya baru berbicara di tingkat kementerian</p>

	<p>pembangunan pengembangan IT ini payung hukumnya masih belum lengkap. Payung hukum pemerintah itu masih payung hukum infrastruktur fisik untuk pembangunan IT belum. Sehingga ini menjadi phobia dan penghambat beberapa pihak kalau kita tidak mengutarakannya. Kalau kita customize aplikasi belum tentu setelah jadi terbatas pada anggaran begitu selesai bisa running realitanya masih error, penyesuaian dengan user(pengguna dan pengelola) Pengguna bisa masyarakat dan pengelola bisa kita. Itu harus disinkronkan begitu tutup tahun dikatakan tuntas tapi masih begitu dimana IT itu gagal kerugian Negara itu menjadi risiko. Pernah dulu barang-barang import waktu membuat Akses point dan ada kegiatan akhir tahun kebetulan tempat import diluar negeri maka banyak akhir tahun semua off. Jika memakai kacamata fisik bukan berbasis IT maka ya celaka dikita. Saya mengutarakan kepada Pak Yoto, saya sudah bekerja tidak akan melakukan penyimpangan niat aja tidak ada apalagi melakukan. Sehingga saya sampaikan ini memang kendala seperti itu pengadaan, tidak apa-apa jika bagaimana keputusan bapak sudah jalan hidup saya. Namun, jika saya tidak salah tolong saya dibantu karena lingkungan kita masih belum tahu tentang itu. Akhirnya beliau membantu.</p>
<p>3.“Sejauh ini selama bapak/ibu menjabat, apakah bapak/ibu memiliki kelompok kerja inovatif nggeh, guna terus berinovasi dalam mewujudkan tujuan instansi? “</p>	<p>Tim khusus ada Dewan TIK saya guide dan saya mencoba membuka peluang yang lainnya untuk mencukupi potensi kami. Disini ada anak SMK ada PKL maka begitu PKL di sini, sebelumnya</p>

	<p>saya masih ke gugus kepala sekolah musyawarah kerja kepala sekolah saya masuk disitu waktu rapat saya sampaikan saat melakukan PKL siswa dibekali saat disini ditempatkan di desa, kecamatan dan pemerintahan minimal bisa mengajarkan transfer knowledge ini cara rutin. Dengan bapak yudi coba dilihat problem disini munculkan solusi itu yang saya sampaikan. Dengan Open Government Partnership banyak perguruan tinggi kesini juga saya terapkan itu. Tujuannya mereka mendapat sesuatu dengan fasilitas kami dengan produk silahkan tulis sebagai karya laporan kerja akhir harus ada kebermanfaatan. Adanya Relawan TIK sekarang mandiri itu awalnya saya yang mendorong rapat kami fasilitasi. Sekarang sudah ada pelatihan-pelatihan blog penjelasan lengkap ada web bojonegoro, ada RTIK Bojonegoro sudah menjadi tolok ukur nasional.</p>
<p>4. “Bagaimana cara bapak/ibu dalam membangun mental berani mencoba/berinovasi kepada anggota bapak/ibu? “</p>	<p>Reward secara umum ada TTP(Tunjangan tambahan penghasilan) untuk staf dari pimpinan. Saya pernah melakukan itu internal waktu itu saya mulai dengan award pengelolaan web terbaik OPD saya berikan hadiah secara aturan tidak boleh sehingga diberikan piagam. Minimal dialog publik di sebutkan untuk mengapresiasi inovasi. Apresiasi untuk pemda sendiri biasanya ada setiap tahun yang paling banyak dulu tahun 2017. Saya masuk Top IT manajer dari tahun 2017 yang awalnya tidak ada background IT sekarang sudah ke sistem</p>
<p>5.“Bagaimana cara bapak/ibu memberikan kepercayaan kepada</p>	<p>Konsep <i>trust</i> mungkin Pak Yoto sudah menjabarkan. Kepercayaan yang terbangun itu adalah kepercayaan</p>

<p>anggotanya dalam komitmen mewujudkan tujuan instansi?"</p>	<p>individual kemudian menjadi institusional kemudian menjadi culture. Tentu dalam organisasi apapun termasuk IT saya anggap organism itu pasti menumbuhkan suatu trust itu diawali trust internal ini paling berat. Kepercayaan luar itu akan terbangun dengan sendirinya kalau kepercayaan didalamnya terbentuk dimanapun seperti itu. Maka strategi yang disampaikan beliau adalah bahwa semua yang ada ini di O(nol) kan dengan dilakukan outbound lalu bermalam di alam bersama-sama itu malam nya ada perenungan. Sehingga awalnya ada sekat dan sebagainya menjadi tidak ada sekat. Awal konsep sosial jika sudah muncul maka untuk menguatkan kepercayaan harus dalam bentuk data sama dengan konsep LAPOR tadi. Begitu saya melaporkan laporan ini belum ditindaklanjuti oleh OPD namun ada yang mengatakan sudah tapi belum diupdate oleh kominfo. Jika tidak disampaikan diawal akan menjadi konflik intern tapi dengan adanya alat, notifikasi kita lakukan tertera kita jawab jam berapa hari apa semua tertera. Sehingga tertera dan menjelaskan sudah dilakukan tapi kan misal baru tadi pagi kan trakhir dilihat malam sehingga coba dicek lagi jam berapa. Jika tidak didukung alat itu maka akan terjadi konflik egois, dengan alat kita ada kepastian. Absensi online jadi tahu masuk jam berapa tapi kembali lagi ke SDM, IT itu tools, pengaduan masyarakat itu merah jika tidak ditangani, kuning masih proses, selesai hijau. Di sistem saya pelajari pakai (.) titik dianggap sudah jawab kelemahan</p>
---	---



	<p>sistem disitu. Semua sistem ada kelemahanya sehingga perlu SDM yang mengontrol dan memantau terus itu saya tugaskan admin. Maka sistem butuh diubah di sistem sekian karakter dihold otomatis jika jawaban tidak sesuai maka harus dirubah ada editing butuh SDM di situ.</p>
<p>6.“Bagaimana menurut bapak/ibu komitmen dari seorang leadership mampu mempengaruhi kesuksesan penyelenggaraan e-leadership?”</p>	<p>Manusia itu bisa jalan karena ada komitmen. Komitmen pimpinan ini sangat 50-75% itu komitmen pimpinan, lalu lainnya kehendak para pihak SDM baru alat. Maka sekecil apapun suatu pekerjaan jangan diremehkan lakukan dengan sungguh-sungguh dengan fokus dengan niat yang kuat, ikhlas pasti yang besar akan terwujud itu prinsip. Kembali pada Top Leader. Saya punya pengalaman saat pak Yoto memerintahkan mempresentasikan 3 aplikasi punya UKP4 dulu, LAPOR, SISMON dan Open Data. LAPOR itu setiap mau paparan saya beliau memaparkan dulu karena ini akan membuka seperi aib teman-teman saya dan manusia pasti akan ada tidak senangnya. Kemudian saya membicarakan hal tersebut dengan pimpinan dan ini kembali lagi pada komitmen pimpinan kalau pemimpin tidak mendukung ya pasti saya dimusuhi banyak orang. Alhamdulillah beliau mendukung mengadakan management review nanti ditambah ini dan itu.</p>
<p><b>Leadership Functions (Fungsi Leadership)</b></p>	
<p>1.“Bapak/ibu sebelumnya sudah ada kesadaran nggeh kalau skill / kemampuan pemimpin mempengaruhi kesuksesan e-government?”</p>	<p>Ini bedanya antara pengalaman dengan ilmu, kalau orang pengalaman memang dia dimatangkan dalam hal skill yang berbasis strategi.Pengalaman itu akan</p>

	menjadi suatu keahlian/skill menjadi professor maka kala ditambahkan ilmu.
2.“Salah satu skill yang diperlukan dalam kepemimpinan kan mengontrol, bagaimana bentuk control yang bapak/ibu lakukan agar anggota tetap <i>on the track</i> ?”	Setiap minggu saya sampaikan isu strategisnya kepada Bapak Bupati maka di dalam isu strategis ini maka akan ada perencanaan yang tepat, penganggaran tepat pengawasannya tepat itu konsepnya <i>money follow problem</i> . Semua tools IT itu sangat menunjang, tapi kembali lagi tools hanya akan menjadi tools jika tidak dioperasionalkan. Sehingga analisis itu perlu sebgaiian memakai mesin. IT Bojonegoro sudah mulai didevelop pada tahun 2008-2010. Kita mempunyai jaringan FO itu 2010/2011 milik sendiri 25 KM jadi seluruh OPD sudah tersambung miliknya Pemkab bukan milik vendor.
3.“Bagaimana bapak/ibu memberikan perlindungan terhadap anggota bapak/ibu, sehingga mereka berani untuk melakukan inovasi-inovasi guna mensukseskan e-government? “	Selama kami mengerjakan kegiatan inovatif yang sudah direncanakan sesuai dengan masterplan IT saya rasa akan aman-aman saja. Selain itu kita juga punya Dewan IT yang bertugas untuk menyeleksi usulan terkait IT. Jadi semuanya harus lewat dewan IT yang mana yang menjadi prioritas adalah aplikasi atau inovasi yang sudah ada pada perencanaan dalam masterplan IT.
4.“Bagaimana bentuk support yang bapak/ibu berikan kepada anggota sehingga anggota terus termotivasi untuk menjalankan tugas dan fungsinya guna mencapai tujuan instansi?”	Harus ada umpan balik dari user setiap problem kita tidak bisa karena kominfo itu bagaikan pipa yang punya tandonnya OPD lain. Setiap ada ilmu baru saya share kepada teman-teman saya
5.“Bagaimana menurut bapak/ibu kemampuan leadership dalam mengelola perbedaan untuk mencapai tujuan mempengaruhi kesuksesan penyelenggaraan e-government?”	Yaa kemampuan managerial dari pimpinan memang sangat berpengaruh besar. Apalagi kendala terbesar yang ada di bojonegoro ini adalah SDM. Persebaran SDM yang tidak merata dan berbeda latar belakang mengharuskan

	<p>pemimpin untuk bisa mengelolnya agar bisa saling berkontribusi adil. Adil disini bukan sama rata atau sama rasa, melainkan adil sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Ditempatkan ditempat yang sesuai dengan kemampuannya. Dengan begitu semua akan saling berkontribusi dalam mensukseskan pemerintahan.</p>
--	--

### INFORMAN 2 DAN INFORMAN 3

#### PROFIL NARASUMBER

1. Nama Instansi : Pemerintah Daerah Kota Madiun
2. Tanggal : 29 November 2018
- Interview
3. Nama : Subakri, S.Sos, M.Si
4. Jabatan : Kepala Dinas Kominfo
5. Lama Kerja : 2 Tahun
6. Kualifikasi : - Memiliki kekuasaan dan wewenang untuk membantu Kepala daerah dalam penerapan e-Government.  
- Memiliki pengalaman terlibat dalam implementasi TI pada kegiatan pemerintahan daerah

Madiun, 29 November 2018



Subakri

### LEMBAR VALIDASI HASIL PENELITIAN

Judul Penelitian : Pengukuran *E-Leadership* Dalam Keberhasilan *E-Government* Di Indonesia

Peneliti : Yudha Herlambang C.P., S.Kom.

Dosen Pembimbing : Tony Dwi Susanto, S.T., M.T., Ph.D., ITIL, COBIT

Telah dilakukan penggalan data melalui wawancara dan observasi langsung terhadap narasumber sebagai berikut :

Nama Narasumber : Subakri , S.Sos , M.Si

Usia :

Posisi : Kepala Dinas Kominpo

Tanggal Wawancara : 29 November 2018


Tempat Wawancara : Kantor Dinas Kominpo Kota Madiun

Hasil Penelitian : **TERLAMPIR SESUAI LAPORAN PENELITIAN**

Berikan checklist (✓) pada kolom di bawah ini :

Komponen Validasi	Sesuai Fakta Di Lapangan	
	Ya	Tidak
Keterkaitan antara e-leadership dalam keberhasilan e-government	✓	
<i>Strong Leadership</i>	✓	
Visi dan Misi <i>Leadership</i>	✓	
Keselarasan IT dengan <i>Goals Strategi</i>	✓	
Komitmen	✓	
<i>Leadership Fuctions</i>	✓	

Madiun, 29 November 2018

  
( Subakri )

PROFIL NARASUMBER

- 1. Nama Instansi : Pemerintah Daerah Kota Madiun
- 2. Tanggal Interview : 29 November 2018
- 3. Nama : Hendro Pradono, S.S
- 4. Jabatan : Kepala Bidang TIK
- 5. Lama Kerja : 2 Tahun
- 6. Kualifikasi :
  - Memiliki wewenang untuk mendukung Kepala dinas penerapan TIK & e-Government
  - Memiliki pengalaman terlibat dalam implementasi TI pemerintahan daerah

Madiun , 29 November 2018



HENDRO PRADONO, S.S

### LEMBAR VALIDASI HASIL PENELITIAN

Judul Penelitian : Pengukuran *E-Leadership* Dalam Keberhasilan *E-Government* Di Indonesia

Peneliti : Yudha Herlambang C.P., S.Kom.

Dosen Pembimbing : Tony Dwi Susanto, S.T., M.T., Ph.D., ITIL, COBIT

Telah dilakukan penggalan data melalui wawancara dan observasi langsung terhadap narasumber sebagai berikut :

Nama Narasumber : Hendro Pradono S.S

Usia :

Posisi : Kepala Bidang TIK

Tanggal Wawancara : 29 November 2018

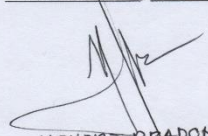
Tempat Wawancara : Kantor Dinas Kominfo Kota Madiun

Hasil Penelitian : TERLAMPIR SESUAI LAPORAN PENELITIAN

Berikan checklist (✓) pada kolom di bawah ini :

Komponen Validasi	Sesuai Fakta Di Lapangan	
	Ya	Tidak
Keterkaitan antara e-leadership dalam keberhasilan e-government	✓	
<i>Strong Leadership</i>	✓	
Visi dan Misi <i>Leadership</i>	✓	
Keselaranan IT dengan <i>Goals Strategi</i>	✓	
Komitmen	✓	
<i>Leadership Fuctions</i>	✓	

Madiun, 29 November 2018

  
( HENDRO PRADONO, ST. )

## HASIL WAWANCARA INFORMAN 2 & INFORMAN 3

<b>Strong Leadership (Pemimpin Yang Kuat)</b>	
1. “Pak/Bu, Menurut panjenengan ada atau tidak nggeh hubungan antara strong leadership terhadap kesuksesan e-government?”	Ada, pemimpin harus kuat, continue dan meningkat. Kuat dalam artian oleh OPD tidak disepelekan. Jika hak itu terjadi akan menjadi hal baik untuk pelayanan publik ke masyarakat untuk mencapai visi misi beliau kan tentunya support.
2. “Model kepemimpinan kan ada banyak pak/bu, kira-kira panjenengan pakai model yang seperti apa yaa? “	-
3. “Misalkan ada anggota ibu yang tidak sesuai dengan kepemimpinan bapak/ibu, bagaimana cara menanggapi nggih?”	Dengan teguran dalam forum rapat. Karena pada dasarnya kita sudah sepakat dengan visi dan misi maupun rencana pengembangan kedepannya. Sehingga semua OPD harus siap dengan kegiatan-kegiatan demi menuju suksesnya kota madiun.
4. “Menurut bapak /ibu penting kah latar belakang pendidikan seorang pemimpin? “	Perlu tapi tidak wajib dan tidak perlu sangat teknis tapi harus tahu TI itu bisa dimanfaatkan untuk ini maka didorong. Cukup dengan tahu wawasan sudah cukup namun jika tahu lebih sempurna. Misal data-data makro yang untuk mencapai visi misi walikota yang beliau perlukan, contoh membutuhkan data ini tampilkan sehingga saya bisa monitor itu sudah IT harus masuk. Yang penting kemauan, komitmen dan konsistensi yang utama itu. Pemimpin harus support sistem yang ada dengan penganggaran memang untuk kebutuhanyang urgent. Bicara IT tidak lepas dari anggaran namun wujudnya tidak nampak berbeda dengan pembanguna fisik yang terlihat.
5. “Sebagai sorang pemimpin tentunya bapak/ibu butuh kerjasama dengan	Penawaran-penawaran khusus di Kominfo ada kemarin GSIO ke ITS



kepala daerah yang lain, bagaimana bentuk relationship yang bapak/ibu bangun?”	ada teman dapat beasiswa kesana, kemudian ada yang berangkat ke Bandung masalah fiber optic. Kominfo selalu diikuti. Tugas belajar juga ada tapi nanti SDM nya jadi tidak ada. Misal kelurahan itu basic utama jika tidak ada yang mengurus pusat itu ya susah juga atau bahkan merangkap tugas akhirnya tidak konsentrasi. Ada orang tidak paham IT bisa dipahamkan namun jika tidak ada orangnya ini yang menjadi kendala.
6. “Bagaimana menurut bapak/ibu kepemimpinan yang efektif menyebabkan kesuksesan e-goverment?”	Betul, pemimpin harus kuat continue dan meningkat. Kuat dalam artian oleh OPD tidak disepelekan. Jika itu menjadi hal baik untuk pelayanan publik ke masyarakat untuk mencapai visi misi beliau kan tentunya support.
<b>Vision and Mision Leadership (Visi dan Misi Pemimpin)</b>	
1. “Pak/ibu, menurut panjenengan, ada atau tidak yaa hubungan visi dan misi terhadap kesuksesan e-leadership?”	Ada lah. Kalo visinya tercapaikan secara otomatis kesuksesan akan diraih. Disini visi dan misi sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintahan. Apakah sudah tercapai atau belum seperti itu.
2. “Apakah selama ini visi dan misi apak/ibu sudah selaras dengan tujuan instansi nggeh?”	Sudah selaras karena ada dokumennya. E-kinerja sudah ada perwali, jadi di dalam bagian dari peraturan walikota mengenai pemberian TPP (Tunjangan Perbaikan Pegawai) dan uang kinerja kegiatan sudah ada payung hukumnya.
3. “Agar tujuan instansi dapat tercapai tentunya bapak/ibu harus menshare visi & misi, bagaimana cara bapak/ibu melakukan itu nggeh? “	Sosialisasi biasanya ada forum lalu kita sampaikan misal aplikasi baru juga pada level bawahnya. Kita butuh tenaga admin, ada pejabat-pejabat tentang komitmennya. Di masyarakat ada KIM ada relawan TIK itu menjadi ujung tombak kami.
4. “Menurut bapak/ibu, bagaimana cara untuk mengetahui bahwa stakeholders	Yaa dengan melakukan kegiatan seperti yang sudah direncanakan.

sudah paham dan jelas dengan visi dan misi yang bapak/ibu tentukan?”	Semua kegiatan yang direncanakan tentunya dalam rangka menuju tercapainya visi dan misi. Dengan mereka melakukan kegiatan yang sudah direncanakan dalam masterplan brati mereka sudah paham dengan visi dan misi yang ada.
5. “Bagaimana menurut bapak/ibu, visi dan misi leadership mempengaruhi kesuksesan e-government?”	Visi yang baik dengan indicator pencapaian yang jelas memudahkan para stakeholders untuk memahaminya. Dengan mencapai visi dan misi maka kesuksesan e-government akan tercapai. Tentunya dengan kerjasama antar OPD yang ada di pemerintahan kota madiun.
<b>Align IT and Goals Strategy (Keselarasan IT dan Tujuan Strategi)</b>	
1. “Pak/bu, sebelumnya sudah ada kesadaran kan dari bapak/ibu untuk menggunakan IT dalam mencapai tujuan instansi?”	Sudah ada, karena sekarang memang sudah eranya IT. Mau tidak mau kita harus menggunakan IT agar memudahkan kita dalam menjalankan pemerintahan. Sekarang serba online, serba aplikasi dan serba terintegrasi. Dari pusat sudah menggunakan aplikasi jika tidak mengikuti kita akan ketinggalan dengan itu semua.
2. “Menurut bapak/ibu ada tidak yaa dampak yang diperoleh dengan menggunakan IT dalam keberhasilan e-government?”	Pasti lebih meningkat kepercayaanya istilahnya memang semakin tinggi kepercayaan dengan adanya sarana lewat IT sehingga merasakan kemudahan. ada LAPOR ada dari sosial media kita dan pemerintah memfasilitasi wifi gratis sudah ada di 200 lebih titik sebagai pelayanan dasar yang ada di masyarakat. Jika pelayanan ada yang kurang akan menyampaikan contoh lampu PJO yang mati, mungkin pelayanan kependudukan yang kurang memuaskan, jalannya yang kurang bagus bisa melapor titik pusat wifi ada

	<p>di pos kamling. Memang suatu program pemerintah ada positif dan negatifnya tapi ya itulah tuntutan perkembangan jaman IT kebutuhan masyarakat paham. Ada KIM, Relawan TIK, pemuda karang taruna yang membantu respon sekali. Ada pertemuan dan pembinaan KIM setiap bulan tentang diskusi masalah tanya jawab.</p>
<p>3. “Dari kacamata bapak/ibu, seberapa penting sih peranan IT dalam proses bapak/ibu mewujudkan tujuan instansi?”</p>	<p>Suka untuk mencapai kinerja dan pencapaian visi misi pemerintahannya. Saya rasa TI di Pemerintahan itu menjadi sesuatu yang wajib, tuntutan, suka tidak suka, mau tidak mau harus pakai jika tidak memakai akan ketinggalan.</p>
<p>4. “Sebelumnya kan tidak menggunakan IT kemudian berubah menggunakan IT, bagaimana cara bapak/ibu merubah paradigam anggota yang sudah nyaman dengan proses manual kemudian dirubah menjadi menggunakan IT?”</p>	<p>Yaa pelan-pelan sebelumnya Ada, Jilid 1 jaringan setiap kantor itu bisa tersambung semua dengan IT termasuk juga CCTV mau ada juga video conference juga. baris jilid 2 ini gara-gara ada masalah di 2016 akhirnya kita menerapkan e-kinerja dan dari KPK kan kita dikekang untuk rencana aksi mengatasi korupsi. Jadi kita ada integrasi sistem antara perencanaan dan penganggaran sehingga ada e-kinerja. Dengan begitu mau tidak mau kita jadi melek dengan TI.</p>
<p>5. “Bagaimana menurut bapak/ibu penggunaan IT dapat mempengaruhi kesuksesan penyelenggaraan e-government?”</p>	<p>Dengan IT kinerja pemerintahan menjadi lebih transparan, efisien dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kami. Dengan begitu penyelenggaraan e-government akan semakin sukses. Parameternya adalah masyarakat puas dan tugas-tugas dapat diselesaikan dengan baik dan benar.</p>
<p><b>Commitment Leadership (Komitmen Pemimpin)</b></p>	

<p>1. “Menurut bapak/ibu ada gak hubungan antara komitmen yang kuat dari leadership terhadap kesuksesan penyelenggaraan e-government?”</p>	<p>Jelas ada. Komitmen itu penting. Pemimpin harus komitmen dan konsisten. Jangan hanya di awal saja namun terus dikawal. Bisa dengan melibatkan OPD dan Kominfo juga. Sehingga semangat untuk mewujudkan visi dan misi itu akan terus ada dan penyelenggaraan e-government akan sukses tentunya.</p>
<p>2. “Tentunya dengan komitmen yang bapak/ibu punya mudah untuk menangani resiko-resiko yang kemungkinan terjadi, kira-kira resiko terbesar apa yang pernah bapak/ibu ambil dalam upaya mencapai tujuan yang sudah bapak/ibu tentukan?”</p>	<p>Perlu tekana sosial, dalam setiap rapat koordinasi. Memang daerah OPD itu kendalanya adalah SDM kurang orangnya. Tahun ini kita bangun madiun dashboard itu jika supply data dari OPD kurang lancar ya sama aja mau menampilkan apa analisisnya seperti apa. Tidak ada artinya jika OPD itu tidak update data.</p> <p>Dulu ada gangguan itu tapi tidak sampai database tapi cum sampai bagian tampilan karena tim kami sudah ada. Upaya mengatasi awal kami deteksi dari mana kita ada notifikasi dan dilacak. yang paling dominan ya itu. Cara mengatasi yan harus ada tata kelola IT yang bagus dan sistem kita tidak boleh sembarangan buka email dan akses link macam-macam jangan semabarang diklik.</p>
<p>3. “Sejauh ini selama bapak/ibu menjabat, apakah bapak/ibu memiliki kelompok kerja inovatif nggeh, guna terus berinovasi dalam mewujudkan tujuan instansi? “</p>	<p>Organisasi khusus ya dari dinas terkait. Outsource di kami itu memang saat ini belum sampai kepada fokus implementator namun aplikasi sudah kami kembangkan saat ini. Tapi juga tidak menutup kemungkinan nanti tuntutan kedepan untuk melakukan itu. Katakanlah sekarang ada masterplan. Untuk kerjasama kita ada dengan Surabaya dan bandung. dengan Surabaya itu e-kinerja kalau kota</p>

	bandung seluasnya aplikasi yang ada di bandung moU bapak walikota dengan pak ridwan kamil ada banyak aplikasi tapi yang sesuai dengan sini ada sekitar 20 aplikasi dan tahap pengembangan, yang sudah berjalan perijinan itu sudah.
4. “Bagaimana cara bapak/ibu dalam membangun mental berani mencoba/berinovasi kepada anggota bapak/ibu? “	Pak wali ada kunjungan kerja walikota di 27 kelurahan disitu pak wali menyampaikan selain masalah pembangunan ya salah satu tentang pemanfaatan IT lewat jumpa pers pak wali sebagai narasumber terkait topiknya IT ya akan disampaikan dalam bentuk berita, ada radio juga untuk menyampaikan hasil itu. Selama ini sudah berjalan.
5. “Bagaimana cara bapak/ibu memberikan kepercayaan kepada anggotanya dalam komitmen mewujudkan tujuan instansi?”	Dengan memberikan kebebasan melakukan kegiatan asalkan sesuai dengan perencanaan dan masterplan yang sudah disepakati. Asal kegiatannya tidak melenceng jauh dari yang sudah ditentukan di situ otomatis pak wali kota pasti support.
6. “Bagaimana menurut bapak/ibu komitmen dari seorang leadership mampu mempengaruhi kesuksesan penyelenggaraan e-leadership?”	Penting yang utama itu komitmen dan konsistensi dari seorang leader. Komitmen itu hanya diawal yang harus terus itu konsisten. Jika tahun ini ada inovasi maka butuh konsisten. mengawal dengan bekerjasama dengan kominfo.
<b>Leadership Functions (Fungsi Leadership)</b>	
1. “Bapak/ibu sebelumnya sudah ada kesadaran nggeh kalau skill / kemampuan pemimpin mempengaruhi kesuksesan e-government?”	Sudah ada. Skil kepemimpinan perlu dimiliki seorang pemimpin. Utamanya sebenarnya managerial. Karena pemimpin disini yang memanajajemen seluruh resource dan SDM. Dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada guna mencapai kesuksesan jalanya pemerintahan.

<p>2. “Salah satu skill yang diperlukan dalam kepemimpinan kan mengontrol, bagaimana bentuk control yang bapak/ibu lakukan agar anggota tetap <i>on the track?</i>”</p>	<p>Kan ada atasan, kalau misal kominfo kan levelnya sama kita punya atasan ada pak sekda ada pak wali. Kita tiap bulan atau tiap waktu tertentu mengadakan forum diskusi terkait IT untuk menuju smart city. Biasaya pak wali menanyakan dan sering kita menghadiri undangan instansi di atas kita dengan melibatkan perangkat daerah yang lain. Sehingga dari itu tahu masing-masing OPD tidak boleh ego sektoral atau sangat protect tidak open ini kan tidak boleh. Sekarang eranya keterbukaan semua harus transparan tidak ada suatu informasi yang tidak bisa dilihat masyaakat, kecuali informasi atau dokumen tertentu yang sifatnya memang harus dirahasiakan misal APBD, anggaran semua sudah share, lelang share semua sudah by system. Jika ada yang menanyakan kita sudah terbuka tidak ada ditutupi misal agar dapat dana yang lebih besar ini tidak ada kerena ada e-kinerja. Karena sudah paham semua ini butuh ada pak wali ada pak sekda jadi kita sampaikan musyawarahkan bila memang era keterbukaan.</p>
<p>3. “Bagaimana bapak/ibu memberikan perlindungan terhadap anggota bapak/ibu, sehingga mereka berani untuk melakukan inovasi-inovasi guna mensukseskan e-government? “</p>	<p>Karena sudah kita susun masterplan jadi tahu kebutuhan dan data lengkap kependudukan. Inovasi tidak harus menciptakan sendiri replika tidak masalah tinggal menyesuaikan kebutuhan di daerah. Kebutuhan yang belum ada apa misal di rumah sakit yang kurang ada tinggal mencontoh yang sudah ada kan hampir sama.</p>
<p>4. “Bagaimana bentuk support yang bapak/ibu berikan kepada anggota sehingga anggota terus termotivasi</p>	<p>Kita ada lomba pelayanan publik setiap tahun yang diselenggarakan bukan dari kami tapi organisasi lain, jadi setiap</p>

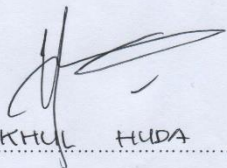
<p>untuk menjalankan tugas dan fungsinya guna mencapai tujuan instansi?"</p>	<p>ada inovasi-inovasi baru diberikan oleh walikota. Inovasi dalam bentuk proposal dari masyarakat atau juga OPD lalu diseleksi tingkat kota yang menang mewakili kota madiun untuk dimasukkan dalam aplikasi oleh menpan itu teman-teman organisasi yang melakukan itu. Aplikasi DoPariSakatu dari SDN mojorejo 2 masuk 40 besar inovasi dari ribuan aplikasi ini kan terkait pembentukan karakter sebelum masuk kelas didongengi. Dampaknya dari daerah kan mendapatkan dana insentif sekitar 9M untuk APD tingkat itu dari kementerian.</p>
<p>5. "Bagaimana menurut bapak/ibu kemampuan leadership dalam mengelola perbedaan untuk mencapai tujuan mempengaruhi kesuksesan penyelenggaraan e-government?"</p>	<p>Pemimpin yang bisa memaksimalkan sumber daya yang ada dapat menyebabkan kesuksesan e-government. Contohnya dengan sumber daya yang ada aja dimaksimalkan missal ada sdm yang kurang mengetahui tentang IT yaa dia jangan ditugaskan di bidang IT. Nanti hasilnya tidak akan maksimal dan malah membebani juga. Kerjasama memang harus melibatkan tidak bisa hanya orang perorang itu. Memang harus kerjasama dan dirasa kebutuhan contoh integrasi memang dirasa manfaatnya kebutuhan untuk itu mulai dari perencanaan sampai monitoring</p>

**INFORMAN 4**

**PROFIL INFORMAN**

- 1. Nama Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek
- 2. Tanggal Interview : 5 Desember 2018
- 3. Nama : Miftakhul Huda, S.Sos, M.Eng
- 4. Jabatan : Kasi Penyelenggaraan e-Government
- 5. Lama Kerja : 2 Tahun
- 6. Kualifikasi :
  - Memiliki wewenang untuk wewenang penyelenggaraan / penanganan penuh e-government daerah dibawah kepala bidang
  - Memiliki pengalaman terlibat dalam implementasi TI pada kegiatan pemerintahan daerah

Trenggalek, 5 Desember 2018

  
MIFTAKHUL HUDA



### LEMBAR VALIDASI HASIL PENELITIAN

Judul Penelitian : Pengukuran *E-Leadership* Dalam Keberhasilan *E-Government* Di Indonesia  
Peneliti : Yudha Herlambang C.P., S.Kom.  
Dosen : Tony Dwi Susanto, S.T., M.T., Ph.D., ITIL, COBIT  
Pembimbing

Telah dilakukan penggalan data melalui wawancara dan observasi langsung terhadap informan sebagai berikut :

Nama Informan : MIFTAKHUL HUDA, S.Sos., M.Eng .  
Usia : 38 TH  
Posisi : Kasi Penyelenggaraan e-Government  
Tanggal : 5-12-2018  
Wawancara  
Tempat : DINAS KOMINFO KAB. TRENGGALEK  
Wawancara  
Hasil Penelitian : TERLAMPIR SESUAI LAPORAN PENELITIAN

Berikan checklist (✓) pada kolom di bawah ini :

Komponen Validasi	Sesuai Fakta Di Lapangan	
	Ya	Tidak
Keterkaitan antara e-leadership dalam keberhasilan e-government	✓	
<i>Strong Leadership</i>	✓	
Visi dan Misi <i>Leadership</i>	✓	
Keselarasan IT dengan <i>Goals Strategi</i>	✓	
Komitmen	✓	
<i>Leadership Fuctions</i>	✓	

Trenggalek, 5 Desember 2018

( MIFTAKHUL HUDA )

## HASIL WAWANCARA INFORMAN 4

<b>Strong Leadership (Pemimpin Yang Kuat)</b>	
<p>1. “Pak/Bu, Menurut panjenengan ada atau tidak nggeh hubungan antara strong leadership terhadap kesuksesan e-government?”</p>	<p>Yaa ada kalo menurut saya, pemimpin harus memiliki keinginan yang kuat, komitmen yang kuat untuk mensukseskan penyelenggaraan e-government. Dan saya rasa pak bupati sekarang memiliki itu semua, soalnya kalua pas ada rapat dan paparan itu pak bupati rasanya paham semua yang dikerjakan gitu. Jadi kita juga istilah kasarnya harus belajar dulu agar nanti kalo ditanya-tanya kita juga bisa menjawab. Naah disinilah yang akhirnya memaksa anggota lain untuk mengupdate wawasan juga akhirnya bisa turut mensukseskan pemerintahan.</p>
<p>2. “Model kepemimpinan kana da banyak pak/bu, kira-kira panjenengan pakai model yang seperti apa yaa? “</p>	<p>Kalua pak bupati rasanya berbasis ide-ide atau masalah dari masyarakatnya. Soalnya dulu pas pertama menjabat bapak bupati melalui bapeda pernah mengadakan sebuah lomba untuk menggali ide. Itu membuat ide gagasan trenggalek semacam kompetisi dilombakan kategori pemerintahan mungkin pelayanan public, mungkin pengelolaa keuangan, dia membuat kategori-kategori dilombakan independent dari luar. Penilaian akhir itu bertempat di pendopo difasilitasi pak wakil bupati yang menang diminta difasilitasi oleh kabupaten bapeda. Jadi ide-ide inovasi masyarakat siapapun PNS ikut juga bisa.</p>
<p>3. “Misalkan ada anggota ibu yang tidak sesuai dengan kepemimpinan bapak/ibu, bagaimana cara menanggapi nggih?”</p>	<p>Selama ini sih masih ngikut apa kata pak bupati aja sih mas, tapi kalua memang ada yang tidak sesuai dengan keinginan pak bupati biasanya diingatkan di rapat aja siih. Karena tugas dari masing-masing dinas sudah jelas di RPJMD dan</p>

	Masterplan pengembangan e-government jadi yaa selama mengikuti itu yaa fine-fine ajaa.
4. “Menurut bapak /ibu penting kah latar belakang pendidikan seorang pemimpin? “	Kalau pendidikan khusus mungkin tidak perlu karena pimpinan kan kebijakan tapi kalau punya kompetensi lebih bagus lagi. Kalau Bupati sekarang pak emil sangat-sangat berkompeten seperti dalam paparan selalu paham. Karena bapak Bupati sudah sangat berkompeten ya mungkin kalau bupati pasti fungsi manajerial, IT meskipun tidak detail juga harus paham misal smart regency dari petanya dan fungsi itukan pasti paham tidak harus keteknis tapi secara gambaran umumnya paham. Tidak harus lulusan IT yang penting tahu dan mau mengikuti perkembangan IT dan mampu menerjemahkan kegunaan IT juga terbuka tidak menutup saran dan masukan untuk mau belajar mengikuti perkembangan saat ini.
5. “Sebagai sorang pemimpin tentunya bapak/ibu butuh kerjasama dengan kepala daerah yang lain, bagaimana bentuk relationship yang bapak/ibu bangun?”	Kita ada kerjasama dengan kota lain e-planning dan e-budgeting kemarin kita ada ke banyuwangi dulu Surabaya ya ikut seminar-seminar. Namun dari banyuwangi itu minta komitmen pimpinan diberikan aplikasinya dan dipakai atau tidak di sini MoU tanda tangan Bapak Bupati. Dari pusat sendiri ada aplikasi berbagi pakai dari pemda itu disuruh untuk mendata aplikasi yang ada nanti dari sana menginventaris yang bagus mana untuk misal e-planning e-budgeting disesuaikan. Dulu dari kementrian mengatakan untuk tidak membeli aplikasi tapi berbagi aplikasi. Sekarang selanjutnya difasilitasi group-group kepala dinas kominfo, group kominfo yang se-Indonesia, lalu ITS sendiri kan ada group smartcity.

<p>6. “Bagaimana menurut bapak/ibu kepemimpinan yang efektif menyebabkan kesuksesan e-government?”</p>	<p>Kepemimpinan yang efektif ini maksudnya dengan memanfaatkan IT kan? Jadi seperti yg sudah katakana sebelumnya tadi dengan memanfaatkan IT pemimpin akan lebih efektif dalam memantau dan menjalankan fungsinya. Jadi sudah jelas akan turut mensukseskan penyelenggaraan e-government.</p>
<p><b>Vision and Mision Leadership (Visi dan Misi Pemimpin)</b></p>	
<p>1. “Pak/ibu, menurut panjenengan, ada atau tidak yaa hubungan visi dan misi terhadap kesuksesan e-leadership?”</p>	<p>Adaa, dengan dibuatnya visi dan misi yang jelas dan terukur tentunya akan memudahkan kepala daerah dan perangkat daerah untuk mewujudkannya. Dengan mewujudkan visi dan misi tersebut maka akan terbentuknya kesuksesan bagi pemimpin. Salah satu indikator kesuksesan seorang pemimpin adalah apabila visi dan misi atau strategi planingnya dapat tercapai.</p>
<p>2. “Apakah selama ini visi dan misi bapak/ibu sudah selaras dengan tujuan instansi nggeh?”</p>	<p>Kalo pada RPJMD itu visi dari kepemimpinan yang berkaitan dengan IT tentunya dan diskominfo ada. Tepatnya di visi nomor 1. Selain itu ada juga visi dan misi yang berkaitan dengan IT di isian form SPBE. Untuk tertulisnya memang tidak ada, namun tersirat dengan meningkatkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Yang mana efektif dan efisien yang dimaksud adalah dengan memanfaatkan TIK.</p>
<p>3. “Agar tujuan instansi dapat tercapai tentunya bapak/ibu harus menshare visi &amp; misi, bagaimana cara bapak/ibu melakukan itu nggeh?”</p>	<p>Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya visi dan misi pemerintahan tertuang dalam RPJMD. Yang mana dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program pemimpin (kepala daerah) yang mana penyusunanya berpedoman terhadap</p>

	<p>RPJM nasional. Selain itu diawal penyusunan masterplan pengembangan e-government kami melakukan FDG ke dinas-dinas terkait visi dan misi yang akan dicantumkan dalam masterplan. Kemudian setelah FDG masukan dari dinas-dinas terkait kita tamping kemudian kita finalisasi masterplannya baru kemudian di share. Untuk sosialisasi visi dan misi terkait IT sudah ada roadmapnya.</p>
<p>4. “Menurut bapak/ibu, bagaimana cara untuk mengetahui bahwa stakeholders sudah paham dan jelas dengan visi dan misi yang bapak/ibu tentukan?”</p>	<p>Cara mengetahuinya dengan melihat apakah mereka sudah melakukan beberapa hal yang ada dalam RPJMD guna mewujudkan visi dan misi. Apabila hal-hal yang sudah dilakukan untuk mencapai target dari RPJMD maka mereka sudah paham dan sudah mengerti kontribusi apa yang akan dilakukan untuk menuju visi dan misi tersebut. Dalam FDG sebelumnya di penyusunan masterplan pengembangan e-government kami sudah mengumpulkan masukan-masukan dari dinas terkait sehingga menjadi aneh kalo sampek dinas kurang paham dengan visi dan misi yang ada.</p>
<p>5. “Bagaimana menurut bapak/ibu, visi dan misi leadership mempengaruhi kesuksesan e-government?”</p>	<p>Yaa kalua visi dan misinya sudah berhasil dilakukan secara otomatis kesuksesan dalam pemerintahan government pasti akan terwujud. Selain itu kami juga selalu mengusahakan yang terbaik salah satunya kita memiliki masterplan pengembangan e-government yang dimana didalamnya terdapat visi dan misi terkait It. Untuk saat ini kami masih mengupayakan proses nya untuk dijadikan sebagai peraturan bupati, hingga kini sedang proses penetapan.</p>

### Align IT and Goals Strategy (Keselarasan IT dan Tujuan Strategi)

<p>1. “Pak/bu, sebelumnya sudah ada kesadaran kan dari bapak/ibu untuk menggunakan IT dalam mencapai tujuan instansi?”</p>	<p>iyaa, apalagi di jaman sekarang kita akan ketinggalan kalo tidak menyesuaikan dengan perkembangan IT. Dari awal trenggalek smart regency yaa aware sebenarnya, pak wakil bupati juga aware. Namun keinginan trenggalek menuju smart regency, e-government di kominfo khususnya masih kebingungan memulai smart regency ini. Kita kebingungan memulai smart regency ini dari mana lalu apakah yang sudah kita lakukan ini sudah memenuhi karakteristik dari e-government. Mungkin hanya di level beberapa persen saja karena semua sudah memanfaatkan IT (computer) seperti website dan ms office. Penilaian tentang level pemanfaatan e-government sebenarnya juga sudah ada pada dokumen SPBE.</p>
<p>2. “Menurut bapak/ibu ada tidak yaa dampak yang diperoleh dengan menggunakan IT dalam keberhasilan e-government?”</p>	<p>Sangat ada kalua itu, dengan menggunakan IT kinerja kita jadi lebih mudah. Sebenarnya kan bukan pada e-nya tatpi tujuan e-government adalah pelayanan kepada masyarakat. Jadi harus ada hasil akhirnya yang meningkatkan pelayanan pada public. Dengan menggunakan IT tentunya pelayanan public jadi lebih baik.</p>
<p>3. “Dari kacamata bapak/ibu, seberapa penting sih peranan IT dalam proses bapak/ibu mewujudkan tujuan instansi? “</p>	<p>Sangat penting utamanya untuk menuju trenggalek smart regency. Untuk mewujudkan smart regency dibutuhkan peranan IT guna memudahkan dan memaksimalkan pelayanan public serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.</p>
<p>4. “Sebelumnya kan tidak menggunakan IT kemudian berubah menggunakan IT, bagaimana cara</p>	<p>Dengan mengupdate wawasan terkait IT. Di Roadmap memang ada kompetensinya meningkatkan ini ikut</p>

<p>bapak/ibu merubah paradigam anggota yang sudah nyaman dengan proses manual kemudian dirubah menjadi menggunakan IT?”</p>	<p>sertifikasi, ikut ini itu. Untuk anggaran-anggaran peningkatan di kominfo ini terbatas untuk yang lebih luas itu anggaran ada di BKD nanti ada bidang diklat. Kemarin kita sudah ada tawaran-tawaran, kominfo sendiri kan ada pelatihan pengembangan SDM, pernah kita kerjasama BSSN kesini memberikan pelatihan keamanan sistem informasi dan koordinasi langsung kesana. Dulu pernah inisiatif daftar sendiri untuk pelatihan dulu masih hubkominfo dan ada penawaran beasiswa dan saya alumni penerima beasiswa kominfo dulu 2010. Ada juga kegiatan sosialisasi SPBE pak kadis dan sekretarisnya. Kita ada kerjasama dengan kota lain e-planning dan e-budgeting kemarin kita ada ke banyuwangi dulu Surabaya ya ikut seminar-seminar.</p>
<p>5. “Bagaimana menurut bapak/ibu penggunaan IT dapat mempengaruhi kesuksesan penyelenggaraan e-government?”</p>	<p>Di dokumen SPBE itu sudah dijelaskan bahwa kesuksesan penyelenggaraan e-government dipengaruhi oleh penggunaan IT. Karena semua yang ditanyakan dalam evaluasi SPBE tersebut berkaitan dengan IT. Mulai dari dokumen landasan hukum, tata kelola IT sampai penggunaan aplikasi-aplikasi yang menunjang kinerja pemerintahan. Dari situ sudah jelas kalo IT mendukung penyelenggaraan e-government.</p>
<p><b>Commitment Leadership (Komitmen Pemimpin)</b></p>	
<p>1. “Menurut bapak/ibu ada gak hubungan antara komitmen yang kuat dari leadership terhadap kesuksesan penyelenggaraan e-government?”</p>	<p>Jelas ada, malah ini yang menjadi modal utamanya. Komitmen dari atasan sangat mempengaruhi kemauan anggotanya untuk mewujudkan tujuan organisasi. Biasanya komitmen pimpinan ini ditunjukkan dengan caranya memotivasi, memberikan arahan serta</p>

	bertanggung jawab akan hasil kerja anggotanya. Biasanya bapak bupati melakukan rapat koordinasi rutin untuk memberikan arahan kepada kepala dinas terkait. Yaa itu dilakukan biar kepala dinas terus diingatkan akan tugas dan fungsinya dalam mensukseskan e-government.
2. “Tentunya dengan komitmen yang bapak/ibu punya mudah untuk menangani resiko-resiko yang kemungkinan terjadi, kira-kira resiko terbesar apa yang pernah bapak/ibu ambil dalam upaya mencapai tujuan yang sudah bapak/ibu tentukan?”	Rasanya sampai sekarang belum ada resiko besar yang terjadi. Soalnya semua kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan sudah dirancang dalam RPJMD dan utamanya untuk kegiatan yang berkaitan dengan IT sudah ada masterplanya. Jadi selama masih mengikuti itu yaa saya rasa tidak ada resikonya wong kita sudah saling berkomitmen untuk menjalankan semua itu.
3. “Sejauh ini selama bapak/ibu menjabat, apakah bapak/ibu memiliki kelompok kerja inovatif nggeh, guna terus berinovasi dalam mewujudkan tujuan instansi? “	Idealnya iya, kalau kominfo levelnya masih luas. Saya mengatakan iya karena assesment dari SPBE itu mungkin ada Dewan Pengarah TIK, harus ada Komite TIK itu salah satu rekomendasi harus ada pengarah lalu ada komitenya ada pelaksananya. Dulu ada istilah Government shift Officer itu levelnya itu mungkin Bapak Sekda atau Bapak Bupati untuk menggerakkan atau untuk memerintah dinas-dinas. Bisa juga dengan tim independent, sekarang disini masih terpusat di Kominfo itu rekomendasi SPBE itu ada pembentukan tim pengarah istilah steering commite.
4. “Bagaimana cara bapak/ibu dalam membangun mental berani mencoba/berinovasi kepada anggota bapak/ibu? “	Kami sudah memiliki masterplan pengembangan e-government jadi aplikasi yang dibangun harus selaras dengan ketetapan masterplan. Atau minimal aplikasi tersebut memang sudah direncakana sebelumnya. Namun



	<p>apabila memang membutuhkan inovasi yang sifatnya penting itu bisa dilakukan dengan menggunakan aturan yang dibuat oleh kepala diskominfo atau mungkin dari bupati.</p>
<p>5. “Bagaimana cara bapak/ibu memberikan kepercayaan kepada anggotanya dalam komitmen mewujudkan tujuan instansi?”</p>	<p>Dengan memberikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi kerjanya. Kalau di pemerintahan kaitanya sebenarnya dengan honor, yaa selama ini kita berkomitmen dalam menjalankan tujuan pemerintahan dengan adanya honor diluar gaji pokok. Pokoknya kita mengerjakan tugas sesuai tanggung jawab dan beban yang diberikan, insyaAllah honor dan kepercayaan pimpinan akan mengikuti.</p>
<p>6. “Bagaimana menurut bapak/ibu komitmen dari seorang leadership mampu mempengaruhi kesuksesan penyelenggaraan e-leadership?”</p>	<p>Komitmen dari kepala daerah dan perangkat daerah sangat penting dalam kesuksesan penyelenggaraan e-government. Komitmen tersebut biasanya terlihat dari banyak aplikasi yang kita pakai, berapa OPD yang saling terhubung. Namun kebanyakan orang biasanya melihat dari jumlah aplikasi yang digunakan dan missal adanya command center, biasanya itu. Secara tertulis banyak aplikasi desa, itu ada bantuan dari KOMPAK dan LSM bekerjasama dengan combine research institute desa, sudah mengadopsi ini hampir 108 desa. Kalau OPD ada website kurang 3 atau berapa gitu dari total 40 OPD. Aplikasi pasti itu seperti perijinan SIMPADU lalu SIAK trus semacam e-planning itu SIPPD kedepanya SIMCAN, kalau e-budgeting SIPDA meskipun istilahnya masih lokal belum terintegrasi. Lalu ada SIMBADA untuk mengelola asset lalu SIPGAJI dan untuk detailnya aplikasi ada daftar aplikasi. Semua itu adalah bentuk</p>

	komitmen kepala daerah untuk mewujudkan e-government.
<b>Leadership Functions (Fungsi Leadership)</b>	
1. “Bapak/ibu sebelumnya sudah ada kesadaran nggeh kalau skill / kemampuan pemimpin mempengaruhi kesuksesan e-government?”	Sekarang semua ini tergantung pemimpinnya, kalo pemimpinnya bagus nanti anggotanya akan menyesuaikan juga. Karena bapak Bupati sudah sangat berkompeten ya mungkin kalau bupati pasti bisa turut mempengaruhi jalannya pemerintahan. Apalagi dari masa jabatannya ini sudah bisa kita rasakan perbedaannya. Trenggalek jadi lebih tertata, masyarakatnya juga lebih aware sekarang. Intinya dengan pemimpin yang memiliki skill semuanya jadi lebih jelas dan mudah.
2. “Salah satu skill yang diperlukan dalam kepemimpinan kan mengontrol, bagaimana bentuk control yang bapak/ibu lakukan agar anggota tetap <i>on the track</i> ?”	Bapak bupati meninjau ke kominfo dari 2017 itu sekali memastikan pengelolaan ITnya. Kominfo kan ada pengelolaan/penanganan masyarakat lalu pengelolaan informasi, Bapak bupati sangat aware, contohnya saat penyusunan masterplan dari tim penyusunnya itu kebetulan kita kan swakelola dengan ITS itu juga ada Bapak Bupati itu sangat mengapresiasi itu karena dinkominfo sebelumnya hubkominfo itu dulu waktu ada pemerinngkatan PeGi itu yang ditanya pertama kali mesti terkait kepemilikan masterplan dulu belum ada dan baru terealisasi pada tahun 2017 akhir. Lalu ada SPBE pada tahun ini. Bapak bupati memastikan secara langsung itu ya di rapat. Jika rapat khusus belum, ini kan fokusnya e-government smart regency memastikan itu. Malah yang sering menanyakan itu kalau tidak salah malah DPRD komisi 1 itu yang menangani kominfo itu yang menanyakan.

	<p>Pertanyaan seputar bagaimana pencapaian e-government. Jika bupati langsung mungkin intern langsung dengan bapak kepala dinas kominfo sendiri. Jika ada komite TIK atau pengarah TIK nanti akan lebih mengarahkan itu.</p>
<p>3. “Bagaimana bapak/ibu memberikan perlindungan terhadap anggota bapak/ibu, sehingga mereka berani untuk melakukan inovasi-inovasi guna mensukseskan e-government? “</p>	<p>Yaa dengan melakukan tugas dan kegiatan yang sesuai dengan masterplan pengembangan e-government tentunya mereka akan aman. Karena semua kegiatan itu harus direncanakan sebelumnya dan tentunya harus saling menuju ke arah tujuan pemerintah. Dengan melakukan kegiatan yang sesuai dengan masterplan mereka akan merasa aman karena itu sudah legal dan ada aturannya.</p>
<p>4. “Bagaimana bentuk support yang bapak/ibu berikan kepada anggota sehingga anggota terus termotivasi untuk menjalankan tugas dan fungsinya guna mencapai tujuan instansi?”</p>	<p>Usul dari kominfo untuk penilaian web dinas indikator dibuat oleh kominfo nanti dibuat ranking dan dipasang di web kabupaten. Hal ini kan akan dilihat bupati akan malu jika posisi dibawah dan pasti akan berlomba-lomba untuk mengupdate webnya. Namun saat ini masih usulan belum terealisasi. Yang pasti bentuk support yang nyata adalah dari honor pegawai itu, setiap kegiatan yang dilakukan para pegawai dan anggota akan mendapatkan honor kegiatan diluar gaji pokok mereka.</p>
<p>5. “Bagaimana menurut bapak/ibu kemampuan leadership dalam mengelola perbedaan untuk mencapai tujuan mempengaruhi kesuksesan penyelenggaraan e-government?”</p>	<p>Yaa memang fungsi managerial seorang pemimpin disitu. Harus bisa mengolah SDM yang ada. Entah itu SDM yang mumpuni ataupun kurang semua harus bisa dimanfaatkan sesuai tugas dan kemampuannya. Perbedaan SDM ini seharusnya juga bisa sedikit dikurangi dengan memberikan beberapa pelatihan-pelatihan dan sertifikasi kerja. Semua sumberdaya yang ada harus</p>

	dimanfaatkan agar sama-sama ikut serta dalam upaya mewujudkan tujuan pemerintahan, utamanya untuk mensukseskan penyelenggaraan e-government.
--	--

## 7. DOKUMENTASI PENELITIAN



**Gambar 1** Wawancara dengan KOMINFO Kab. Trenggalek



**Gambar 2** Wawancara dengan KOMINFO Kab. Trenggalek



**Gambar 3** Wawancara dengan KOMINFO Kab. Trenggalek



**Gambar 4** Wawancara dengan KOMINFO Kota Madiun



**Gambar 5** Wawancara dengan KOMINFO Kota Madiun





**Gambar 6** Wawancara dengan KOMINFO Kab. Bojonegoro



**Gambar 7** Wawancara dengan KOMINFO Kab. Bojonegoro.



**Gambar 8** Wawancara dengan KOMINFO Kab. Bojonegoro.



**Gambar 9** Wawancara dengan Bupati Kab. Bojonegoro.



**Gambar 10** Wawancara dengan Bupati Kab. Bojonegoro.



**Gambar 11** Dokumentasi Dengan PLT Bupati Kab. Trenggalek

## BIODATA PENULIS



Yudha Herlambang Cahya Pratama, lahir di Ponorogo pada tanggal 01 Agustus 1993. Penulis telah menempuh pendidikan formal di SDN 1 Somoroto, SMPN 1 Ponorogo, dan SMAN 2 Ponorogo. Pada tahun 2012, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 pada Program Studi Sistem Informasi di Universitas Negeri Jember. Pada tahun 2017, penulis berhasil menyelesaikan studi S1 dengan tugas akhir yang berjudul “ Sistem Optimasi Penjadwalan Penyiraman Tanaman Menggunakan Metode Pewarnaan Graf (Studi Kasus Agrotechno Park Universitas Jember) ”. Pada penelitian tesis ini, penulis mengambil konsentrasi Manajemen Sistem Informasi (MSI) dengan topik E-Leadership dalam E-Government. Kritik dan saran yang membangun dapat disampaikan melalui [yudhahimasif@gmail.com](mailto:yudhahimasif@gmail.com).